



**LAPORAN PENYELENGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kami menyadari bahwa dalam LPPD Kabupaten Belitung ini masih ada hal-hal yang belum teruraikan secara sempurna dari penyampaian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan capaian kinerja. Berkenaan dengan hal itu, kami akan terus melakukan peninjauan ulang terhadap LPPD Kabupaten Belitung ini dan melakukan upaya-upaya perbaikan agar lebih baik lagi

Akhir kata, semoga LPPD ini dapat berguna bagi kita semua untuk dijadikan acuan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Maret 2022





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

INSPEKTORAT

Jalan A.Yani Nomor 08 Tanjungpandan

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Tanjungpandan, 30 Maret 2022

INSPEKTUR KABUPATEN BELITUNG,



Ir. ARPANI

NIP. 196307051990031018

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	9
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	31
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	34
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	34
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	35
2.1.2 Angka Kemiskinan	35
2.1.3 Angka Pengangguran	36
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	36
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	37
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>).....	38
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	26
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	38
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	79
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	88
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	90
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	258
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	259
4.1 URUSAN PENDIDIKAN.....	259
4.2 URUSAN KESEHATAN.....	262
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM	268
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	272
4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ...	276
4.6 URUSAN SOSIAL	283
4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	287
BAB V PENUTUP	293
LAMPIRAN 1 PENDUDUK MENURUT SRUKTUR UMUR DAN JENIS KELAMIN	
LAMPIRAN 2 PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN	
LAMPIRAN 3 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang- Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Daerah Kabupaten Belitung didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS. Luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², dengan luas wilayah daratan sebesar 2.293,69 km² atau 229.369 Ha dan sisanya berupa lautan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan Tanjungpandan sebagai ibu kota kabupaten. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Membalong, dan yang terkecil Kecamatan Selat Nasik (kecamatan kepulauan). Luas wilayah dari lima kecamatan adalah sebagai berikut :

- Membalong : 909,550 Km²
- Tanjungpandan : 378,448 Km²
- Badau : 458,200 Km²
- Sijuk : 413,992 Km²
- Selat Nasik : 133,500 Km²

Kabupaten ini terdiri dari sekitar 163 buah pulau besar dan kecil di mana pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Selain itu, beberapa pulau-pulau besar lainnya adalah Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.



Tabel 1.1
Jumlah Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

No.	Kecamatan	Jumlah Pulau
1.	Tanjungpandan	17
2.	Membalong	35
3.	Selat Nasik	38
4.	Sijuk	55
5.	Badau	18
Jumlah		163

Sumber : Bappeda Kab. Belitung

Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2021 antara 0 mm sampai 347,4 mm dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai 25 hari setiap bulannya. Curah hujan tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada bulan Desember yang mencapai 347,4 mm. Rata-rata temperatur udara pada tahun 2021 bervariasi antara 26,1°C sampai 33,9°C, dimana kelembaban udaranya bervariasi antara 77 persen sampai 91 persen, dan tekanan udara antara 1010,1 mb sampai dengan 1012,0 mb.

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni :

- Sebelah Utara oleh DAS Buding
- Sebelah Selatan oleh DAS Pala & Kembiri, dan
- Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kwarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas total mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 Km² atau 5,82 persen dari luas Kabupaten Belitung.

Kondisi topografi Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, yang mana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai. Sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon.

c. Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah penduduk Kabupaten Belitung per Desember 2021 berjumlah 181.735 jiwa dengan 61.297 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk Kabupaten Belitung berkedudukan di Kecamatan Tanjungpandan sebanyak 103.520 jiwa (56,96%) dengan rincian per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Tanjungpandan	52.126	51.394	103.520	34.664
2.	Membalong	13.367	12.647	26.014	9.188
3.	Selat Nasik	3.071	2.903	5.974	2.011
4.	Sijuk	15.976	15.306	31.282	10.397
5.	Badau	7.719	7.226	14.945	5.037
Jumlah		92.259	89.476	181.735	61.297

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2021



Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2021 paling banyak adalah lulusan SD/ sederajat yaitu sebanyak 44.637 orang (24,56%). Sedangkan dari segi jenis pekerjaan, penduduk Kabupaten Belitung paling banyak bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sebanyak 19.519 orang. Untuk peran serta perempuan dalam pekerjaan hanya sebagian kecil saja perempuan di Kabupaten Belitung memiliki pekerjaan dan mayoritas mengurus rumah tangga sebagaimana rincian Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian terlampir dalam laporan ini.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2021

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tdk/Blm Sekolah	17.336	16.659	33.995
Blm Tamat SD/Sederajat	15.636	14.834	30.470
Tamat SD/Sederajat	21.901	22.736	44.637
SLTP/Sederajat	13.233	12.630	25.863
SLTA/Sederajat	19.254	17.069	36.323
D-I/II	403	638	1.041
Akademi/D-III/Sarjana Muda	1.435	1.670	3.105
D-IV/Strata-I	2.928	3.166	6.094
Strata-II	132	72	204
Strata-III	1	2	3
Jumlah	92.259	89.476	181.735

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2021

d. Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi Kabupaten Belitung dibagi dalam 5 (lima) kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 42 desa, yang terdiri dari :

Tabel 1.7
Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Tanjungpandan	a. Kelurahan Kota b. Kelurahan Parit c. Kelurahan Kampong Damai d. Kelurahan Paal Satu e. Kelurahan Lesung Batang f. Kelurahan Pangkallalang g. Kelurahan Tanjungpendam h. Desa Buluh Tumbang i. Desa Perawas j. Desa Dukong k. Desa Juru Seberang l. Desa Air Saga m. Desa Air Merbau n. Desa Aik Pelempang Jaya o. Desa Aik Ketekok p. Desa Aik Rayak
2	Membalong	a. Desa Membalong b. Desa Perpat c. Desa Lassar d. Desa Simpang Rusa e. Desa Kembiri f. Desa Bantan g. Desa Tanjung Rusa h. Desa Mentigi i. Desa Pulau Seliu j. Desa Pulau Sumedang k. Desa Gunung Riting l. Desa Padang Kandis
3	Selat Nasik	a. Desa Selat Nasik b. Desa Petaling c. Desa Suak Gual d. Desa Pulau Gersik
4	Sijuk	a. Desa Sijuk b. Desa Batu Itam



		c. Desa Terong d. Desa Air Seruk e. Desa Tanjung Binga f. Desa Air Selumar g. Desa Sungai Padang h. Desa Keciput i. Desa Pelepak Pute j. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	a. Desa Badau b. Desa Air Batu Buding c. Desa Sungai Samak d. Desa Kacang Butor e. Desa Cerucuk f. Desa Pegantungan g. Desa Ibul
3	Selat Nasik	e. Desa Selat Nasik f. Desa Petaling g. Desa Suak Gual h. Desa Pulau Gersik
4	Sijuk	k. Desa Sijuk l. Desa Batu Itam m. Desa Terong n. Desa Air Seruk o. Desa Tanjung Binga p. Desa Air Selumar q. Desa Sungai Padang r. Desa Keciput s. Desa Pelepak Pute t. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	h. Desa Badau i. Desa Air Batu Buding j. Desa Sungai Samak k. Desa Kacang Butor l. Desa Cerucuk m. Desa Pegantungan n. Desa Ibul

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung

e. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung

No	Perangkat Daerah	Tipe	Urusan/Fungsi
1	Sekretariat Daerah	A	unsur penunjang sekretariat
2	Sekretariat DPRD	C	unsur penunjang sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah	A	unsur penunjang pengawasan
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
5	Dinas Kesehatan	A	urusan pemerintahan bidang kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	A	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga	A	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga
8	Dinas Pariwisata	A	urusan pemerintahan bidang pariwisata
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	A	urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan



			perlindungan anak
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	A	urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	A	urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
14	Dinas Perhubungan	A	urusan pemerintahan bidang perhubungan
15	Dinas Lingkungan Hidup	A	urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A	urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan
17	Dinas Perikanan	A	urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	A	urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	A	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik
20	Satuan Polisi Pamong Praja	B	urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	fungsi penunjang bidang keuangan
24	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	A	fungsi penunjang bidang pendapatan
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	urusan kesatuan bangsa dan politik
27	Kecamatan Tanjungpandan	A	unsur penunjang kewilayahan
28	Kecamatan Membalong	A	unsur penunjang kewilayahan
29	Kecamatan Sijuk	A	unsur penunjang kewilayahan
30	Kecamatan Badau	A	unsur penunjang kewilayahan
31	Kecamatan Selat Nasik	A	unsur penunjang kewilayahan

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas dapat membentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun Dinas yang memiliki UPT adalah sebagai berikut :



Tabel 1.9
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perangkat Daerah

No	Dinas	Nama UPT	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT Satuan Pendidikan SD	114
		UPT Satuan Pendidikan SMP	21
		UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar	1
		UPT Museum	1
2	Dinas Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan	1
		UPT Puskesmas	9
		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono (BLUD)	1
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UPT Pengelolaan Air Minum	1
		UPT Sarana Prasarana, Perbekalan dan Laboratorium	1
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Perbenihan dan Perbibitan	1
5	Dinas Perikanan	UPT Perikanan Budidaya	1
	Dinas Perhubungan	UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan	1
6	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Lingkungan	1
		UPT Pengelolaan Sampah	1
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	UPT Metrologi Legal	1

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2021 sebanyak 3.245 orang yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2021

NO	SATUAN ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL (PNS)
1	Sekretariat Daerah	103
2	Sekretariat DPRD	24
3	Staf Ahli Bupati	2
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21
6	Inspektorat	43
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36
9	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	15
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18
11	Dinas Perhubungan	41
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	84
13	Dinas Perikanan	37
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	32
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	53
17	Dinas Kesehatan	62
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	33
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23
21	Dinas Pariwisata	32
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	16
24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	28
25	Dinas Lingkungan Hidup	39



NO	SATUAN ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL (PNS)
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27
27	Satuan Polisi Pamong Praja	27
28	Kecamatan Tanjungpandan	18
29	Kecamatan Badau	12
30	Kecamatan Sijuk	19
31	Kecamatan Membalong	18
32	Kecamatan Selat Nasik	9
33	Kelurahan Kota	7
34	Kelurahan Parit	5
35	Kelurahan Kampong Damai	5
36	Kelurahan Paal Satu	7
37	Kelurahan Lesung Batang	5
38	Kelurahan Pangkallalang	5
39	Kelurahan Tanjung Pendam	6
40	UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	366
41	UPT Puskesmas Selat Nasik	32
42	UPT Puskesmas Tanjung Binga	46
43	UPT Puskesmas Membalong	43
44	UPT Puskesmas Badau	41
45	UPT Puskesmas Perawas	36
46	UPT Puskesmas Sijuk	37
47	UPT Puskesmas Air Saga	51
48	UPT Puskesmas Tanjungpandan	55
49	UPT Puskesmas Simpang Rusa	32
50	UPT Sekolah-sekolah dan SKB	1.402
JUMLAH		3.245

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan tingkat penerimaan pendapatan daerah, dengan demikian pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Kemudian baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mendukung pendapatan Kabupaten Belitung, baik yang menyangkut pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah seperti pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan bagi hasil dari pemerintah lain tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Selama periode 2020-2021, target pendapatan daerah secara keseluruhan menurun dari Rp 970.146.286.359,00 pada tahun 2020 dan menjadi Rp.964.938.538.517,00 pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan sepanjang Tahun 2020 merupakan masa pandemi covid-19 yang telah melumpuhkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pendapatan tahun 2020-2021, realisasi pendapatan Tahun 2020 persentase pendapatan tidak mencapai target yang ditetapkan, persentase yang dicapai sebesar 98,65% sedangkan pada Tahun 2021 cenderung melebihi target dengan persentase sebesar 105,30% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :



Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2022

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
2020	970.146.286.359,00	957.021.589.492,11	98,65
2021	964.938.538.517,00	1.016.167.896.318,00	105,30

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2021

Pendapatan daerah Kabupaten Belitung ditopang oleh tiga komponen sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berbagai sumber pendapatan tersebut memiliki kontribusi terhadap total belanja daerah. Kontribusi tiap komponen pendapatan terhadap total belanja daerah Kabupaten Belitung dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.12
Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Per Komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020-2021

No	Komponen Pendapatan	2021			2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	149.628.679.180,00	176.706.134.753,00	118,09	145.075.360.800,00	162.134.305.440,46	111,76
2	Dana Perimbangan	749.820.889.337,00	766.716.523.438,00	102,25	634.413.715.145,00	617.730.480.634,00	97,37
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	65.488.970.000,00	72.745.238.127,00	111,08	190.657.210.414,00	177.156.803.417,65	92,92
Jumlah		964.938.538.517,00	1.016.167.896.318,00	105,30	970.146.286.359,00	957.021.589.492,11	98,65

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2021

Masing-masing komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap realisasi belanja daerah daerah. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2020 dan 2021 bersumber dari dana perimbangan dengan kontribusi pada tahun 2020 sebesar 64,54% dan Tahun 2021 sebesar 75,45%. Komponen kedua pada Tahun 2020 adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan kontribusi sebesar 18,51% sedangkan pada Tahun 2021 komponen kedua adalah pendapatan asli daerah sebesar 17,38%. Untuk Komponen ketiga pada Tahun 2020 adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,94% sedangkan pada Tahun 2021 komponen ketiga adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berkontribusi sebesar 7,15%.

Pada Tahun Anggaran 2021, alokasi belanja operasi mempunyai target anggaran sebesar Rp872.546.217.335,00 dan terealisasi Rp786.237.650.071,20 dengan persentase pencapaian target sebesar 90,11%, sedangkan pada belanja modal memiliki target Rp101.591.706.051,00 dan terealisasi Rp86.023.297.198,00 atau 84,68%. Sementara itu, target belanja tak terduga sebesar Rp3.250.000.000,00 dan terealisasi Rp824.395.000,00 atau 25,37%. Berdasarkan akumulasi komponen belanja di atas maka belanja daerah pada tahun 2021 memiliki target Rp1.086.436.605.406,00 dengan realisasi sebesar Rp981.935.654.269,20 atau 90,38%. Tahun Anggaran 2021 belanja daerah juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 baik pada target maupun realisasi anggaran, dimana realisasi anggaran belanja berkurang sebesar Rp 50.096.799.026,45. Jika mengacu kepada data yang ada terlihat bahwa persentase pencapaian target belanja daerah masih berada di bawah target, hal ini terjadi lebih diakibatkan oleh adanya upaya penghematan anggaran melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan catatan tidak akan mempengaruhi volume program dan kegiatan yang telah ditargetkan dan juga dikarenakan adanya pandemi covid-19



yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah.

Rincian target, realisasi dan persentase pencapaian target per komponen belanja daerah dijelaskan tabel berikut ini :

Tabel 1.13
Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020-2021

No	Komponen Belanja	2021			2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	872.546.217.335,00	786.237.650.071,20	90,11	894.162.103.888,69	779.419.940.510,31	87,17
2	Belanja Modal	101.591.706.051,00	86.023.297.198,00	84,68	154.155.077.801,00	139.687.352.160,12	90,61
3	Belanja Tak Terduga	3.250.000.000,00	824.395.000,00	25,37	10.200.000.000,00	4.200.711.625,00	41,18
Jumlah		1.086.436.605.406,00	981.935.654.269,20	90,38	1.167.241.630.689,69	1.032.032.453.295,45	88,42

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung 2021

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis pembangunan Kabupaten Belitung dapat dijabarkan dalam 5 (lima) pokok masalah utama yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- **Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan berkontraksi akibat pandemi COVID-19**

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -2,31 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 5,36 persen, namun pada tahun 2020 LPE Kabupaten Belitung mengalami penurunan yang sangat besar bahkan sampe terkoreksi minus. Terkoreksinya ekonomi Kabupaten Belitung pada tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang AS-China yang menahan kinerja ekspor dan industri pengolahan akibat perlambatan ekonomi dan volume perdagangan dunia. Pada Tahun 2020 LPE Kabupaten Belitung menempati peringkat ke-4 dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan pada tahun 2019 (peringkat ke-2) dan Tahun 2018 (peringkat ke-1). Selain menurunnya peringkat LPE Belitung, masih ada 4 (tiga) kabupaten/kota dengan LPE yang lebih rendah dari LPE Belitung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: (1) Kabupaten Bangka Tengah, (2) Kota Pangkalpinang, dan (3) Kabupaten Bangka Barat. Terkoreksinya ekonomi tidak hanya dialami oleh Kabupaten belitung saja akan tetapi hampir semua Kabupaten/Kota di Indonesia laju pertumbuhannya terkoreksi, hal ini disebabkan akibat adanya pandemi Covid-19 yang mulai melanda dunia pada awal Tahun 2020. Pada 2 Maret 2020 virus ini mulai ditemukan di Indonesia dan sampai saat ini masih terus menyebar. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh provinsi dan menyerang tidak saja aspek kesehatan namun juga berdampak ke aspek sosial, ekonomi, keuangan dan yang lainnya. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan rakyat, perlu adanya kebijakan yang terpadu. Kinerja perekonomian Belitung selama periode Tahun 2019-2020 dapat dilihat dari



pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Belitung Tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 168,75 persen, sedangkan jika dibandingkan per triwulan, capaian Triwulan III-2020 tumbuh 3,37 persen dibanding capaian Triwulan II-2020. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2020 ini menyebabkan penurunan aktivitas produksi pada sebagian besar lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19. Secara umum dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian, baik pada lapangan usaha maupun pengeluaran. Perekonomian Belitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2020 mencapai Rp 9.838,60 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 6.352,00 milyar. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 terhadap Tahun 2019 berdasarkan harga berlaku mengalami penurunan Rp 18,20 milyar. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2020 sebesar Rp 2.737.936 juta. Kontribusi terbesar kedua disumbang oleh sektor konstruksi sebesar Rp 1.272.593 juta pada tahun 2020, diikuti sektor industri pengolahan sebesar Rp 1.171.822 juta pada tahun 2020.

- **Pengendalian Inflasi Belum Optimal**

Inflasi di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2016 berada pada angka 4,92 dan terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 2,72 kemudian kembali meningkat pada angka 3,19 di tahun 2019 dan 2,11 di tahun 2020. Walau inflasi dapat dikendalikan sampai 2,11, namun bila dibandingkan dengan inflasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,08 persen, maka berada posisi lebih tinggi. Inflasi nasional di titik 1,68 persen merupakan inflasi terendah selama 10 tahun terakhir. Komponen penyebab inflasi Belitung tak bisa dilepaskan dari komponen bahan makanan, pendidikan, rekreasi dan olahraga serta umum.

- **Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal dan Cenderung Meningkat**

Pada periode Tahun 2016 sampai 2020, Kabupaten Belitung berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 7,85 persen menjadi 6,27 persen. Upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Belitung belum cukup optimal bila dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Keadaan diperburuk oleh terjadinya pandemi COVID-19 pada Triwulan I-2020. Dalam beberapa bulan sejak pertama kali terjadi pandemi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung cenderung meningkat yang menyebabkan persentase penduduk miskin juga meningkat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung tahun 2020 mencapai 12.070 juta jiwa (6,27 persen). Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 190 jiwa dibandingkan keadaan tahun 2019. Dibandingkan dengan kabupaten lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecuali Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- **Penanganan Pengangguran Belum Optimal dan Cenderung Meningkat**

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung menunjukkan mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2017 TPT Kabupaten Belitung sebesar 2,57% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 2,93%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2,89% sebelum naik drastis pada tahun 2020 menjadi 4,82%. Kondisi ini berubah pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Kabupaten Belitung merupakan Kabupaten dengan pengangguran terkecil ketiga diantara 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



bahkan lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,25%. Tekanan yang berat amat dirasakan di semua sektor usaha, baik yang berskala besar dan formal maupun di sektor informal yang berimbas pada pengurangan penghasilan dan bahkan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga kerja informal.

2. Permasalahan Kualitas Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah dengan kualitas yang baik agar dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan pembangunan daerah disektor-sektor lainnya dan hal tersebut secara positif akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia tersusun dari beberapa variabel yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebesar 72,51 melebihi capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 71,47 dan IPM Nasional sebesar 71,94, namun jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung capaian IPM Kabupaten Belitung tahun 2020 berada dibawah capaian IPM Kota Pangkalpinang sebesar 78,22.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Dimensi Kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang bermakna bahwa Harapan Lama Sekolah adalah Lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang (dalam tahun), sedangkan Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dimensi Ekonomi diukur dengan standar hidup layak yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 jika dilihat dari tiga dimensi dasar yaitu (1) Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 71,05; (2) Harapan Lama Sekolah sebesar 11,85 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,46 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp. 13.554.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) per tahun.

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh 1) Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat, 2) Rendahnya Derajat Kesehatan, dan 3) Rendahnya Pendapatan Masyarakat. Kualitas sumber daya manusia Dari ketiga dimensi tersebut kualitas manusia saling berpengaruh saling berkaitan erat Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi penentu kualitas sumber daya manusia, tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi kualitas SDM adalah masih rendahnya derajat kesehatan, peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya, sedangkan rendahnya pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Belitung walaupun tidak secara signifikan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia :



1) Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat

Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, belum terpenuhinya pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan Kesehatan, masih kurangnya kualitas layanan rumah sakit, belum optimalnya kualitas tenaga medis dan non medis.

2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang PHBS dapat membentuk keyakinan seseorang untuk tidak menerapkan berperilaku PHBS sesuai dengan keyakinan yang dipahaminya. Pendidikan formal yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi kemampuan untuk mencerna informasi-informasi yang diterima sekaligus mempertimbangkan apakah informasi tersebut bisa dijadikan dasar bagi perilaku mereka selanjutnya. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Belitung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ditandai dengan tidak tercapainya salah satu indikator dari 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga adalah menggunakan jamban yang sehat. Dari 49 desa/kelurahan di Kabupaten Belitung baru terdapat 11 desa/kelurahan yang mendeklarasikan sebagai Desa ODF (*Open Defecation Free*) dan belum ada satupun desa/kelurahan yang mendeklarasikan sebagai Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Pada tahun 2017 penyakit berbasis lingkungan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Belitung. ISPA dan Diare adalah penyakit berbasis lingkungan yang selalu berada di urutan teratas 10 penyakit yang paling umum di semua pusat pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Belitung. Selain itu, kejadian demam berdarah terus meningkat pada tahun 2017 terjadi 22,5 kasus DBD per 100.000 penduduk. Berbagai penyakit menular yang terjadi pada masyarakat ini dapat dicegah dengan pelaksanaan berbagai indikator yang terdapat dalam Program PHBS pada tatanan rumah tangga. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi serta rendahnya praktik hidup bersih dan sehat telah berkontribusi terhadap masih tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Belitung. Perilaku hidup bersih dan sehat juga berpengaruh terhadap kejadian penyakit tidak menular. Pada tahun 2017 penyakit hipertensi dan diabetes melitus berada di urutan 10 penyakit terbanyak berdasarkan kunjungan di Puskesmas Kabupaten Belitung. Penyakit tidak menular disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan indikator PHBS pada tatanan rumah tangga, yaitu makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Upaya PHBS jika tidak dilakukan oleh masing-masing keluarga dan anggota keluarganya akan menjadi faktor risiko untuk timbulnya penyakit, baik infeksi atau penyakit tidak menular.

3) Kurangnya akses pendidikan

Akses pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Belitung. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung.



4) Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja

Belum seimbangnya antara ketersediaan lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja disebabkan oleh tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja serta masih rendahnya kemampuan atau keterampilan tenaga kerja.

5) Beban pengeluaran masyarakat miskin tinggi

Kemiskinan terjadi tidak hanya kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh belum terpenuhinya hak-hak yang diperlukan bagi seseorang atau kelompok. Tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah proporsi penerima jaminan kesehatan yang belum merata dan sesuai peruntukan yang berpengaruh terhadap sulitnya masyarakat miskin mengakses pelayanan kesehatan yang layak, belum optimalnya pelayanan dan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), upaya perlindungan sosial yang belum tepat sasaran, serta kuantitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum optimal.

6) Pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan masih kurang

Kurangnya Peran pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan dipengaruhi oleh peranan kelembagaan di desa yang belum optimal, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender yang belum optimal, serta masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

3. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas.

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintahan :

1) Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal

Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset dikarenakan pengamanan aset, terutama aset tanah bawah jalan yang belum memiliki sertifikat, serta aset yang tidak diketahui keberadaannya. Pengelolaan dan penataan aset oleh perangkat daerah yang belum optimal, dan belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

2) Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah

Belum selarasnya perencanaan pembangunan dikarenakan sistem perencanaan berbasis elektornik yang belum diterapkan, dan belum terintegrasinya perencanaan dengan penganggaran.

3) Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal, belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.



4) Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah

Rendahnya kualitas dan profesional aparatur disebabkan karena integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur, dan sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

5) Belum optimalnya Pelayanan publik

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Belitung disebabkan oleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal, keterbukaan informasi publik yang masih kurang, pelayanan publik yang masih kurang, pelayanan administrasi pertanahan yang masih kurang, terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk pelayanan kepada masyarakat belum optimal, ketersediaan data dan informasi pembangunan yang masih kurang.

4. Permasalahan daya saing potensi ekonomi

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami perkembangan yang cenderung melambat. Melambatnya perkembangan perekonomian disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi secara global, lemahnya tingkat konsumsi masyarakat akibat dampak dari inflasi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, perikanan dan kehutanan. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi namun beberapa kategori mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada kategori industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan kategori jasa lainnya. Peningkatan aktifitas pertanian, kehutanan dan perikanan, diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya.

Angka inflasi bulanan di Kabupaten Belitung yang tergolong inflasi ringan atau dibawah 10% pertahun, walaupun belum mengganggu perekonomian daerah namun dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap. Pengendalian terhadap inflasi menjadi penting karena ada keterkaitan yang erat antara kenaikan harga dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak serta merta disertai dengan meningkatnya pendapatan bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka membatasi pengeluaran dan mengatur ulang perencanaan keuangan. Selain itu potensi peningkatan jumlah penduduk miskin juga kian besar dikarenakan kemampuan membeli barang kebutuhan hidup yang terus menurun.

Peningkatan daya saing produk unggulan daerah berbasis potensi daerah seperti perikanan, pariwisata dan pertanian menjadi perhatian utama dalam meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Belitung. Pengembangan produk-produk usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat dari masing-masing sektor unggulan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global.

Masalah Pokok pembangunan perekonomian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

1) Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan

Belum optimalnya produksi pertanian disebabkan oleh belum optimalnya penerapan teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, masih rendahnya kompetensi petani dan



kelembagaan petani, belum terkelolanya air irigasi dengan baik, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dan belum optimalnya pengelolaan pasca panen produk pertanian dan perkebunan. Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya dipengaruhi oleh belum optimalnya produksi perikanan tangkap, masih tingginya tangkapan ikan diluar batas biologis yang aman, belum optimalnya produksi perikanan budidaya, belum optimalnya produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik.

2) Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro

Belum Optimalnya pengembangan koperasi dan mikro disebabkan oleh Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi yang masih rendah, masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro, belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dalam mengembangkan IKM sebagai pendukung kepariwisataan, dan belum optimalnya pembinaan dan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan IKM.

3) Kurangnya daya saing pariwisata

Kurangnya daya saing pariwisata Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh belum optimalnya amenities, atraksi, promosi pariwisata, belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, SDM pariwisata yang masih kurang berkualitas, belum optimalnya pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata, serta belum optimalnya pengembangan Desa wisata.

4) Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan

Tata kelola penanaman modal dan perizinan yang belum optimal disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, belum optimalnya perencanaan penanaman modal, belum optimalnya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan, belum optimalnya pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal, belum optimalnya perencanaan kawasan industri.

5. Permasalahan Lingkungan

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tidak lepas dari penggunaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Dampak negatif dari pembangunan adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran air, tanah dan udara. Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung adalah terjadinya pencemaran terhadap air dan kerusakan lingkungan hidup, rendahnya area pelayanan penanganan sampah, rendahnya pengelolaan sampah 3R, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, belum optimalnya rencana pengelolaan sampah.

Berkaitan dengan 4 (empat) permasalahan utama sebagaimana telah dijabarkan di atas, pembangunan infrastruktur juga memegang peranan penting untuk peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, drainase, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dalam sistem lingkungan.

Pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi pendorong bagi pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong



berkembangnya sektor-sektor terkait dan memberikan *multiplier effect*, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Selain itu, penambahan penduduk serta adanya urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Belitung.

Dengan Pembangunan infrastruktur akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran.

Dukungan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1) Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah

Aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Belitung masih kurang, hal ini dipengaruhi oleh rencana tata ruang belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pembangunan konektivitas infrastruktur kewilayahan.

2) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku

Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan air baku, dipengaruhi oleh legalitas dan pengelolaan sumber air baku yang belum optimal.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD dirumuskan dalam bentuk visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan demikian RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Belitung secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, serta program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung, RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional.

Untuk periode 2018 – 2023, RPJMD Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Mengacu pada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka



dirumuskan visi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, yaitu : adalah **MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023**.

Adapun makna yang terkandung di dalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. **Ekonomi Berkeadilan** bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;
- b. **Berdaya saing** bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;
- c. **Inovatif** mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kabupaten Belitung dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa daerah kepada suatu fokus. Pemerintah Kabupaten Belitung, telah menetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

- a. **Misi Kesatu** : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.

Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

- b. **Misi Kedua** : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.

Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.



- c. **Misi Ketiga** : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan, lingkungan dan berkelanjutan.

Misi Ketiga : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Di samping itu perlu pula percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global.

Sementara itu, misi ketiga dalam rencana pembangunan jangka menengah sudah mencakup misi satu dan misi tiga dalam RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, yaitu meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang sudah jelas mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023 menetapkan sebanyak 18 (delapan belas) sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 1.14
Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran Kabupaten Belitung

VISI: MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia
			2. Angka Kemiskinan
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Angka Harapan Hidup
		3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4. Rata-rata Lama Sekolah



		4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	5. Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)
		5. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	6. Status Desa "Maju"
MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
2. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	2. Indeks Reformasi Birokrasi	6. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7. Indeks Reformasi Birokrasi
		7. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	8. Opini BPK
			9. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung
		8. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	10. Indeks Profesional ASN
		9. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11. Survei Kepuasan Masyarakat
MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12. Laju Pertumbuhan Ekonomi
		11. Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)
		12. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)
		13. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)



			16. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)
		14. Meningkatnya investasi	17. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)
		15. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	16. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas lingkungan hidup
		17. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20. Indeks kualitas air
			21. Indeks kualitas udara
			22. Indeks Kualitas tutupan lahan
		18. Meningkatnya pengelolaan sampah	23. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

VISI: MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
2. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	2. Indeks Pembangunan Manusia	2. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	3. Indeks Pembangunan Manusia
			4. Angka Kemiskinan
		4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup
		5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	6. Rata-rata Lama Sekolah
		6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	7. Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)
		19. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	20. Status Desa "Maju"



MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
3. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	3. Indeks Reformasi Birokrasi	10. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	21. Indeks Reformasi Birokrasi
		11. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	22. Opini BPK
			23. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung
		12. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	24. Indeks Profesional ASN
		13. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	25. Survei Kepuasan Masyarakat
MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	16. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	26. Laju Pertumbuhan Ekonomi
		17. Meningkatnya pengembangan pariwisata	27. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)
		18. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	28. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)
		19. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	29. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)
			30. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)
		20. Meningkatnya investasi	31. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)
		21. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	32. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan



5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	19. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	24. Indeks Kualitas lingkungan hidup
		20. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	25. Indeks kualitas air
			26. Indeks kualitas udara
			27. Indeks Kualitas tutupan lahan
		21. Meningkatnya pengelolaan sampah	28. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

4. Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Belitung yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah ini selain merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati juga telah disempurnakan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Belitung. Prioritas Pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, meliputi :

1) Akses pendidikan untuk semua

Prioritas pembangunan pendidikan difokuskan kepada pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan sehingga mampu memenuhi atau mencapai standar pendidikan (SNP) yang meliputi komponen standarisasi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Memberikan layanan pendidikan dalam upaya mengembangkan potensi, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional.

2) Pelayanan kesehatan terintegrasi

Prioritas pembangunan kesehatan terintegrasi difokuskan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh Segecap anggota masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan sarana kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan promosi kesehatan dan memperkuat jaringan kemitraan dengan pihak ketiga lintas sektoral, dan meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat. Peningkatan Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, meningkatkan sumberdaya kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga non medis, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Perwujudan dari pelayanan kesehatan terintegrasi ini dalam bentuk inovasi yaitu SEHATI (sistem Kesehatan Terintegrasi) serta Pelanduk (Pelayanan Medik untuk Kampung) Dengan adanya program SEHATI ini sistem pelayanan sudah terintegrasi dengan instansi terkait dan dalam pelaksanaannya program ini memberikan pendampingan kepada pasien rujukan keluar daerah lengkap dengan berbagai fasilitas, seperti mobil penjemputan di Bandara Soekarno Hatta sampai



pemberian uang saku. Program Pelanduk ini mengadopsi kebutuhan masyarakat yang bertujuan meningkatkannya pelayanan kesehatan secara prima gratis 24 jam dan terintegrasi dengan Call Center 119 dan kartu SEHATI.

3) Infrastruktur dan konektivitas daerah

Prioritas pembangunan Infrastruktur dan konektivitas difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Belitung, meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana transportasi guna menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang handal di Kabupaten Belitung, Peningkatan management pemeliharaan Jaringan jalan, Inventarisasi, evaluasi dan perencanaan sistim iaringan transportasi, peningkatan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perikanan, industri dan kawasan pariwisata. Peningkatan infrastuktur Pertanian berupa jaringan irigasi sistem jaringan irigasi dalam upaya menunjang ketahanan pangan daerah.

Peningkatan penataan ruang dengan menjadikan tata ruang menjadi salah satu pedoman pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Membentuk kelambagaan penataan ruang. Keselarasan perencanaan tataruang Provinsi dan tata ruang kabupaten dan pemanfaatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Raperda **RZWP3K**) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4) Inovasi pelayanan publik dan birokrasi

Prioritas Pembangunan inovasi pelayanan publik dan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan penyelenggaraan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Mengefektifkan sistem pengawasan dan audit dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Menata dan menyempurnakan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan agar lebih proporsional, efisien dan efektif.

Mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, pengembangan sistem dan prosedur pelayanan publik serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu bentuk dari inovasi pelayanan publik dan birokrasi adalah inovasi Besadu (Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan). Layanan BESADU ini merupakan media pengaduan yang menjadi wadah untuk menampung berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai pelayanan publik yang prima dan efektif melalui aplikasi berbasis teknologi.

5) Pengembangan ekonomi lokal

Prioritas pengembangan KUMKM dan Koperasi bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing KUMKM dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap kewirausahaan para pengusaha/calon pengusaha, peningkatan produktifitas, peningkatan ragam produk-produksi unggulan dan meningkatnya unit koperasi yang mandiri dan maju. Memberikan kemudahan bagi KUMKM yang beorientasi Export; mendorong KUMKM menciptakan produk substitusi impor, memberikan dukungan dalam upaya peningkatan kualitas KUMKM memberikan fasilitas akses permodalan dan teknologi bagi KUMKM dan - Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia KUMKM.



Meningkatkan kualitas dan keberagaman investasi di berbagai sektor dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi daerah dan menjadikan investasi sebagai pemicu perkembangan sektor hulu dan sektor hilir, serta penyerapan tenaga kerja lokal. Peningkatan kualitas investasi dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

6) Pengembangan sektor perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Prioritas pengembangan sektor perikanan adalah Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, melakukan pemulihan dan perlindungan potensi sumberdaya kelautan dan paikanan beserta ekosistemnya.

Peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan meningkatnya Pelayanan Informasi Perikanan dan Kelautan kepada masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Meningkatkan keterkaitan sektor perikanan kelautan dengan lapangan usaha di sektor lain. Pengembangan usaha ekonomi perikanan produktif, Pengembangan riset dan teknologi perikanan dan kelautan; Pengembangan mutu dan nilai tambah hasil perikanan, mengembangkan dan menerapkan teknologi serta sistem informasi perikanan dan kelautan.

7) Pengembangan budaya dan kearifan lokal

Prioritas pembangunan pengembangan budaya dan kearifan lokal difokuskan kepada meningkatkan apresiasi masyarakat, termasuk aparat pemerintah terhadap aset budaya serta meningkatkan sistem pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya, agar aset budaya, sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dapat berfungsi optimal. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, dan berkembangnya industri budaya dengan melakukan Penguatan Lembaga Adat dalam meningkatkan pengetahuan dan kearifan lokal. Melakukan Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisional, pengembangan peran serta masyarakat dalam operasionalisasi dan pemeliharaan aset budaya - Peningkatan sumber daya manusia pengelola aset budaya, meningkatkan promosi Budaya, melestarikan Cagar Budaya sebagai asset bernilai tinggi dan objek pariwisata yang potensial.

8) Pengembangan Pariwisata

Prioritas pembangunan Pariwisata difokuskan pada pengembangan 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas), pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan potensi desa menjadi potensi wisata (PROGRAM TUSENA), pengembangan Geopark Belitung untuk mendukung perkembangan KSPN dan KEK Tanjungkelayang, pengembangan lokasi utama perhutanan sosial. Sektor pariwisata ini merupakan unggulan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengembangan wilayah sebagai transformasi dari sektor pertambangan.

9) Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19

Prioritas pembangunan daerah akan mendorong kepada proses inovasi dan transpormasi membangun Kabupaten Belitung, seperti yang diharapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam kampanye pemilihan Bupati Belitung.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Pembangunan Provinsi. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan prioritas



nasional (PN) dan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka terlihat seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belitung, sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dalam pembangunan yang akan dibagi kedalam beberapa cluster, diantaranya adalah :

a. Cluster I

Cluster I ini masuk dalam misi ke-2 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Pariwisata merupakan core bisnis dari kabupaten belitung yang memberikan stimulus bagi seluruh sektor pembangunan. Pariwisata memberikan efek domino dan timbal balik terhadap sektor- sektor lainnya. Sejak terjadinya transisi pembangunan kabupaten belitung dari pertambangan ke pariwisata , sektor ini menjadi sektor yang paling diharapkan untuk mendorong seluruh sektor pembanguan daerah.

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Belitung, Pariwisata merupakan sektor unggulan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pariwisata akan mendorong produksi sektor pertanian dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan lokal daerah, di mana mengurangi ketergantungan pasokan produksi pertanian dari luar daerah khususnya pangan yang dapat diproduksi lokal. Potensi pertanian agrikultur dan pertanian lainnya juga menjadi atraksi wisata yang dapat dikembangkan berupa agriwisata.

Begitu juga dengan perikanan, menjadi sektor yang akan turut bertumbuh dengan berkembangnya kuliner dan kebutuhan bahan baku untuk pengrajin makan ringan yang terus bertambah akibat makin banyaknya pelancong pariwisata. Sektor ini pun menjadi suatu atraksi wisata yang juga sangat menarik untuk dikembangkan.

Sejalan dengan itu pengembangan usaha mikro menjadi lebih terpacu dengan adanya peningkatan kunjungan wisata, tumbuhnya usaha-usaha mikro di daerah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa baik bagi penduduk lokal maupun bagi wisatawan. Peningkatan kreativitas masyarakat untuk turut membangun pariwisata melalui usaha mikro dan selanjutnya akan memacu pertumbuhan koperasi-koperasi di daerah. Pembangunan pariwisata menjadi titik pokok pelaksanaan investasi daerah, dengan ditetapkannya KSPN dan KEK, merupakan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menginvestasikan modalnya di Kabupaten Belitung baik sekali kecil maupun skala besar, baik di sektor jasa pariwisata maupun di sektor sektor lainnya selain pariwisata.

Pembangunan Infratraktur yang baik dan memenuhi standar menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas pariwisata dan meningkatkan sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa jalan dan jembatan saja tetapi semua infrasturtur ekonomi masyarakat, yang meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan berusaha. Pembangunan infrastruktur diarahkan sinergi dengan pembangunan pariwisata dengan membuat bangunan iconik pariwisata yang menjadi atraksi bagi pariwisata.

Pengembangan pariwisata berupa peningkatan aktraksi dan dan amenitas pariwisata di seluruh sektor, saling berkaitan dan saling mendukung kenyamanan wisatwan dalam melakukan aktivitasnya, pembangunan sumber daya manuais pariwisata , masyarakat sadar wisata, dan komunitas-komunitas masyarakat berbasis pariwisata di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung. Pembangunan objek wisata baik yang dikembangkan oleh masyarakat atau pun pihak-pihak pengembang pariwisata terus dibina dan diarahkan untuk memenuhi kepada pelayanan yang baik dan memenuhi standar pelayanan pariwisata.



b. Cluster II

Cluster I ini masuk dalam misi ke-1 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Pembangunan pariwisata tidak hanya pada pengembangan pada cluster pertama atau cluster ekonomi, tetapi harus didukung juga dengan cluster kedua yaitu sebagai berikut : Sektor kesehatan, merupakan sektor penunjang tidak langsung dari pembangunan pariwisata karena daerah tujuan yang sehat tentunya akan membuat wisatawan menjadi lebih tertarik, apalagi perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat semakin meningkat menjadi faktor pendukung pariwisata apalagi di masa pandemi saat ini.

Kesehatan mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor pariwisata, karena infrastruktur kesehatan menjadi faktor utama ketertarikan wisatawan khususnya mancanegara untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan dalam berwisata. Pendidikan menjadi sektor yang sangat menentukan dalam membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki moral dan perilaku yang baik, pendidikan karakter bangsa, sebagai identitas bangsa, dan identitas daerah menjadi faktor pendukung pembangunan pariwisata. Manusia yang cerdas dan kreatif dibentuk dari pendidikan yang baik.

Peningkatan daya beli masyarakat, dengan pembangunan pariwisata akan meningkatkan daya beli masyarakat, karena semakin banyaknya peluang kerja dan peluang berusaha di masyarakat. Pembangunan Pariwisata akan mengurangi pengangguran.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangun pariwisata meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan, partisipasi masyarakat baik di desa untuk menjadikan desa – desa yang maju dan mandiri.

c. Cluster III

Cluster III ini masuk dalam misi ke-2 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Birokrasi yang bersih inovatif dan profesional, akuntabel dan transparan. Menjadi pendorong bagi pengembangan cluster I dan cluster II, pemerintah yang baik, menjadi pemicu dari cluster I dan cluster II.

Aparatur negara menjadi birokrasi yang bersih dan transparan serta akuntabel dalam melaksanakan pembangunan daerah akan mendorong seluruh sektor dengan komitmen yang baik untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pembangun daerah.

Aparatur daerah yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan selalu berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan pembangun daerah untuk mencaai visi dan misi daerah. Aparatur yang selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh *stake holder* masyarakat.

Pada suatu saat *cluster* ketiga ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ring pembangunan pariwisata, di mana aparatur Kabupaten Belitung dengan inovasi-inovasinya akan menjadi daya tarik bagi daerah lain untuk selalu mencari tahu dan datang ke Belitung untuk melakukan study tentang pelayanan publik yang baik. RPJMD Kabupaten Belitung 2018 – 2023 merupakan Dokumen Strategis Kabupaten Belitung yang juga memuat janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Belitung terpilih. Janji-janji tersebut terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi, dan menjadi tugas bagi perangkat daerah untuk mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

c. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Oleh karenanya setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja



utama dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama juga merupakan salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk maksud tersebut diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.16
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	
MISI 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia Angka Kemiskinan	%
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Status Desa "Maju"	Desa
MISI 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
6	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat
7	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	Predikat
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Predikat
8	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai
9	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
MISI 3 : : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%
11	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang



12	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	%
13	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi (ribu rupiah)	Ribu Rupiah
		Nilai Omset Usaha Mikro (ribu rupiah)	Ribu Rupiah
14	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi (juta rupiah)	Juta Rupiah
15	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan	%
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin
17	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Poin
		Indeks Kualitas Udara	Poin
		Indeks Kualitas Lahan	Poin
18	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%

d. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan. Perjanjian Kinerja ini merupakan wahana proses yang akan memberikan skala prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan instansi terarah.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan Januari 2021 mengalami perubahan pada bulan Desember 2021 seiring terjadinya perubahan RPJMD, RKPD dan APBD 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator



Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.17
Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2021

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	72,88
		2	Angka Kemiskinan	5,97
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka harapan hidup	71,22 Tahun
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4	Rata-rata lama sekolah	8,46 Tahun
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	5	Pengeluaran per kapita (dalam ribu rupiah)	13.671 Rupiah
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	6	Status desa “Maju”	25 Desa
6	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	7	Indeks Reformasi Birokrasi	B
7	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	8	Opini BPK	WTP
		9	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	BB
8	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional	10	Indeks Profesionalitas ASN	75
9	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12	Laju pertumbuhan ekonomi	3,2-3,6%
11	Meningkatnya pengembangan pariwisata	13	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	150.000 orang
12	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB	27,83%
13	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15	Nilai omset koperasi (ribu rupiah)	80.651.293 (Ribu Rupiah)
		16	Nilai omset usaha mikro (ribu rupiah)	1.479.811.375 (Ribu Rupiah)
14	Meningkatnya investasi	17	Nilai investasi (juta rupiah)	2.519.187 (Juta Rupiah)
15	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	54,35 %
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks kualitas lingkungan hidup	67,8 6
17	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20	Indeks Kualitas Air	53,2 6
		21	Indeks Kualitas Udara	93,6
		22	Indeks Kualitas	46,4
18	Meningkatnya pengelolaan sampah	23	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	15,50%



e. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2021 diarahkan dan difokuskan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 1.086.436.605.406,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 872.546.217.355,00 Belanja Modal sebesar Rp. 101.591.706.051,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 3.250.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 109.048.682.000,00. Alokasi anggaran yang ada untuk membiayai program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 1.18
Rencana Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN
Belanja Operasi	Rp. 872.546.217.355,00
Belanja Modal	Rp. 101.591.706.051,00
Belanja Tak Terduga	Rp. 3.250.000.000,00
Belanja Transfer	Rp. 109.048.682.000,00
TOTAL BELANJA	Rp. 1.086.436.605.406,00

Tabel 1.19
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021

INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN
Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	NA
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rp. 165.001.1067.140
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rp 75.600.008.825
Meningkatnya daya beli masyarakat	Rp 3.588.976.145
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Rp 6.544.465.701
Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	NA
Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Rp 134.317.109.304
Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional	Rp 2.954.098.195
Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Rp 18.046.726.982
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	NA
Meningkatnya pengembangan pariwisata	Rp 11.051.103.079
Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Rp 9.179.444.060
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Rp 1.198.356.520
Meningkatnya investasi	Rp 748.187.135



Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Rp 112.895.542.474
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	NA
Meningkatnya kualitas lingkungan air udara dan tutupan lahan	Rp 1.649.692.799
Meningkatnya pengelolaan sampah	Rp 6.907.902.930

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam rangka menyediakan pelayanan yang merupakan urusan wajib, Pemerintah Daerah harus mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM ini menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Bila dikaji secara mendalam ada pergeseran makna SPM pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Secara tekstual, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dengan kata lain SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria.

Dalam penerapannya, SPM harus berdasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut; (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perubahan Paradigma penting lain berkaitan dengan SPM adalah dalam konteks belanja daerah. Dalam belanja daerah harus ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, sebagai jaminan pemenuhan hak konstitusional masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan bukanlah kinerja Pemerintah Daerah tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kebutuhan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah mencakup 6 (enam) bidang urusan wajib yaitu bidang urusan



pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum; urusan perumahan rakyat; urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

c. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 merupakan arahan umum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan umum berisikan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja yang merupakan pedoman berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mengarahkan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran bertahap selama lima tahun.

Kebijakan Umum Pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diprioritaskan dalam target-target pembangunan Kabupaten Belitung, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung, serta pada pencapaian visi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yaitu **MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023.**

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran. Arah kebijakan merupakan bentuk konkret pelaksanaan



perencanaan pembangunan yang memberi arahan kepada pemerintah daerah supaya lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan disusun berdasarkan tema pembangunan setiap tahun untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan. Dengan demikian penuangan RPJMD ke dalam RKPD lebih jelas dengan penekanan pada tema setiap tahunnya.

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. Di Kabupaten Belitung, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang terus meningkat pada Tahun 2019. Namun, pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, masalah krisis kesehatan juga menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi. Anggaran bantuan sosial juga semakin marak diberikan oleh pemerintah untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Seperti telah diketahui bahwa selama pembatasan kegiatan masyarakat ini, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, berkelompok dan dibatasi kegiatannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ekonomi yang terbatas tentunya menyebabkan terjadinya penurunan penghasilan atau pendapatan. Oleh karena itu, bantuan sosial perlu diberikan untuk masyarakat yang terdampak. Tidak hanya bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak, pemberian bantuan juga dilakukan untuk para pelaku usaha agar dapat terus melanjutkan kegiatan usahanya dan bertahan di tengah pandemi.

Adapun gambaran indikator makro di Kabupaten Belitung pada Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Belitung Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	72,57	0,083
2	Angka Kemiskinan (%)	6,27	7,15	14,035
3	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT) (%)	4,82	3,51	-27,178
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Konstan /ADHK) (%)	-2,31	5,64	344,156
5	Pendapatan Per kapita (PDRB Per Kapita Per Tahun) (Rupiah)	50.847.912	59.802.778	17,611
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,262	0,256	-2,29

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021



2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*),
Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH),
- b. Pengetahuan (*knowledge*), dan
Pengetahuan dapat diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*).
Standar hidup layak dapat digambarkan oleh pengeluaran per kapita.

Nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Belitung terus mengalami kemajuan selama kurun 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung

NO	I P M	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KET
1	IPM KABUPATEN BELITUNG	72,51	72,57	0,083%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2021

IPM Kabupaten Belitug meningkat dari 72,51 pada tahun 2020 menjadi 72,57 pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,083% per tahun. Level IPM Kabupaten Belitung masih pada posisi **tinggi**, yang artinya nilai IPM tersebut menggambarkan bahwa harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga telah malampaui nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 71,94 menjadi 72,29 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,35 poin.

Pada tahun 2021, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 71,05, naik 0,01 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 11,86 tahun naik sebesar 0,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,47 tahun, naik 0,01 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 13.554.000,- (Tiga belas juta Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) per tahun, meningkat menjadi Rp 13.563.000,- (Tiga belas juta Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per tahun.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini akan dihasilkan Garis Kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan



kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sementara interpretasi tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan sebesar 0,88% dengan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Belitung Tahun 2021 yaitu 7,15%. Pandemi COVID 19 menjadi salah satu penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Belitung seiring dengan tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Belitung pada tahun 2021 yaitu sebesar 830.484. Namun demikian, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung masih di bawah tingkat kemiskinan nasional per September 2021 sebesar 9,71%.

Tabel 2.3
Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Belitung

NO	PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	6,27	7,15	14,035%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2021

2.1.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 tercatat sebesar 4,82 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja yang ada di Kabupaten Belitung, 4 hingga 5 orang diantaranya merupakan pengangguran. Pada tahun 2021 Tingka Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,51 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja yang ada di Kabupaten Belitung, 3 hingga 4 orang diantaranya merupakan pengangguran.

Tabel 2.4
Persentase Angka Pengangguran Kabupaten Belitung

NO	PERSENTASE ANGKA PENGANGGURAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	4,82	3,51	-27,18%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2021

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi meningkatnya pendapatan masyarakat yang dipicu oleh peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting karena menjadi salah satu indikasi keberhasilan pembangunan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi dan peranan lapangan usaha meskipun masih di masa pandemic covid 19 menunjukkan kenaikan pada Tahun 2021 jika dibandingkan Tahun 2020 yang sempat menurun drastis dikarenakan masa awal pandemi covid-19.



Tabel 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung

NO	PDRB ADHK (%)	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	-2,31	5,64	344,156%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2021

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor dominan dalam perekonomian di Kabupaten Belitung. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi terjadi pada semua sektor apabila dibandingkan Tahun 2020. Pertumbuhan terbesar adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan kenaikan 13,29 % sedangkan yang terkecil pertumbuhannya sektor Jasa Pendidikan dengan persentase kenaikan sebesar 2,48%. Adapun rincian PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (Persen)

Kategori	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.781.356	1.856.190
B	Pertambangan dan Penggalian	485.051	509.252
C	Industri Pengolahan	734.688	770.064
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.725	10.549
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	2.054	2.163
F	Konstruksi	796.636	839.467
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	661.004	701.337
H	Transportasi dan Pergudangan	316.255	342.021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum	206.449	229.162
J	Informasi dan Komunikasi	285.434	308.772
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	142.334	155.016
L	Real Estate	210.862	221.951
M,N	Jasa Perusahaan	17.505	18.469
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	398.269	420.651
P	Jasa Pendidikan	124.879	127.982
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131.392	148.856
R,S,T,U	Jasa Lainnya	46.133	48.156
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6.352.027	6.710.007

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2021

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Penghitungan pendapatan per kapita yang digunakan saat ini adalah menggunakan metode penghitungan PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan harga berlaku) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan. Pada Tahun 2020 mulai mengalami masa pandemi covid-19 PDRB Per Kapita Riil



Kabupaten Belitung tercatat Rp.50.847.912,-. Sedangkan pada Tahun 2020 masih dalam masa pandemi covid-19, PDRB Per Kapita Riil juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.59.802.778,-.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indikator ini hanya dilakukan pengukuran di daerah tingkat provinsi. Adapun angka ketimpangan pendapatan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semula pada Tahun 2020 adalah 0,262 berubah menjadi angka 0,252 pada Tahun 2021. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2021 lebih sedikit ketimpangannya yang berarti lebih tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatan bila dibandingkan pada Tahun 2020.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	93	Dindikbud	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6,534 Orang	Dindikbud	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dindikbud	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	204 Orang	Dindikbud	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	348 Orang	Dindikbud	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	54 Orang	Dindikbud	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	23 Orang	Dindikbud	
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD = 122 SMP = 32	Dindikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	76,698 Orang	Dindikbud	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	33.636 Orang	Dindikbud	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	685 Orang	Dindikbud	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	315 Orang	Dindikbud	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.230 Orang	Dindikbud	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	569 Orang	Dindikbud	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	941 Orang	Dindikbud	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	417 Orang	Dindikbud	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	474 Orang	Dindikbud	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	163 Orang	Dindikbud	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	262 Orang	Dindikbud	
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	162 Orang	Dindikbud	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	630 Orang	Dindikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	218 Orang	Dindikbud	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	114 Orang	Dindikbud	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	23 Orang	Dindikbud	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	157 Orang	Dindikbud	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	152 Orang	Dindikbud	
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD = 122 SMP = 32	Dindikbud	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	76,898 Orang	Dindikbud	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	33,636 Orang	Dindikbud	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	685 Orang	Dindikbud	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	315 Orang	Dindikbud	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.230 Orang	Dindikbud	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah	569 Orang	Dindikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		menengah pertama			
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	941 Orang	Dindikbud	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	417 Orang	Dindikbud	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	474 Orang	Dindikbud	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	163 Orang	Dindikbud	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	262 Orang	Dindikbud	
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	162 Orang	Dindikbud	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	630 Orang	Dindikbud	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	218 Orang	Dindikbud	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	114 Orang	Dindikbud	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	23 Orang	Dindikbud	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	157 Orang	Dindikbud	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah	152 Orang	Dindikbud	
		1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	2 PKBM	Dindikbud	
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan	536 Orang	Dindikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dindikbud	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	88 Orang	Dindikbud	
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	96 Orang	Dindikbud	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	81 Orang	Dindikbud	
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	6 Orang	Dindikbud	
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah	7 Orang	Dindikbud	
2	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1		
		1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan Akreditasinya	1		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	355.681		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	173		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10.278		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	283		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	26.096	Dinkes	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	260		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	127.392		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai	111		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	39.573		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	54		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	101.464		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	28		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50.577		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	157		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	20 unit		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	19 orang		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8.652		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	28		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	26		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	32		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	26.040		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	54	Dinkes	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.313		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	48		
3.	Pekerjaan Umum	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten /kota (ha)	288,37		
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	15.114 M	PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	87633,17 ha		
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	2055461,393 m		
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	1		
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1		
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	(i) 550 M (ii) 22695,6 m (iii) 9593,04 m (iv) 0 (v) 0 (vi) 0 (vii) 4022 m		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	288.37Ha		
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	15114 m		
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	87,633,17 Ha		
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	205,461,393 m		
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada		
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan Sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	PUPR	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	(i) 550 M (ii) 22695,6 M (iii) 9593,04 M (iv) 0		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah .i. Bangunan perkuatan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(v) 0 (vi) 0 (vii) 4022 M		tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengamanan pantai lainnya (m) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	2.605 = ----- x 100% 3.710,18 = 70,23%		
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	39.756,52 = ----- x 100% 83.629,30 = 47,53%		
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	8.379,36 = ----- x 100% 20.923,90 = 40,04%		
		1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada		
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak Ada		
		3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	BUMD ADA 3 UPTD ADA 7		
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		Surat keterangan
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1		
		1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	360		
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	350		
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar	360		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		menggunakan SPALD S dan SPALD T			
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	347	DLH	
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	347		
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	360	DPUPR	
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0		Surat Keterangan
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0		Surat Keterangan
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	350 = ----- x 100% 7,042 = 4,97%		
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	80 = ---- x 100% 899 = 22,32%	DPUPR	
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	1 = ---- x 100% 5 = 20%	DLH	
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	1 m ³ = ---- x 100% 5 m ³ = 20%		
		13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	350 = ----- x 100% 7,042 = 4,97%	DPUPR	
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	DLH	Srt Keterangan
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	77 = ----- x 100% 1,070 = 7,20%	DPUPR	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	377	DPMPSTPP	
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	PUPR	Perda 8/2015
		4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada		
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	3		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	BPKAD	
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	4.145		
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	3.969		Kondisi Baik
		1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	666,024	PUPR	
		2. Panjang jalan yang dibangun	0,524		
		3. Panjang jembatan yg dibangun	48		
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	1		Pekerjaan di Tahun 2021 Data Pendukung Terlampir
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	1		Tidak ada Pekerjaan di Tahun 2021 Surat Keterangan
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0		Pekerjaan di Tahun 2021 Data Pendukung Terlampir
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		Tidak ada Pekerjaan di Tahun 2021 Surat Keterangan
		8. Panjang jalan yang dipelihara	655,211		
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	0		Tidak ada Pekerjaan di Tahun 2021 Surat Keterangan
		1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	8 Kali		
		2. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	181 Orang	PUPR	
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	395		dari Tahun 2018s.d. 2021
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1		Aplikasi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1		Aplikasi LPSE https://lpse.belitungkab.go.id/



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0		Surat keternagan
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1		Aplikasi LPSE https://lpse.belitungkab.go.id/
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1		Aplikasi LPSE https://lpse.belitungkab.go.id/
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1		Profil OPD dan Aplikasi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0		Surat keternagan
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	1		Aplikasi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	1		Aplikasi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	PUPR	Surat keternagan
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	68		Surat keternagan
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk	1		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan/atau kualifikasi			
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		Surat Pernyataan Tidak ada Kecelakaan
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0		Aplikasi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0		OSS di Dinas PMPTSP /
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	1		https://lpse.belitungkab.go.id/
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	1		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	1		OSS di Dinas PMPTSP
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	12		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		-
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasan	12	PUPR	Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
4	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0		
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana	0	BPBD	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
		1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	2		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0		Data Pendukung
		1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	72,30 Ha	PUPR	134 Unit didapat dari (Total RLH Tahun 2021 – Total Jumlah RLH Tahun 2020) $28.004 - 27.870 = 134$ unit



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	134 unit	PUPR		
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	23,98 Ha			
		1. Jumlah rumah di kab/kota	36.058 Ha			
		2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	134 = ----- x 100% 8,054 = 1,66%			
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	8.054			
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak Ada			
		5. Rasio rumah dan KK	61,297 = ----- x 100% 36,058 = 0,59%			
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	134			
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	23 Perumahan			
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	23 Perumahan			
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan Lingkungan	3.681 unit			
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	3.681 unit			
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	23 Perumahan			
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	3.681 unit			
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	23			
		8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	23			
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	23			
5.	Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	83 = ----- x 100% 83 = 100%		POLPP	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	180			
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6 Perda			
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Orang			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	POLPP	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	1		
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	BPBD	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	87,14%		
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0		Surat Pernyataan
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0		Surat Pernyataan
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0		Surat Pernyataan
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0		Surat Pernyataan
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0		Surat Pernyataan
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	87,14%		
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%		Surat Keterangan Karena tidak ada status KLB
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%		
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%		
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%		
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	86	BPBD	
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0		Surat Keterangan
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0		Surat Keterangan
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0		
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	16		
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	5 Orang		
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0		Surat Keterangan
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0		Surat Keterangan ; Karena refocusing anggaran
6.	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2	DSPPA	1. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 2. Website Begalor
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	8.778 orang		(Terdiri dari : Penyandang disabilitas : 636; Lanjut Usia : 7923; Anak Terlantar : 219)
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim = 16 Orang		SK No. 900/052/KEP/DSPPA/2022 tgl 2 Februari 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	4.862 orang	DSPPA	(terdiri dari : Penyandang disabilitas : 176; Anak Terlantar : 3.573; Lanjut Usia Terlantar : 1.113)
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1		SK No. 300/053/KEP/DSPPA/2022 Tgl 02 Februari 2022
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	275 orang		
		7. Jumlah rumah singgah/ shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1		SK Rumah Singah No : 900/053/KEP/DSPPA/2022 Tanggal : 02 Februari 2022
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	24 Orang		
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	36 Orang		
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	3		1. kursi roda 2. tripod 3. tongkat adaaktif
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1 Paket		1. Pempers = 2 Bal 2. Hand Sanitizer = 3 Botol 3. Masker = 1 Kotak 4. Hand Scoon = 1 Kotak
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	2 Orang		1. Bpk Safari 2. Ibu Marina
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak ada		Surat Pernyataan
		14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	8 Orang		
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	126 Orang		1. Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas = 30 Org 2. Bimbingan Sosial Kepada Lanjut Usia = 80 Org 3. Bimbingan Sosial Kepada anak terlantar = 10 Org 4. Bimngan Vokasional kepada Penyandang Disabilitas Sensorik rungu wicara secara resensial di BRSPDSRW Melati, Bambu Apus Jakarta Timur = 6 Org
		16. Jumlah bimbingan sosial yang	6 Orang		Bimbingan Sosial untuk



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			Penyandang Disabilitas Rungu Wicara yang mengikuti layanan Rehabilitasi Sosial Program Atensi Berbasis Residensi Oleh Balai Disabilitas Melati Jakarta
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	13 Orang		
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	3.404 Orang		1. Anak Usia Dini Program PKH = 2.941 Orang 2. Anak Sekolah Program PKH = 455 Orang 3. Disabilitas, Anak dan Lansia terlantar = 8 Orang
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	3 Orang		1. M. Sapta 2. Marzuki 3. Marina
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	1 Orang		1. Cong Kong Yen
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	10 Orang		PSBL 1. Samsu 2. Marzuki 3. Adna Firmansyah Panti Putra/Putri 1. Widia 2. Liko 3. Sapta Panti Lansia/Rujukan Permakanan 1. Aminah 2. Maimunah 3. Lusianti 4. Era Ermawanti
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	41		Bencana Alam = 24 Bencana Sosial = 17
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	25 orang		Bencana Alam = 8 Bencana Sosial = 17
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	DSPPA	Surat pernyataan : No. 664/DSPPPA/2022
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		Surat pernyataan : No. 664/DSPPPA/2022
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		Surat pernyataan : No. 664/DSPPPA/2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	299 Orang		
7.	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	KUKMPTK	
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0%		
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0%		
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0%		
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	7 = ---- x 100% 11 = 63,64%		
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	16 = ---- x 100% 464 = 3,5%		
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	6 = ---- x 100% 8 = 75%		
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	8 = ---- x 100% 8 = 100%		
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	0		
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	0%		
		8. Persentase penyerapan lulusan	0%		
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	302 = ----- x 100% 93.445 = 0,32%		
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	0		Surat Keterangan
		11. (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan	0		Surat Keterangan
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	302 = ----- x 100% 93.445 = 0,32%		Surat Keterangan
2. Data tingkat produktivitas total	0	Surat Keterangan			
1. Persentase perusahaan yang telah	75 = ---- x 100%				



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	75 = 100%		
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	5 = --- x 100% 12 = 33,53%		
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	29		Surat Keterangan Dikarenakan tidak ada perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam satu perusahaan di Tahun 2020
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	0 = --- x 100% 75 = 0%		
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	512 = ----- x 100% 498 = 102,81%		
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	12 = ---- x 100% 498 = 2,40%		
		7. Jumlah mogok kerja	1		
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0		Surat Pernyataan
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	1		
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		Surat Keterangan
		11. Jumlah perselisihan PHK	1		
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	113		
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0		Surat Keterangan
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0		Surat Keterangan
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industri	2 = --- x 100% 17 = 11,76%		
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	66	KUKMPTK	
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	438		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	0		Surat Keterangan
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0		Surat Keterangan
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3 orang		
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		Surat Keterangan
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0		Surat Keterangan
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	58		
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0		Surat Keterangan
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0		Surat Keterangan
		11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0		Surat Keterangan
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		Surat Keterangan
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		Surat Keterangan
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0		Surat Keterangan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	40 OPD = 60 Orang		
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Tidak Ada	DSPPA	Surat Pernyataan No. 474/265/DSPPA
		1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Media		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	10 Lembaga		
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	10 = ---- x 100% = 100% 10		
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	10 Lembaga		
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	10 Lembaga		
		1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	18 Organisasi		
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	112 Orang		
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	8 Lembaga		
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	5 Lembaga		
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 Kebijakan		
		6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	8 Lembaga		
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	37 = ---- x 100% = 100% 37		
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	DKPP	PKS antara DKPP Kab. Belitung dengan Perum Bulog Kacab Bangka ttg Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah (Beras) Kab. Belitung No. 01/PKS/CPD/DKPP/BLT/IX/2021 dan No. 002/PBJ/06A02/IX/2021
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	4		<ul style="list-style-type: none"> • BA Penyerahan Bantuan Korban Kebakaran di Desa Sijuk 6 Okt 2021 • BA Penyerahan Bantuan Korban Kebanjiran di Desa Aik Raya 16 Jan 2021 • BA Penyerahan Bantuan Korban Kebakaran di



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Desa Tanjung Binga 27 April 2021 • BA Penyerahan Bantuan Korban Kebakaran di Kelurahan Pangkallalang 29 Des 2021
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0		Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung belum tersedia regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	2		• Penetapan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani Penerima DAK Non Fisik TA.2021 • Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Konsumsi Pangan Berbasis sumber daya lokal
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	0		Surat Pernyataan
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0		Surat pernyataan : Penyaluran Cadangan pangan daerah pada tahun 2021 disalurkan pada korban bencana kebakaran, sedangkan cadangan pangan pada daerah rentan pangan belum tersalurkan karena berdasarkan Data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2021 desa yang termasuk prioritas rentan rawan pangan adalah Desa Kembiri yang dinilai pada indicator ketersediaan jumlah air bersih dan jumlah tenaga kesehatan dengan kondisi tersebut masih mampu untuk mengakses pangan sehingga belum memerlukan penyaluran cadangan pangan.
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan keamanan pangan segar
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	5	Bagian Pemerintahan	
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari	0		Surat Pernyataan : Dikarenakan tidak ada Tanah Obyek Landreform



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek			yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek di Kab. Belitung
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0		Surat Pernyataan : Dikarenakan tidak ada Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek di Kab. Belitung
		4. Dokumen Izin membuka tanah	0		Surat pernyataan : Belum ada Dokumen Izin Membuka tanah karena masih proses pembahasan regulasi
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0		Surat pernyataan : Belum ada Dokumen perencanaan Penggunaan Tanah Kab. Belitung Tahun 2021
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan Kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA (Indeks Kualitas Air) = 56.75 IKU (Indeks Kualitas Udara) = 91.69 ITH (Indeks Tutupan Hutan) = 43.89 IKLH = 62,09	DLH	
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya Informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah : Ada 2. Tersedianya Informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah : Ada 3. Tersedianya Informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan : Tidak Ada		
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	26 = ---- x 100% 29 = 89,66%	DLH	
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	1 = ---- x 100% 26 = 3,85%		
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah	0 = ---- x 100% 0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kabupaten/ kota	= 0%		
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0 = ----- x 100% 0 = 0%		
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0 = ----- x 100% 0 = 0%		
		8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	3 = ----- x 100% = 100% 3		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	98 = ---- x 100% 98 = 100%	Disdukcapil	
		2. Penerbitan akta perceraian	10 = ----- x 100% 10 = 100%		
		3. Penerbitan akta kematian	1.420 = ----- x 100% 1.420 = 100%		
		4. Penyajian data kependudukan	3 = ---- x 100% 2 = 150%		<ul style="list-style-type: none"> • Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Belitung Tahun 2021, • Buku Agregat Kependudukan I Tahun 2021, • Buku Agregat Kependudukan II Tahun 2020
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	7	DPPKBPMMD	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	7		
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan	42		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kapasitas dan diberdayakan			
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0		
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	7		
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	7		
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	42		
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1		<ul style="list-style-type: none"> Buku GDPK Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2020 ttg Grand Design Pembangunan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2019-2039
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	37,30	DPPKBPM	Rekapitulasi Hasil PK2021 Kabupaten Belitung (Rata-rata UKP Istri dan Jumlah Anak yang Pernah dilahirkan)
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility rate/ASFR 15-19)	$\frac{218}{6.668} \times 100\%$ $= 32,69\%$		Data Ibu Bersalin Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Belitung Tahun 2021 dari Dinkes Kab. Belitung
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{23.596}{23.596} \times 100\%$ $= 100\%$		Laporan Pengendalian Lapangan Kabupaten Belitung
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	<p>10</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah Kab. Belitung</p> <p>1. Sekda Kab. Belitung</p> <p>2. Dinas PPPA dan Sosial Kab. Belitung</p> <p>3. Dinkes Kab. Belitung</p> <p>4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung</p> <p>Jumlah Mitra Kerja yg</p>	DPPKBPM	SK Pokja Advokasi Kependudukan dan KB Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Berperan Aktif 1. Kodim 0414 2. Polres Belitung 3. TP PKK Kab. Belitung 4. Kantor Kemenag Kab. Belitung 5. IDI Kabupaten Belitung 6. IBI Cabang Kab. Belitung		
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	14 $= \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\% = 100\%$ 14		
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.558 $= \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ 23.596 = 15,08%		
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	18 pokja <ul style="list-style-type: none"> • Pokja Advokasi KKB Kab. Belitung Th 2019-2023 : 1 • Pokja Kampung KB Tk. Kab.: 1 • Pokja Kampung KB Tk. Kecamatan : 5 Kec • Pokja Kampung KB Tk. Desa : 11 Desa 		<ul style="list-style-type: none"> • SK Pokja Advokasi Kependudukan & KB Kab. Belitung • SK Pokja Kampung KB Tk. Kabupaten s.d. Desa
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	2.427 $= \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ 3.128 = 77,64%		<ul style="list-style-type: none"> • Rekap Laporan Bulanan Faskes KB Jan-Des 2021 • Data Ibu Bersalin berdasarkan kelompok umur Kab. Belitung Th 2021 oleh Dinkes
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	11 Desa		
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	7.504 $= \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ 8.834 = 84,94%		
15	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	10+11 = 21 $= \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ 23+29 = 52 = 40%	DISHUB	Ketersediaan Fasilitas Terminal Tanjungpandan
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	2.179 $= \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ 19.767 = 11%		Data Jumlah Kendaraan wajib uji Kab. Belitung 2021
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	1 $= \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ 4 = 25%		Data Lintasan Komersil dan Lintasan Perintis Kab. Belitung
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	6.642 $= \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ 8.739 = 79,67%		Data Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{26}{31} \times 100\% = 83,87\%$	DISKOMINFO	Tabel OPD yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah)
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{26}{31} \times 100\% = 83,87\%$		Akses Internet Berkualitas : - Tingkat Realibitas (SLA) 99,66% Downtime selama 1 Tahun = 1.812 Menit Bandwith : 1. 100 Mbps Dedicated 2. 150 Mbps Shared
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1		Topologi Jaringan
		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{114}{114} \times 100\% = 100\%$		Tabel Permintaan Domain
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{31}{31} \times 100\% = 100\%$		Tabel Portal dan Situs Web
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	$\frac{31}{31} \times 100\% = 100\%$		Tabel Aplikasi Umum dan Khusus
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$		Tabel Layanan SPBE
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$		Tabel Layanan SPBE yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik)
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{112}{112} \times 100\% = 100\%$		Tabel Sertifikat Elektronik yang terdaftar



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{26}{26} \times 100\%$ $= 100\%$		Tabel Layanan Publik yang terintegrasi
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$		Tabel Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$		Tabel Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$		Tabel Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{33}{33} \times 100\%$ $= 100\%$		Tabel data yang dapat berbagi pakai
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{23}{31} \times 100\%$ $= 74,190\%$		Tabel Perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi smart city
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{86}{103} \times 100\%$ $= 83,5\%$		Tabel ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi
		14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1		Perbup No. 47 Tahun 2019 (Pasal 24-25)
		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{4}{5} \times 100\%$ $= 80\%$		Keterangan : Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{25}{33} \times 100\%$ $= 75,76\%$	DISKOMINFO	Daftar Konten Informasi
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{9}{10} \times 100\%$ $= 90\%$		Daftar Diseminasi dan layanan informasi publik
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{9} \times 100\%$ $= 0\%$	DKUKMPTK	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	KUKMPTK	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{98}{109} \times 100\%$ = 89,90%		
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{7}{43} \times 100\%$ = 13,95%		
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{55}{109} \times 100\%$ = 50,45%		
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{60}{13.111} \times 100\%$ = 0,45%		
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%		Tidak Perlu di isi
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{38}{109} \times 100\%$ = 34,86%		
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{3}{109} \times 100\%$ = 2,75%		
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{1}{109} \times 100\%$ = 0,91%		
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	$\frac{98}{109} \times 100\%$ = 89%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		daerah kabupaten/kota			
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	23 = ----- x 100% 109 = 21,10%	KUKMPTK	
		1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2.396 = ----- x 100% 22.899 = 11,69%		
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	3.609 = ----- x 100% 22.899 = 15,73%		
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	4.282 = ----- x 100% 22.899 = 18,70%		
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	341 = ----- x 100% 22.558 = 1,5%		
		5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1.463 = ----- x 100% 21.436 = 6,82%		
		6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	648 = ----- x 100% 22.889 = 2,83%		
		7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	8.149 = ----- x 100% 22.899 = 35,59%		
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 1	DPMPTSP	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0 masih dalam tahapan proses penyusunan		Dibuktikan Surat Pernyataan Kepala Dinas DPMTSPP Kab. Belitung
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		Selama tahun 2021 belum ada investor yang mengajukan insentif atau keringanan lainnya sehingga belum ada laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	4		1. Sosialisasi kemudahan pelayanan perizinan melalui program KERISI (Kios Pelayanan Informasi dan Perizinan Berusaha/Investasi



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Terintegrasi) 2. Kegiatan Rakornas dan Anugerah Layanan Investasi 2021 melalui virtual zoom meeting. 3. Kegiatan Geopark Indonesia Summit 2021 secara live virtual. 4. Kegiatan FGD Penyusunan Profil Investasi Daerah dan Pra-Study Kelayakan Investasi Daerah Kabupaten Belitung diruang rapat Bappeda Kab. Belitung
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	1		Pameran Hari Jadi Kota Tanjungpandan
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	10	DPMPSTPP	1.Penandatanganan MOU Pemkab Belitung dengan Pemkab Belitung Timur tentang kerjasama pembangunan daerah yang salah satu ruang lingkupnya dibidang investasi 2.Penandatanganan MOU Pemkab Belitung dengan PT. Mitra Dinamika Sejahtera tentang pelaksanaan kerjasama peningkatan dan pendampingan UMKM, pemasaran dalam dan luar negeri 3.Audiensi dan paparan tentang perahu layar wisata oleh PT.Molopi Bahari Indonesiaku tanggal 2 Desember 2021 diruang rapat Bupati Belitung 4.Webinar Peluang Investasi di Belitung dan pemulihan ekonomi melalui konsep Blue Economy dan Pariwisata bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) 5.Menerima kunjungan kerja PT. Sucofindo dan team Kementrian Investasi/BKPM RI terkait penyusunan peta peluang investasi Prov. Bangka Belitung 6.Menerima kunjungan kerja Tim HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) wilayah Belitung untuk kerjasama dan kolaborasi dalam kegiatan investasi daerah 7.Audiensi dengan PT. Ekosis diruang rapat Bupati Belitung terkait wacana kerjasama pembuatan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>aplikasi Directory Investasi</p> <p>8. Penandatanganan addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung Inter Permai tentang pelaksanaan kerjasama pembangunan Billiton Beach Hotel dan pengelolaan kawasan wisata Pantai Tanjung Kelayang Kab. Belitung</p> <p>9. Menerima kunjungan kerja DPD RI mengenai reses/penyerapan aspirasi perkembangan investasi Kabupaten Belitung</p> <p>10. Paparan rencana kegiatan virtual Belitung Fiesta oleh ETSDC Chairman diruang rapat Bupati Belitung</p>
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.049 konsultasi		
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	671 Izin		
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 493.807.554.200		
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	4 orang		Diklat Penanaman Modal yang diselenggarakan BKPM Republik Indonesia
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	70 perusahaan		Rekap Berita Acara Pengawasan Penanaman Modal Th. 2021
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten / kota	4 data		Rekap Surat Permintaan Data yang masuk ke DPMPSTPP ditahun 2021
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	666 Orang	Dispora	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		Surat Pernyataan
		1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	362 Orang		
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	2 Orang		
		1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	150 Orang		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	8 Event		
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	2	Diskominfo	1. Buku Belitung Dalam Angka 2. Buku Belitung Satu Data
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0%		Belum tersedia karena belum ada Forum data Kabupaten
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1		Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Belitung Tahun 2021
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0%		Belum tersedia karena belum ada Forum data Kabupaten
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1		Rekomendasi BPS "Kegiatan Statistik Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Belitung" Nomor: 001/K-21/OT.130/X/2021
		6. Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral	0%		Belum tersedia karena belum ada Forum data Kabupaten
		7. Persentase kelengkapan metadada variabel sektoral	0%		Belum tersedia karena belum ada Forum data Kabupaten
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0%	Diskominfo	surat keterangan: dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana dalam hal pengamanan sinyal berupa Alat Pendukung Utama (APU) seperti Jammer. Pada Tahun Anggaran 2022 akan diusulkan pengadaan Jammer pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{36}{38} \times 100\% = 94,73\%$		Daftar Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Belitung yang menerapkan SMKI
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0%		Surat Keterangan dikarenakan Kategori Sistem Elektronik (SE) yang telah diukur melalui Penilaian Indeks KAMI Tahun 2020 sebesar 20 dengan Tingkat Ketergantungan yaitu Tinggi . Berdasarkan penilaian Pengelolaan resiko keamanan informasi terhadap SE tersebut dengan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					mempertimbangkan Daftar Identifikasi Risiko pada Data Center (Ruang Server) memiliki Nilai Risiko Dasar (NRD) yaitu Tinggi dan Sangat Tinggi pada asset yang telah diidentifikasi sebelumnya.
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0%		Surat Keterangan Dikarenakan belum diidentifikasinya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) dan direncanakan akan diusulkan pada Tahun Anggaran 2022 melalui agenda Penetapan PHKS dan Pembentukan Forum Komunikasi Sandi Daerah pada sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	33	Dindikbud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam Gede 2. Eks tuan Rumah Tuan Kuase 3. Museum tanjungpandan 4. Gereja Regina pacis 5. Eks Europeesche Klinik 6. Eks Zusterhuis 7. Eks Chineesche Hospital Danlanud 8. Rumah type kolonial Danlanud 9. Rumah Type Kolonial Dandim 10. Eks Societed 11. Kelenteng Hok Tek Che 12. Holland Indisch School 13. Eks Gedung Landraad 14. Eks Tuintdienst 15. Eks kantor Asisten Residen 16. Eks Rumah Asisten residen 17. Gedung Nasional 18. Eks Districhoofd 19. Dockyard 20. Kerkhof 21. Mesjid Tua Sijuk 22. Kelenteng Sijuk 23. Situs Padang Kelarin 24. Situs Padang Pendam 25. Mercusuar Pulau Lengkuas 26. Situs gunung lilangan 27. Situs kota tanah 28. Situs Gunung tajam 29. Situs Parit Gunung 30. Situs aik labu kembiri 31. Situs Luday
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	38		
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	33		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					32. Mercusuar P.Sumedang 33. Mercusuar Tanjung luncur
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Dindikbud	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	38		
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	38		
		7. Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		Surat Pernyataan
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	26		
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	28		
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1.556		
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	14.756		
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			Tidak Perlu Diisi
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0		Surat Pernyataan
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0		Surat Pernyataan
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Surat Pernyataan	
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	2		
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0		
				Dindikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	4				
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7				
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	96.776 = ----- = 0,55 177.472				
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	341.115 = ----- x 100% 177.472 = 192,207%				
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	149 = ----- = 8,40 177.472				
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	17 = ---- x 100% = 11,40% 149				
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	3 Sub Kegiatan				
		1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2 Koleksi				
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	2 Koleksi				
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	12 Koleksi				
		24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	2.915 = ----- x 100% = 30,54% 9.546	DKPD	
				2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	5.921 = ----- x 100% = 59,93% 9.546		
3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	910 = ----- x 100% = 9,53% 9.546						
4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0			Surat pernyataan			
1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0			Surat pernyataan			
2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	60			Surat pernyataan			
3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0						



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	0		Surat pernyataan
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	57		
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	20		
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	49 RTP		
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0 = $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	DKP	Surat Pernyataan : proses operasional penyelenggaraan TPI di Kabupaten Belitung sampai tahun ini baru pada tahap proses inventarisasi dan persiapan indentifikasi pengelola sehingga belum beroperasi
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	52 Izin Budidaya		
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	20 Pembudidaya	DKP	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	= 2.767.098+ 300 = 2.767.398 ekor		
26	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	134 Destinasi Wisata		Daya Tarik Wisata = 68 Desa Wisata = 20 Buah Geosite Belitung Geopark = 17 Geosite Hutan Kemasyarakatan = 18 HKM
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	944	Dispar	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	1. Daya Tarik usaha = 2 2. Jasa perjalanan wisata = 204 3. Jasa makanan dan minuman = 103 4. Penyediaan akomodasi = 72		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi = 5 6. Biro Perjalanan Wisata = 23 7. Agen Perjalanan Wisata = 181 8. Jasa Boga/Rumah Makan/Restoran/café/warung = 103 9. Hotel = 72 10. Jasa Penyelenggara Hiburan = 2 11. Spa = 1		
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	= 44 Negara = 1.583 Orang		
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0 event		
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0 event		
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0		
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{1.537}{3.183} \times 100\%$ = 48,29%		
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{927}{927} \times 100\%$ = 100%		
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	5 Kecamatan		
27	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	24		
		2. Prasaran pertanian yang digunakan	140		
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	0%	DKPP	Surat Pernyataan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung bahwa selama tahun 2021 tidak ada fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian
		4. Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{138}{140} \times 100\%$ = 98.57%		
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0%		Surat Pernyataan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung bahwa tidak ada usulan izin usaha pertanian
		1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{54}{54} \times 100\%$ $= 100\%$		
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0		Surat Pernyataan : Belum memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan karena menunggu legalitas Surat Keputusan arahan pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, UPTD Tahura selaku unit teknis structural pengelola Tahura juga belum terbentuk.
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0		Sda
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		Sda
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0		Sda
		5. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0		Sda
		6. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0		Sda
29	Energi Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0		Dikarenakan tidak ada kegiatan Pemanfaatan langsung panas bumi dalam Kabupaten Belitung
30	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0%	DKUKMPTK	
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{7}{7} \times 100\%$ $= 100\%$		
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0%		
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari	0%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri			
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0%		Surat Keterangan Dikarenakan tidak ada fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di Kabupaten Belitung
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0%		
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a+b) \times 100\%$ $= (0,5+0,5) \times 100\%$ $= 100\%$		
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,09%		
		1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{2.253}{4.222 \times 4.691} \times 100\%$ $= 0,011\%$		
		1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{1.760}{3.379} \times 100\%$ $= 52,07\%$		
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0%		Surat Keterangan
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Bidang Perindustrian DPMPTSP Kabupaten Belitung ditahun 2021 tidak menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)		Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Belitung
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Dokumen RPIK bidang perindustrian DPMPTSP Kabupaten Belitung masih berada pada tahapan tersusunnya naskah akademik (30%)		Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Belitung
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{4}{4} \times 100\%$ $= 100\%$	DPMPTSP	1. CV. Harapan Putra 2. Jaringan Teribonk Tekno 3. CV. Satu Karya Muda 4. PT. Aneka Kaolin Utama
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Bidang Perindustrian DPMPTSP Kabupaten Belitung ditahun 2020 tidak menerbitkan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Belitung



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	7		Data Aplikasi SIINas di Bidang Perindustrian DPMTSPP Kab. Belitung

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi PAUD	$\frac{6.142}{5.903} \times 100\%$ = 104,05%	Dindikbud	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{18.696}{19.467} \times 100\%$ = 96,04%		
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{6.258}{9.035} \times 100\%$ = 69,26%		
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{65}{32.685} \times 100\%$ = 0,20%		
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{126}{181.735} \times 100\%$ = 0,69%	Dinkes	
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{1}{3} \times 100\%$ = 33,33%		
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{2.994}{3.587} \times 100\%$ = 83,46%		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{3,118}{3,426} \times 100\%$ <p>= 91,01%</p>		
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{3,035}{3,262} \times 100\%$ <p>= 93,04%</p>		
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{10,479}{13,132} \times 100\%$ <p>= 79,80%</p>		
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{27,950}{27,950} \times 100\%$ <p>= 100%</p>		
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{88,717}{116,285} \times 100\%$ <p>= 76,29%</p>		
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{14,420}{16,859} \times 100\%$ <p>= 85,53%</p>		
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{24,335}{45,462} \times 100\%$ <p>= 53,53%</p>		
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{3,108}{2,422} \times 100\%$ <p>= 128,31%</p>		
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{295}{302} \times 100\%$ <p>= 97,68%</p>		
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{3,925}{3,457} \times 100\%$ <p>= 113,54%</p>		
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{4,504}{4,391} \times 100\%$ <p>= 102,57%</p>		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Pekerjaan Umum	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{182,07}{288,37} \times 100\%$ $= 63,13\%$	PUPR	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	$\frac{9,375,30}{87,633,17} \times 100\%$ $= 10,70\%$		
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{556,45}{1,077,73} \times 100\%$ $= 51,63\%$		
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{47,109}{61,297} \times 100\%$ $= 76,85\%$		
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{29,854}{36,058} \times 100\%$ $= 82,79\%$		PUPR
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{377}{377} \times 100\%$ $= 100\%$		
		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{614,784}{666,024} \times 100\%$ $= 92,31\%$		
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{395}{444} \times 100\%$ $= 88,96\%$		
		9. rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{0}{12} \times 100\% = 0\%$		
4	Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten /kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	PUPR	Surat Pernyataan Kepala PUPR Kab. Belitung
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		Surat Pernyataan Kepala PUPR Kab. Belitung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	23,98 = ----- x 100% 62,01 = 38,67%		
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,054 = ----- x 100% 36,058 = 22,34%		
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum)	1,463 = ----- x 100% 3,681 = 39,74%		
5.	Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	83 = ---- x 100% 83 = 100%	POLPP	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	6 = ---- x 100% 24 = 25%		
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	= 158,369	BPBD	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	= 158,369		
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	= 3,012		
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	29 = ---- x 100% 38 = 76,32%		
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	= 18,55		
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1.412 = ----- x 100% 1.412 = 100%	DPPAS	
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	49 = ---- x 100% 49 = 100%		Jumlah Bencana Alam = 32 Orang Jumlah Bencana Sosial = 17 Orang Total : 49 orang



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{2}{32} \times 100\%$ $= 6,25\%$	KUKMPTK	
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{302}{93.445} \times 100\%$ $= 0,32\%$		
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{5,64}{93.445} \times 100\%$ $= 0,006036\%$		
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{498}{498} \times 100\%$ $= 100\%$		
		5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{58}{438} \times 100\%$ $= 13,24\%$		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{3.836.720.810,00}{1.086.161.055.406,00} \times 100\%$ $= 0,35\%$	DPPAS	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{10}{55.293} \times 100\%$ $= 0,018\%$		
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{30}{89.476} \times 100.000$ $= 33,529$		
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{39,50}{15.185,54} \times 100\%$ $= 0,26\%$	DKPP	
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{2.953.560}{2.953.560} \times 100\%$ $= 100\%$	Bagian Pemerintahan	
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{11.866,37}{11.866,37} \times 100\%$ $= 100\%$	DPUPR	
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{2.953.560}{2.953.560} \times 100\%$ $= 100\%$	DPMTSPP	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Bagian Pemerintahan	Surat Pernyataaan Sekda Belitung
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	0		Surat Pernyataaan Sekda Belitung
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{9}{9} \times 100\%$ $= 100\%$		
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten Belitung IKA = 56,75 IKU = 91,69 ITH = 43,89 IKLH Kab = $(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times ITH)$ $= (0.376 \times 56.75) + (0.405 \times 91.69) + (0.219 \times 43.89)$ IKLH Kab Belitung = 62,09	DLH	
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	$\frac{13.577,09}{26.092,97} \times 100\%$ $= 52,03\%$		
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	$\frac{35}{56} \times 100\%$ $= 62,50\%$		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Perekaman KTP Elektronik	$\frac{128.942}{130.948} \times 100\%$ $= 98,46\%$	Dukcapil	
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{31.084}{50.482} \times 100\%$ $= 61,57\%$		
		3. Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{53.815}{55.293} \times 100\%$ $= 97,33\%$		
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{23}{31} \times 100\%$ $= 74,19\%$		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100\%$	DPPKBPMMD	
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{6}{13} \times 100\%$ $= 46,15\%$		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR : 2,42	DPPKBPM	
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{23.596}{30.038} \times 100\%$ = 78,55%		
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{2.254}{30.038} \times 100\%$ = 7,50%		
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Kabupaten	$= ((11 \times 1/17) \times 50) + ((4 \times 1/10) \times 50)$ $= (0.65 \times 50) + (0.40 \times 50)$ $= 32.50 + 20.00$ $= 52,50$	DISHUB	
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten	= 0,76		
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{26}{31} \times 100\%$ = 83,87%	DISKOMINFO	Topologi Jaringan Tahun 2021
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{38}{42} \times 100\%$ = 90,48%		
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{113.264}{130.934} \times 100\%$ = 86,50%		Data Penduduk Usia 17 Tahun Keatas
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{55}{189} \times 100\%$ = 50,48%	KUKMPTK	
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{2.396}{22.899} \times 100\%$ = 10,46%		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{493.807.554.200 - 632.609.960.000}{632.609.960.000} \times 100\%$ = -22%	DPMPSTPP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{566}{138.962} \times 100\%$ = 0,41%	DISPORA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{107.923}{138.962} \times 100\%$ $= 77,66\%$		
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	30 Medali		
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$	DISKOMINFO	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$		
21	Persandian	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	$\frac{384}{645} \times 100\%$ $= 59,53\%$	DISKOMINFO	
22	Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{38}{38} \times 100\%$ $= 100\%$	DINDIKBUD	
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	= 14,09	DKPD	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	= 7		
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (30,54 + 59,93 + 09,53 + 0) / 4$ $= 25,00$	DKPD	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (0 + 60 + 0 + 0 + 57 + 20) = 22,83$		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten di wilayah Provinsi	= 45,744,08	DKP	
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{1.583-6,288}{6,288} \times 100\%$ $= -74,83\%$	DISPAR	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{182,987-127,928}{127,928} \times 100\%$ <p>= 43,04%</p>		
		3. Tingkat hunian akomodasi	$\frac{90,192}{635.573} \times 100\%$ <p>= 14,19%</p>		
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{418.456.000.000}{11.003.950.000.000} \times 100\%$ <p>= 255,74%</p>		
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{12.663.762.255,74}{176.706.134.752,28} \times 100\%$ <p>= 7,17%</p>		
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{1.576.37}{490} \times 100\%$ <p>= 3,22%</p>	DKPP	Data terlampir Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian tidak ada kejadian kasus penyakit hewan menular
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>= 0</p>		
28	Kehutanan		0	DLH	
29	Energi Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0		
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{1.301}{1.301} \times 100\%$ <p>= 100%</p>	KUKMPTK	
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{2.253}{2.253} \times 100\%$ <p>= 100%</p>		
		3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{1.760}{3.379} \times 100\%$ <p>= 52,08%</p>		
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{2.272-2.242}{2.242} \times 100\%$ <p>= 1,34%</p>	DPMPTSP	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	= 100%		Terlampir menggunakan Surat Pernyataan bahwa Kabupaten Belitung masih dalam tahap penyusunan RPIK



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					belum ditetapkan dalam PERDA
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$		1. CV. Harapan Putra 2. Jaringan Teribonk Tekno 3. CV. Satu Karya Muda 4. PT. Aneka Kaolin Utama
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Surat Pernyataan Kepala DPMPSTPP Kabupaten Belitung
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0		Surat Pernyataan Kepala DPMPSTPP Kabupaten Belitung
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	$= 50\%+25\%+10\%+10\% = 95\%$		
32	Transmigrasi		BUP		

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Perencanaan Dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{431,450,743,712,00 - 165,479,444,998,00}{265,971,298,714,00} \times 100\% = 981.935.654.269,20 = 27,09\%$	BPKAD	
		2. Rasio PAD	$\frac{176.706.134.753,00}{11,003,950.000.000,00} \times 100\% = 1,61\%$	BPRD	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Inspektorat	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2 Plus	Inspektorat	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{(892.345.101.135,33 - 132.282.250.022,00)}{981.935.654.269,20} \times 100\% = 74,034\%$	BPKAD	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Opini Laporan Keuangan	2011 = WDP 2017 = WDP 2012 = WDP 2018 = WDP 2013 = WDP 2019 = WDP 2014 = WDP 2020 = WTP 2015 = WDP 2016 = WDP		
34	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 = ----- x 100% 95.759.485.498,36 = 0%	Bagian PBJ	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	65 = ----- x 100% 378 = 17,20%		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	287.763.043.944,-+17.619.670.961,- = 305.382.714.905,00 = ----- x 100% 431.450.743.712,-+331.227.690.815,20 + 86.023.297.198,- = 848.701.731.725,20 = 35,98%		
35	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.294 = ----- x 100% 1.622 = 79,78%	BKPSDM	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	403 = ----- x 100% 1.622 = 24,85%		
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	403 = ----- x 100% 403 = 100%		
36	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	= $\left[\frac{981.935.654.269,20}{1.086.436.605.406,00} - 1 \right] \times 100\%$ = 9,618%	BPKAD	LRA Audited BPK-RI dan Total APBD Sebelum Perubahan Tahun 2020
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	= $\left[\frac{176.706.134.753,00}{149.628.679.180,00} - 1 \right] \times 100\%$ = 18,096%		
		3. Assets Management	= 4 1.Apakah ada daftar asset tetap? Ya 2.Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? Ya 3.Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya 4.Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya		1. Neraca Audited 2. Surat Sekda dan lampiran, 3. Inventarisasi Aset atas tindak Lanjut temuan BPR-RI 4. LRA dan Neraca 2021
		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	122.084.492.006,37 = ----- x 100% 1.086.436.056.406,00 = 0,11%		
37	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	8.814.302.623,00 = ----- x 100% 8.245.919.765,00 = 106,893%	Diskominfo	LRA Diskominfo Tahun 2021



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{12}{12} \times 100\%$ $= 100\%$		Dokumen pendukung : 1. Ringkasan RKA SKPD 2. Ringkasan RKA PPKD 3. Raperda APBD 4. Raperda Perubahan APBD 5. Perda APBD 6. Perda Perubahan APBD 7. Ringkasan DPA SKPD 8. Ringkasan DPA PPKD 9. LRA seluruh SKPD 10. LRA PPKD 11. LKPD yang sudah diaudit 12. Opini atas LKPD

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Laporan ini memuat gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, RKT Tahun 2021, RKPD Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 melalui tahapan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mendapatkan selisih antara target dan realisasi guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sebagai hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi dan analisa guna mendapatkan strategi yang tepat untuk perbaikan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Tingkat pencapaian kinerja diklasifikasikan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

Persentase	Tingkat	Kode Warna
< 100%	BELUM TEREALISASI (BT)	
= 100%	TEREALISASI (T)	
> 100%	MELEBIHI TARGET (MT)	



Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja dari program dan kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai dan disertai makna dari nilai tersebut dengan pendekatan sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021

KATEGORI	KODE WARNA	RATA-RATA % CAPAIAN
Sangat Berhasil (SB)		>90
Berhasil (B)		75.00 – 89.00
Cukup (C)		50.00 – 74.99
Kurang (K)		0.00 – 49.00

Pencapaian kinerja kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan memaparkan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian kinerja indikator sasaran menggunakan *asumsi 1*: Jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/ jelek** adalah:

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya realisasi **semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan perumusan:

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{RENCANA (REALISASI – RENCANA)}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

2.3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Dalam rangka untuk memperoleh informasi kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, maka setiap instansi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk periode 2018 – 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung dan tingkat Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023.



Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, melalui Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat, Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pembinaan pengembangan dan penetapan, evaluasi, dan reviu IKU. Evaluasi dan reviu pencapaian IKU sangat mempengaruhi kinerja organisasi di masa datang. Hasil pengukuran atas IKU Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN RPJMD (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	72,88	72,57	99,57	97,79
2.	Angka Kemiskinan	Persentase	5,97	7,15	80,23	67,84
3.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,10	99,83	99,48
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,46	8,47	100,12	98,95
5.	Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	13.671	13.563	99,21	96,54
6.	Status Desa "Maju"	Desa	25	29	116	93,55
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	B	n/a	-	BB
8.	Opini BPK	Skala	WTP	n/a	-	WTP
9.	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	BB	n/a	-	BB
10.	Indeks Profesional ASN	Skala	75	33,80	45,07	44,47
11.	Suvei Kepuasan Masyarakat	Skala	85	84,80	99,76	96,36
12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,2-3,6	5,64	156,67	110,59
13.	Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)	Orang	150.000	184.570	123,05	46,14
14.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	27,83	28,17	101,22	101,22
15.	Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	80.651.293	93.098.521	115,43	108,81



16.	Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	1.479.811.375	1.533.059.179	106,67	70,14
17.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	2.519.187	2.693.167,25	106,91	53,61
18.	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	54,35	57,17	105,19	95,38
19.	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	67,86	68,09	100,34	98,85
20.	Indeks Kualitas air	Skala	53,26	56,75	106,35	106,15
21.	Indeks Kualitas udara	Skala	93,63	91,69	97,93	97,72
22.	Indeks Kualitas tutupan lahan	Skala	46,41	43,89	94,57	87,17
23.	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	15,50	16,73	107,94	104,56

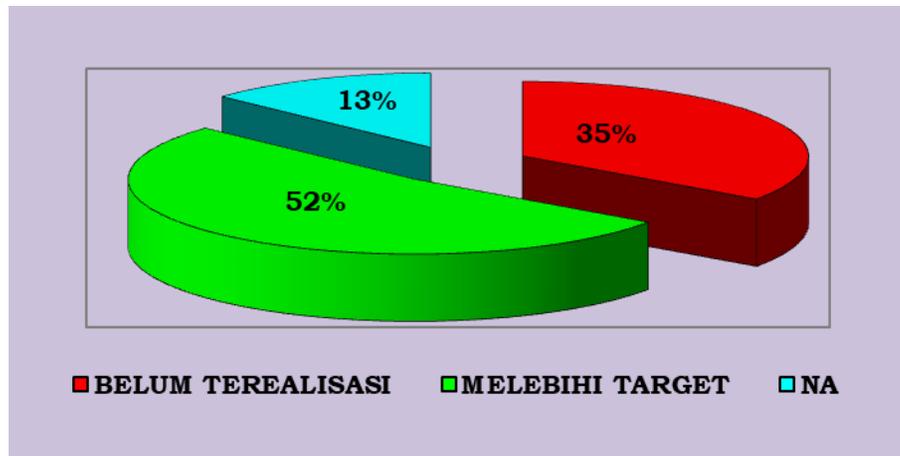
Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari indikator:
 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian 99,57%
 2. Angka Kemiskinan, capaian 80,23%
 3. Angka Harapan Hidup (AHH), capaian 99,83%
 4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), capaian 100,12%
 5. Pengeluaran per Kapita, capaian 99,21%
 6. Status Desa Maju, capaian 116%
2. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan dapat dilihat pada indikator :
 1. Indeks Reformasi Birokrasi, belum tersedia data (n/a)
 2. Opini BPK, belum tersedia data (n/a)
 3. Nilai SAKIP belum tersedia data (n/a)
 4. Indeks Profesional ASN, capaian 45,07%
 5. Survei Kepuasan Masyarakat, capaian 99,76%
3. Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat dilihat pada indikator :
 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi, capaian 156,67%
 2. Jumlah kunjungan wisatawan, capaian 123,05%
 3. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB, capaian 101,22%
 4. Nilai Omset Koperasi, capaian 115,43%
 5. Nilai Omset Usaha Mikro, capaian 103,60%
 6. Nilai Investasi, mencapai 106,91%
 7. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan, capaian 105,19%
 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian 100,34%



9. Indeks Kualitas Air, capaian 106,35%
10. Indeks Kualitas Udara, capaian 97,93%
11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan, capaian 94,57%
12. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan, capaian 107,94%

Gambar 2.1
Capaian IKU Kabupaten Belitung 2021



Secara umum pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung telah dapat melaksanakan seluruh tugas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

2.3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, pencapaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2020 yang tergambar dalam laporan ini merupakan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	TUJUAN/ SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	72,88	72,57	99,57
		2	Angka Kemiskinan	Persentase	5,97	7,15	80,23
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,10	99,83
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,46	8,47	100,12



4.	Meningkatnya daya beli masyarakat	5	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rupiah	13.671	13.563	99,21
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	6	Status Desa "Maju"	Desa	25	29	116
6.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	B	n/a	-
7.	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	8	Opini BPK	Dokumen	WTP	n/a	-
		9	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Nilai	BB	n/a	-
8.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	10	Indeks Profesional ASN	Skala	75	33,80	45,07
9.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11	Survey Kepuasan Masyarakat	Skala	85	84,80	99,76
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,2-3,6	5,64	156,67
11.	Meningkatnya pengembangan pariwisata	13	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	150.000	184.570	123,05
12.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	Persentase	27,83	28,17	101,22
13.	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15	Nilai Omset Koperasi	Ribu Rupiah	80.651.293	93.098.521	115,43
		16	Nilai Omset Usaha Mikro	Ribu Rupiah	1.479.811.375	1.533.059.179	106,67
14.	Meningkatnya investasi	17	Nilai Investasi	Juta Rupiah	2.519.187	2.693.167,25	106,91
15.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	54,35	57,17	105,19
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	67,86	68,09	100,34
17.	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20	Indeks Kualitas air	Skala	53,26	56,75	106,35
		21	Indeks Kualitas udara	Skala	93,63	91,69	97,93
		22	Indeks Kualitas tutupan lahan	Skala	46,41	43,89	94,57



18.	Meningkatnya pengelolaan sampah	23	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	15,50	16,73	107,94
-----	---------------------------------	----	--	------------	-------	-------	--------

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja di atas dapat digambarkan Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021

No.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Berhasil (SB)	>90	13
2	Berhasil (B)	75.00 – 89.00	1
3	Cukup (C)	50.00 – 74.99	0
4	Kurang (K)	0.00 – 49.00	1
5	NA	-	5
JUMLAH			20

Adapun kategori pencapaian indikator kinerja kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA SASARAN	0.00 – 49.00 KURANG	50.00 – 74.99 CUKUP	75.00 – 89.00 BERHASIL	>90 SANGAT BERHASIL
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat							
1.	Meningkatnya Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	99,57				SANGAT BERHASIL
		Angka Kemiskinan	80,23			BERHASIL	
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	99,83				SANGAT BERHASIL
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	100,12				SANGAT BERHASIL
4.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per Kapita	99,21				SANGAT BERHASIL
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Status Desa "Maju"	116				SANGAT BERHASIL
MISI 2 : Meningkatkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan							
6.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	N.A				



dan transparan							
7.	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	N.A				
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	N.A				
8.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesional ASN	45,07	KURANG			
9.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat	99,76		SANGAT BERHASIL		
MISI 3 : Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan							
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	156,67		SANGAT BERHASIL		
11.	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	123,05		SANGAT BERHASIL		
12.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	101,22		SANGAT BERHASIL		
13.	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi	115,43		SANGAT BERHASIL		
		Nilai Omset Usaha Mikro	103,60		SANGAT BERHASIL		
14.	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi	106,91		SANGAT BERHASIL		
15.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	105,19		SANGAT BERHASIL		
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	100,34		SANGAT BERHASIL		
17.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas air	106,35		SANGAT BERHASIL		
		Indeks Kualitas udara	97,93		SANGAT BERHASIL		
		Indeks Kualitas tutupan lahan	94,57		SANGAT BERHASIL		
18.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	107,94		SANGAT BERHASIL		
			JUMLAH (KET. 5 n.a)	1	0	1	18

TUJUAN 1 : Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat” diukur melalui



pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Kemiskinan. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2021

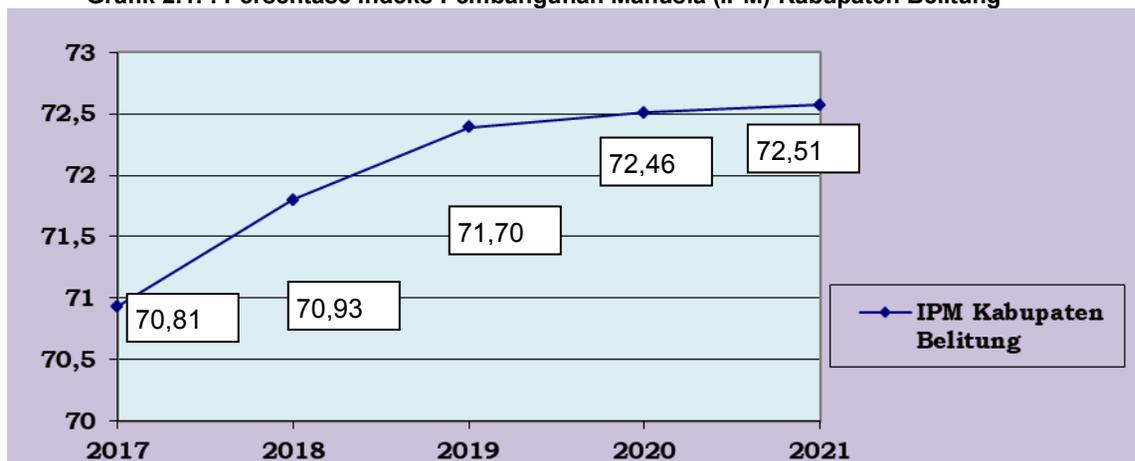
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	2021			Kategori	Target Akhir RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	70,93	72,88	72,57	99,57	SB	74,21
2	Angka Kemiskinan	Skala	7,56	5,97	7,15	80,23	B	5,41

Dari tabel di atas terlihat bahwa kedua indikator kinerja tujuan belum bisa melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 99,57% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Sementara Capaian Angka Kemiskinan sebesar 80,23% dengan kategori BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, IPM Kabupaten Belitung 2021 mencapai 97,79%, namun untuk Angka Kemiskinan hanya mencapai 67,84%.

➤ **Indeks Pembangunan Manusia**

Dalam kurun waktu 2015 - 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa IPM Kabupaten Belitung Tahun 2020 mencapai 72,57. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IPM tahun sebelumnya yang sebesar 72,51. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2015 - 2021 disajikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.1. : Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang yang memiliki nilai IPM 78,57. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga mengalami peningkatan, yang semula 71,47 di tahun 2020 menjadi 71,69 di tahun 2021. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga telah melampaui nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 71,94 menjadi 72,29 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,35 poin. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2017 - 2021:



Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2017 – 2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Belitung Timur	69,57	70,22	70,84	70,92	71,42
Bangka	71,09	71,80	72,39	72,40	72,46
Bangka Tengah	68,99	69,52	70,33	70,45	70,89
Bangka Barat	67,94	68,68	69,05	69,08	69,60
Bangka Selatan	65,02	65,98	66,54	66,90	67,06
Belitung	70,93	71,70	72,46	72,51	72,57
Pangkal Pinang	76,86	77,43	77,97	78,22	78,57
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69
Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Peningkatan IPM Kabupaten Belitung ini tidak terlepas dari kinerja dari 3 (tiga) dimensi dasar yang merupakan komponen pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun), sedangkan rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara dimensi ekonomi diukur dengan standar hidup layak, yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Selama kurun waktu 2017 – 2021, peningkatan 3 (tiga) dimensi dasar IPM Kabupaten Belitung yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ditampilkan perkembangan ketiga dimensi IPM Kabupaten Belitung periode 2017 – 2021.

Tabel 2.13
Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Umur Harapan Hidup	70,44	70,64	70,94	71,05	71,10
2	Harapan Lama Sekolah	11,51	11,83	11,84	11,85	11,86
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,11	8,15	8,41	8,46	8,47
4	Pengeluaran per Kapita	12.91	13.281	13.662	13.554	13.563

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Pada tahun 2021, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 71,05, naik 0,01 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 11,86 tahun naik sebesar 0,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,47 tahun, naik 0,01 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.



13.554.000,- (Tiga belas juta Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) per tahun, meningkat menjadi Rp 13.563.000,- (Tiga belas juta Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per tahun.

➤ **Angka Kemiskinan**

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini akan dihasilkan Garis Kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sementara interpretasi tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Belitung mengalami gejolak berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan sebesar 0,88% dengan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Belitung Tahun 2021 yaitu 7,15%. Pandemi COVID 19 menjadi salah satu penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Belitung seiring dengan tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Belitung pada tahun 2021 yaitu sebesar 830.484.

Tabel 2.13
Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2021

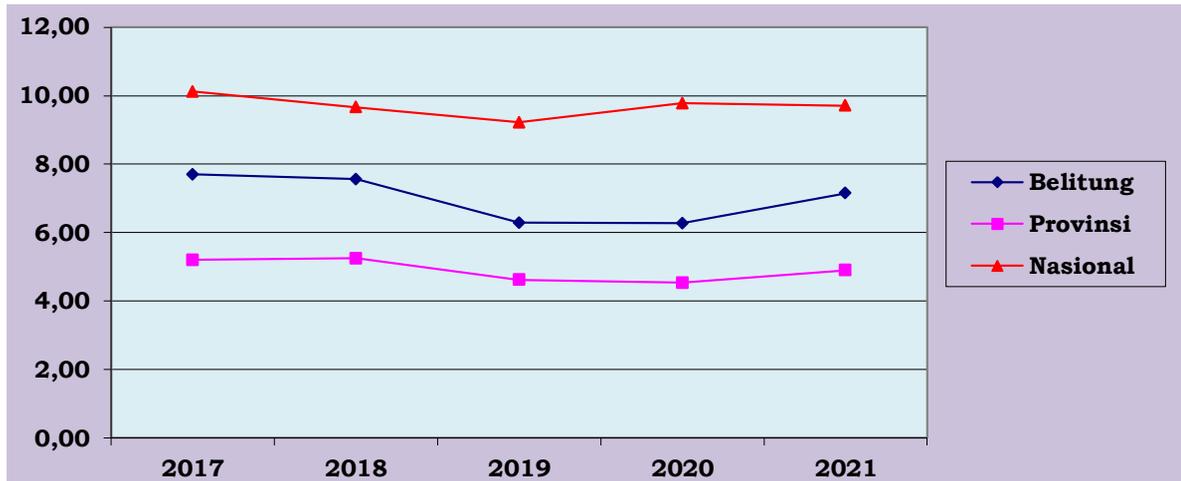
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	7,81	5,36	5,58	5,40	5,20	5,63	5,52	5,10	5,47	4,92	4,51	4,81
Belitung	10,13	6,97	7,27	8,48	7,36	8,38	7,85	7,77	7,56	6,29	6,27	7,15
Bangka Barat	5,25	3,59	3,72	3,26	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70	2,75
Bangka Tengah	8,07	5,56	5,78	5,46	5,27	5,67	5,64	6,07	5,81	5,02	4,85	5,13
Bangka Selatan	6,19	4,23	4,41	4,01	3,87	3,74	3,62	3,92	3,70	3,36	3,52	3,69
Belitung Timur	10,36	7,13	7,44	6,90	6,68	7,33	6,99	6,81	7,06	6,60	6,52	7,20
Pangkalpinang	6,02	4,15	4,29	4,15	4,04	4,97	5,02	4,80	4,95	4,25	4,36	4,76
Kep. Bangka Belitung	6,51	5,16	5,37	5,25	4,97	5,40	5,22	5,20	5,25	4,62	4,53	4,90

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Namun demikian, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung masih di bawah tingkat kemiskinan nasional per September 2021 sebesar 9,71% seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Grafik 2.2. : Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 202

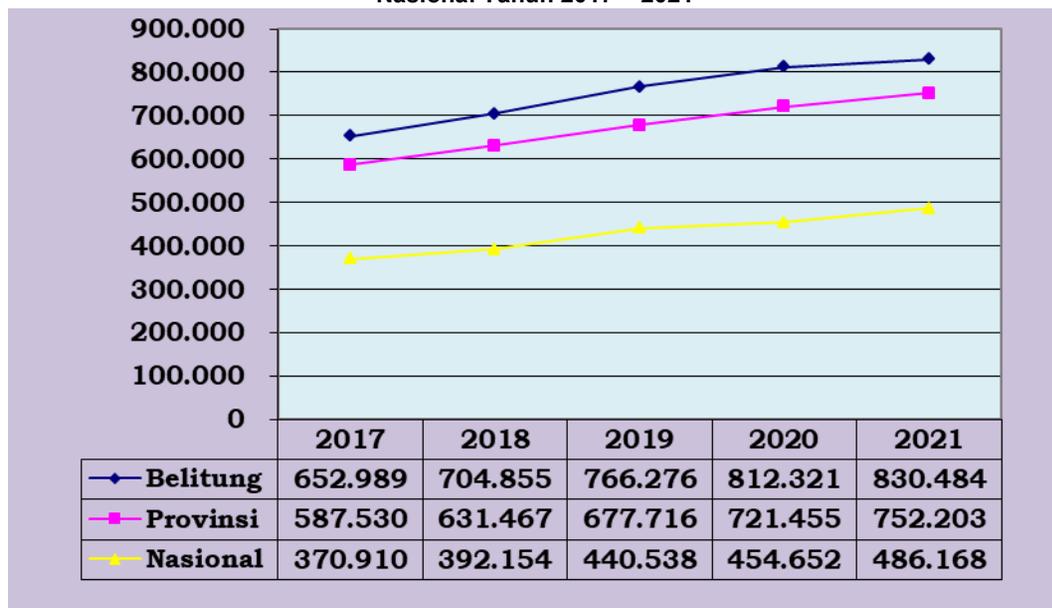
Tingginya tingkat kemiskinan ini dipicu oleh tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Belitung. selama kurun waktu 2010 – 2021. Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kecenderungan meningkat dan lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Provinsi, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.15
Garis Kemiskinan (GK) Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan), 2010 – 2021

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	280 089	315 548	336 790	360 715	375 653	385 899	427 684	475 024	497 164	541.925	577.093	595.429
Belitung	367 883	416 041	463 675	523 846	563 475	580 050	610 072	652 989	704 855	766.276	812.321	830.484
Bangka Barat	271 761	305 500	331 971	366 365	388 493	399 401	440 850	497 567	520 642	549.496	589.894	599.887
Bangka Tengah	342 841	387 786	429 177	479 479	512 240	528 720	586 445	653 308	680 907	693.842	721.331	735.479
Bangka Selatan	274 125	308 328	328 497	350 691	364 504	374 778	415 359	462 716	483 823	523.155	561.617	581.970
Belitung Timur	336 847	380 813	420 973	464 590	492 652	504 668	528 572	563 309	622 396	684.277	725.395	798.017
Pangkalpinang	334 337	378 275	423 848	475 480	509 246	527 668	604 011	654 044	700 949	748.487	795.653	808.839
Kep. Bangka Belitung	315 556	323 638	382 412	427 081	469 814	488 701	534 229	587 530	631 467	677.716	721.455	752.203



Grafik 2.3. :Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jumlah minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Belitung untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan sangat tinggi sehingga penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung juga cukup memprihatinkan jika dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*), yang sedikit menurun dari 0,74 pada tahun 2020 menjadi 0,51 pada tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung terhadap Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Belitung	1,14	0,59	0,69	0,74	0,51
Bangka	0,42	0,66	0,65	0,47	0,39
Bangka Barat	0,16	0,34	0,31	0,23	0,25
Bangka Tengah	0,57	0,42	0,52	0,72	0,63
Bangka Selatan	0,19	0,49	0,48	0,53	0,35
Belitung Timur	0,79	1,01	0,81	0,70	1,15
Pangkal Pinang	0,57	0,49	0,59	0,59	0,57
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	0,49	0,68	0,51	0,60	0,61

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Maka tabel di atas menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Belitung di tahun 2021 menunjukkan kecenderungan semakin mendekati garis kemiskinan.

Demikian pula bila dilihat dari sisi Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*), di mana Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung merupakan tertinggi ketiga setelah Kabupaten Belitung Timur



dan Kabupaten Bangka. Ini terlihat dari perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung selama 6 (enam) tahun terakhir, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung terhadap
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Belitung	0,23	0,08	0,11	0,16	0,06
Bangka	0,06	0,17	0,14	0,09	0,06
Bangka Barat	0,01	0,05	0,07	0,04	0,04
Bangka Tengah	0,1	0,06	0,1	0,14	0,11
Bangka Selatan	0,02	0,08	0,08	0,13	0,06
Belitung Timur	0,18	0,19	0,16	0,19	0,29
Pangkal Pinang	0,11	0,11	0,1	0,12	0,13
Prov. Kep. Bangka Belitung	0,08	0,14	0,1	0,13	0,11

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Selanjutnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada poin ini Babel berada pada urutan pertama se-Indonesia. Artinya, jumlah pengeluaran masyarakat miskin semakin dekat dengan pengeluaran rata-rata masyarakat miskin. Tahun 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belitung mengalami penurunan sebesar 0,10 point dari 0,16 pada tahun 2020 menjadi 0,06 ditahun 2021. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung fluktuatif, tertinggi sebesar 0,23 pada tahun 2017.

Melihat kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung semakin dalam tahun 2021. Sejumlah faktor menjadi penyebab tingkat kemiskinan semakin dalam dan parah. Salah satunya adalah tingkat inflasi.

Tingkat inflasi tidak hanya mempengaruhi Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan, tetapi juga menjadi faktor penentu tinggi tidaknya Garis Kemiskinan. Tingkat inflasi Kabupaten Belitung, tolok ukur tingkat inflasi Kota Tanjungpandan, selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Tingkat Inflasi Bulanan dan Tahunan Kota Tanjungpandan Tahun 2020-2021

Bulan dan Tahunan	Inflasi Bulanan dan Tahunan (Persen) Tanjungpandan 2020	Inflasi Bulanan dan Tahunan (Persen) Tanjungpandan 2021
Januari	0,46	1,03
Februari	-1,20	0,28
Maret	-0,13	-0,18
April	-0,19	-0,02
Mei	1,20	0,52
Juni	0,27	0,36
Juli	0,26	0,22
Agustus	-0,67	0,28
September	0,20	0,38
Oktober	0,45	-0,44
November	0,03	0,38



Desember	1,49	1,14
Tahunan	2,69	1,31

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021
ADHK 2018 = 100

Pada Desember 2021 Kota Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 1,14 persen dengan IHK 110,92. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,86 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,20 persen; kelompok transportasi sebesar 0,46 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,37 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,32 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 4,01 persen. Kelompok energi pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 1,29 dengan IHK sebesar 102,55. Sementara itu, komponen bahan makanan pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 3,13 persen dengan IHK 118,39.

Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2020 inflasi tertinggi terjadi bulan Desember, yakni sebesar 1.49 persen. Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,64. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya enam indeks kelompok pengeluaran, yaitu; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,71 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,42 persen; kelompok transportasi sebesar 1,08 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,35 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,31 persen. Sebagian kelompok pengeluaran lainnya mengalami deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen. Sementara itu, komponen bahan makanan Desember 2020 mengalami inflasi sebesar 4,28 persen dengan IHK 108,55. Sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Februari atau sebesar -1.20 atau terjadi deflasi.

Sementara tingkat inflasi tahun 2020 sebesar 2,69 persen. Jika dibandingkan dengan Kota Pangkalpinang sebesar 0,52 persen, tingkat inflasi Kabupaten masih tinggi, bahkan lebih tinggi dari tingkat inflasi Provinsi yang sebesar 0,52 persen, serta lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 1,68 persen. Ini menggambarkan bahwa biaya hidup di Kabupaten Belitung sangat tinggi, sehingga pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum juga tinggi.

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung tahun 2020 memprihatinkan. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari tahun sebelumnya, tapi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata tingkat kemampuan daya beli masyarakat miskin Kabupaten Belitung makin menjauh dari garis kemiskinan. Sementara indeks keparahan menandakan tingkat kesenjangan kemampuan daya beli antar masyarakat miskin Kabupaten Belitung makin melebar. Walaupun daerah tidak dapat mengintervensi tingkat inflasi daerah secara langsung, namun upaya-upaya untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan dapat dilakukan dengan langkah-langkah strategis dan program-program pengentasan kemiskinan sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPJMD. Hal ini juga diperparah dengan adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia yang berimbas terhadap menurunnya produktivitas di masyarakat.



Dalam RPJMD Kabupten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat”, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Sasaran 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan
	Sasaran 3 Meningkatnya daya beli masyarakat	Perluasan kesempatan kerja Mengurangi beban pengeluaran
	Sasaran 4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat

SASARAN 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Angka Harapan Hidup dengan target “71,22”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2021.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

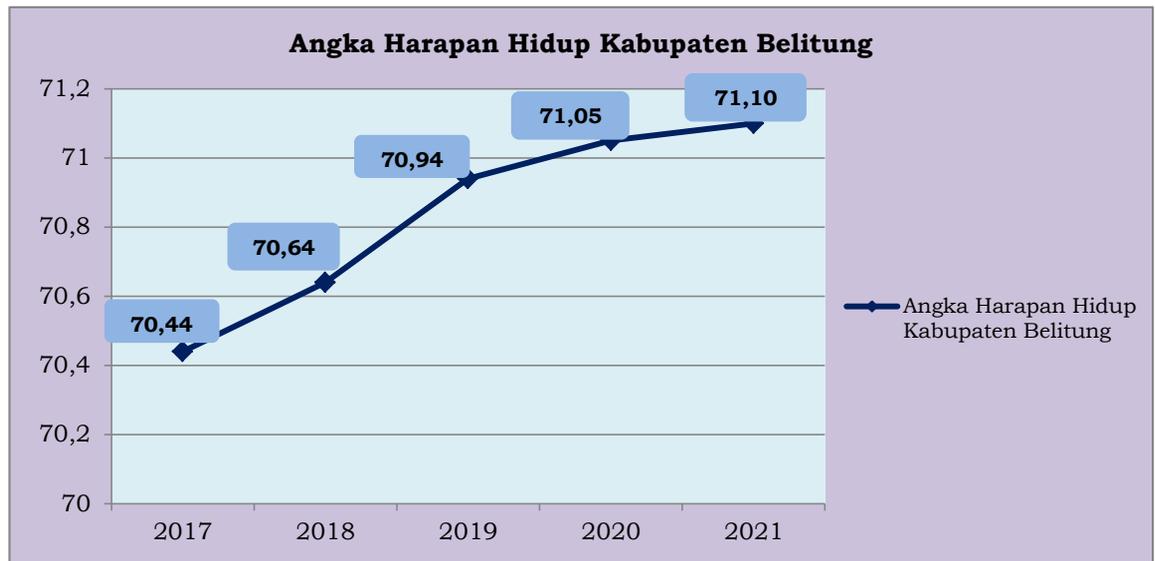
No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2021 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,64	71,22	71,10	99,83	SB	71,47

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2021 dari target 71,22 tahun, terealisasi umur harapan hidup penduduk Belitung mencapai 71,10 tahun atau 99,83% dari target kinerja. Realisasi tahun 2021 masih menggunakan data AHH Tahun 2021 yang dikeluarkan BPS.

Trend Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada grafik perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2016-2021



Grafik 2.4. : Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2021



Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan AHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan AHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Peningkatan AHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan, jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Belitung. Setiap Kecamatan telah memiliki Puskesmas dengan jumlah Puskesmas 9 unit pada 5 Kecamatan, dengan jumlah puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah.

Peningkatan angka harapan hidup saat lahir kabupaten tentunya tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap urusan kesehatan dengan berbagai program dan pelayanan serta penyuluhan kepada masyarakat, kondisi tersebut didukung dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan kesehatan yang baik.

Tabel 2.21
Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan
Kabupaten Belitung Tahun 2021

NO	KINERJA BIDANG KESEHATAN	2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	83,47%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	91,01%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)	93,04%
4	Pelayanan kesehatan balita (0-59 bln)	79,79%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (kls 1-9)	100%



6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 tahun)	76,29%
7	Pelayanan kesehatan pada lanjut usia (usia 60 tahun keatas)	85,53%
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi	53,53%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	128,31%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	97,68%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga TB	113,54%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	102,57%

Dari 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tahun 2021 ada 4 indikator yang mencapai 100% yaitu :

- 1.Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (100%)
- 2.Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus (128,31%)
- 3.Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis (113,54%)
- 4.Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (102,57%)

Pelayanan Kesehatan Dasar untuk 8 indikator belum mencapai 100% antara lain: Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) sebesar (97,68%) , pelayanan kesehatan bayi baru lahir (93,04%) dan Pelayanan kesehatan ibu hamil (83,46%), pelayanan kesehatan ibu bersalin (91,01%), Pelayanan Kesehatan Usia lanjut (85,52%), Yang lainnya masih kurang dari target. Adapun indikator SPM yang masih rendah yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif (79,29%), pelayanan kesehatan hipertensi (53,53)%, pelayanan kesehatan balita (79,79%).

Permasalahan tidak tercapainya Indikator SPM tersebut adalah :

a.SPM pelayanan kesehatan Ibu hamil :

1. Karena adanya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Masih ada ibu hamil pendatang dari luar wilayah Kabupaten Belitung yang tidak memeriksakan kesehatannya dan tidak memiliki kelengkapan pencatatan riwayat kesehatan selama kehamilannya.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan keluarga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil ke fasilitas kesehatan.

b.SPM Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin:

1. Adanya persalinan yang terjadi tanpa ditolong oleh tenaga kesehatan (melahirkan seorang diri dirumah).
2. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non nakes (dukun beranak) di wilayah Kecamatan Badau dan Membalong walaupun sudah bermitra.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melahirkan di Fasyankes dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih.
4. Masih kurangnya informasi tentang pentingnya persalinan di Fasyankes .

c.SPM Pelayanan Kesehatan Balita:

1. Pemantauan tumbuh kembang balita selama pandemic covid pada tahun 2020 di Posyandu,TK/PAUD dan fasilitas kesehatan tidak bisa dilaksanakan sesuai standar di karenakan SK bupati no 443.1/266/II2020 tanggal 13 Maret tentang instruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung dan surat dari Kepala Dinas Kesehatan nomor 440/525/Dinkes tanggal 19 Maret 2020 perihal himbauan (penutupan sementara pelaksanaan posyandu) serta surat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 440/1004/Dinkes tanggal 30 Maret tentang Himbauan dalam situasi pandemic covid-19.



2. Pemantauan kesehatan balita melalui sweeping terkendala dengan jumlah tenaga baik di Puskesmas maupun di desa/kelurahan, dikarenakan Sumber daya manusia (SDM) mempunyai tugas rangkap dalam pelaksanaan vaksinasi Covid -19 serta sebagai Satgas Covid-19.

d.SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut :

1. Pemantauan kesehatan pada usia lanjut selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di Posyandu lansia dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai SK Bupati no 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang instruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung.
2. Pemantauan kesehatan usia lanjut melalui sweeping tidak maksimal dikarenakan kurangnya jumlah tenaga di Puskesmas maupun di desa/kelurahan.

e.SPM Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif dan Hipertensi

1. Pemantauan kesehatan pada usia produktif selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di Posbindu dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai SK Bupati no 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang instruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung.
2. Usia produktif yang datang ke Posbindu hanya usia diatas 40 tahun.
3. Tidak semua Desa terutama di dusun – dusun mempunyai Posbindu.
4. Jarak tempuh masyarakat untuk ke Posbindu masih relatif jauh.
5. Peran serta masyarakat dan keluarga untuk berkunjung ke Posbindu masih kurang.

f. SPM Pelayanan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat :

Masih rendahnya dukungan keluarga penderita jiwa. Hal tersebut diatas menjadi kendala sehingga tidak mencapai atau memenuhi standar SPM yang telah ditetapkan. Disamping memang ada alat dan bahan serta dana untuk kelengkapan yang terbatas. Selain itu hal – hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ini adalah masih belum maksimalnya kerjasama dari lintas program maupun lintas sektor lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut strategi/upaya pemecahan antara lain:

- 1.Memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
- 2.Melakukan kerjasama Lintas Sektor/ Lintas program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- 3.Meningkatkan Komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Promosi Kesehatan.
- 4.Meningkatkan Kapasitas petugas sehingga capaian SPM menjadi lebih berkualitas.

Strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat. Dan Arah kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat adalah dengan Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi dan meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu.

Adanya arah kebijakan yang mendukung pencapaian strategi Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat yaitu: Meningkatkan sistem pelayanan terintegrasi. Pada Tahun 2021





melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung telah membangun gedung PSC 119

☞ Kebijakan Pengurangan Kawasan Kumuh

Pencapaian kinerja sasaran untuk kebijakan pengurangan kawasan kumuh diukur dengan menggunakan indikator persentase luasan permukiman kumuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas sisa permukiman kumuh tahun berjalan}}{\text{Luas permukiman kumuh tahun awal}}$$

Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan intervensi kegiatan KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) pada kawasan kumuh yang pendanaannya bersumber dari DIPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pencapaian pengurangan kumuh sebesar **23,98 Ha**. Dengan capaian ini sisa luas total kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Belitung sebesar **38,03 Ha** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.22
Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Belitung, 2021

No	Kecamatan	Kelurahan*	Luas Kumuh (Ha)**	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2021 (Ha)***	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Tanjung Pandan	Pangkal Lalang	26,15	13,60	12,55
2		Lesung Batang	18,57	10,38	8,19
3		Kampung Damai	4,59	0	4,59
4		Parit	12,7	0	12,7
5		Air Saga	0	0	0
Jumlah Luasan (Ha)			62,01	23,98	38,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021

Sosialisasi yang diadakan sejak tahun 2018 dalam program KOTAKU dan dukungan dari semua pihak serta fasilitasi Kemekumham dalam penyusunan dokumen pendukung untuk Raperbub Pencegahan kawasan kumuh menjadi faktor pendorong capaian kinerja. Sementara itu koordinasi dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan stakeholder terkait yang dilakukan secara virtual dapat dilihat sebagai faktor pendorong sekaligus faktor penghambat terlaksananya anggaran terkait sub kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh. Jika dilihat dari sisi pendorong, maka kemajuan teknologi menjadi strategi dalam efisiensi anggaran sehingga kegiatan-kegiatan pertemuan dapat dilaksanakan melalui virtual/online. Sementara itu pertemuan secara virtual juga dapat dipandang sebagai penghambat capaian kinerja karena pelaku pertemuan kurang dapat fokus seperti dalam pertemuan secara offline sehingga output rapat/pertemuan kurang efektif.



Foto: Kegiatan penataan Kawasan kumuh oleh KSM di kelurahan Pangkal Lalang

☞ Kebijakan Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman

Pelaksanaan arah kebijakan ini melalui pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang sehat dan aman.



Rasio permukiman layak huni dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas permukiman yang layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100$$

$$\frac{29.090,81}{29.170} \times 100$$

Realisasi rasio permukiman layak huni adalah sebesar **99,73** dengan perhitungan luas permukiman yang layak huni sebesar **29.090,81 Ha** dibagi dengan Luas wilayah permukiman yaitu **29.170 Ha** dikali seratus.

Indikator rasio permukiman layak huni didukung dengan pelaksanaan 3 (empat) Program utama antara lain Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan program Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU).

☞ Kebijakan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi;

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan “Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi”, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu: terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkualitas dan meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah.

Terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan indikator kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia. *Food and Agriculture Organization–Regional Office for Asia and the Pasific* (FAO-RAPA) mendefinisikan PPH sebagai komposisi dari kelompok-kelompok pangan utama yang disiapkan untuk dikonsumsi sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori dan akan memberikan zat gizi dalam jumlah yang mencukupi.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2021 mengalami penurunan dari segi keberagaman akan tetapi secara konsumsi terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020, dimana hal ini terjadi karena kurang beragamnya pola konsumsi pangan pada masyarakat di Kabupaten Belitung. Masyarakat masih tinggi dalam mengkonsumsi bahan pokok (beras) 1.181 Kkal/Kap/hari dibandingkan konsumsi energi standar sebesar 1.075 Kkal/Kap/hari sedangkan untuk konsumsi bahan pangan non beras masih sangat kurang. Selain konsumsi beras yang tinggi masyarakat Belitung untuk tingkat konsumsi pangan hewani juga menunjukkan angka yang tinggi sebesar 342 Kkal/Kap/hari dibandingkan dengan angka konsumsi energi standar 258 Kkal/Kap/hari serta konsumsi minyak dan lemak juga lebih dari konsumsi ideal (215 kkal/Kap/hari) sedangkan tingkat konsumsinya berada pada angka 280 Kkal/Kap/hari. Terkait dengan hal tersebut akan dilakukan upaya yang lebih intensif lagi untuk mengatasi agar konsumsi pangan menjadi beragam yaitu dengan dilakukan pembinaan terhadap masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan juga akan dilakukan sosialisasi pada anak usia dini terkait pola konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Indikator Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas, 2021

INDIKATOR SASARAN	REALISASI		CAPAIAN	
	2020	2021	2020	2021
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,70 %	78,90 %	93,11 %	89,66 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2020, persentase capaian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan standar nasional, realisasi kinerja indikator PPH jauh di bawah standar, di



mana standar nasional untuk PPH adalah 100. Dimana hal ini terjadi karena kurang beragamnya pola konsumsi pangan pada masyarakat di Kabupaten Belitung yang ditunjukkan dengan angka konsumsi energi kelompok pangan umbi-umbian; kacang-kacangan, sayur dan buah masih dibawah angka konsumsi energi standar dan untuk kelompok pangan padi-padian; dan protein hewani diatas angka konsumsi energi standar.

☞ Kebijakan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolah raga;

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Partisipasi dalam olahraga juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk berkonsentrasi.



Kesadaran masyarakat



Foto: Gedung Olah Raga Tanjungpandan untuk berolahraga memberikan

kontribusi dalam masyarakat yang kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.



pembangunan individu dan cerdas, sehat, terampil, tangguh,

Dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan meningkatkan masyarakat dalam berolah raga, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung melaksanakan Penyelenggaraan event olahraga prestasi dan olahraga rekreasi yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepramukaan diukur dengan event olahraga prestasi dan olahraga rekreasi yang diselenggarakan pada tahun 2021 sebanyak 13 event. Nilai penyelenggaraan event olahraga prestasi dan olahraga rekreasi yang terealisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2021

sebesar 39 Prestasi (3 event) di peroleh dari data realisasi kegiatan tahun 2021 yaitu :

1. Kesegaran jasmani Masyarakat.
Golf Championship Series.
Belitung Geopark Run.

Foto: Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana Gedung Olah Raga

2. Belitung
3. Lomba



perilaku Kabupaten



bagi setiap yang setinggi-tingginya sehingga masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan.

Dalam upaya mendorong dan meningkatkan hidup bersih dan sehat masyarakat, Pemerintah Belitung terus membangun kesadaran, meningkatkan kemampuan dan memotivasi kemauan hidup sehat penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan



Strategi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk merupakan komponen terpenting dalam membangun peradaban, namun terdapat hal positif dan negatif. Jumlah penduduk yang banyak menjadi positif bila dikaitkan dengan faktor produksi, karena penduduk yang banyak berarti modal tenaga kerja juga melimpah. Apalagi bila struktur penduduk lebih banyak didominasi oleh usia produktif. Suatu daerah yang mempunyai struktur penduduk seperti ini berarti daerah tersebut memiliki tenaga kerja yang melimpah. Inilah yang disebut bonus demografi. Bila daerah dapat memanfaatkan bonus demografi ini maka akan majulah daerah tersebut, sebaliknya bila tidak bisa memanfaatkannya maka akan menjadiao bumerang bagi daerah tersebut. Masalah-masalah sosial akan muncul dari penduduk usia produktif ini.

Mengacu pada hal di atas maka kuantitas penduduk harus pula diimbangi dengan kualitas penduduk. Bila tidak mampu mengimbangnya kuantitas penduduk dengankualitasnya, maka salah satu jalan adalah membatasi laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk dapat dikendalikan dan kebijakan pembangunan dapat direncanakan dengan optimal mengacu pada kebutuhan penduduk yang ada dan terkendali.

Untuk melaksanakan strategi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu:

Menurunkan jumlah perkawinan usia muda

Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2021 memiliki tujuan Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan capaian kinerja laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 sebesar 1,26% dan total fertility rate sebesar 2,42%. Berikut target dan capaian kinerja Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,70	1,26	214,29%
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,23	2,42	92,15%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial.

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} - 1$$

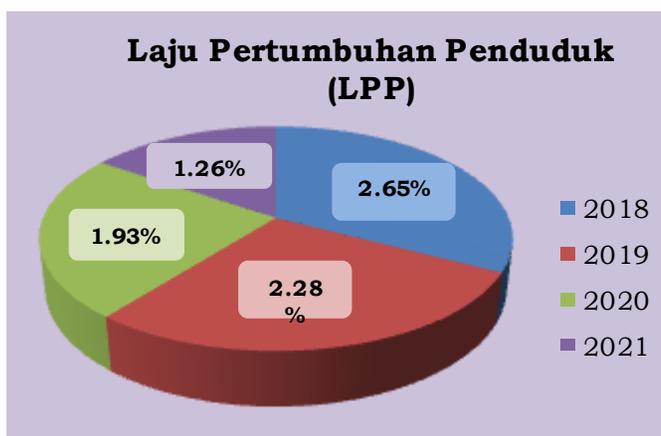
Metode geometri

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk tahun t

P_0 : Jumlah penduduk tahun awal

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung

namun tetap harus ada upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program pendidikan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan mengupayakan peningkatan komitmen bersama terhadap program keluarga berencana antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat di semua tingkatan, memperkuat advokasi dan KIE program KB melalui kelompok-kelompok kegiatan (Tribina, PIK Remaja, dan UPPKS) guna mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber-KB.

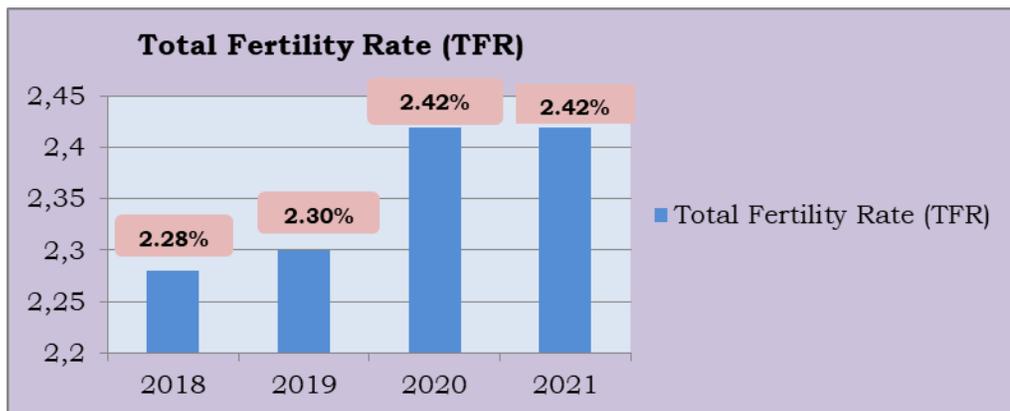
Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah: Masih rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelompok kegiatan baik untuk menjadi kader pengelola maupun sebagai anggota kelompok kegiatan dan masih adanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menolak program Keluarga Berencana dikarenakan bertolak belakang dengan kepercayaan yang dianut.

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mencapai 1,26%. Atau terjadi penambahan penduduk pada tahun 2021 sebesar 1,26%, namun kinerja ini meningkat 0,67% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 1,93%.

Banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya laju pertumbuhan penduduk seperti faktor migrasi dan tingkat kelahiran,



Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Belitung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kategori Pendataan Keluarga dengan Pencapaian 100% Target KK terdata Tepat Waktu



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Untuk menghitung **Total Fertility Rate (TFR)** digunakan rumusan sebagai berikut:

$$TFR = \frac{JK_{15-49}}{JP_{15-49}} \times 1000$$

Keterangan:

- TFR : Total Fertility Rate (TFR)
- JK15-49 : Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu
- JP15-49 : Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama

Total Fertility Rate (TFR) digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Pada tahun 2021 adalah 2,42%. Artinya bahwa angka Total Fertility (TFR) di Kabupaten Belitung pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020. TFR sebesar 2,42 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

Permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian target ini adalah Peran atau fungsi petugas/penyuluh lapangan KB (PLKB) sebagai ujung tombak dalam mengkampanyekan dan mengajak pasangan usia subur untuk ber KB belum maksimal dikarenakan rasio jumlah petugas/penyuluh KB (PLKB) tidak ideal dengan wilayah binaan, serta pernikahan dibawah umur yang masih terjadi di masyarakat.

Diharapkan solusi yang tepat dapat dilakukan perekrutan dan optimalisasi tenaga penyuluh lapangan KB untuk meningkatkan promosi dan pelayanan program KB kepada masyarakat, melakukan edukasi kepada remaja dan orang tua melalui kegiatan PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja untuk mencegah pernikahan diusia muda, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi kepada anak remaja melalui program GenRe dan Pendewasaan Usia Perkawinan.



Gambar : Kursus Catin (calon Pengantin) di Balai Penyuluhan KB Tg.pandan



Gambar : Peningkatan Sarana Prasarana Balai Penyuluh KB



Kebijakan Meningkatkan program Keluarga Berencana. Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam UU NO 10 tahun 1992, yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Wujud dari program Keluarga Berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda/mencegah kehamilan. Program keluarga berencana tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga. Tak hanya ibu, anak dan suami juga bisa merasakan efek dari program ini secara langsung.



Piagam penghargaan diberikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung kategori Terbaik II Kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung Banggakencana Tahun 2021.

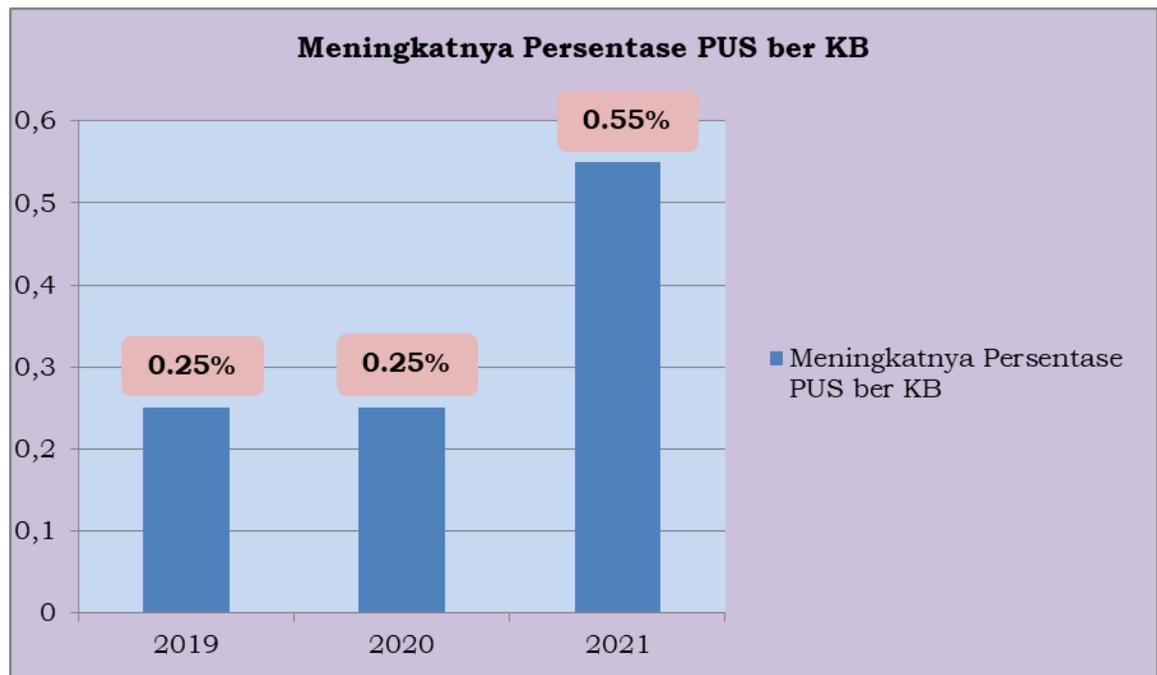
Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan yaitu: Meningkatnya Persentase PUS ber KB dan Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP.

Tabel 2.25
Capaian indikator kinerja meningkatkan program Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Persentase PUS ber KB	%	0,25	0,55	99,78
2	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	%	12,37	15,08	113,74

Sumber : Dinas Pengendalian Pendudu dan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

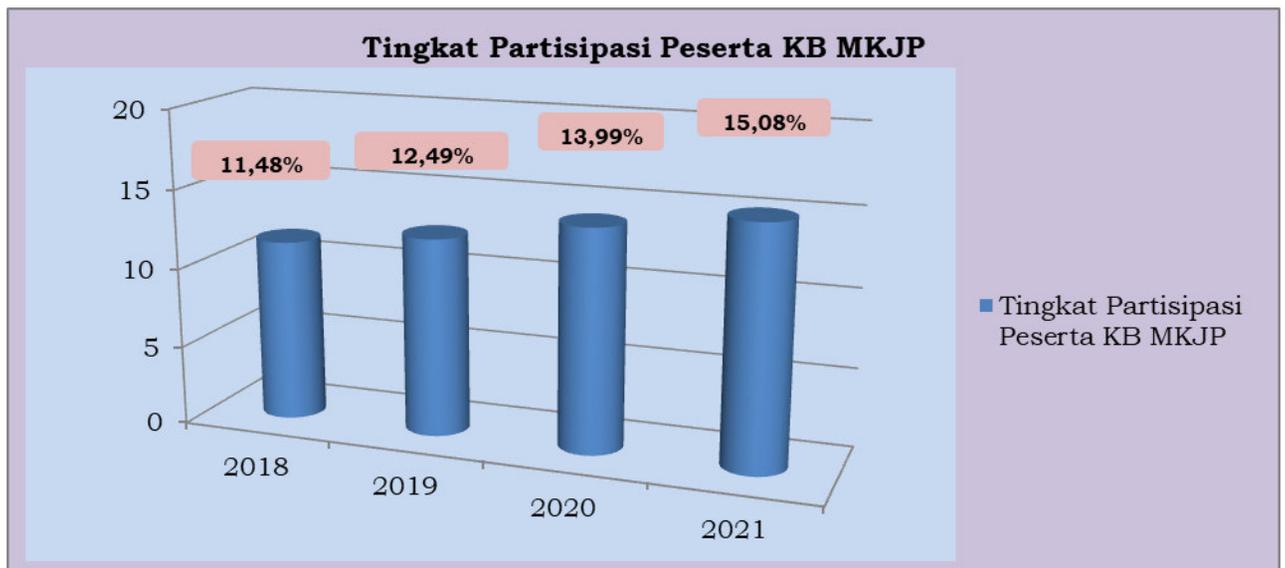
Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri, yang istri berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. Untuk mengukur Persentase PUS ber KB digunakan rumusan: $((\text{Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB tahun berkenaan} - \text{Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB tahun awal}) / \text{Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB tahun awal}) \times 100\%$.



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021

Indikator Meningkatnya Persentase PUS ber KB pada tahun 2021 adalah 0,55%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persentase PUS ber KB pada tahun 2021 mengalami peningkatan pencapaian sebesar 0,30% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 kondisi Persentase PUS ber KB yaitu 0,25%. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja ini antara lain mengoptimalkan promosi KB di masyarakat melalui berbagai media promosi baik elektronik dan media sosial, memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk mengetahui target akseptor KB agar KIE tepat sasaran, meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program KB. Namun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian antara lain masih adanya stigma di masyarakat mengenai keinginan mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang berbeda dan adanya ketakutan terhadap rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai penggunaan alat kontrasepsi jenis tertentu.

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang disingkat MKJP adalah metode kontrasepsi yang dapat memberikan perlindungan dari resiko kehamilan untuk jangka waktu sepuluh tahun yang terdiri dari Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), Alat Konterasepsi dalam Rahim (AKDR) atau IUD, dan Alat Kontrasepsi bawah Kulit (AKBK) atau *Implant*. Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dihitung dengan rumusan sebagai berikut: Jumlah peserta KB MKJP / Jumlah Peserta KB x 100%.



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021

Indikator Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun 2021 adalah 15,08%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi peserta KB MKJP pada tahun 2021 mengalami peningkatan pencapaian sebesar 1,09% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yaitu 13,99%. Pencapaian tahun ini tidak terlepas dari upaya yang dilaksanakan dengan melakukan pemetaan sasaran KIE KB MKJP dengan memanfaatkan hasil pendataan keluarga, kemudian juga meningkatkan partisipasi pria dalam ber KB dan kesehatan reproduksi. Dukungan dana baik APBD, dan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Reguler Sub Bidang KB (BOKB) untuk penggerakan dan pelayanan KB. Adapun dukungan dananya berupa Jasa Medis (Tenaga Pelayanan/ Bidan/ Dokter), transport peserta dan tenaga KIE bagi Kader sehingga memberikan semangat kepada kader dalam pelayanan KB MKJP.

Beberapa faktor penghambat juga terjadi antara lain masih kurangnya tenaga provider untuk pelayanan MOP dan harus didatangkan dokter dari Pangkal Pinang, hal lainnya adalah pelayanan KB MOW dengan target 80 akseptor yang dibiayai dari dana BOKB tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi masih berlangsung dan RSUD dr H. Marsidi Judono masih focus untuk pelayanan pasien covid19.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan



Gambar: Pelaksanaan Evaluasi
Kampung KB 2021

Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota.

Kebijakan Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang

beragam. Terwujudnya Ketahanan pangan daerah yang berkualitas ditentukan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Hal ini dikarenakan kurang beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat yang berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa konsumsi pangan hewani melebihi konsumsi energi standar sedangkan untuk konsumsi pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih dibawah konsumsi energi standar. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyusun pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung telah berusaha untuk mencapai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 78,90 dari target sebesar 88,00 dengan tingkat capaian sebesar 89,66%. Pencapaian realisasi tersebut didukung dengan adanya pencapaian 1) Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi sebesar 97,5% dari target 95,7%; 2) Persentase (%) penurunan status desa/kelurahan rawan pangan sebesar 14,29% dari target 12,24%; 3) Persentase (%) tingkat keamanan pangan sebesar 90,91% dari target 89,29% dan juga target konsumsi pangan perkapita/tahun sebesar 765.040 kkal/kap/th dari target 750.805 kkal/kap/th yang ditetapkan pada indikator kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pencapaian realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga didukung dengan adanya Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dengan pencapaian cadangan pangan sebesar 15 ton sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selain hal tersebut realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) didukung juga dengan terlaksananya 1) kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja berupa dokumen ketahanan pangan; 2) penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dengan indikator kinerja berupa peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); 3) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja berupa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) didukung oleh adanya beberapa pencapaian realisasi indikator kinerja Program/Kegiatan yang ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 2.26
Capaian Indikator Kinerja Program pendukung Skor
Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
I	Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	%	95,7	97,5	102%
1	Dokumen Ketahanan Pangan	Dokumen	1	1	100%
2	Ketersediaan Energi Padi-padian (kkal/kap/hr)	Kkal/kap/hr	1.200	1.202	100%
3	Cadangan Pangan	Ton	15	15	100%
4	Persentase (%) Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	56,64	56,64	100%
5	Konsumsi Pangan perkapita/tahun	Kkal/kap/th	750.805	765.040	102%
6	Tercapainya tingkat kecukupan energi perkapita/hr	Kkal/kap/th	2.057	2.096	102%
II	Persentase (%) penurunan status desa/kelurahan rawan pangan	%	12,24	14,29	117%
1	Peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) SERTA Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jenis	2	2	100%
2	Informasi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	%	100	100	100%
III	Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan	%	89,29	90,91	102%
1	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	Kali	16	16	100%
2	Persentase (%) Tingkat keamanan Pangan	%	89,29	90,91	102%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Capaian indikator kinerja Program terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Belitung untuk urusan Pangan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi Tahun 2021 sebesar 97,5% dari target yang ditetapkan sebesar 95,7%, hal ini didukung dengan adanya tingkat konsumsi pangan masyarakat yang sudah cukup tinggi secara kuantitas yang ditunjukkan dengan nilai tingkat kecukupan energi perkapita/hari sebesar 2.096 kkal/kap/hr;



2. Persentase (%) penurunan status desa/kelurahan rawan pangan Tahun 2021 sebesar 14,29% dari target 12,24%, hal ini didukung dengan adanya kegiatan pertanian keluarga dengan sumber dana APBN Kementerian Pertanian RI yang bertujuan untuk menurunkan status desa rawan pangan di daerah rawan pangan di kecamatan Sijuk dan Badau. Kegiatan Pertanian Keluarga berlokasi di poktan Sumber Rezeki Abadi desa Air Seru dan poktan Tunas Harapan desa Air Batu Buding bertujuan untuk menurunkan status desa rawan pangan yang ditunjukkan dengan adanya penurunan status desa rawan pangan untuk desa Kacang Butor yang awalnya status 2 menjadi 3 dan desa Batu Itam dari status 3 menjadi 4.
3. Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan Tahun 2021 sesuai target 100% dan pada Tahun 2021 sebesar 90,91 dari target sebesar 82,29%. Target pada Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan target Tahun 2020 dikarenakan jumlah jenis uji/parameter yang diuji terhadap bahan pangan bertambah, akan tetapi dari segi pencapaian realisasi telah melebihi target yang ditetapkan, hal ini didukung dengan adanya kesadaran petani dalam penerapan pertanian semi organik dan mengurangi penggunaan bahan kimia serta penerapan budidaya pertanian sesuai dengan petunjuk teknis. Selain hal tersebut pencapaian persentase (%) tingkat keamanan pangan didukung oleh kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah.

Tabel 2.27
Realisasi Keuangan Program penunjang
Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	128.832.903.070	102,215,401,061	79.34
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.956.409.782	3,443,625,675	57.81
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	207.573.000	169,225,600	81.53
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	102.573.000	100,893,000	98.36
5.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	615.400.720	569,626,475	92.56
6.	Pengawasan Keamanan Pangan	34.293.600	32,744,518	95.48
7.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.586.729.450	5,636,110,719	85.57
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.703.700.000	1,703,200,000	99.97
9.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	799.320.000	790,443,000	98.89
10.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.619.860.455	1,561,356,975	96.39
11.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.166.601.600	918,205,500	78.71



Sehingga anggaran untuk sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan rata-rata capaian 87,69% dengan persentase realisasi anggaran 79,35% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 20,65%.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Belitung dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung majunya pendidikan suatu bangsa. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia.

Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.

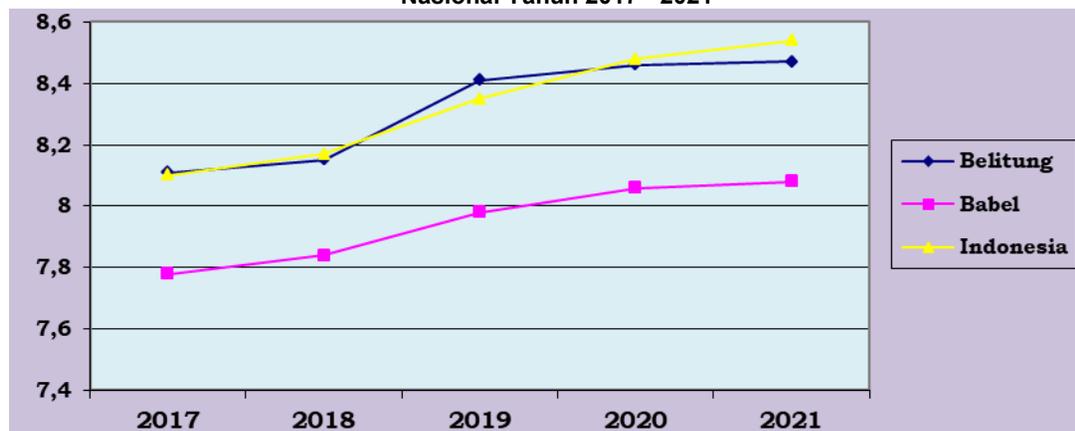
Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” diukur melalui Indikator Sasaran Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Target yang ditetapkan adalah 8,46 tahun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	TARGET	2021 REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD 2023
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,11	8,46	8,47	100,12	SB	8,56

Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan penghitungan dari BPS, realisasi RLS Kabupaten Belitung tahun 2021 sebesar 8,47 tahun. Realisasi ini melampaui target sebesar 0,12%. Berikut disajikan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung dan Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai 2021.

Grafik 3.7. : Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung terhadap Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2017 - 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021



Dari grafik terlihat bahwa selama kurun waktu 2017 – 2020, capaian RLS Kabupaten Belitung sudah di atas provinsi Bangka Belitung. Namun berbanding terbalik dengan capaian RLS nasional, RLS Kabupaten Belitung lebih rendah. Pada tahun 2021, capaian RLS Kabupaten Belitung 8,47 tahun, melampaui RLS Provinsi Kep Babel yang sebesar 8,08 tahun, namun masih dibawah capaian nasional yang sebesar 8,54 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak .

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencapai capaian indikator kinerja “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” dilakukan melalui strategi “Meningkatkan Akses Pendidikan” dengan 7 (tujuh) arah kebijakan, yaitu:

- 1.Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah;
- 2.Meningkatkan akreditasi sekolah (SD dan SMP);
- 3.Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal;
- 4.Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak;
- 5.Meningkatkan kualitas SDM pendidikan;
- 6.Meningkatkan pemerataan sebaran guru; dan
- 7.Meningkatkan minat baca masyarakat.

Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu; Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APTs).

❖ Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu tolok ukur partisipasi penduduk ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Sehingga seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan. APK juga menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Berikut angka partisipasi kasar (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung Tahun 2021:



Pada tahun 2021, APK Kabupaten Belitung pada beberapa jenjang pendidikan turun dari tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan APK pada jenjang SD tidak berarti menunjukkan kinerja yang rendah namun sebaliknya penurunan tersebut menunjukkan bahwa pada jenjang SD lebih banyak dihuni anak usia 7-12 tahun, hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017.

Selain itu, penurunan terjadi dikarenakan menurunnya jumlah siswa mengulang di sekolah SD, adanya pemberlakuan regulasi penerapan Usia Minimal Masuk sekolah pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap

tahun pelajaran. Selain itu penurunan APK jenjang SMP, juga disebabkan oleh tidak semua ulusan SD melanjutkan ke jenjang SMP dan sebagian lulusan SD melanjutkan pendidikan di luar wilayah Kabupaten Belitung yang disebabkan ikut orang tua, pindah keluarga atau sebab lain.

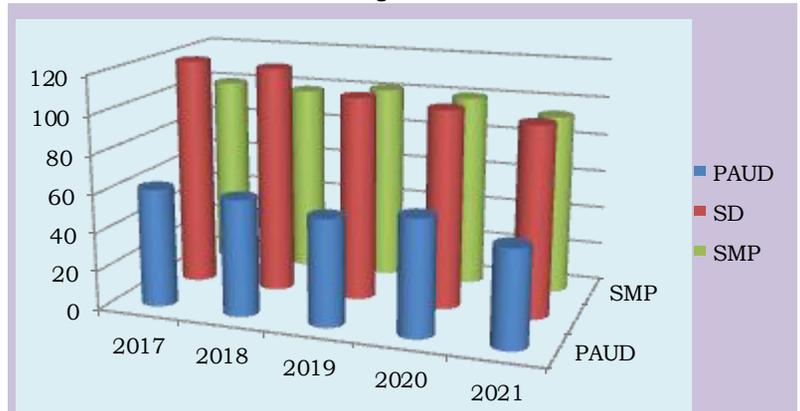
❖ Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

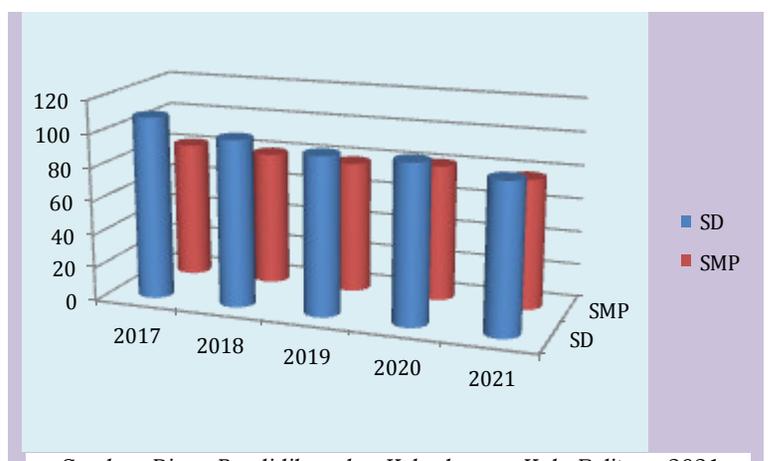
Pada tahun 2021, APM jenjang SD dan SMP mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD dan SMP) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia sekolah (Usia 7 - 12 tahun jenjang SD dan Usia 13 - 15 tahun jenjang SMP).

Grafik 3.8. : Perkembangan APK Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung 2021

Grafik 3.9. : Perkembangan APM Tahun 2017-2021



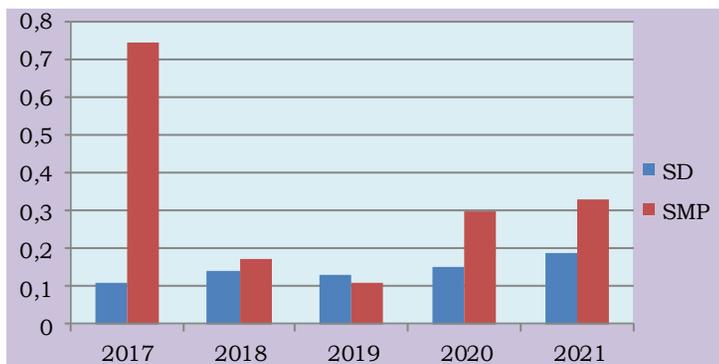
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung 2021

❖ Angka Putus Sekolah (APTs)

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Di Kabupaten Belitung, APTs mengalami penurunan terutama di tingkat SD/MI + Paket A dan SMP/Mts + Paket B. Sebagaimana terlihat pada berikut :

Grafik 3.10. : Perkembangan Angka Putus Sekolah Kab. Belitung Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung 2021

Dari grafik di samping terlihat bahwa persentase APTs jenjang SD mengalami peningkatan pada tahun 2021 (0,19 %) dibandingkan tahun 2020 (0,15 %) dan APTs jenjang SMP juga meningkat pada tahun 2021 (0,33%) dibandingkan tahun 2020 (0,30%). Persentase angka putus sekolah yang meningkat perlu dilakukan kajian secara



Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung melakukan pengujian secara acak karena adanya pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di seluruh sekolah di Kabupaten Belitung

mendalam dengan menilai banyak variabel.

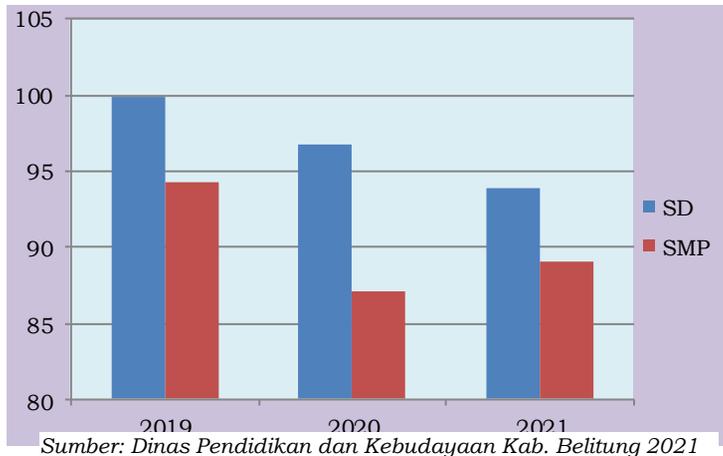
Angka putus sekolah ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Terjadi peningkatan angka putus sekolah di Kabupaten Belitung disebabkan Pandemi Covid 19 yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan digantikan dengan belajar dari rumah (BDR) tidak efektif untuk membangun suasana belajar

yang menyenangkan, kemudian siswa terutama jenjang SMP sudah memiliki kesibukan lain selama belajar di rumah seperti membantu orang tua sehingga mereka jadi malas untuk bersekolah dan pada daerah dan kondisi tertentu memiliki aktivitas sendiri atau memiliki penghasilan dari aktivitasnya membantu orang tua sehingga mereka tidak memiliki motivasi untuk bersekolah.

❖ Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase.

Grafik 3.11. : Perkembangan Angka Melanjutkan Kab. Belitung Tahun 2019 – 2021



Dari grafik di samping capaian kinerja angka melanjutkan SD di tahun 2021 sebesar 93,84% lebih kecil jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 96,70% artinya jumlah siswa lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang SMP di Kabupaten Belitung berkurang dibanding tahun 2020. Sedangkan capaian indikator angka melanjutkan SMP ditahun 2021 sebesar 89,05% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 87,11%, artinya jumlah siswa lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK di Kabupaten Belitung

meningkat dibandingkan tahun 2020. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka melanjutkan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Belitung, antara lain: siswa lulusan SD dan SMP melanjutkan pendidikannya diluar Kabupaten Belitung dengan alasan ikut orang tua atau keluarga, sehingga tidak terdata dan juga siswa lulusan SD dan SMP enggan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dengan berbagai alasan dan pertimbangan, salah satunya pandemic covid 19 yang mana siswa baru pada jenjang pendidikan yang akan ditempuh harus melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah sehingga siswa baru disuatu sekolah tidak pernah berada dilingkungan sekolah barunya.



vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun

Tabel 2.29
Data Akreditasi Per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung Tahun 2021

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI				JUMLAH	PERSENTASE TERAKREDITASI
		TERAKREDITASI			BELUM		
		A	B	C			
1	PAUD	8	66	19	9	102	91,18
2	SD/MI	13	102	7	0	122	100
3	SMP/MTs	15	14	3	0	32	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk jenjang PAUD, dari 102 sekolah sudah terakreditasi sebanyak 88.79% atau sebanyak 93 sekolah, dengan rincian 8 sekolah akreditasi A, 66 akreditasi B, dan 19 akreditasi C. Untuk jenjang SD/MI tidak ada sekolah yang belum terakreditasi. Dari 122 sekolah, sebanyak 13 sekolah akreditasi A, 102 akreditasi B, dan 7 akreditasi C. Demikian juga untuk jenjang SMP, tidak ada sekolah yang belum terakreditasi. Dari 32 sekolah, 15 akreditasi A, 14 akreditasi B, dan 3 akreditasi C.



Kebijakan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal dilakukan dengan menggerakkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memotivasi masyarakat agar mau ikut sekolah kembali terutama bagi mereka yang telah putus sekolah. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 8 (delapan) PKBM. Tiga PKBM sudah terakreditasi dan lima masih dalam proses, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Jumlah PKBM di Kabupaten Belitung Tahun 2021

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JENIS LAYANAN	STATUS AKREDITASI	PERSENTASE TERAKREDITASI
1.	SKB Belitung	Tg.Pandan	PAUD, Paket A,B dan C	Terakreditasi B	37,50%
2.	PKBM Mendanau	Selat Nasik	Paket A, B dan C	Belum	
3.	PKBM Pengayoman	Badau	Paket A, B dan C	Terakreditasi	
4.	PKBM Mitra Sejahtera	Badau	Paket A, B dan C	Belum	
5.	PKBM Insan Harapan	Sijuk	Paket A, B dan C	Belum	
6.	PKBM Sumber Ilmu	Sijuk	Paket A, B dan C	Belum	
7.	PKBM Az- Zahrawi	Sijuk	Paket A, B dan C	Belum	
8.	PKBM Belantu Edukasi	Membalong	Paket A, B dan C	Terakreditasi	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung 2021

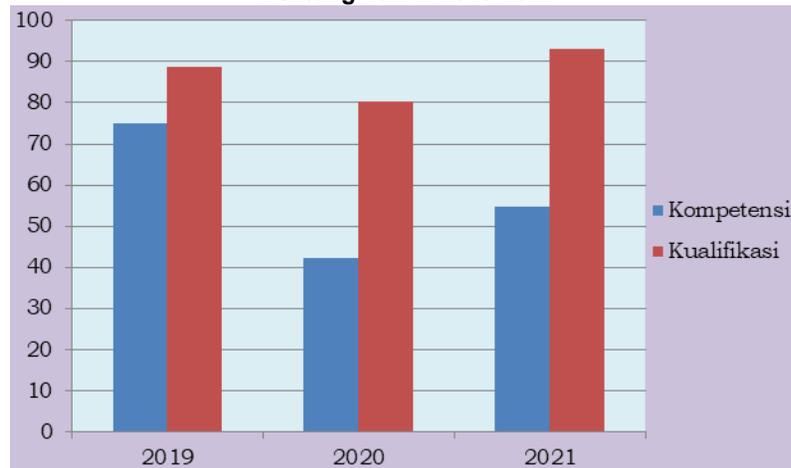
Pencapaian program pendidikan non formal dengan indikator Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terkreditasi dengan capaian sebesar 37,50% dari total 8 Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kabupaten Belitung, perlu upaya yang lebih intensif menggerakkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memotivasi masyarakat agar mau ikut sekolah kembali terutama bagi mereka yang telah putus sekolah.

Selain tempat belajar dan kualitas kelembagaan, upaya meningkatkan mutu pendidikan dengan arah kebijakan meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak dan meningkatkan kualitas SDM pendidikan juga menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu; persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi dan persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi.

Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi diukur dari kompetensi yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik, dalam hal ini sertifikat pendidik yang dimiliki. Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi diukur dari tingkat pendidikan yang dimilikinya, yaitu untuk guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV dan tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Berikut capaian peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan disajikan pada grafik.



Grafik 3.12. : Capaian Indikator Guru Memenuhi Kualifikasi dan bersertifikat pendidik Kabupaten Belitung Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung 2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian indikator Persentase Jumlah Guru yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/DIV pada tahun 2021 sebesar 93,22% lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 80,30%. Sedangkan capaian indikator Persentase Jumlah Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik pada tahun 2021 sebesar 54,61% meningkat dari tahun 2020 sebesar 42,39%. Selain itu, tak kalah penting dari hal di atas adalah pemerataan sebaran sekolah dan guru. Berikut dipaparkan sebaran sekolah, guru, dan murid per jenjang pendidikan per kecamatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung.

Tabel 2.31
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang TK/PAUD di Kabupaten Belitung Tahun 2019/2020 - 2021/2022

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Membalong	8	7	7	32	31	36	314	289	293
Tanjungpandan	23	22	22	140	127	127	1717	1 469	1293
Badau	4	4	4	16	16	16	167	138	153
Sijuk	9	9	9	36	37	36	357	353	330
Selat Nasik	1	1	1	5	5	5	28	27	26
Belitung	45	43	43	229	226	229	2 583	2 276	2 095

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2022

Tabel 2.32
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SD/MI di Kabupaten Belitung Tahun 2019/2020-2021/2022

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Membalong	30	30	30	247	246	259	2 709	2 660	2 568
Tanjungpandan	44	44	44	542	630	581	11 245	11 238	11 024
Badau	17	17	17	148	162	149	1 526	1 587	1 588
Sijuk	22	22	22	202	211	197	3 256	3 221	3 183
Selat Nasik	7	7	7	61	64	58	570	583	546
Belitung	120	120	120	1 200	1 331	1 244	19 302	19 289	18 909

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2022



Tabel 2.33
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SMP di Kabupaten Belitung Tahun 2019/2020 - 2021/2022

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Membalong	5	5	5	75	83	71	1 067	1 028	973
Tanjungpandan	15	15	15	257	292	282	4 556	4 620	4 726
Badau	3	3	3	46	54	46	740	679	658
Sujuk	4	4	4	74	83	80	1 337	1 311	1 314
Selat Nasik	2	2	2	23	24	22	273	267	250
Belitung	29	29	29	475	536	501	7 973	7.905	7 921

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2022

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan sebaran guru-guru pada jenjang TK/ PAUD, SD dan SMP di tiap kecamatan, peningkatan sebaran guru-guru ini terjadi karena adanya penerimaan PNS untuk kategori guru TK/ PAUD, SD dan SMP. Peningkatan yang tinggi sebaran guru-guru di Kecamatan Tanjungpandan karena mutasi dari kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Sedangkan jumlah sekolah tidak mengalami peningkatan. Khusus untuk jumlah sekolah diprioritaskan pada peningkatan kualitas gedung sekolah dengan perbaikan-perbaikan ruang kelas, penambahan ruang kelas, serta penambahan kelengkapan sarana pendidikan.

Untuk mencapai sasaran "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat" melalui dengan 7 (tujuh) arah kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidikan dan Tenaga Pendidik;

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inovatif yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Program Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu dan Siswa Berprestasi (SIMPOR)". Program ini merupakan upaya untuk mencegah putus sekolah bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah. Program SIMPOR menysasar Siswa SD dan SMP yang kurang mampu dan rentan putus sekolah, tetapi tidak mendapat bantuan pada Program Indonesia Pintar (PIP). Program SIMPOR dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 dirasakan sangat efektif dalam rangka menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Belitung. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerima Program SIMPOR sebanyak 315 siswa/tahun dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 157.500.000,- dan terealisasi 100%, sedangkan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang menerima Program SIMPOR sebanyak 685 siswa/ tahun dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 342.500.000,- serta terealisasi 100%.

Untuk meningkatkan mutu layanan manajemen kependidikan diukur dengan menggunakan Indeks pemerataan guru mata pelajaran Tingkat SD dan Indeks Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP. Indeks Pemerataan guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota, atau dalam lingkup nasional. Ketidakmerataan tersebut dapat berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran maupun perbandingan antardaerah.

Indeks Pemerataan Guru di hitung dengan Indeks Gini Ratio dengan skala 0-1, semakin mendekati nol maka dianggap semakin merata sebaran guru. Target kinerja pada tahun 2021 sebesar 0,10 dengan realisasi sebesar 0,10 atau mencapai 100% untuk Guru Kelas Sekolah Dasar, Target kinerja pada tahun 2021 sebesar 0,18 dengan realisasi sebesar 0,18 atau mencapai 100% untuk Guru Mata Pelajaran Sekolah Dasar, Target



kinerja pada tahun 2021 sebesar 0,34 dengan realisasi sebesar 0,34 atau mencapai 100% untuk Guru Mata Pelajaran Sekolah Menengah Pertama.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu: Melakukan pemetaan sebaran guru sesuai kebutuhan. Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan antara lain Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan penyusunan regulasi distribusi guru berdasarkan kriteria tertentu yang mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan program-program tersebut telah dianggarkan sebesar Rp 75.633.558.825,00. Realisasi anggaran untuk menjalankan program-program dalam rangka pencapaian kinerja sasaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengelolaan Pendidikan	75.633.558.825,00	70.086.244.883,00	92.67

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran per program cukup baik, dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 92,67%, maka terdapat efektifitas anggaran sebesar 7,33%.

Upaya pencapaian indikator sasaran ini bisa berjalan baik karena adanya faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- ❖ Adanya dukungan program pusat yang berkaitan dengan wajib belajar dan pengentasan kemiskinan;
- ❖ Ketersediaan anggaran dan komitmen pimpinan.
- ❖ Melakukan Komunikasi dan Pembinaan Kepada pihak sekolah dalam upaya menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah.
- ❖ Program Inovatif "SIMPOR" dapat berjalan dengan baik.

Adapun faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain;

- ✘ Akses pendidikan kurang merata. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung;
- ✘ Sistem pembelajaran kurang optimal dengan adanya kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) akibat pandemi covid 19 yang tidak mampu membangun suasana belajar seperti saat pembelajaran tatap muka di sekolah, yang berakibat motivasi belajar siswa yang rendah dan menganggap sekolah sebagai hal yang penting;
- ✘ Cukup tingginya APTs di Kabupaten Belitung.
Adanya pandemi Covid 19 yang terjadi semenjak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Memperhatikan faktor pendukung dan penghambat di atas beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan adalah sebagai berikut:

- ⌘ Meningkatkan pemerataan akses pendidikan terutama untuk daerah terpencil;
- ⌘ Meningkatkan kualitas pembelajaran

Menurut pengamatan sebagian besar siswa tidak belajar sebagaimana yang seharusnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa siswa setidaknya mencapai standar minimal pembelajaran dan pengembangan diri siswa di setiap jenjang sistem pendidikan.



⌘ Mulai lebih dini

Penelitian internasional menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan anak usia dini menghasilkan capaian yang tinggi secara kognitif, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat mendorong masyarakat agar lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pendidikan usia dini.

⌘ Meningkatkan kemampuan mengajar guru

Tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Kabupaten Belitung tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa Kabupaten Belitung memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.

⌘ Meningkatkan minat baca masyarakat

Sebagai bentuk pencapaian strategi meningkatkan akses pendidikan dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dilaksanakan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung yang selalu berupaya dalam mendukung untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Keseriusan ini di buktikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung sebagai Dinas Perpustakaan

Kabupaten/ Kota Terbaik Dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2021.



Foto: Piagam Penghargaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung sebagai Dinas Perpustakaan Kabupaten/ Kota Terbaik Dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik

SASARAN 3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Kemampuan ekonomi suatu daerah memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investasi yang masuk tentunya akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan daya saing daerah.

Salah satu tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah Kabupaten akan terus mendorong dan memberikan stimulus bagi para pelaku usaha baik kecil maupun besar untuk dapat bergerak di tengah pandemi. Dengan cara tersebut, konsumsi rumah tangga diharapkan akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	2021			Kategori	Akhir
			RPJMD 2018	Target	Realisasi	Capaian (%)		RPJMD 2023 Target
1	Pengeluaran per kapita (dalam ribu rupiah)	(Ribu Rupiah)	12.910	13.671	13.563	99,21	SB	14.049



Berdasarkan perhitungan BPS, indikator sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat, yaitu Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) Kabupaten Belitung tahun 2021 sebesar 13.563 (ribu rupiah). Realisasi kinerja indikator Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) ini belum melampaui target, sedangkan untuk target akhir RPJMD perlu peningkatan sekitar 3,46%.

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, Pengeluaran per Kapita masyarakat Kabupaten Belitung lebih tinggi, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
Tahun 2017-2021 (dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Belitung	12.910	13.281	13.662	13.554	13.563
2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.066	12.666	12.959	12.794	12.819
3	Indonesia	10.664	11.059	11.299	11.010	11.156

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Sebagaimana digambarkan pada tabel di atas, selama kurun waktu 2017 – 2021, Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung selalu lebih tinggi dari provinsi dan nasional. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Belitung lebih baik dari pada penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia secara rata-rata.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, tingkat Pengeluaran per Kapita tertinggi adalah Kota Pangkalpinang dan tertinggi kedua Kabupaten Belitung. Berikut perbandingan pengeluaran per kapita sebulan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2020 pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Setahun (dalam ribu rupiah) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bangka	11.420	12.043	12.480	12.416	12.424
2	Belitung	12.910	13.281	13.662	13.554	13.563
3	Bangka Barat	11.394	12.011	12.275	12.233	12.269
4	Bangka Tengah	12.330	12.836	13.070	12.909	12.945
5	Bangka Selatan	10.999	11.573	11.910	11.757	11.768
6	Belitung Timur	10.894	11.302	11.831	11.730	11.760
7	Pangkalpinang	14.923	15.560	15.883	15.663	15.716

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Tabel di atas menyatakan bahwa dalam kurun 2017 – 2021 terjadi fluktuatif rata-rata pengeluaran per kapita setahun pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan tahun kebangkitan dari keterpurukan di Tahun 2020 hal ini merupakan dampak akibat adanya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia, rata-rata pengeluaran per kapita setahun Kabupaten Belitung sebesar Rp 13.563.000,00, tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang sebesar Rp 15.716.000,00.

Sementara berdasarkan data resmi BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.38
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2021

KABUPATEN/KOTA	MAKANAN		BUKAN MAKANAN		JUMLAH	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Belitung	835 504	828 742	917 281	797 998	1 752 785	1 626 741
Kep. Bangka Belitung	771 121	783 204	730 723	748 970	1 501 843	1 532 174

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2021

Berdasarkan tabel di atas, Pengelompokan golongan pengeluaran per kapita berdasarkan klasifikasi wilayah menunjukkan stratifikasi konsumsi pengeluaran sekaligus mengetahui sebaran dari pola konsumsi penduduk suatu wilayah. Rata-rata perkapita penduduk Kabupaten Belitung tahun 2021 sebesar Rp1.626.741. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk kelompok makanan di Kabupaten Belitung adalah Rp 828.742 dimana proporsi terbesar adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi yaitu Rp 222.044. Pada kelompok nonmakanan, lebih dari 50 persen pengeluaran di alokasikan untuk perumahan dan aneka komoditas dan jasa. Secara umum pengeluaran kelompok nonmakanan lebih tinggi daripada pengeluaran untuk kelompok makanan.

Tingginya pengeluaran per kapita ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Pada tahun 2021, berdasar catatan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tingkat inflasi Kota Tanjungpandan sebesar 4,01% sedangkan tingkat inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 3,60%.

Rata-rata pengeluaran dan tingkat inflasi yang tinggi ini merupakan masalah yang harus dihadapi masyarakat Kabupaten Belitung. Masyarakat Kabupaten Belitung tentunya harus memiliki pendapatan per bulan dari hasil kegiatan ekonomi mereka yang lebih tinggi dari pengeluaran tersebut. Hal ini sangat bergantung pada kondisi ketengakerjaan Kabupaten Belitung.

Berdasarkan data resmi BPS Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, indikator ketenagakerjaan Kabupaten Belitung cukup baik, tetapi masalah ketenagakerjaan ini tetap menjadi perhatian serius, karena memiliki peran yang sangat krusial dalam penentuan keberhasilan pembangunan daerah. Berikut ditampilkan tabel ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.39
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, 2017 - 2021 di Prov. Kep. Babel

KABUPATEN/KOTA	TPT					TPAK				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	4.29	4.12	3.80	5,42	5,97	65.75	64.10	64.30	63,93	62,68
Belitung	2.57	2.93	2.90	4,82	3,51	69.29	70.36	68.74	69,32	66,28
Bangka Barat	4.23	3.11	2.85	4,12	3,83	68.17	70.47	66.99	69,32	65,98
Bangka Tengah	3.38	3.93	4.39	5,59	4,95	69.26	70.99	69.65	70,85	66,24
Bangka Selatan	2.74	4.35	3.87	5,42	5,29	64.70	67.40	68.12	68,86	68,96
Belitung Timur	2.62	4.35	1.71	3,93	3,78	68.00	71.93	71.37	71,33	69,23
Pangkalpinang	5.80	1.50	5.01	6,93	6,81	63.42	63.64	68.35	62,37	65,16
Kep. Bangka Belitung	3.78	3.65	3.62	5,25	5,03	66.72	67.79	67.70	66,89	65,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung tahun 2021 sebesar 3,51 menurun dari tahun 2020 sebesar 4,82, atau 1,31%. TPT Kabupaten Belitung tahun 2021 sedikit menurun dari tahun 2020. Artinya dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 35 orang



diantaranya merupakan pencari kerja. Dibandingkan kabupaten/ kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, TPT Kabupaten Belitung terendah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dilihat dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK Kabupaten Belitung tahun 2021 sebesar 66,28% artinya sebesar 66,28 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. TPAK Kabupaten Belitung tahun 2021 ini menurun dari tahun 2020 yang sebesar 69,32% dan berada di posisi ketiga di bawah Belitung Timur (69,23%) dan Bangka Selatan (68,96%). Sementara TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 hanya 65,88%.

Dari sisi penyerapan Angkatan Kerja, pada tahun 2021 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 96.884 orang yang bekerja sebanyak 93.445 orang sedangkan sisanya 3.399 orang adalah pengangguran.

Perluasan Kesempatan Kerja dengan 4 (empat) arah kebijakan, yaitu: meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata, meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin, meningkatkan serapan tenaga kerja local dan meningkatkan pemuda yang mandiri dan kreatif. Melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata dilakukan pembekalan sektor kepariwisataan terhadap Sumber Daya Manusia Peserta Pembekalan sektor

Daftar Kegiatan Pengembangan SDM Pariwisata Belitung Tahun 2021
Daftar Kegiatan Uji Kompetensi Sektor Pariwisata (Sertifikasi) Tahun 2021

1	Hotel & Restoran (Uji Kompetensi Bidang Hotel/Restoran)	130 Orang (Lulus 80 orang) Tidak Lulus 50 orang)	KEMENPAREKRAF RI	29-30 Maret 2021	Hotel BW Inn, Oleh LSP Rafflesia	
2	Kepemanduan Wisata (Uji Kompetensi Bidang Kepemanduan Wisata City Tour, Local Guide	50 Orang (Lulus 50 orang)	KEMENPAREKRAF RI	29-30 Maret 2022	Hotel BW Inn, Oleh LSP Rafflesia	
Total		180 orang				
4.	Uji Kompetensi Pemandu Wisata Snorkling	17 orang	HPI Belitung	08-Apr-21	BAHAMAS HOTEL	

Kepariwisataan.

5.	Penyuluhan Kepariwisataan Kabupaten Belitung menghadapi Unesco Global Geopark	40 Orang	Poltexpar Palembang	16-Apr-21	Fairfield By Marriot Hotel	
6.	Pemberdayaan Minuman Lokal dan Pengelolaan Homestay sebagai daya Dukung Destinasi Wisata Belitung	40 Orang	Poltexpar Palembang	17-Apr-21	Fairfield By Marriot Hotel	
7.	MASAMO (Masak Bersama Master)	30 ORANG	DIREKTORAT KULINER, KRIYA, DESAIN DAN FESYEN DEPLITI BIDANG DIGITAL DAN PRODUK KREATIF, KEMENPAREKRAF/	25 MEI	SANTIKA HOTEL, SIBUE	



8.	Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata (Dana Pelayanan Kepariwisataan)	40 ORANG	DINAS PARIWISATA KAB BELITUNG	15 – 17 Juni Tahun 2021	GRAND HATIKA HOTEL TANJUNGPANDAN	
9.	Peningkatan Masyarakat Di Destinasi Pariwisata	40	DISPAR Kabupaten Belitung	22-24 Juni 2021	Desa Kacang Buto, Kec. Badau	
10.	Pembinaan Destinasi	40	DISPAR Kabupaten Belitung	5-7 Juli 2021	Hotel Golden Tulip	
11.	Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata (Dana pelayanan Kepariwisataan)	40 ORANG	DINAS PARIWISATA KAB BELITUNG	15 – 17 September Tahun 2021	GRAND HATIKA HOTEL TANJUNGPANDAN	
12.	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (WORKSHOP KULINER "MEMBANGUN BISNIS KULINER INOVATIF DAN KREATIF DIMASA PANDEMI")	50 ORANG	DINAS PARIWISATA	20-21 SEPTEMBER	MAXONE BELLSTAR HOTEL, TANJUNGPANDAN	
13.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata& Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (Pelatihan Pemandu Geowisata)	40	DISPAR Kabupaten Belitung	28-30 September 2021	BW Suite Hotel dan Desa Tanjung Rusa	
14.	Bimtek Pengelolaan Destinasi Pariwisata Sehat	40	DISPAR Kabupaten Belitung	13-15 Oktober 2021	Hotel Maxone	
15.	Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata (Dana pelayanan Kepariwisataan)	40 ORANG	DINAS PARIWISATA KAB BELITUNG	26 – 28 Oktober Tahun 2021	MAXONE HOTEL TANJUNGPANDAN	
16.	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (WORKSHOP PENINGKATAN SUB SEKTOR KULINER DIDEASA WISATA)	50 ORANG	DINAS PARIWISATA	28-29 OKTOBER	GEOSITE BATU BEDIL SUNGAI PADANG KEC. SIJUK	

Pencapaian kinerja indikator Meningkatnya daya beli masyarakat pada tahun 2021 merupakan dampak positif dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja tersebut. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain: Komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten di bidang di bidang peningkatan kesempatan kerja yang dengan melakukan Sinergitas Program Pelatihan di era New Normal yang melibatkan Balai Latihan Kerja Belitung untuk peningkatan ekonomi masyarakat Belitung bersama dengan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Belitung dan juga Dinas Perikanan.

BLK Belitung mengadakan Pelatihan Berbasis Kompetensi tahap I tahun 2021 itu diikuti oleh 80 peserta dan dibuka 5 program. Yakni processing pembuatan roti dan kue, pengolahan buah, pariwisata yakni barista, *front office receptionist* serta *tour guide*. Untuk tahun 2021 ini BLK Belitung akan melatih sebanyak 496 orang pencaker atau sebanyak 31 paket pelatihan. Terdiri 3 kejuruan antara lain Processing, Pariwisata, Bisnis dan Manajemen.

Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus sehingga dapat mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Belitung di



Foto: Pembukaan pelatihan berbasis Kompetensi Tahap I Kejuruan Processing dan Pariwisata di Aula BLK Belitung oleh Bupati Belitung



sektor pariwisata dan menyerap tenaga kerjaserta berkembangnya industri pariwisata yang mampu menyerap tenaga kerja.



Foto: Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Namun demikian tetap saja muncul faktor-faktor penghambat capaian kinerja, seperti berikut ini:

- Tingginya tingkat inflasi di Kabupaten Belitung;
- Terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan akibat pandemi covid 19 ini berpengaruh kepada peningkatan angka pengangguran terbuka;
- Kurang terlatihnya Angkatan Kerja;
- Masih banyaknya PMKS;
- Terbatasnya sarana sosial;
- Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu strategi dan kebijakan sebagai pemecahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja, antara lain:

- Upaya untuk menekan angka laju inflasi dengan terus memonitor persediaan barang kebutuhan pokok terutama pada bulan-bulan tertentu sehingga kestabilan harga di daerah terjaga;
- Perluasan kesempatan kerja dengan fokus pada sektor andalan yang memiliki potensi pengembangan tinggi seperti pariwisata;
- Terus meningkatkan kompetensi dan ketrampilan pencari kerja khususnya di bidang pariwisata;
- Koordinasi dengan pihak swasta dalam rangka membuka peluang kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi Angkatan Kerja;
- Kebijakan memenuhi jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- Meningkatkan penyediaan sarana sosial.

Menjadi keharusan bagi setiap daerah di NKRI ini untuk dapat bergerak maju menuju perubahan positif dari waktu ke waktu, sarat dengan prestasi dan pencapaian berarti dalam rangka meretas kemiskinan di segala lini kehidupan agar kemudian dapat terbingkai dalam "masyarakat sejahtera". Keinginan dan harapan ini seakan menjadi delusi manakala pandemic covid 19 melanda dunia. Kabupaten Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia juga pastinya terdampak pandemi covid 19.

Peningkatan pengeluaran per kapita diperoleh dari daya beli masyarakat yang meningkat. Hal ini harus disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara memaksimalkan produktivitas. Salah satu upaya tersebut dapat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peningkatan investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran difokuskan pada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk pelaksanaan strategi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Sosial menyelenggarakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Untuk mengukur kinerja program digunakan Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



Tabel 2.40
Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial Tahun 2014 – 2021

TAHUN	PERSENTASE (%) PENANGANAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL
2014	98,53%
2015	98,73%
2016	82,45%
2017	76,42%
2018	73,85%
2019	83,89%
2020	94,78%
2021	97,69%

Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung 2022

Penanganan PMKS tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 97,69% atau 2,91 % meningkat dari tahun 2020. Data jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Belitung terhadap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial
Tahun 2014-2021

TAHUN	JUMLAH PENYANDANG MASALAH SOSIAL	JUMLAH PEYANDANG MASALAH SOSIAL YANG TERTANGANI	PERSENTASE (%)
2014	9.041	8.908	98,53
2015	9.722	9.599	98,73
2016	9.656	7.961	82,45
2017	14.618	11.171	76,42
2018	13.535	9.996	73,85
2019	14.337	12.028	83,86
2020	13.619	12.908	94,78
2021	14.787	14.445	97,69

Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penanganan PMKS meningkat dari tahun sebelumnya hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penyandang masalah yang sosial yang juga meningkat sepanjang tahun 2021, hal ini belum bisa menangani seluruh penyandang masalah sosial yang ada di Kabupaten Belitung.

Di samping penanganan PMKS, pada tahun 2021 Kabupaten Belitung juga memberikan bantuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban penyediaan pelayanan dasar. Berikut data jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan dan persentase pencapaian SPM pada akhir tahun 2021.

Tabel 2.42
Data Jumlah PMKS seluruhnya dan jumlah PMKS yang dibantu berdasarkan jenis PMKS, tahun 2021

NO	JENIS PMKS	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir Tahun pencapaian SPM (%)
1	Anak Balita Terlantar	71	71	100.00
2	Anak Terlantar	219	219	100.00
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	15	15	100.00
4	Anak Jalanan	0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	37	12	32.43



6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	10	10	100.00
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	15	15	100.00
8	Lanjut Usia Terlantar	1163	1163	100.00
9	Penyandang Disabilitas	612	295	48.20
10	Tuna Susila	0	0	-
11	Gelandangan	0	0	-
12	Pengemis	0	0	-
13	Pemulung	0	0	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	n/a	n/a	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	16	16	100.00
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	6	6	100.00
18	Korban Trafficking	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	40	40	100.00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	12	12	100.00
21	Korban Bencana Alam	2	2	100.00
22	Korban Bencana Sosial	5	5	100.00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1096	1096	100.00
24	Fakin Miskin	11463	11463	100.00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5	5	100.00
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-
Jumlah		14787	14445	97.69

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, 2022

Untuk menyediakan pelayanan dasar bagi PMKS terutama fakir miskin, maka Kabupaten Belitung menyediakan sarana dan prasarana sosial, yaitu panti sosial. Panti sosial mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar. Sarana sosial di Kabupaten Belitung terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Panti Asuhan dan Panti Lansia dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.43
Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2021

NO	SARANA SOSIAL	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panti Asuhan (Unit)	3	3	3	3	3	3
2	Panti Lansia (Unit)	1	1	1	1	1	1
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Taman Anak Sejahtera (TAS)	2	2	2	2	2	2
Jumlah		6	6	6	6	6	6

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana panti sosial selama 6 (enam) tahun terakhir tetap tanpa ada penambahan dan pengurangan jumlah sarana dan prasarana panti. Walaupun tanpa penambahan sarana dan prasarana panti di Kabupaten Belitung tetap menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penanganan penyandang masalah sosial.



Tabel 2.44
Realisasi Keuangan Program penunjang
Sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Perekonomian dan Pembangunan	2.944.422.745,00	2.625.702.536,00	89,18
2.	Rehabilitasi Sosial	644.553.400,00	578.843.599,00	89,81

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat dengan persentase realisasi anggaran 89,49%.

SASARAN 4 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan” diukur melalui indikator Status Desa Maju. Untuk melihat capaian kinerja indikator sasaran tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2021		Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
					Realisasi	Capaian (%)		
1	Status Desa “Maju”	Desa	10	25	29	116	SB	31

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui indikator Status Desa “Maju” telah melampaui target, dari target 25 (dua puluh lima) desa terealisasi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa Maju atau sebesar 116%. Sedangkan untuk target akhir RPJMD perlu peningkatan sekitar 6,45% untuk mewujudkan 31 Desa Maju.

Penetapan status Desa Maju ini berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung pada tahun 2017 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.46
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung
Tahun 2016 – 2021

Status IDM	Tanjungpandan										
	Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tertinggal	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Berkembang	6	6	4	3	3	10	10	7	6	4	
Maju	3	3	5	6	6	1	1	5	6	8	
Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Status IDM	Selat Nasik					Sijuk					Badau					
	Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Berkembang	4	4	3	3	2	5	5	3	2	2	6	6	5	5	2	
Maju	0	0	1	1	2	5	5	7	8	8	1	1	2	2	5	
Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Dinas PPKBPMD Kabupaten Belitung 2022



Selama kurun waktu 2017 – 2021, pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 berjumlah 29 desa dengan IDM di Kabupaten Belitung atau meningkat 8,7% dari realisasi tahun 2020 sejumlah 23 desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung . Namun demikian, hingga tahun 2021 dari 47 desa, belum satu pun yang berhasil mencapai status desa mandiri. Untuk mencapai status desa mandiri harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang digunakan sebagai indikator capaian sasaran pembangunan desa dan status kemandirian desa.

Adapun 29 (Dua puluh sembilan) nama Desa Berstatus “Maju” Tahun 2021 dari 5 Kecamatan di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021
Kabupaten Belitung

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM 2020
Tanjungpandan	Buluh Tumbang	MAJU
Tanjungpandan	Air Saga	MAJU
Tanjungpandan	Air Merbau	MAJU
Tanjungpandan	Aik Ketekok	MAJU
Tanjungpandan	Aik Rayak	MAJU
Tanjungpandan	Perawas	MAJU
Sijuk	Sijuk	MAJU
Sijuk	Batu Itam	MAJU
Sijuk	Air Seruk	MAJU
Sijuk	Tanjung Binga	MAJU
Sijuk	Air Selumar	MAJU
Sijuk	Sungai Padang	MAJU
Sijuk	Keciput	MAJU
Sijuk	Terong	MAJU
Membalong	Membalong	MAJU
Membalong	Simpang Rusa	MAJU
Membalong	Pulau Seliu	MAJU
Membalong	Gunung Rinting	MAJU
Membalong	Padang Kandis	MAJU
Membalong	Perpat	MAJU
Membalong	Kembiri	MAJU
Membalong	Tanjung Rusa	MAJU
NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM 2020
Badau	Air Batu Buding	MAJU
Badau	Sungai Samak	MAJU
Badau	Badau	MAJU
Badau	Kacang Butor	MAJU
Badau	Cerucuk	MAJU
Selat Nasik	Suak Gual	MAJU
Selat Nasik	Selat Nasik	MAJU



Sumber : Dinas PPKBPMD Kabupaten Belitung 2022

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dengan 6 (enam) arah kebijakan, yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, meningkatkan peran kelembagaan desa, meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda, memperkuat ekonomi desa kawasan pedesaan, memperkuat pemerintahan desa dan memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan.



Strategi ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMDD). Pada tahun 2021, untuk menjalankan strategi ini, DPPKBPMDD menyusun dan menjalankan program-program. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi untuk mengimplementasikan perubahan peraturan.
2. Perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memberikan pemikiran atau ide-ide dan masukkan dalam forum perencanaan pembangunan desa.

Pencapaian indikator kinerja program-program pendukung Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut: am sebagai beriku

Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengisian Profil Desa/ Kelurahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	100	100
	Persentase Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	100	100
	Persentase BUMDesa	100	100	100
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa Aktif	99,53	100	100

Analisa penyebab keberhasilan dan hambatan pencapaian indikator kinerja program

1. Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku tahun 2021 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 100 %. faktor pendorong tercapai indikator kinerja program ini karena adanya Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa sehingga hasil yang ditargetkan pada tahun 2021 yaitu administrasi pemerintahan desa yang sesuai regulasi dan telah dituangkan dalam Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan penetapan Pemenang lomba evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan pada 6 desa/kelurahan.
2. Persentase Kelembagaan Desa Aktif tahun 2021 adalah sebesar 100% atau sebesar 99,53 % dari target yang ditetapkan sebesar 99,53 % persen. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja program adalah karena adanya Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa. Indikator target yang ditetapkan adalah meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dan telah dituangkan dalam Laporan kegiatan tahunan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat termasuk juga Lembaga Adat Melayu Belitung dan Laporan kegiatan tahunan tim penggerak PKK
3. Persentase Pengelolaan Keuangan desa Sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebesar 100% atau sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 % persen. Faktor pendorong pencapaian indikator kinerja adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Belitung Nomor



51A Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung.

4. Persentase BUMDesa aktif pada tahun 2021 adalah sebesar 100 % atau sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Faktor Pendorong tercapainya Indikator Kinerja Program ini adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pada Pasal 6 ayat (1) penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat 2 huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.
 - b. penyediaan listrik desa untuk mewujudkan Desa berenergi dan terbarukan;
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. Dan dengan adanya Pembinaan dari Kabuapten, sehingga Pemerintah Desa semangkin sadar akan pentingnya dibentuk BUMDesa untuk meningkatkan PADes dan untuk mengelola potensi Desa.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja program tersebut adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengamankan, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa solusi yang dilakukan adalah perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memberikan pemikiran/ide-ide dan masukan dalam folum perencanaan pembangunan Desa

Capaian kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Indikator kinerja Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku pada tahun 2021 adalah 100 %. Faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah ketersediaan anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kecamatan dan Desa dan terbitnya peraturan Bupati Belitung.



Capaian kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Indikator kinerja Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku pada tahun 2021 adalah 100 %. Faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah ketersediaan anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kecamatan dan Desa dan terbitnya peraturan Bupati Belitung Nomor 51A tahun 2020 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah Desa di Kabupaten Belitung. Faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah refofusing anggaran dan terbitnya surat Edaran Bupati Belitung Nomor: 900/1618/BPKAD tentang langkah-langkah persiapan tutup buku Tahun Anggaran 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan yang melewati tanggal 3 Desember 2021.

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa adalah faktor Pendorong Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Faktor penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa

adalah Refocusing Anggaran .



Foto: Peluncuran Desa Digital Pertama se Babel
Tahun 2021

dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Belitung serta Bank Sumsel Babel cabang Tanjungpandan. Aplikasi yang pertama kali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini diluncurkan beberapa aplikasi yang mendukung pengembangan desa digital, yaitu Sistem Keuangan Desa (www.siskeuded.belitung.go.id), transaksi non tunai (www.banksumselbabel.com), website desa (www.desa.belitung.go.id) dan sistem informasi pelayanan masyarakat (www.sipmas.belitung.go.id).

Terkait sistem keuangan dana desa, diharapkan kedepan kepada dinas terkait untuk membuat peraturan tentang pelaporan dana desa dan diharapkan kepada seluruh kepala desa agar membuat laporan setiap bulannya yang diteruskan kepada koordinator. Ini adalah bentuk pembinaan kepada kepala desa, desa digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

Capaian Kinerja outcome dan output kegiatan adalah 100 %. Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa adalah Terbitnya Peraturan Bupati Belitung nomor 51A Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa adalah Refocusing anggaran dan terbitnya surat Edaran Bupati Belitung Nomor: 900/1618/BPKAD tentang langkah-langkah persiapan tutup buku Tahun Anggaran 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan yang melewati tanggal 3 Desember 2021 sebagaimana tercantum didalam Surat Edaran dimaksud.



Foto: Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi
Perkembangan Desa 2021

Bupati Belitung, H.

Sahani Saleh, S.Sos meluncurkan aplikasi Desa Digital ditandai dengan penekanan tombol pada layar monitor di Gedung Serba Guna Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Aplikasi desa digital ini adalah hasil kolaborasi antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Belitung yang didukung oleh Dinas Kependudukan



Foto: Penyampaian Raperda Penetapan Desa oleh Kanwil Kemenkumham

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah Faktor Pendorong ketersediaan anggaran untuk mempercepat penyerapan sistem informasi keuangan Online di Desa. Faktor Penghambat kurang memadai sumber daya manusia dan kapasitas aparatur yang membidangi masalah keuangan sering berganti-ganti. Outcome kegiatan adalah Apartur yang Akuntabel.

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa adalah faktor Pendorong: ketersediaan anggaran untuk melakukan pembinaan. Faktor Penghambat minimnya SDM di Desa dan kepengurusan BUM Desa yang sering berganti-ganti.



Foto: Pembinaan BUMDes

Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan adalah Faktor Pendorong ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan koordinasi yang baik dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa. Faktor Penghambat kurangnya tingkat partisipasi masyarakat.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan adalah faktor penghambat kegiatan dilaksanakan sampai dengan Tingkat Kabupaten, sedangkan tingkat provinsi tidak dilaksanakan sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 410/0083/DPMD Tanggal 21 Januari 2021 Hal Peniadaan Lomba Des dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk Lomba Tingkat Provinsi dan Nasional tidak direalisasikan.

Faktor Pendorong : Program Administrasi Pemerintahan Desa/Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa, faktor pendorong yaitu Ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa dan Terbitnya Peraturan Bupati Belitung Nomor 51A Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung.

Faktor Penghambat: Program Administrasi Pemerintahan Desa/Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa, faktor penghambat yaitu Refocusing Anggaran.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Daerah ke Desa pada tahun 2021 terjadi terjadi Penurunan Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD) dan BHPRD (APBD) yang disalurkan Pemerintah Daerah ke Desa pada Tahun 2021. Semula pada Anggaran Tahun 2021 alokasi tersebut sebesar Rp.110.050.123.000,- turun pada Anggaran Perubahan menjadi Rp.108.550.145.000,- . Kemudian pada Anggaran Induk Tahun Anggaran 2022 turun menjadi Rp. 98.591.580.520,- sebesar 9,08 % atau sebesar Rp.9.958.564.480,-, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018-2021

Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD)		Dasar Hukum
	Keuangan (Rp)	Dasar Hukum	
2018	52.326.327.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 23 Januari 2018
	38.805.104.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 Tanggal 23 Januari 2018



	7.403.078.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung kepada Desa tahun Anggaran 2018
	54.084.694.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 15 Oktober 2018
	8.869.397.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 Oktober 2018
	46.568.028.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018
	58.261.098.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018
	7.758.529.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018
2019	9.173.407.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 27 September 2019
	48.034.247.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019
	56.432.736.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Desember 2019
	9.041.961.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 26 Desember 2019
2020	47.580.353.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Juni 2020 (Mencabut Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020)
	51.830.686.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Juni 2020
	5.937.522.900	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Juni 2020
	8.535.022.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 30 September 2020
	50.127.737.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 Desember 2020
	7.949.513.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29



		Desember 2020	
	51.972.873.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 Desember 2020
2021	50.472.895.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 3 Mei 2021
	50.779.112.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 14 Oktober 2021
	8.138.630.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 14 Oktober 2021
	51.270.200.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Desember 2021
	8.393.173.520	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Desember 2021

Tabel 2.49 :
Rincian DD, ADD dan BHPRD Tahun Anggaran 2021

Uraian	DD	ADD	BHPRD		JUMLAH TOTAL DD, ADD, DAN BHPRD
			PAJAK	RETRIBUSI	
Pagu Induk	50.127.737.000	51.972.873.000	7.131.000.000	818.513.000	110.050.123.000
Berkurang Perubahan Covid-19	-	1.499.978.000	-	-	1.499.978.000
Jumlah	50.127.737.000	50.472.895.000	7.131.000.000	818.513.000	108.550.145.000

Tabel 2.50. :
Jumlah DD, ADD dan BHPRD Tahun Anggaran 2022

DD	ADD	BHPRD		JUMLAH TOTAL DD, ADD, DAN BHPRD
		PAJAK	RETRIBUSI	
38.928.207.000	51.270.200.000	7.493.319.520	899.854.000	98.591.580.520

Sumber : DPPKBPMK Kab. Belitung Tahun 2021

Adapun Peraturan Bupati Belitung tentang Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022 tidak menjadi syarat penyaluran sehingga Rincian perhitungan masing-masing Desa mengacu kepada PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, akan tetapi hal tersebut tidak menghambat komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Capaian kinerja kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Kabupaten/Kota dengan Indikator kinerja Persentase Kelembagaan Desa Aktif pada tahun 2021 adalah 99,53%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 99,53%. Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja kegiatan adalah faktor pendorong ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat,



pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kecamatan dan Desa. Faktor Penghambat Kurang Aktifnya peran serta masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan di Desa.

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat adalah faktor Pendorong ketersediaannya anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Faktor Penghambat kurang aktifnya peran serta masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan di Desa.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat adalah terbitnya surat Edaran Bupati Belitung Nomor : 900/1618/BPKAD tentang langkah-langkah persiapan tutup buku Tahun Anggaran 2021.

Faktor Pendorong pencapaian target kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Faktor Pendorong yaitu Ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.

Di samping program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bupati dan Wakil Bupati pun meluncurkan program inovatif, yaitu Program KEMINANGAN (Kearifan lokal dan adat istiadat sebagai inspirasi pembangunan). Program ini ditujukan pada bagi tokoh masyarakat Belitung.

Program ini merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada para tokoh-tokoh adat Belitung yang selalu aktif dan berperan konstruktif dalam proses pembangunan serta menjaga nilai-nilai kearifan local dalam bentuk insentif melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain insentif, Pemkab Belitung juga memberikan pakaian adat Belitung berupa baju kancing lima untuk 120 orang dukun kampung tersebut.

Pencapaian kinerja indikator Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pada tahun 2021 merupakan dampak positif dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja tersebut. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

Komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten di bidang kependudukan; Ketersediaan dana; Adanya Alokasi Dana Desa; Komitmen masyarakat desa yang ingin maju.

Namun demikian tetap saja muncul faktor-faktor Penghambat Capaian Kinerja, seperti berikut ini: Peraturan yang selalu berubah-ubah; Penyerapan dana lamban; Sumber daya manusia dan kapasitas aparatur yang ada kurang memadai; Pandemi Covid 19 yang masih terjadi ditahun 2021 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu strategi dan kebijakan sebagai pemecahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja, antara lain: Ketegasan dalam penetapan juknis maupun pedoman umum sebagai acuan pelaksanaan penyaluran dana desa; Efektifitas kegiatan sehingga penyerapan anggaran dapat lebih maksimal; Sinkronisasi dan koordinasi terkait dalam penggunaan dana desa; Perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Memaksimalkan ekosistem Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan dengan melakukan upaya penting yaitu identifikasi objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan sesuai target yang direncanakan, kemudian dukungan dari pemangku kepentingan setempat



Foto: Sertifikat WBTB dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk Kesenian "Keroncong Stambul Fadjar"



seperti Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan revitalisasi objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam dokumen Pokok-pokok Kebudayaan Daerah (PPKD). Penghargaan berupa sertifikat warisan budaya tak benda (WBTB) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk Kesenian “Keroncong Stambul Fadjar” yang berlokasi di Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasi Kabupaten Belitung.

Tabel 2.51

Realisasi Keuangan program penunjang sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Administrasi Pemerintahan Desa	1.041.554.931,00	851.829.589,00	81,78
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	483.588.510,00	651.316.315,00	93,33
3.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.372.725.130,00	1.058.949.670,00	77,14
4.	Pengembangan Kebudayaan	1.130.116.740,00	791.972.825,00	70,08
5.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.516.480.390,00	1.919.652.020,00	76,28

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan rata-rata capaian realisasi anggaran 79,72% dan persentase per sasaran sebesar 77,53%, maka terdapat efektifitas dan efisiensi 22,47%.

TUJUAN 2 : Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

Capaian kinerja tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52

Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	2021			Kategori	Target Akhir RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	--	B	N.A	-	-	BB

Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung meningkat sebanyak 13,74 poin baik pada komponen pengungkit maupun hasil. Adanya perbedaan penilaian antara Tahun 2019 dengan 2020 merupakan sistem Penilaian/ Evaluasi sesuai dengan penilaian dari Kementerian PANRB. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar komponen pengungkit yang masih memperoleh nilai di bawah rata-rata sub totalnya terutama pada Komponen Pengungkit yaitu pada area pemenuhan, hasil antara, dan reform dari area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 dan 2020.



No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Evaluasi KemenPANRB 2019	
			Nilai	%
A.	Pengungkit/Proses			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	0,70	14
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	0,41	8,20
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	0,38	6,33
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	1,09	21,80
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	4,27	28,47
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,66	27,67
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	1,65	13,75
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,83	30,50
	Total Komponen Pengungkit/Proses	60,00	11,99	19,98
B.	Hasil			
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)	20,00	7,04	35,20
2.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (10)	10,00	4,27	42,70
3.	Kualitas Pelayanan Publik (10)	10,00	6,20	62
	Total Komponen Hasil	40,00	28,21	70,53
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	40,20	

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Evaluasi KemenPANRB 2020	
			Nilai	%
A.	Komponen Pengungkit			
I	Pemenuhan	20,00	9,03	45,15
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,86	48,60
III	Reform	30,00	8,55	28,50
	Total Komponen Pengungkit	60,00	22,44	37,40
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	5,65	56,50
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,48	94,80
3.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,73	97,30
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,65	66,50
	Total Komponen Hasil	40,00	31,50	78,75
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	53,94	

Hasil evaluasi pada area manajemen perubahan, area peraturan perundang-undangan, dan penataan dan penguatan organisasi dari tahun 2019 dan 2020 ada peningkatan. Adapun Hasil Antara Area Perubahan Tahun 2020 didapatkan dari masing-masing *Leading Sector* antara lain:

NO	HASIL ANTARA	SKALA	NILAI	%	SUMBER DATA
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	58,21 (Cukup)	58,21	Arsip Nasional RI
2	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0-100	30 (Kurang)	30,00	LKPP Republik Indonesia
3	Sistem Merit	0-400	132,5 (Buruk)	33,13	Komisi Aparatur Sipil Negara
4	Profesional ASN	0-100	61 (Rendah)	61,00	BKN
5	Maturitas SPIP	0-5	2,3	46,00	BPKP
6	Kapabilitas APIP	0-5	2	40,00	BPKP
7	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan	0-100	72,11	72,11	Ombudsman RI

Dari data diatas terdapat 5 sektor yang masih dibawah nilai 60,00 (Cukup), Kualitas Pengelolaan Arsip yang berada pada posisi 58,21 hal ini dikarenakan pengelolaan arsip statis, dinamis dan konvensional pada masing-masing OPD belum maksimal. Begitu juga dengan Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa yang berada pada nilai 30,00 (Kurang) dipengaruhi oleh Tenaga Fungsional Pengelola Barang Jasa yang belum terpenuhi. Sistem Merit yang Buruk dengan nilai 132,5 merupakan cambuk untuk perbaikan dimasa



mendaang, sistem merit yang baru diterapkan pada beberapa aspek manajemen ASN sehingga suatu instansi perlu dibina secara intensif. Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern juga masih rendah yaitu level 2,3.

Pada tingkat ini Pemkab Belitung telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Dan Kapabilitas APIP yang berada pada Level 2 juga belum maksimal pada Pemkab Belitung, APIP harus memiliki kapabilitas pada Level 3 agar mampu memberikan layanan *assurance* dan *advisory* untuk perbaikan manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. APIP Level 3 sebagai pondasi agar mampu berperan sebagai konsultan yang profesional (*trusted advisor*), sebagai *strategic business partner* bagi manajemen.

Komponen hasil antara lain:

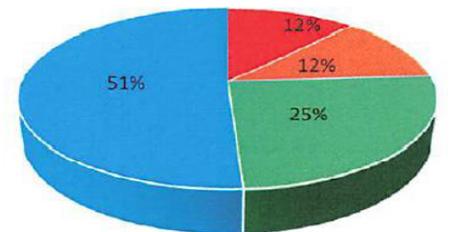
- ❖ Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung menunjukkan hasil yang cukup dengan nilai SAKIP 52, 14/ Predikat CC tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK pada tahun 2019;
- ❖ Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Pemerintah Kabupaten Belitung menunjukkan hasil sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

NO	HASIL SURVEI	INDEKS	
		2019	2020
1	Survei Eksternal Kulaitas Pelayanan	3,48	3,79
2	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,54	3,89

- ❖ Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung telah mampu meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan;
- ❖ Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 juga mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan sistem integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung telah mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi.

Hasil Survei Integritas Jabatan:

- ❖ Hasil Survei Integritas Jabatan Terhadap 100 Responden Pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung menunjukkan bahwa Indeks 3,58 dari skala 5. Secara keseluruhan, hanya 51% responden yang memahami kinerjanya, ukuran kinerja, dan kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Sedangkan 49% responden belum sepenuhnya memahami kinerjanya, ukuran kinerja atau kontribusinya terhadap kinerja organisasi.



- Tidak memahami kinerja, ukuran, dan kontribusi
- Hanya memahami kinerjanya
- Memahami kinerja dan ukuran atau kinerja dan kontribusi
- Memahami Kinerja, ukuran, dan kontribusi terhadap organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung oleh tim evaluator KemenPAN RB tahun 2020 terdapat 10 (dua belas) rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Hingga triwulan II Tahun 2021, monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2021 diperoleh sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI	PIC	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan Internaliasi Pelaksanaan RB Secara Masif Sampai Ke Tingkat opd, tidak hanya sebatas di Pokja tingkat Kabupaten, sehingga pembangunan dan perubahan akan merata sampai ke tingkat Kabupaten, sehingga pembangunan dan perubahan akan merata sampai ke tingkat OPD tidak hanya di level pusat;	Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung	1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023; 2. Pengaturan Ketentuan mengenai Tim RB Pemkab Belitung dalam Keputusan Bupati Belitung Nomor :188.45/339/KEP/VIII/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021;



Inspektorat Kabupaten
Belitung

3. Penyampaian Surat Sekretaris Daerah Nomor : 060/390/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Penyampaian Perbup Nomor 29 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 kepada seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Belitung;

4. Penyampaian Surat Sekretaris Daerah Nomor : 060/236/VIII/2021 tanggal 07 Juni 2021 perihal Pembentukan Agen Perubahan kepada seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Belitung;

5. Penyampaian Surat Sekretaris Daerah Nomor : 060/241/VIII/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Permintaan Penyampaian LKE Offline Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021 kepada seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Belitung;

6. Shering seasion dalam kunjungan Kerja Kemenko Polhukam terkait Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik pada 22 Juni 2021 bertempat di Ruang Rapat Pemkab Belitung;

7. Penyampaian Surat Sekretaris Daerah Nomor : 060/213/VIII/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Undangan Rapat Persiapan Penyampaian PMPRB Tahun 2021 tanggal 24 s/d 28 Mei 2021 bertempat di Ruang Rapat Bagian Organisasi Setda Kab Belitng bersama seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Belitung;

8. Berita Acara Kesepakatan Bersama dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemkab Belitung Nomor: 060/284/VIII/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang disepakati bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Pimpinan Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Belitung;

9. Pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 bertempat di Ruang Sidang Pemkab Belitung, diadakan Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Belitung Tahun 2021. Acara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Belitung, Bapak Isyak Meirobie, S. Sn., M.Si. dan dihadiri oleh seluruh OPD di lingkungan;

10. Dalam rangka lebih memperdalam pemahaman para asesor dan Tim Penilai Internal (TPI) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung untuk persiapan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, pada tanggal 10 Juni 2021 dilaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dengan menghadirkan narasumber Ibu Yulina, S.E., M.M., Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Prov. Kep. Bangka Belitung secara virtual;

11. Dalam rangka persiapan pelaksanaan reuiu/verifikasi terhadap hasil penilaian LKE (Lembar Kerja Evaluasi) PMPRB tingkat unit kerja/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Belitung dilaksanakan rapat *Entry Briefing* Tim Penilai Internal Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

12. Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Inspektorat Kabupaten Belitung menyelenggarakan Webinar Coaching Tata Cara Pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Reformasi



			Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2021. Acara yang menghadirkan narasumber Ibu Yulina, S.E., M.M., Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Prov. Kep. Bangka Belitung secara virtual tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Ir. Arpani selaku Inspektur Kabupaten Belitung dan diikuti oleh tim asesor pusat, asesor unit, tim RB pusat, tim RB unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, serta P2UPD dan auditor yang tergabung dalam TPI (Tim Penilai Internal) Reformasi Birokrasi.
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB secara berkala, sehingga dapat terlihat perkembangan dari rencana perubahan yang telah disusun. Monitoring dan evaluasi tersebut penting dilakukan dan ditindaklanjuti untuk mengetahui apakah terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RB, dan mencari solusi/ alternatif strategi yang mungkin lebih tepat dan efektif untuk pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;	Inspektorat Kabupaten Belitung Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung	1. Pemerintahan Kabupaten Belitung. Pada tanggal 27 Mei 2021, Inspektorat Kabupaten Belitung mengadakan webinar sosialisasi PMPRB Tahun 2021 dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si. dengan narasumber dari Kemen PANRB, yaitu Ibu Astri Mefayani, S.E. M.Ak. dan diikuti oleh seluruh Unit Kerja Kabupaten Belitung; 2. Pengembangan dan pemuktahiran data dan informasi Reformasi Birokrasi pada website rb.belitung.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat dan pegawai internal di Lingkungan Pemkab Belitung.
3.	Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hukum yang dibentuk;	Bagian Hukum Setda Kab. Belitung.	1. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kab Belitung dengan melakukan fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah kepada Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Belitung untuk Tahun 2021 dengan target 400 rancangan jumlah produk hukum daerah yang terharmonisasi dari Januari sampai dengan Desember 2021. 2. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hukum yang dibentuk dengan melakukan bimtek penyusunan produk hukum daerah dan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Belitung.
4.	Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah strategis dan konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta beberapa Surat Menteri Dalam Negeri terkait Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik;	Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung.	1. Bagian Organisasi telah mempunyai kajian penyederhanaan birokrasi yang terus berproses dibahas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindak lanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi. Dalam rangka Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/1970/OTDA tanggal 10 Maret 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemkab Belitung telah mengirim surat No 800/252/VIII/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal Penyampaian Data Hasil Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung. Usulan Penyederhanaan Struktural dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemkab Belitung melalui si OLA Kemendagri RI.
5.	Menyusun Peta Proses Bisnis dari level instansi hingga unit kerja sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit	Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung	1. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung



kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP;

ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/588A/KEP/VIII/2020 Tentang Penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

2. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung menyesuaikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung dan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan memperhatikan setiap jenjang organisasi sehingga selaras dengan kinerja Organisasi yang dtertuang dalam dokumen Peta Proses Bisnis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD masing-masing di Lingkungan Pemkab Belitung.

3. Seluruh SOP pada OPD di lingkungan Pemkab Belitung telah diterapkan, telah dilakukan penyusunan dan implementasi SOP di Pemkab Belitung sejak Tahun 2011 dan dievaluasi pada tahun 2016. Dengan ditetapkannya Peta Proses Bisnis pada Tahun 2020 yang menjadi bahan pada saat pelaksanaan evaluasi penyusunan SOP di lingkungan Pemkab Belitung Tahun 2021. Sebagian masih dalam proses penyusunan SOP yang diawali dengan Bimbingan Teknis dan Asistensi Penyusunan SOP pada awal tahun 2021.

6. Menyusun Grand design SPBE yang terpadu dan terintegrasi, sehingga esensi dilaksanakannya e-gov dapat tercapai yaitu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif dan transparan. Dengan diterapkannya SPBE yang terintegrasi ini juga diharapkan akan memudahkan pihak internal, sehingga tidak perlu berkali-kali memasukkan data yang sama untuk aplikasi yang berbeda-beda; dan bagi pengguna layanan, SPBE ini dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih prima, lebih mudah, transparan, dan meminimalisasi terjadinya praktik-praktik percaloan maupun pungli yang mungkin terjadi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung

1. Kebijakan Internal Arsitektur SPBE tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor: 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Percepatan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Belitung.

2. Tim Koordinasi Spbekabupaten Belitung Telah Dibentuk Untuk Melaksanakan Tugas Dan Program Kerjanya Sesuai Dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/145A/KEP/DISKOMINFO/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Belitung.

3. Layanan Publik Berbasis Elektronik juga telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reuiv dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Pemerintah Daerah melalui Layanan Publik Kependudukan e-Besilak, Sistem Pelayanan Pajak Daerah Bpprd Dan Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 Sehat (Sistem Pelayanan Kesehatan Terintegrasi) Dan Besadu Belitung.

7. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/ talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung

Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai, dengan adanya:
1. Surat Bupati Belitung Nomor 800/2134/BKPSDM Tanggal 11 November 2019 Tentang Permohonan Rekomendasi Evaluasi dan Penilaian Kinerja Serta Uji Kesesuaian PTT Pratama Kabupaten Belitung.

2. Surat Panitia Seleksi JPT Pratama Nomor 011/Pansel.UK-JPT Pratama /2019 Tanggal 09 Desember 2019 Tentang Laporan/Rekomendasi Hasil Uji Kesesuaian (JOB PIT) JPT Pratama.



		<p>3. Surat KASN Nomor B-4018/KASN/11/2019 Tanggal 21 November 2019 Tentang Rekomendasi Uji Kompetensi dalam Rangka Mutasi/Rotasi di Lingkungan Pemerintah Kab.Belitung.</p> <p>4. Surat Bupati Belitung Nomor 821/2316/BKPSDM/2019 Tanggal 02 Desember 2019 Tentang Evaluasi/Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi PTT Pratama Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.</p> <p>5. Surat Bupati Belitung Nomor 800/2406/BKPSDM/2019 Tanggal 17 Desember 2019 Tentang Hasil Uji Kesesuaian dan Rencana Rotasi/Mutasi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.</p> <p>6. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-211/KASN/01/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama Di Lingkungan Pemkab.Belitung, Nomor B-1070/KASN/04/2020 Tanggal 03 April 2020 Tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemkab.Belitung,</p>
<p>8. Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja dibawahnya, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja dari level Kabupaten sampai ke individu pegawai;</p>	<p>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung</p>	<p>1. Pada Tahun 2020 telah dilakukan revisi terhadap 14 OPD untuk penyempurnaan IKU dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan hasil Evaluasi Tahap Awal SAKIP oleh KemenPAN RB.</p> <p>2. Tahun 2021 dilakukan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sejalan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung.</p> <p>3. Workshop Penyusunan Cascading Kinerja yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan penjabaran kinerja dari level Kabupaten sampai ke level individu juga dilaksanakan pada Bulan September dengan Narasumber dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perpagangan tangan pihak Kementerian PAN dan RB RI dalam mendorong Reformasi Birokrasi di Daerah.</p>
<p>9. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU pada Butir 8 diatas. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan, khususnya di masa pandemi sekarang ini, dimana anggaran diprioritaskan untuk kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional;</p>	<p>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung</p> <p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung</p>	<p>1. Tahun 2021 dilakukan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sejalan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.</p> <p>2. Refocusing Anggaran dan Inovasi Pemerintah Daerah dilakukan untuk Minimalisir Dampak Pandemi Covid-19, <i>Refocusing</i> anggaran dari Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi pada Kabupaten Belitung.</p> <p>3. Rapat Koordinasi Percepatan Anggaran Covid-19 di Kabupaten Belitung dilaksanakan secara <i>daring</i>, acara tersebut diikuti oleh Jajaran pada Pemerintah Kabupaten Belitung, Inspektorat dan BPKAD Kabupaten Belitungserta pihak Kajari Belitung beserta jajaran.</p>



<p>10. Meningkatkan kapabilitas, kompetensi dari APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sehingga dapat lebih berperan dan memastikan bahwa segala kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan kebijakan pengawasan terimplementasi dengan baik. APIP juga harus proaktif untuk melakukan monev atas kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan atas pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan dampak positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kabupaten Belitung.</p>	<p>Inspektorat Kabupaten Belitung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kabupaten Belitung dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51A Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung, melaksanakan acara Pembinaan Pengawasan dan Asistensi Pemerintah Desa Tahun 2021 pada seluruh desa yang ada di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belitung. 2. APIP telah menjalankan perannya sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai contoh APIP telah menjalankan fungsi konsultatif dalam hal persetujuan penambahan persyaratan teknis sebagai syarat pada dokumen tender kegiatan pengadaan barang dan jasa di Unit Kerja Pemkab Belitung. 3. APIP telah menjalankan perannya sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Aktif dalam melaksanakan reviu seperti melaksanakan reviu RKA PD, RPJMD, SAKIP, LPPD, LKPD, LK OPD, Reviu DAK Fisik, serta evaluasi SAKIP. 4. APIP ikut serta dalam pembahasan Evaluasi RPJMD sesuai dengan Kep Bupati No. 188.45/625/Kep/ Bappeda 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM 2018-2023 dan ikut serta dalam rapat penyusunan RPJMD dan perubahannya termasuk dari sisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5. Inspektorat juga ikut aktif dalam acara proses perencanaan lainnya yaitu dalam rasionalisasi pagu indikatif RKPD Kabupaten Belitung.
---	---------------------------------------	--

Pemerintah Kabupaten Belitung telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi yaitu Ketentuan mengenai Tim RB Pemkab Belitung dalam Keputusan Bupati Belitung Nomor :188.45/339/KEP/VIII/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 dan melaksanakan tugas sesuai Rencana Kerja yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2010-2023 yang telah diformasikan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dalam rangka lebih memperdalam pemahaman para asesor dan Tim Penilai Internal (TPI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk persiapan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, dengan narasumber dari Inspektorat Prov. Kep. Bangka Belitung dan dilaksanakan secara virtual. Untuk persiapan pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap hasil penilaian LKE (Lembar Kerja Evaluasi) PMPRB tingkat unit kerja/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung maka dilaksanakan rapat *Entry Briefing* Tim Penilai Internal Reformasi Birokrasi Tahun 2021. Inspektorat Kabupaten Belitung menyelenggarakan Webinar Coaching Tata Cara Pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Reformasi Birokrasi



Foto: Webinar Coaching Tata Cara Pengisian LKE dan Entry Briefing Tim Penilai Internal Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Kabupaten Belitung Tahun 2021. Acara diikuti oleh tim asesor pusat, asesor unit, tim RB pusat, tim RB unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, serta P2UPD dan auditor yang tergabung dalam TPI (Tim Penilai Internal) Reformasi Birokrasi.

PMPRB ini telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik serta dikomunikasikan pada Pusat maupun Unit/ OPD. Keterlibatan pimpinan secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan dengan rapat-rapat bersama Tim RB, Assesor Unit dan Assesor Pusat dan TPI di Lingkungan Pemkab Belitung. Pada tahun 2021 terdapat penambahan unit kerja PMPRB Kabupaten Belitung sebanyak 15 unit kerja ibanding tahun sebelumnya 2020 sebanyak 10 unit kerja.

Untuk memenuhi amanat Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Republik Indonesia, secara bertahap Pemerintah Kabupaten Belitung telah melaksanakan Penyederhanaan Struktural dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, hal ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada Publik.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:



Foto: Bupati Belitung H Sahani Saleh melantik 218 orang pejabat fungsional Desember 2021

- a. Mengoptimalkan peran fungsi *agent of change* dan *role model* yang ditetapkan untuk memperluas penyebaran informasi pelaksanaan reformasi birokrasi keseluruhan unit dan pemangku kepentingan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- b. Melaksanakan *assessment* terhadap seluruh pegawai sebagai dasar untuk melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan segera melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- c. Meningkatkan keterlibatan pimpinan tingkat kabupaten maupun tingkat OPD dalam implementasi sistem AKIP untuk mempercepat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Belitung;
- d. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan benturan kepentingan;
- g. Penambahan unit kerja Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM);
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan serta menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 2 “Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Sasaran 5 Terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah



Sasaran 6 Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur
Sasaran 7 Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

SASARAN 5 : Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023. Capaian kinerja tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2021 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Opini BPK	Skala	WDP	WTP	n/a	-	-	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	CC	BB	n/a	-	-	BB

(*)Indikator sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib

Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui 2 (dua) indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target BB. Dari dua indikator tersebut, indikator Opini BPK belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil audit BPK dan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung juga belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

➡ **Opini BPK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sampai saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2021 sedang dalam proses penyusunan dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan akan diterima setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI selesai.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2021:

Tabel 2.55
Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung

TAHUN	OPINI BPK RI
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	n/a*

(*) masih menunggu hasil audit BPK RI

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 83.A/LHP/XVIII.PPG/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Pencapaian kinerja sasaran 5 melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Setiap strategi memiliki arah kebijakan masing-masing yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja sasaran.

Ada 3 (tiga) arah kebijakan dari strategi meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu: 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi; 2) Meningkatkan tata kelola aset dan pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan 3) Menerapkan e-budgeting yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti rekomendasi atas pemeriksaan BPK, yaitu: Pengamanan administrasi dan hukum serta penatausahaan barang milik daerah berupa kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Belitung belum optimal.

Adapun jumlah kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas hasil inventarisasi per tanggal 18 Januari 2022 adalah sebanyak 914 (sembilan ratus empat belas) unit dengan rincian sebagai berikut:

- Kendaraan roda dua sebanyak 663 unit
- Kendaraan roda tiga sebanyak 42 unit
- Kendaraan roda empat sebanyak 165 unit
- Kendaraan roda lebih dari empat sebanyak 44 unit

Adapun jumlah OPD yang belum menyampaikan data inventarisasi per tanggal 18 Januari 2022 masih terdapat 6 OPD yaitu Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, Kecamatan Selat Nasik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung.

Berdasarkan data rekapitulasi hasil inventarisasi ini, seluruh data kendaraan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitung menjadi jelas dan tertib sehingga akan memudahkan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait pengamanan administrasi dan pengamanan hukum atas kendaraan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitung. Berdasarkan data rekapitulasi hasil inventarisasi ini juga, data kendaraan OPD telah dilakukan pemuktahiran di dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

Pencatatan dan Penatausahaan Aset Biologis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan pada Aset Tetap Lainnya Belum Memadai. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koreksi penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020 (Audited) senilai Rp80.775.000,00 yang terdiri dari induk kerapu sebanyak 12 ekor senilai



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai surat kepala BPK Perwakilan Prov. Kepulauan Babel Nomor : 83.A/S-HP/XVIII.PPG/05/2021 tanggal 21 Mei 2021



Rp58.800.000,00 (8 ekor induk kerapu senilai Rp39.200.000,00 dan 4 ekor induk kerapu yang pada awalnya tidak diketahui nilainya yaitu senilai Rp19.600.000,00) pada UPT BBI Tanjung Binga, serta calon induk ikan nila merah sebanyak 4 paket senilai Rp13.200.000,00 dan induk lele mutiara sebanyak 3 paket senilai Rp8.775.000,00 pada UPT BBI Membalong.

Aset tetap lainnya 9135 senilai Rp1.526.080.773 sebagai aset ekstrakompabel Pemerintah Kabupaten Belitung menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tetap Lainnya sebanyak 9.135 unit senilai Rp1.526.080.773,00 berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan berharga satuan di atas nilai kapitalisasi serta kondisi baik dan rusak ringan dicatat pada Buku Inventaris sebagai aset ekstrakompabel. Terhadap rekomendasi ini telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya.

Melengkapi Informasi Aset Tetap Jalan sesuai Kondisi dan Ruas Jalan Pemerintah Kabupaten Belitung menindaklanjuti rekomendasi ini dengan membuat surat kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belitung Nomor : 030/779/BPKAD tanggal 11 Juni 2021, Hal Tindak Lanjut Temuan BPK Atas Penyesuaian Jalan Kabupaten Berdasarkan Ruas Jalan Kabupaten Belitung. Atas temuan ini pada tahun 2021 ini belum terdapat progress tindak lanjut yaitu masih sama 118 (360-242) atau 32,78% karena masih dalam proses identifikasi ulang jalan yang disesuaikan dengan ruas jalan kabupaten.

Aset Lainnya dengan kondisi rusak berat dan yang tidak diketahui keberadaannya belum ditelusuri dan diproses untuk penghapusan senilai Rp200.691.067,00. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan memproses penghapusan atas peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang tidak diketahui keberadaannya dan rusak tidak terbatas pada jumlah yang terdapat di dalam temuan pemeriksaan, akan tetapi ditindaklanjuti pada seluruh unit pengguna barang (UPB) dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

Dalam rangka mempertahankan Opini penilaian BPK atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan beberapa upaya terutama terkait proses pengelolaan keuangan selama tahun 2021 serta penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan tahun anggaran 2021 dan laporan barang milik daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 Berdasarkan surat edaran Bupati Belitung Nomor : 900/1986/BPKAD tanggal 17 Desember 2021 Hal : Pedoman Penyusunan Laporan keuangan OPD Tahun 2021, maka kepada seluruh OPD agar menindaklanjuti dengan: Menyampaikan data awal paling lambat tanggal 11 Januari 2022.

Menyampaikan Laporan Keuangan OPD ke BPKAD paling lambat tanggal 10 Februari 2022, Penyusunan/ Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah tahun 2021. Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan keuangan Pemerintah daerah tahun 2021, Kepala BPKAD Kabupaten Belitung telah mengeluarkan surat nomor: 030/1961/BPKAD tanggal 13 Desember 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala OPD/ Unit Kerja selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, Hal Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021.

Berdasarkan surat tersebut, batas penyampaian laporan barang pengguna tahun 2021 adalah pada tanggal 4 Januari 2022, namun sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 masih terdapat beberapa OPD/ UPB yang belum menyelesaikan/ menyampaikan laporan dimaksud.

Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas manajemen aset pada tahun 2021 antara lain dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

(1) Inventarisasi Aset

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah, antara lain:

- Inventarisasi barang milik daerah berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- Inventarisasi aset keberadaan tidak ada
- Inventarisasi kendaraan dinas operasional

(2) Penilaian Aset

Penilaian aset dilakukan untuk pelaksanaan lebih lanjut atas:

(3) Pemanfaatan



Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan penilaian untuk tujuan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang sebanyak 9 (sembilan) usulan.

(4) Penjualan (pelelangan umum)

Mekanisme penjualan melalui pelelangan umum. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui internet (*e-auction*) dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*). Selama tahun 2021 terdapat penilaian untuk penjualan sebanyak 5 (lima) usulan

(5) Penyertaan Modal

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2021 direncanakan dalam bentuk uang dan bentuk barang dan harus dilakukan penilaian apabila penyertaan modal dilakukan dalam bentuk barang. Selama tahun 2021 terdapat penilaian untuk penyertaan modal sebanyak 1 (satu) usulan Penyelesaian Aset Tumpang Tindih Akibat Pemekaran.

Penyelesaian permasalahan aset tumpang tindih akibat pemekaran antara lain aset P3D yang belum diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atas perubahan kewenangan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, serta penyelesaian hibah akibat pembiayaan bersama (*cost sharing*) pembebasan lahan untuk peningkatan jalan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

(6) Penghapusan Aset Kondisi Rusak Berat

Selama tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung telah memproses sebanyak 9 (sembilan) usulan yang disampaikan oleh OPD/UPB. Adapun jumlah rincian usulan pemusnahan adalah sebanyak 1.334.022 buah/ unit dengan nilai sebesar Rp4.799.469.760,10. Untuk kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan.

Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa. Adapun barang yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah desa tersebut adalah kelompok tanah, bangunan dan jalan, irigasi dan jaringan.

Selama tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung telah memproses sebanyak 11 (sebelas) usulan. Terdapat beberapa usulan yang belum terselesaikan dan dalam proses penyelesaian.

Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas perlu adanya peningkatan pelayanan administrasi dan mekanisme kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, maka aparatur dituntut untuk lebih memperbaiki pelayanan administrasi yang lebih baik lagi. Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran dengan beberapa kegiatan antara lain: Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Pendataan Wajib Pajak PBB P2, Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB P2, Monitoring Pajak Daerah, Sosialisasi Pajak Daerah, Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Diharapkan Pelayanan administrasi yang diberikan kepada wajib pajak dapat diproses dengan cepat, dengan mengacu standar pelayanan daerah.

Secara umum pencapaian kebijakan dari beberapa program di tahun 2021 menunjukkan hasil yang lumayan baik, hal ini terlihat dari Pendapatan Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 964.352.113.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.008.882.792.291,45. Sumber dari Penerimaan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 secara terperinci dapat dijabarkan pada tabel berikut:



Tabel. 2.56
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2021

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	PAJAK DAERAH	73,233,194,752.00	81,758,425,816.47	8,525,231,064.47
2	RETRIBUSI DAERAH	8,168,099,200.00	7,594,676,094.00	(573,423,106.00)
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4,354,310,000.00	4,281,969,912.36	(72,340,087.64)
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	52,658,653,900.00	83,071,062,930.15	30,412,409,030.15
A.		138,414,257,852.00	176,706,134,752.98	38,291,876,900.98
				-
1	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	54,448,100,000.00	84,457,661,765.00	30,009,561,765.00
2	DANA ALOKASI UMUM	453,343,018,000.00	452,942,728,100.00	(400,289,900.00)
3	DANA ALOKASI KHUSUS	139,657,697,000.00	129,582,596,757.00	(10,075,100,243.00)
4	DANA DESA	50,127,737,000.00	49,929,359,000.00	(198,378,000.00)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT	697,576,552,000.00	716,912,345,622.00	19,335,793,622.00
5	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	52,195,808,248.00	49,804,177,816.47	(2,391,630,431.53)
B.		749,772,360,248.00	766,716,523,438.47	16,944,163,190.47
				-
1	PENDAPATAN HIBAH	39,585,620,000.00	39,262,663,106.00	(322,956,894.00)
2	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	36,579,875,300.00	26,197,470,994.00	(10,382,404,306.00)
C.	JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76,165,495,300.00	65,460,134,100.00	(10,705,361,200.00)
A+B+C	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	964,352,113,400.00	1,008,882,792,291.45	44,530,678,891.45

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2021

Hal ini sejalan dengan Hasil Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Keadaan s/d Desember 2021) dimana Kabupaten Belitung meraih Peringkat 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah se Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2021 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel. 2.57
Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Keadaan s/d Desember 2021)

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI (Rp)	PERSENTASE (%)			
				YG DICAPAI	SEHARUSNYA	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KABUPATEN BANGKA	Rp. 135.750.792.450,00	Rp. 153.968.359.606,41	113,42	100,00	13,42	-
2	KABUPATEN BELITUNG	Rp. 138.414.257.852,00	Rp. 176.706.134.752,98	127,66	100,00	27,66	-
3	KOTA PANGKALPINANG	Rp. 143.391.826.819,00	Rp. 168.863.503.538,32	117,76	100,00	17,76	-
4	KABUPATEN BANGKA SELATAN	Rp. 63.206.413.406,32	Rp. 61.994.232.136,17	98,08	100,00	-	(1,92)
5	KABUPATEN BANGKA TENGAH	Rp. 96.330.016.700,00	Rp. 83.428.374.333,18	86,61	100,00	-	(13,39)
6	KABUPATEN BANGKA BARAT	Rp. 76.205.606.356,00	Rp. 56.574.218.634,36	74,24	100,00	-	(25,76)
7	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Rp. 111.210.150.282,00	Rp. 116.697.543.709,74	104,93	100,00	4,93	-
	JUMLAH	Rp. 764.509.063.865,32	Rp. 818.232.366.711,16	107,03	91,67	-	15,36

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2021

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung meningkat. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah berusaha untuk menyusun dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini sejalan dengan diraihnya predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang masih



harus dibenahi adalah berkenaan dengan penataan aset di perangkat daerah hal ini terus dilakukan untuk tetap terus mempertahankan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung dan mempertahankan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

➡ Nilai SAKIP Kabupaten Belitung

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ada 5 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Kedua, pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Ketiga, pelaporan kinerja, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Keempat, evaluasi kinerja, terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Kelima, pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya. Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (SANGAT BERHASIL) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Belitung dari tahun 2018 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.58
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung

KOMPONEN	BOBOT	2018	% kinerja komponen terhadap bobot	2019	% kinerja komponen terhadap bobot	2020	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	35	17.62	50.34	18.83	53.8	22.17	63.34
Pengukuran Kinerja	20	11.24	56.2	11.00	55	12.76	63.80
Pelaporan Kinerja	15	9.32	62.13	7.88	52.53	9.72	64.80
Evaluasi Kinerja	10	5.34	53.4	4.53	45.3	4.53	45.30
Capaian Kinerja	20	6.75	33.75	9.90	49.5	10.85	54.25
Total	100	50.27		52.14		60.03	
Kategori		CC		CC		B	

Sumber : Bagian Organisasi Setda 2021

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebesar 60.03, dengan kategori B (Baik). Dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018 dengan kategori CC, ada kenaikan sebesar 7.89 poin. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 komponen penilaian, ada 2 komponen yang mengalami peningkatan, yaitu perencanaan kinerja meningkat sebesar 3.34 poin, pengukuran kinerja meningkat sebesar 1.76 poin, pelaporan kinerja meningkat sebesar 1.84 poin dan capaian kinerja meningkat sebesar 0.95 poin. Sedangkan 1 komponen evaluasi kinerja tetap tidak mengalami peningkatan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Pada Tahun 2021 dilaksanakan orientasi perubahan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal penyesuaian terhadap beberapa peraturan dan kebijakan yang baru. Beberapa aturan yang dijadikan perubahan antara lain Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah



Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.



Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra dan juga perjanjian kinerja. Pimpinan memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang tergambar dalam Cascading Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja. Seluruh Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, Laporan capaian kinerja Tahunan, Triwulanan, Laporan Dalev Pelaksanaan RKPD dan Laporan Evaluasi RENJA per OPD, ditambahkan dengan Laporan Realisasi Fisik dan

Kegiatan Bulanan setiap OPD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh Kepala OPD beserta staf perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi secara daring melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* yang bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB Republik Indonesia, BPKP Perwakilan Provinsi Kep. Babel, Inspektorat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kep. Babel.

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategi, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama ke level unit organisasi yang lebih rendah. Mengingat pentingnya cascading yang akan merumuskan sasaran strategi dan indikator kinerja utama ke tingkat unit organisasi yang tingkatnya lebih rendah maka dilaksanakan Workshop Penyusunan Cascading di Lingkungan Pemkab Belitung yang melibatkan seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Belitung di Fasilitas oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Virtual Zoom Meeting.

Dari data di atas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori B atau nilai dalam *range* 60 – 70. Ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan), kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kondisi ini tentunya kurang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sementara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain; (1) Azas



Bimbingan Teknis mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh Kepala OPD beserta staf perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kep. Babel



Kepastian Hukum; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Azas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas.

Pencapaian kinerja sasaran Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui strategi, yaitu: meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Adapun arah kebijakan dalam strategi ini adalah Menerapkan *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)* untuk sisten informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, hal ini telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung sejak tahun 2020.

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2021 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah antara lain program perencanaan pembangunan daerah, dengan upaya sinergitas perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten, pengendalian dan penyusunan RKPD, Penyusunan RKPD, pengelolaan aplikasi e-planning, penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung, sosialisasi perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian dan evaluasi program inovasi daerah.

Selanjutnya Pencapaian kinerja sasaran Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui strategi, yaitu meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi pembangunan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini diarahkan pada pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Upaya pencapaian kinerja sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Komitmen Pimpinan untuk meraih Opini WTP dan meningkatkan nilai SAKIP;
- Perbup tentang Perkin sampai tingkat eselon IV;
- Penetapan Indikator Kinerja Individu.

Namun demikian dalam upaya pencapaian kinerja sasaran terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu:

- Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, dikarenakan: pengamanan aset, terutama aset tanah bawah jalan yang belum memiliki sertifikat, serta aset yang tidak diketahui keberadaanya;
- pengelolaan dan penataan aset oleh perangkat daerah yang belum optimal;
- belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah, dikarenakan:

- belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal;
- belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah, dikarenakan:

- integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur;
- sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

Belum optimalnya Pelayanan publik, dikarenakan:

- kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal;
- keterbukaan informasi publik yang masih kurang;



- pelayanan publik yang masih kurang;
- terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik;
- pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
- Belum terdapat e-sakip sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Belitung, sehingga pengukuran secara berjenjang pada perangkat daerah belum optimal sehingga capaian atau perkembangan kinerja belum dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat;
- Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2021 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa datang dalam upaya meningkatkan kinerja sasaran birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang sebagai berikut :

- Terus melakukan upaya penataan aset yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
- Membangun sistem teknologi informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.59
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih , Transparan dan Akuntabel

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1	Pengelolaan keuangan daerah	115.055.322.120,00	111.900.905.474,00	97,26
2	Pengelolaan barang milik daerah	1.050.584.820,00	503.833.285,00	47,96
3	Pengelolaan pedapatan daerah	1.320.092.925,00	813.748.650,00	61,64
4	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	590.193.870,00	494.237.154,00	83,74
5	Koordinasi dan sinkronisasi perenanaan pembangunan daerah	154.587.590,00	90.544.960,00	58,57
6	Penyelenggaraan pengawasan	646.286.960,00	200.878.371,00	31,08

Sehingga untuk Sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel masih menunggu hasil Audit dari BPK RI, dengan perse ntase realisasi anggaran 67,77% dan persentase per sasaran 95,74% maka terdapat efektifitas dan efesiensi 4,26%.

SASARAN 6 : Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Profesional ASN dengan target “75”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional Kabupaten Belitung Tahun 2021.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	2021		Capaian (%)	Kategori	Akhir
			RPJMD 2018	Target	Realisasi			RPJMD 2023 Target
1	Indeks Profesional ASN	Skala	62	75	33,80	45,07	K	76



Dapat dijelaskan bahwa capaian indikator sasaran Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional, yaitu Indeks Profesional ASN tahun 2021 sebesar 33.80 menurun dari tahun sebelumnya yang semula 72,86 di tahun 2020. Artinya belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu dengan capaian 45,07%.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permenpan RB No. 38 Tahun 2019). Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun indikator profesionalitas ASN adalah pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan memiliki disiplin yang tinggi.

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Kepegawaian Nasional. Sumber Data yang digunakan untuk mengukur IP ASN adalah data SAPK yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Adapun unsur-unsur yang dinilai yaitu Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi (kediklatan), Kinerja dan Disiplin dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91% - 100% : Sangat Tinggi
- Nilai 81% - 90% : Tinggi
- Nilai 71% - 80% : Cukup/Sedang
- Nilai 61% - 70% : Rendah
- Nilai < 60% : Sangat Rendah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah :

- Kualifikasi, dengan nilai maksimal 25
- Kompetensi, dengan nilai maksimal 40
- Kinerja, dengan nilai maksimal 30
- Disiplin, dengan nilai maksimal 5
- Total nilai maksimal 100

Kualifikasi, meliputi data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, Kompetensi, meliputi data dan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas. indikator yang digunakan adalah :

Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis, Seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kinerja, meliputi data dan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku PNS.

Disiplin, meliputi data dan informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Data hukuman disiplin tersebut telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir).

Realisasi kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2021 berdasarkan perhitungan Badan Kepegawaian Negara adalah 45,07 Hasil IP ASN Tahun 2021 sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 70/B-BH.02.01/SD/C/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021, Hasil sementara Pengukuran IP ASN PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung adalah :

Jumlah PNS yang diukur	= 3.015 PNS
Nilai IP ASN	= 33,80 (tiga puluh tiga koma delapan nol)
Kategori	= Sangat Rendah

Mekanisme penginputan setiap unsur instrument pengukuran dilakukan melalui updating pada aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik Badan Kepegawaian Negara.



Nilai pengukuran IP ASN yang dilaporkan oleh BKN berdasarkan data PNS yang telah diupdate pada aplikasi SAPK. Berdasarkan surat BKN tersebut, nilai IP ASN tersebut bersifat sementara dan dapat berubah, apabila data masing-masing PNS pada aplikasi SAPK telah diupdate, terutama data yg diupdate menyangkut setiap unsur instrument yang menjadi pengukuran IP ASN, yaitu : *kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin*.

Maka Strategi peningkatan nilai IP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yaitu mengingat bahwa pengukuran nilai IP ASN dilakukan dengan menarik data SAPK milik BKN, maka data PNS Pemkab Belitung pada aplikasi SAPK harus selalu *diupdate*.

Tabel 2.61
Perbandingan IP ASN Tahun 2021 di Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	IP ASN Tahun 2021
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	49.68
Pangkal Pinang	31.89
Bangka	44.61
Bangka Barat	43.36
Bangka Selatan	28.20
Bangka Tengah	32.36
Belitung	33.80
Belitung Timur	50.98

Tabel 2.62
Indeks Profesional ASN Tahun 2019 s.d 2021

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	IP ASN
2019	12,25	33,65	25,07	4,99	75,96
2020	12,18	30,62	25,06	4,99	72,86
2021	12,53	13,94	2,34	5,00	33,80

Masih kurangnya integritas dan kompetensi profesional aparatur menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. SDM aparatur merupakan pelaku pelayanan publik. SDM aparatur yang kurang profesional dapat berdampak buruk secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur ini diarahkan pada optimalisasi kinerja pegawai berbasis teknologi, penataan manajemen sumber daya aparatur.

Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

Strategi jangka pendek, dalam rangka memperbaiki nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 :

Mengingat bahwa berdasarkan hasil pengukuran nilai IP ASN tahun 2021 salah satu unsur pengukuran IP ASN yaitu, *kinerja* masih sangat rendah, maka akan segera dibuatkan surat Edaran ke seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang mewajibkan seluruh OPD untuk segera melakukan input data nilai SKP seluruh pegawai pada aplikasi *e-lapkin*. karena berdasarkan hasil monitoring data *e-lapkin*, masih banyak OPD yang belum melakukan input data nilai SKP seluruh PNS setiap tahun pada aplikasi ini. Data SKP PNS yang telah diinput pada aplikasi ini, akan segera diekpor ke aplikasi SAPK milik BKN, sehingga data kinerja PNS mengalami perubahan (*update*).

Mengupdate/menyelesaikan data kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2021 yang belum selesai diinput pada aplikasi SAPK, dengan demikian diharapkan terjadi perubahan pengukuran pada instrumen kompetensi pada IP ASN tahun 2021.

Strategi jangka panjang:

Untuk peningkatan nilai kualifikasi pendidikan, karena merupakan indikator yang memiliki nilai (maksimal 25) dalam pengukuran IP ASN, maka :



PNS yang kualifikasi pendidikannya belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan minimal sesuai persyaratan jabatan, baik itu dalam jabatan administrator (setara eselon III), jabatan pengawas (setara eselon IV), dan jabatan fungsional, segera diwajibkan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sesuai syarat jabatannya. hal ini perlu dilakukan karena masih terdapat PNS yang kualifikasi pendidikannya belum sesuai dengan syarat jabatan. termasuk juga Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan, yang berasal dari Pejabat Pengawas (Setara eselon IV). Mekanisme Peningkatan pendidikan ini tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, yang dalam hal ini di atur oleh Peraturan Menteri PAN dan RB. Untuk peningkatan nilai kompetensi, karena kompetensi merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi (maksimal 40) dalam pengukuran IP ASN, maka :

Perlunya dukungan dan komitmen dalam hal penganggaran guna peningkatan kompetensi bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang berdasarkan ketentuan harus mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan sesuai jenjang. Karena berdasarkan data pengembangan kompetensi bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, masih banyak pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. Hal ini menjadi penting, untuk meningkatkan nilai kompetensi, terutama bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. namun hal ini tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah. Karena biaya yang diperlukan untuk mengikuti diklat ini sangat besar.

Setiap OPD memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi masing-masing PNS, sesuai dengan anggaran yang tersedia. Baik pengembangan kompetensi yang bersifat klasikal (di dalam kelas), maupun non klasikal (di luar kelas). selanjutnya setiap pengelola kepegawaian pada masing-masing OPD harus melakukan update data pengembangan kompetensi setiap PNS pada aplikasi SIMPEG dan melaporkan secara berkala (setiap tiga bulan) laporan hasil pengembangan kompetensi PNS kepada BKPSDM Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya data tersebut dilakukan update pada aplikasi SAPK milik BKN.

Untuk peningkatan nilai Kinerja, karena merupakan indikator yang memiliki nilai (maksimal 30) dalam pengukuran IP ASN, maka Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung wajib melakukan input data nilai SKP setiap tahun bagi seluruh pegawai pada aplikasi *e-lapkin*. Data SKP PNS yang telah diinput pada aplikasi ini, akan segera diekpor ke aplikasi SAPK milik BKN.

Perlu dibentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, yang secara berkala melakukan monitoring hasil pengukuran IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung pada aplikasi SAPK milik BKN pada setiap tahun berjalan. Tim ini juga bertugas untuk membantu dan mempercepat proses input data PNS yang menjadi komponen pengukuran IP ASN ke dalam aplikasi SAPK milik BKN.

Setiap OPD perlu membentuk tim untuk mengevaluasi pelaksanaan IP ASN pada masing-masing OPD, khususnya untuk pelaksanaan kompetensi masing-masing pegawai, karena setiap PNS diwajibkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP setiap tahun.

Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan periode yang akan datang (perumusan indikator yang bersifat *outcome*).

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung harus senantiasa ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi perangkat daerah, melainkan juga terkait dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara) dan juga pihak-pihak lainnya.



Tabel 2.63

Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Kepegawaian daerah	2.141.831.325,00	1.316.666.012,00	61,47
2.	Pengembangan sumber daya manusia	812.266.870,00	597.245.776,00	73,53

Sehingga untuk sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional dengan rata-rata capaian 67,50% dengan persentase per sasaran 64,79% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 35,21%.

SASARAN 7 : Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas

Capaian kinerja sasaran “Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target “85”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas Kabupaten Belitung Tahun 2021.

Tabel 2.64

Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		2021		Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
			RPJMD 2018	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Survei Kepuasan Masyarakat	Skala	76,81	85	84,80	99.76	SB	88

Realisasi kinerja indikator rata-rata indeks kepuasan masyarakat berdasarkan tabel di atas telah belum mencapai target yang ditetapkan, capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,76%. Sedangkan untuk target akhir RPJMD memerlukan peningkatan 3,2 poin. Kondisi tersebut perlu usaha meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga nilai survei kepuasan masyarakat meningkat untuk seluruh unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Berikut nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung dari Tahun 2017- 2021 :

Tabel 2.65

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021

TAHUN	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat
2017	81,67
2018	76,81
2019	82,54
2020	84,84
2021	84,80

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab Belitung 2021

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Mekanisme survei dilakukan dengan menetapkan 48 Perangkat Daerah yang terdiri dari 20 Dinas, 6 Badan, 5 Kecamatan, 7



Kelurahan dan 10 Unit Pelayanan sebagai sampling serta jumlah responden pada seluruh pelayanan di sebar sebanyak 17.625 kuesioner dan didapat responden sebanyak 13.324 responden atau sebanyak 75,6%. Hal ini dikarenakan adanya pandemic COVID-19 sehingga ada beberapa pembatasan pelayanan kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan.

Dari hasil survei didapatkan kesimpulan secara menyeluruh bahwa terdapat 10 OPD/UPP yang memperoleh nilai diatas 88,31 (Sangat Baik), 38 OPD/UPP yang memperoleh nilai direntang 76,61-88,30 (Baik) dan tidak ada OPD/UPP yang memperoleh nilai direntang 65-76,60 (Kurang Baik). Nilai tertinggi diraih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Nilai 96,53 sedangkan yang terendah diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai 77,50.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan IKM Tahun 2020 dengan nilai 84,80.

Tabel 2.66
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per OPD Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	IKM 2017	IKM 2018	IKM 2019	IKM 2020	IKM 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,36	50,12	87,07	87,18	83,15
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	82,61	75,35	77,39	80,43	77,50
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	79,66	82,86	81,85	82,82	86,63
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,49	79,49	82,51	82,48	82,59
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	84,38	85,17	85,75	86,05	90,16
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	97,99	87,95	80,30	85,07	88,97
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	78,49	85,88	84,42
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	82,25	82,93	81,13
9	Dinas Kesehatan	-	-	84,65	85,01	81,08
10	Dinas Pariwisata	-	-	-	85,21	78,80
11	Dinas Perikanan	-	-	-	92,6	93,36
12	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	77,99	77,85	82,6	84,69	81,89
13	RSUD dr. H. Marsidi Judono	80,66	78,82	79,71	82,59	84,34
14	Kecamatan Tanjungpandan	80,95	84,03	81,47	83,99	84,41
15	Kecamatan Badau	76,20	70,95	90,41	90,14	93,87
16	Kecamatan Sijuk	83,03	91,37	83,82	87,32	86,65
17	Kecamatan Membalong	81,60	79,30	81,47	90,28	85,35
18	Kecamatan Selat Nasik	80,33	-	95,61	79,14	79,14
19	Kelurahan Kota	90,65	54,14	83,93	94,72	83,64
20	Kelurahan Parit	82,78	83,34	82,52	95,68	83,99
21	Kelurahan Kampong Damai	72,24	89,17	83,65	81,84	82,67
22	Kelurahan Paal Satu	82,31	86,06	81,21	85,34	88,32
23	Kelurahan Pangkal Lalang	83,96	81,15	82,02	86,76	81,79
24	Kelurahan Tanjung Pendam	86,64	85,45	83,91	80,48	81,72
25	Kelurahan Lesung Batang	87,26	88,69	79,79	86,9	86,54
26	Puskesmas Tanjungpandan	82,45	84,45	81,42	86,8	84,34
27	Puskesmas Air Saga	77,74	81,94	81,04	83,81	83,17
28	Puskesmas Perawas	81,33	77,73	83,18	84,46	82,40
29	Puskesmas Sijuk	76,98	76,88	77,24	81,47	81,42
30	Puskesmas Badau	80,22	83,31	82,94	86,56	86,24
31	Puskesmas Membalong	79,53	75,74	80,43	80,16	91,35
32	Puskesmas Selat Nasik	78,90	81,94	81,89	83,64	83,39
33	Puskesmas Tanjungbinga	75,93	74,37	79,01	88,75	90,77



34	Puskesmas Simpang Rusa	82,33	79,94	81.6	79.98	79.25
35	Sekretariat Daerah	-	-	-	90.09	90.03
36	Sekretariat DPRD	-	-	-	83.73	82.69
37	Inspektorat	-	-	-	88.43	85.62
38	Dinas Perhubungan	-	-	-	75.43	84.58
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	81.59	81.08
40	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	76.55	81.89
41	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	80.89	81.52
42	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	78.4	89
43	Satuan Polisi dan Pamong Praja	-	-	-	81.95	81.93
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	84.15	86.09
45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	86.41	87.12
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	89.89	81.86
47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	98.51	96.53
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	73.33	86.77
RATA - RATA		81,67	76,81	82.54	84,84	84,80

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung 2021

Pencapaian kinerja sasaran 9 melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu: 1) Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik; 2) Meningkatkan keterbukaan informasi publik; 3) Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 4) Meningkatkan pelayanan publik; 5) Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa; 6) Menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik; 7) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat; 8) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan, 9.) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 10). Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan, 11) Meningkatkan pelayanan kemetrolagian dan perlindungan konsumen 12) Menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Meningkatnya pelayanan publik berbasis TIK diukur dengan menggunakan formulasi hitungan komponen IKU (Persentase pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas) yaitu :

- Terintegrasinya sistem informasi
- Diseminasi informasi
- Pemanfaatan data
- Agregat nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen yang diterapkan BSSN

Terintegrasinya sistem informasi diukur dengan perbandingan antara Jumlah sistem informasi yang terintegrasi sebanyak 31 sistem dengan Jumlah sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ada sebanyak 32 sistem.

Tabel 2.67
Realisasi Terintegrasi Sistem Informasi Tahun 2021

NO	APLIKASI	SUB DOMAIN	STATUS	INTEGRASI	KET
I LAYANAN PUBLIK					
1	Layanan Cloud Kabupaten Belitung	https://cloud.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
2	Portal Aplikasi Kabupaten Belitung	https://aplikasi.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
3	Media Center Kabupaten Belitung	https://mediacenter.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
4	Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat	https://sipmas.belitung.go.id	1	1	Diskominfo



NO	APLIKASI	SUB DOMAIN	STATUS	INTEGRASI	KET
5	Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan	https://besadu.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
6	Sehati	Sistem Pelayanan Kesehatan Terintegrasi	1	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
7	Layanan pendaftaran online RSUD Kabupaten Belitung	https://rsud-marsidijudono.belitung.go.id/pendaftaran	1	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
8	Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi	http://sismadak.belitung.go.id	1	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
9	Sistem Pemantauan Kualitas Air Online	http://siabel.belitung.go.id	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
10	Perijinan Terpadu Satu Pintu	https://sicantik.go.id	1	1	DPMPTSP
11	Belitung Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	https://besilak.belitung.go.id	1	1	Disdukcapil
12	Bantuan Sosial Kemanusiaan untuk Gelandangan, Anak-Anak, Lansia serta Orang Terlantar	https://begalor.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
II. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM					
1	Belitung Satu Data	https://data.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
2	Whistle Blowing System	http://wbs.belitung.go.id	1	1	Inspektorat
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Belitung	http://filaj.belitung.go.id	1	1	Dishub
4	e-office Kabupaten Belitung	https://arsip.go.id	1	1	Diskominfo
5	Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik	http://lpse.belitung.go.id	1	1	LPSE
6	Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan	http://sijk.belitung.go.id	1	1	Bagian Adm Pembangunan
III. ADMINISTRASI LEGISLASI					
1	JDIH Kabupaten Belitung	http://jdih.belitung.go.id	1	1	Bagian Hukum
2	JDIH DPRD Kabupaten Belitung	http://jdih.dprd.belitung.go.id	1	0	Sekretariat DPRD
IV. MANAJEMEN PEMBANGUNAN					
1	e-Planning	https://sispd.kemendagri.go.id	1	1	Bappeda
V. SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH					
1	Simda BMD	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	1	1	BPKAD
2	Simda Keuangan	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	1	1	BPKAD
3	Sim Gaji	Sistem Informasi Gaji	1	1	BPKAD
4	Simda Pendapatan	Sistem Informasi Pendapatan	1	1	BPRD
VI. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN					
1	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	http://simpeg.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
2	e-SKP	http://skp.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
3	e-Absensi	http://e-kinerja.belitung.go.id/absen	1	1	BKPSDM
4	e-Arsip	http://earsip.belitung.go.id	1	1	BKPSDM



NO	APLIKASI	SUB DOMAIN	STATUS	INTEGRASI	KET
5	e-TPP	http://e-kinerja.belitung.go.id/tpp	1	1	BKPSDM
6	e-SIDAK	http://aktivitas.belitung.go.id/v2	1	1	BKPSDM
7	e-KGB	http://kgb.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
JUMLAH			32	31	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

Pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan berbagai pakai berupa pengembangan aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya dan aplikasi pelayanan publik yang sudah saling terintegrasi dengan layanan publik lainnya.

Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur berupa pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah. Interopabilitas dan teknologi berupa integrasi data dan peremajaan perangkat teknologi informasi Tata kelola berupa kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlangsungan implementasi layanan teknologi informasi.

Diseminasi Informasi diukur dengan membandingkan antara jumlah media diseminasi yang aktif dengan jumlah media diseminasi yang dimiliki. Diseminasi informasi publik diselenggarakan melalui 5 media yang aktif. Adapun lima media diseminasi tersebut terdiri dari :

Media website, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung mengelola tiga website antara lain :

Tabel 2.68
Daftar Media Website yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2021

Alamat / Url	Keterangan
https://kominfo.belitung.go.id/	Website Dinas Kominfo
https://portal.belitung.go.id/	Website Pemkab Belitung
https://mediacenter.belitung.go.id/	Website Media Center Dinas Kominfo

Media sosial, maraknya penggunaan media sosial saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menggunakan beberapa media sosial yang dijadikan sebagai sarana penyampaian diseminasi informasi kepada masyarakat, antara lain :

Tabel 2.69
Daftar Media Sosial yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2021

Jenis Media Sosial	Alamat / Url
Facebook	https://www.facebook.com/kominfobelitung
Instagram	https://www.instagram.com/kominfobelitung/
Twitter	https://twitter.com/kominfobelitung
Youtube	https://www.youtube.com/channel/
Tiktok	Kominfo Belitung

Media penyiaran radio, penyelenggaraan diseminasi ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Sampai saat ini banyak kegiatan yang telah dilaksanakan di LPPL Radio Suara Praja dengan berkerjasama dengan berbagai pihak terkait sebagai bentuk penyampaian informasi ke masyarakat, diantaranya :

Tabel 2.70
Daftar Talkshow di LPPL Radio Suara Praja Tahun 2021

NO	NAMA INSTANSI	PEMBICARA	TOPIK
1	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpandan	Inovasi Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Sediakan Pelayanan Langsung Siap Untuk



			Perubahan Nama dan Tanggal Lahir
2	Polres Belitung	Kasatlantas	Sosialisasi Razia Menumbing
3	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	Elizabeth Juliana (Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan) dan Syahfitri Apriyuni (Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan)	Sosialisasi pelayanan pengadilan negeri
4	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	Beny Wijaya, S.H., M.H (Hakim) dan Imam Maulimin, S.H., M.H (Panitera)	Sosialisasi Peraturan Tilang
5	Radio Sonora Bangka	Dr. Roni Juardi, Sp.T.H.T.K.L	"Tidur Mendengkur, Bahaya atau Tidak"
6	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	AA. Niko Brahmputra, SH., MH	E-Litigation
7	Radio Sonora Bangka	Dr. Roni Juardi, Sp.T.H.T.K.L	"Penanganan Kencing Batu, Tanpa Luka Oleh Urologi"
8	Radio Sonora Bangka	Dr. Roni Juardi, Sp.T.H.T.K.L	"Gejala Sinusitis dan Pengobatannya"

Media luar ruang, untuk pelaksanaan diseminasi media luar ruangan dilaksanakan melalui pemasangan spanduk yang berisikan informasi terkait Covid-19, dan himbauan protokol 4M melalui pengeras suara di kawasan bundaran satam. Media luar ruang dengan materi protokol kesehatan juga disampaikan dengan menggandeng 6 KIM yang ada di beberapa Kecamatan.

Media komunikasi tatap muka, diselenggarakan melalui 2 kegiatan yaitu diseminasi informasi melalui media tradisional dan kegiatan pengembangan dan pembinaan KIM. Kegiatan diseminasi informasi melalui media tradisional yang dilaksanakan di 5 kecamatan, mulai dari Badau, Membalong, Sijuk, Selat Nasik, dan Tanjungpandan. Kegiatan pengembangan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat telah dilakukan di KIM Pelita damai, KIM tanjung lancor, KIM Mendanau, KIM Berita Parit, KIM Sepakat Kembiri, KIM Gurok Geraye, serta melakukan inisiasi pembentukan KIM di Desa Seliu. Salah satu kunjungan KIM di Desa Pulau Seliu dilampirkan dengan dokumentasi :

Realisasi capaian Diseminasi Informasi ini sama dengan capaian tahun sebelumnya. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

- Aktivasi media cetak. Menjalin kemitraan dengan wartawan untuk berbagi informasi berdasarkan agenda kegiatan pimpinan daerah dan peliputan lainnya.
- Aktivasi media penyiaran. Indikasi keaktifan didasarkan dengan terselenggaranya siaran radio. Untuk mengatasi kendala manajemen dilakukan piket siaran.
- Aktivasi media daring. Mempublikasikan hasil liputan di media yang dikelola oleh Diskominfo dan Infopublik (dikelola oleh Kemenkominfo).
- Aktivasi media sosial. Memposting video, infografis dan liputan dalam media facebook dan instagram.
- Aktivasi media luar ruang melalui pemasangan baliho seperti informasi Covid-19, peringatan hari penting.
- Aktivasi dan media tatap muka dengan mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat dan penyelenggaraan pertunjukan rakyat di 5 kecamatan.

☞ Pemanfaatan Data

Komponen ini diukur dengan membandingkan jumlah data yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dengan jumlah data yang tersedia. Pemanfaatan data yang terealisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 diperoleh dari 327 jenis data yang tersedia melalui Portal Belitung Satu Data dan seluruh data tersebut telah dimanfaatkan seluruhnya. Adapun jenis data yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71
Daftar Pemanfaatan Data Portal Belitung Satu Data Tahun 2022

No	Jenis Data	Produsen Data
1	Data Daftar Nama Lurah, Camat dan Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Tahun 2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG
2	Data Jumlah CPNS - PNS Menurut Unit Organisasi dan Golongan Kepangkatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
3	Data Jumlah CPNS-PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
4	Data Jumlah CPNS-PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
5	Data Jumlah CPNS-PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2020	



6	Data Jumlah PNS Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
7	Data Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
8	Data Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
9	Data Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
10	Data Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan Formal di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
11	Data Daftar Nama Lurah, Camat dan Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2019	
12	Data Daftar ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2020	
13	Data Jumlah PNS Menurut Eselon pada Unit Organisasi di Pemerintahan Kabupaten Belitung Tahun 2019	
14	Data Jumlah PNS Menurut Unit Organisasi dan Golongan Kepangkatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
15	Data Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
16	Data Jumlah PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
17	Data Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
18	Data Jumlah PNS Menurut Unit Organisasi dan Golongan Kepangkatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
19	Data Rumah Ibadah di Kecamatan Selat Nasik Tahun 2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG
20	Data Rumah Ibadah di Kecamatan Sijuk Tahun 2020	
21	Data Rumah Ibadah di Kecamatan Badau Tahun 2020	
22	Data Rumah Ibadah di Kecamatan Membalong Tahun 2020	
23	Data Rumah Ibadah di Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2020	
24	Data Daftar Organisasi Kemasyarakatan Profesi (Ormas Profesi) Terdaftar di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
25	Data Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terdaftar di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
26	Data Daftar Organisasi Kemasyarakatan (Kepemudaan) Terdaftar di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
27	Data Daftar Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Terdaftar di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
28	Data Daftar Partai Politik di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
29	Data Daftar Unjuk Rasa di Kabupaten Belitung	
30	Data Daftar Nama Aliran Kepercayaan di Kabupaten Belitung	
31	Data Potensi Bencana Kabupaten Belitung Tahun 2020	
32	Data Kejadian Evakuasi dan Penyelamatan Bencana Lain Di Kabupaten Belitung Tahun 2020	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG
33	Data Prasarana Mobil Damkar BPBD Kabupaten Belitung Tahun 2020	
34	Data Kejadian Bencana dan Evakuasi di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
35	Data Jumlah Sarana Unit Pendukung Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
36	Data ASN BPBD Kabupaten Belitung	
37	Data Kejadian dan Penyelamatan Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
38	Data Kejadian Penyelamatan Bencana Lain Di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
39	Data Alat dan Unit Pendukung Penanganan Bencana di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
40	Data SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung	
41	Rekapitulasi APBD TA. 2020 Kab. Belitung Berdasarkan OPD Dan Jenis Belanja	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG
42	Rekapitulasi APBD TA. 2020 Kabupaten Belitung Berdasarkan Bidang Dan Jenis Belanja	
43	Rekapitulasi Apbd Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2020	
44	Rekapitulasi Laporan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020	
45	Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020	
46	Data ASN BPKAD Kabupaten Belitung	
47	Data Pengamatan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Belitung	STASIUN METEOROLOGI KELAS III HAS HANANDJOEDIN BANDAR UDARA INTERNASIONAL H.A.S. HANANDJOEDDIN
48	Data Pengamatan Kelembaban Udara Menurut Bulan Di Kabupaten Belitung	
49	Data Pengamatan Kecepatan Angin Menurut Bulan di Kabupaten Belitung	
50	Data Pengamatan Suhu Temperatur Menurut Bulan di Kabupaten Belitung	
51	Data Pengamatan Tekanan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Belitung	
52	Data Pengamatan Intensitas, Hari Hujan dan Curah Hujan Max 24 Jam Menurut Bulan di Kabupaten Belitung	
53	Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung Tahun 2015 - 2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
54	Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2020	
55	Data Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan Tahun 2019	
56	Data Struktur Perekonomian Kabupaten Belitung Berdasarkan Sektor	
57	Data ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	
58	Data Angka Partisipasi Murni (APM) Dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung	BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BELITUNG
59	Data Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lima Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
60	Data Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
61	Data Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung Tahun 2012-2019	
62	Data Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjungpandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016 - 2019	
63	Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung	
64	Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019	



65	Data Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung	
66	Data Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Belitung Tahun 2020	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BELITUNG
67	Data Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Belitung Tahun 2020	
68	Rekap Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020	
69	Jumlah Apotik dan Pedagang Besar Farmasi menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG
70	Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
71	Jumlah Perawat dan Bidan Di fasilitas kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
72	Data Jumlah Status Gizi Balita berdasarkan Indeks menurut Puskesmas dan Kecamatan Tahun 2020	
73	Data Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Fasilitas Sanitasi Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
74	Data Jumlah Persalinan Yang ditolong Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	
75	Data Jumlah Lansia Yang Mendapat Layanan Kesehatan Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Belitung	
76	Data Jumlah Kunjungan Ibu Hamil Ke Puskesmas Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Belitung	
77	Data Jumlah Kematian Ibu Hamil berdasarkan Puskesmas Menurut kecamatan di kabupaten Belitung	
78	Data Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah Menurut Puskesmas di Kabupaten Belitung	
79	Data Jumlah Kematian Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	
80	Data Jumlah Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	
81	Data Jumlah Penderita DBD Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung	
82	Jumlah Puskesmas dan lokasi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
83	Data Jumlah Apotik di Kabupaten Belitung Tahun 2016 - 2018	
84	Data ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2020	
85	Data Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
86	Data Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik-Balai Kesehatan, Posyandu, Poskesdes, Polindes Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
87	Data Jumlah 10 Kasus Penyakit Terbanyak di Kabupaten Belitung Tahun 2019 (Data DDA 2020)	
88	Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
89	Data Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
90	Data Jumlah SDM Kesehatan Per Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
91	Data Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
92	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Badau Tahun 2020	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG
93	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Sujuk Tahun 2020	
94	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Selat Nasik Tahun 2020	
95	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Membalong Tahun 2020	
96	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2020	
97	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
98	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Lada Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
99	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
100	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
101	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
102	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
103	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
104	Data Luas Lahan berdasarkan Jenis Penggunaan menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
105	Data Jumlah Populasi Hewan Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
106	Data Jumlah Produksi Telur Hewan Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
107	Data Jumlah Produksi Daging Hewan Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
108	Data Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
109	Data Jumlah Perkebunan Besar Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
110	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2019	
111	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2019	
112	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2019	
113	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Lada Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2019	
114	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2019	



115	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2018 - 2019	
116	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Membalong Tahun 2018 - 2019	
117	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Selat Nasik Tahun 2018 - 2019	
118	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Sijuk Tahun 2018 - 2019	
119	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Badau Tahun 2018 - 2019	
120	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2019	
121	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2017-2019	
122	Data Luas Lahan berdasarkan Jenis Penggunaan menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2018	
123	Data ASN Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2020	
124	Data Jumlah Perkebunan Besar Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2019	
125	Data Jumlah Pertambahan Mesin Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
126	Data Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
127	Data Jumlah Produksi Daging Hewan Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
128	Data Jumlah Produksi Telur Hewan Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
129	Data Jumlah Populasi Hewan Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
130	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Semester II Tahun 2020 Kabupaten Belitung	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG
131	Data Jumlah Penduduk Menurut Agama Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
132	Data Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Kecamatan Semester II Tahun 2020	
133	Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester II Tahun 2020 Di Kabupaten Belitung	
134	Data Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Belitung Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
135	Data Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
136	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa/Kelurahan Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
137	Data Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Usia 0-17 Tahun Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
138	Data Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
139	Data Jumlah Penduduk Menurut Usia Pendidikan Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
140	Data Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
141	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
142	Data Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
143	Data Jumlah Penduduk Wajib KTP Menurut Desa/Kelurahan Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung	
144	Data Administrasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2019	
145	Data Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
146	Data Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
147	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
148	Data Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Pekerjaan) di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
149	Data Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018	
150	Data Jumlah Penduduk Menurut Agama per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
151	Data Jumlah Penerbitan administrasi Kependudukan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
152	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
153	Data Trend Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2019	
154	Data Administrasi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018	
155	Data Administrasi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2017	
156	Data Administrasi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2016	
157	Data Lokasi CCTV Pemerintah di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
158	Data Lokasi Hotspot Pemerintah di Kabupaten Belitung Tahun 2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG
159	Data Daftar Subdomain Website Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020	
160	Data Daftar Aplikasi Layanan SPBE Menurut Jenis Layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020	
161	Data Lokasi Hotspot Pemerintah di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
162	Data Lokasi CCTV Pemerintah di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
163	Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2019	



164	Data Daftar Subdomain Website Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019	
165	Data Daftar Aplikasi Layanan SPBE Menurut Jenis Layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019	
166	Data Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Roadside berdasarkan Jenis Udara di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
167	Data Sarana dan Prasarana Operasional Persampahan Kabupaten Belitung Tahun 2020	
168	Data Hasil Pengukuran Kualitas Air Sungai di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
169	Data Daftar Sekolah Adiwiyata Kabupaten Belitung Tahun 2020	
170	Data Lokasi Pembuangan Sampah di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
171	Data Forum/Komunitas Pengelola Sampah di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
172	Data Daftar Bank Sampah di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
173	Data Daftar Rumah Kompos di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
174	Data Daftar TPS 3R di Kabupaten Belitung Tahun 2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG
175	Data IKA, IKU, ITH dan IKLH Kabupaten Belitung Tahun 2020	
176	Data Rekomendasi Izin Lingkungan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
177	Data Kualitas Air Sungai di Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2019	
178	Data ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung tahun 2019- 2020	
179	Data Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Industri Di Kabupaten Belitung	
180	Data Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG
181	Data Jumlah Tenaga Kerja Asing Yang Terdaftar Di Kabupaten Belitung	
182	Data Jumlah Perusahaan Eksportir IPSKA Di Kabupaten Belitung	
183	Data Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	
184	Data Pelatihan Berbasis Masyarakat, Kompetensi dan Kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung	
185	Data ini berisi Data Daftar Lembaga Latihan Kerja di Kabupaten Belitung	
186	Data ini berisi Data Fasilitasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Belitung	
187	Data ASN Dinas KUKMPTK Kabupaten Belitung	
188	Data Jumlah KUKM Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	
189	Data Jumlah Koperasi Menurut kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
190	Data Homestay Desa Wisata Kabupaten Belitung 2020	
191	Data Biro Perjalanan Wisata (BPW) di Kabupaten Belitung	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG
192	Data Agen Perjalanan Wisata (APW) di Kabupaten Belitung	
193	Data Restoran Dan Rumah Makan di Kabupaten Belitung	
194	Data Hotel dan Penginapan di Kabupaten Belitung	
195	Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kabupaten Belitung	
196	Data Tempat Objek (Tujuan) Wisata Di Kabupaten Belitung	
197	Data Event Mice dan Jumlah Wisatawan MICE Januari- April Tahun 2019	
198	Data Jumlah Desa Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	
199	Data Jumlah Usaha Makanan dan Minuman di Kabupaten Belitung	
200	Data Jumlah Hotel Dan Penginapan di Kabupaten Belitung	
201	Data Jumlah Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Belitung	
202	Data Rekapitulasi Sewa Rental Moda Transportasi Wisata Tahun 2016-2019	
203	Data Panjang Jalan yang dibangun di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
204	Data Panjang Jalan yang ditingkatkan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG
205	Data Panjang Jalan yang dipelihara di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
206	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur dan Luas Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Belitung Pada Tahun 2020	
207	Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten Belitung, Luas Irigasi yang dilayani oleh Jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan,(ha),direhabilitasi (ha) Tahun 2020	
208	Data Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Tahun 2020	
209	Data Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah Tahun Tahun 2020	
210	Rekapitulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020	
211	Data Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Belitung, berdasarkan berita Acara Perhitungan Pengurangan Luasan pengurangan Luasan Kumuh tahun 2020	
212	Data Panjang Jalan (Km) Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
213	Data Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
214	Data Jumlah Wirausaha Muda Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
215	Data Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG
216	Data Jumlah Perolehan Medali Tingkat Provinsi, Tingkat Regional, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional Tahun 2020	
217	Data Jumlah Pelatih Bersertifikat di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
218	Data Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
219	Data Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
220	Data Jumlah Pemuda berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
221	Data Jumlah Pemuda Menurut Pendidikan Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
222	Data Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
223	Data Jumlah Organisasi Kepemudaan Menurut Jenis Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
224	Data Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
225	Data Jumlah Prasarana Olahraga Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
226	Data Izin Sektor Pengolahan Limbah Yang Diterbitkan DPMPSTPP Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2020	DINAS PENANAMAN MODAL,



227	Data Izin Usaha Sektor Perdagangan Yang Diterbitkan DPMPSTPP Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2020	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG
228	Data Nomor Induk Berusaha (NIB) Yang Diterbitkan OSS di Kabupaten Belitung Dari Tahun 2019 - 2020	
229	Data Izin Usaha Kepariwisata (TDUP)Yang Diterbitkan DPMPSTPP Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2020	
230	Data ASN Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2020	
231	Data Jumlah Peserta Pendidikan Sekolah Dasar/MI di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
232	Data Jumlah Peserta Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - MTS di Kabupaten Belitung Tahun 2019	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG
233	Data Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Belitung Tahun 2019	
234	Jumlah Peserta KB Baru Menurut Alat Kontrasepsi Menurut Kecamatan Tahun 2020	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BELITUNG
235	Data Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta dan Persentase KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi Kabupaten Belitung	
236	Data Jumlah Desa, PPKBD, PKB/PLKB dan Klinik KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	
237	Data Daftar ASN Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung	
238	Data Titik Lokasi Halte Angkutan Kota di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
239	Data Rute Jurusan dan Lintasan Bus Sekolah Rute 8 di Kabupaten Belitung Tahun 2020	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG
240	Data Rute Jurusan dan Lintasan Bus Sekolah Rute Tujuh di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
241	Data Rute Jurusan dan Lintasan Bus Sekolah Dan Bus BRT Rute 6 di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
242	Data Rute Jurusan dan Lintasan Bus Sekolah dan BUS BRT Rute 5 di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
243	Data Rute Jurusan dan Lintasan Bus Sekolah dan BUS BRT Rute 4 di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
244	Data Rute Jurusan dan Lintasan Bus Sekolah dan BUS BRT Rute 3 di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
245	Data Rute Jurusan dan Lintasan Bus Sekolah dan Bus BRT Rute 2 di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
246	Data Rute Jurusan dan Lintasan Bus Sekolah dan Bus BRT Rute 1 di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
247	Data Jumlah Juru Parkir di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
248	Data Jarak Antar Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
249	Data Lokasi dan Kondisi Traffic Light di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
250	Data Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan PERDA di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
251	Data Jarak Antar Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
252	Data Jumlah Juru Parkir di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
253	Data Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan PERDA di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
254	Data Rute Jurusan dan Lintasan Bus Sekolah di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
255	Data Titik Lokasi Halte Angkutan Kota di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
256	Data Lokasi dan Kondisi Traffic Light di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
257	Data Daftar ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2020	
258	Data Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2020	
259	JUMLAH DAN JENIS KAPAL PER ALAT TANGKAP PER RTP DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG
260	Data Jumlah Produksi Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan Tahun 2020	
261	Data Rekapitulasi Volume Ekspor Ikan Kabupaten Belitung Menurut Perusahaan (Dalam Kg) Tahun 2018 -2019	
262	Data Jumlah Pengiriman Ikan Beku, Segar dan Ikan Asin Ke Luar Kabupaten Belitung Tahun 2018 -2019	
263	Data Jumlah Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2019	
264	Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
265	Jumlah Produksi dan Nilai Budidaya Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
266	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
267	Jumlah Produksi Ikan Basah Menurut Jenisnya di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
268	Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
269	Data Jumlah Produksi Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
270	Data Jumlah Terumbu Karang di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
271	Data Jumlah Perpustakaan di Berbagai Instansi di Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2020	
272	Data Daftar ASN Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
273	Data Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling Menurut Bulan di Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2020	
274	Data Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2020	
275	Data Jumlah Buku Berdasarkan Kategori di Perpustakaan Kabupaten Belitung Tahun 20017 - 2020	
276	Data Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Menurut Jenisnya di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
277	Data Jumlah Judul Buku Perpustakaan Menurut Jenisnya di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
278	Data Jumlah Anggota Perpustakaan Menurut Jenisnya di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
279	Data Jumlah Perpustakaan Menurut Jenis Perpustakaan di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
280	Data Opini Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020	INSPEKTORAT KABUPATEN



		BELITUNG
281	Data Jumlah Tindakan Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Belitung Tahun 2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG
282	Data Jumlah Penerima Bantuan PKH Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
283	Data Jumlah Panti Sosial Menurut Jenisnya dan Berdasarkan Jenis Kelamin Penghuni Panti di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
284	Data Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Berdasarkan Program Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
285	Data Jumlah Tindakan Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus Di Kabupaten Belitung Tahun 2018 -2019	
286	Data Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Berdasarkan Program Menurut Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2018 -2019	
287	Data Jumlah Penerima Bantuan PKH Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018 -2019	
289	Data Jumlah Panti Sosial Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019	
290	Data ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020	
291	Data Jumlah Tujuan Wisata di Kecamatan Badau Tahun 2020	
292	Data Sarana Olahraga di Kecamatan Badau Tahun 2020	
293	Data Organisasi Masyarakat di Kecamatan Badau Tahun 2020	
294	Data Sarana Kesenian di Kecamatan Badau Tahun 2020	
295	Data Rumah Makan di Kecamatan Badau Tahun 2020	KECAMATAN SELAT NASIK
296	Data Jumlah Tujuan Wisata Di Kecamatan Badau	
297	Data Jumlah Tujuan Wisata di Kecamatan Selat Nasik Tahun 2020	
298	Data Sarana Kesenian di Kecamatan Selat Nasik Tahun 2020	
299	Data Tujuan Wisata di Kecamatan Tanjungpandan	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
300	Data Jumlah Hotel dan Penginapan di Kecamatan Tanjungpandan	
301	Data ASN di Kantor Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2020	
302	Data Jumlah Kepala Lingkungan, Jumlah RW dan Jumlah RT menurut Kelurahan di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
303	Data Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur Berdasarkan Kelas Dan Jenis Ruangan Di RSUD dr.H.Marsidi Judono	RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG
304	Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tahun 2020	
305	Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2020	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG
306	Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	
307	Daftar Nama Anggota Dewan Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
308	Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	
309	Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2020	
310	Data Daftar Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Jenis dan Kegiatan Rapat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2020 -2021	
311	Daftar Nama Anggota Dewan Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Belitung	
312	Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	
313	Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2019	
314	Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2019	
315	Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Partai Politik Tahun 2019	
316	Data Jumlah Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana di Kabupaten Belitung Tahun 2016 -2020	KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG
317	Data Rekapitulasi Tindak Pidana Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2016 -2020	
318	Data Rekapitulasi Perkara Menurut Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tahun 2015 - 2020	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN
319	Data Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) Menurut Kecamatan pada Kepolisian Resort Belitung Tahun 2016 - 2019	KEPOLISIAN RESORT BELITUNG
320	Data Jumlah Kecelakaan Dan Korban Kecelakaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2015 - 2020	
321	Data Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELITUNG
322	Data Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020	
323	Data Jumlah Jemaah Haji Menurut Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Asal Kabupaten Belitung Tahun 2016-2019	
324	Data Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	
325	Data Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudhatul Anfal Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	
326	Data Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	
327	Data Jumlah Pernikahan, Perceraian dan Dispensasi Nikah di Kabupaten Belitung	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

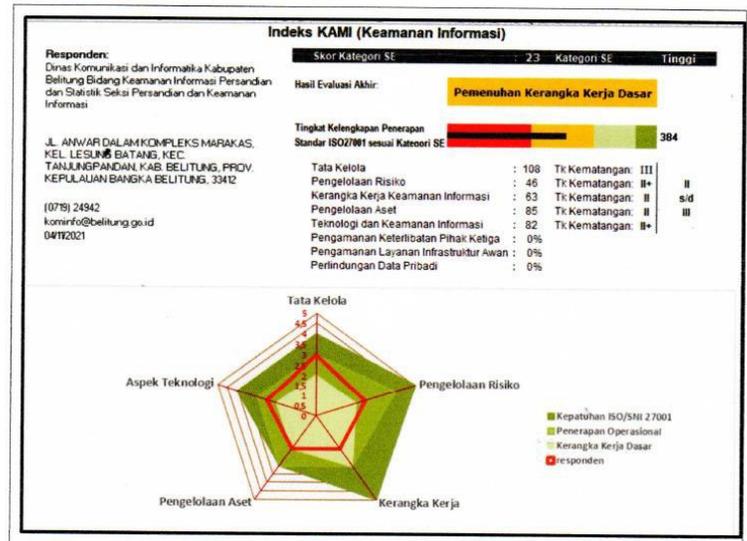
Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

Melakukan koordinasi dengan Produsen Data dalam pengumpulan data untuk didiseminasikan. Penginputan data dalam Portal Satu Data sudah dilakukan oleh admin Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Produsen Data.



- Agregat nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen yang diterapkan BSSN.

Penilaian Komponen ini diukur dengan Assesment Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Pada Tahun 2021, Tingkat Kematangan Keamanan Informasi yang diperoleh dari Assesment Indeks KAMI (Keamanan Informasi) yakni Level II. Pada tahun 2021, Tingkat kelengkapan penerapan standar ISO27001 sesuai Kategori SE sudah mencapai 384 jumlah nilai per area dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mendapatkan 292 jumlah nilai per area.



Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

- Melengkapi data-data pendukung (Evidence) dalam setiap aspek penilaian.
 - Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait untuk melengkapi data-data dukung penilaian
 - Memperbaharui data-data pendukung yang ada sesuai kondisi terbaru.
- Gambar Hasil Validasi Penilaian Indeks KAMI Tahun 2021*

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh :

- Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang keamanan informasi.
- Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
- Adanya rekomendasi perbaikan dari penilaian tahun sebelumnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan :

- Audit Internal keamanan informasi
- Peninjauan kembali terhadap persyaratan/standar kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk tiap personil di lingkup keamanan informasi.
- Penambahan program penilaian kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan baik secara internal maupun pihak eksternal.

Pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan pemerintah Kabupaten Belitung salah satunya diakomodir melalui Layanan BESADU BELITUNG, jumlah laporan pengaduan pada tahun 2021 sebanyak 214 laporan. Gambaran pengaduan masyarakat sebagaimana table berikut:

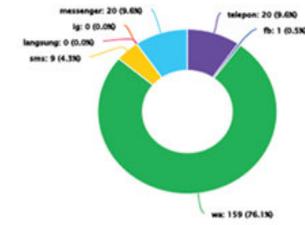
Secara umum laporan pengaduan telah ditindaklanjuti, ditanggapi pelapor atau dinyatakan selesai sesuai prosedur, sampai dengan Desember 2021 menyisakan 74 pengaduan yang masih dalam proses penanganan dan yang belum ditindaklanjuti pada 18 perangkat daerah sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini .



LAPORAN BESADU PER OPD TAHUN 2021

No.	Nama Dinas	Ditanggapi	Belum Ditanggapi	Spam
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian		1	
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	2	2	1
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	1		
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat	41		
6	Dinas Perhubungan	22	4	
7	Dinas Lingkungan Hidup	7	1	
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	2	
9	Dinas Perikanan		1	
10	Satuan Polisi Pamong Praja	15	34	1
11	RSUD dr. H. MARSIDI JUJONO	5		
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	1	
13	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1	1	
14	Kelurahan Pant	1		
15	Kelurahan Tanjungpendam	1	1	
16	Kelurahan Paal Satu	1		
17	PDAM	8	3	
18	PLN	6	1	
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6		1
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	8	
21	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Belitung	1		1
22	Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kab. Belitung	1	5	
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	1		
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Belitung	1	1	
25	Salgus Percepatan Penanganan COVID-19	2	6	
26	PT Icope	1		
27	Dinas Pariwisata		1	

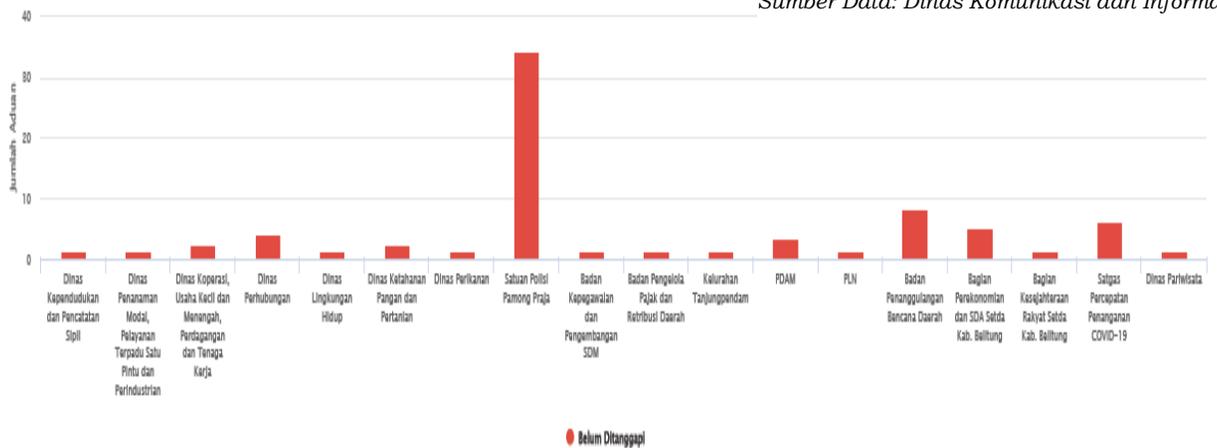
Grafik Laporan Penggunaan Media Besadu Tahun 2021



No.	Media	Jumlah
1	Whatsapp	159
2	Facebook	1
3	Telepon	20
4	SMS	9
5	Messenger	20
6	Website	5

Grafik Laporan Besadu

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika



Pemerintah Kabupaten Belitung menerima sertifikat kepatuhan tinggi Standar Pelayanan Publik di tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia. Dalam kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 Belitung meraih nilai 87,74 dengan standar kepatuhan tinggi dan masuk dalam zona hijau. Penganugerahan ini dilakukan sebagai puncak rangkaian kegiatan pendampingan dan penilaian yang telah dilaksanakan sejak triwulan pertama tahun 2021 terhadap instansi pemerintah dalam hal memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.



Pemerintah Kabupaten Belitung Terima Sertifikat Kepatuhan Dari Ombudsman Tahun 2021

Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik seharusnya dapat menjadi bukti nyata yang dapat diukur bahkan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa pemerintah atau suatu instansi ingin memberikan pelayanan yang berkepastian kepada masyarakat. Salah satu kunci penting dari suatu pelayanan publik adalah adanya kepastian pelayanan.

Hal ini secara nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan apabila komponen standar pelayanan publik seperti persyaratan, jangka waktu, biaya/tarif, persyaratan, prosedur pelayanan dan hal penting lainnya terpampang secara transparan di ruang pelayanan publik. Apalagi jika pada era digitalisasi ini, komponen standar pelayanan publik tersebut mampu divisualisasikan oleh instansi melalui website resmi yang dapat diakses masyarakat kapanpun dan di manapun.



Pemenuhan standar pelayanan baik secara elektronik maupun non-elektronik, sudah seharusnya menjadi hal prioritas yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang berkepastian dan berkualitas kepada masyarakat. Upaya meningkatkan pelayanan berbasis penanganan permasalahan masyarakat dan menunjang peningkatan kinerja perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 terakumulasi mejadi sebanyak 19 inovasi perangkat daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.72
Rekapitulasi Laporan Hasil Capaian Program Inovatif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021

NO	PROGRAM INOVASI	INDIKATOR	CAPAIAN 2021	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
I PROGRAM INOVASI					
1	SEHATI (Sistem Kesehatan Terintegrasi)	Pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, pasien rujukan dan dijemput. Pasien diantarkan ke RS Rujukan, pendampingan administrasi, keluarga diinapkan di rumah sehat dan pemulangan jenazah pasien sampai daerah	62 pasien	Januari 3 pasien Februari 7 pasien Maret 5 pasien April 3 pasien Mei 6 pasien Juni 4 pasien Juli 0 pasien Agustus 2 pasien September 6 pasien Oktober 8 pasien November 7 pasien Desember 11 pasien	Dinas Kesehatan
2	KEMINANGAN (Kearifan Lokal dan Adat Istiadat sebagai Inspirasi Pembangunan)	Pelebagaan resmi dukun kampung yang diberikan tunjangan rutin dan seragam.	120 Orang	Total sebesar + Rp. 288.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	KETARAP (Keterpaduan Antar Rakyat Antar Pengusaha)	Fasilitasi dan mediasi Pemda kepada masyarakat sebagai pemilik usaha UMKM melalui kemitraan dengan pengusaha dan masyarakat pemilik lahan dengan pengusaha selaku pemilik modal yang memberikan keuntungan dengan basis rencana pembangunan Pemda	Inventarisasi data lahan kelompok yang siap dimitrakan dengan pengusaha	2019 : Launching program Ketarap 2020 : Inventarisasi produk unggulan dan UMKM yang siap dimitrakan 2022 : Rencana kemitraan antara UMKM dengan pengusaha/investor	DKUKMPTK
4	BAGUK (Bagi Bibit Gratis Untuk Kampung)	Penyediaan bibit buah dan lainnya secara gratis sesuai masterplan pembangunan desa di Kabupaten Belitung. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya pertanian dan perikanan secara optimal	6500 ekor DOC ayam pedaging 5037,5 kg pakan ternak 1 paket obat-obatan dan vitamin 1 unit mesin pencabut bulu 6500 DOC ayam pedaging 5037,5 kg pakan ternak 1 paket obat-obatan dan vitamin 1 unit mesin pencabut bulu 7000 DOC ayam pedaging 5425,0 kg pakan ternak 1 paket obat-obatan dan vitamin 1 unit mesin pencabut bulu	3 peternak Kelompok Tani Mandiri Sejahtera Desa Terong, Sijuk Penyaluran bibit dimulai dari periode I bulan November 2019 hingga pemeliharaan bibit kembali pada periode VII (Oktober-Desember 2021) 6 peternak Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Perawas, Tanjungpandan Penyaluran bibit dimulai dari periode I bulan November 2019 hingga pemeliharaan bibit kembali pada periode VII (Oktober-Desember 2021) 3 peternak Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Air Batu Buding Kec. Badau Penyaluran bibit dimulai dari periode I bulan November 2019 hingga pemeliharaan bibit kembali pada periode VII (Oktober-Desember 2021)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



			6500 DOC ayam pedaging	15 peternak Kelompok Tani Lette Desa Batu Itam, Kec. Sijuk	
			5037,5 kg pakan ternak 1 paket obat- obatan dan vitamin 1 unit mesin pencabut bulu	Penyaluran bibit dimulai dari periode I bulan November 2020 hingga pemeliharaan bibit kembali pada periode III (Oktober- Desember 2021)	
			6500 DOC ayam pedaging	9 peternak Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Air Selumar, Kec. Sijuk	
			5037,5 kg pakan ternak 1 paket obat- obatan dan vitamin 1 unit mesin pencabut bulu	Penyaluran bibit dimulai dari periode I bulan November 2020 hingga pemeliharaan bibit kembali pada periode III (Oktober- Desember 2021)	
			6500 DOC ayam pedaging	6 peternak Kelompok Tani Masa Depan Same Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	
			5037,5 kg pakan ternak 1 paket obat- obatan dan vitamin 1 unit mesin pencabut bulu	Penyaluran bibit dimulai dari periode I bulan November 2020 hingga pemeliharaan bibit kembali pada periode III (Oktober- Desember 2021)	
			7000 DOC ayam pedaging	11 peternak Kelompok Tani Sinar Baru Desa Pelepak Pute, Kec. Sijuk	
			5425,0 kg pakan ternak 1 paket obat- obatan dan vitamin 1 unit mesin pencabut bulu	Penyaluran bibit dimulai dari periode I bulan November 2020 hingga pemeliharaan bibit kembali pada periode III (Oktober- Desember 2021)	
			7000 DOC ayam pedaging	14 peternak Kelompok Tani Berkarya Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan	
			5425,0 kg pakan ternak 1 paket obat- obatan dan vitamin 1 unit mesin pencabut bulu	Penyaluran bibit dimulai dari periode I bulan November 2020 hingga pemeliharaan bibit kembali pada periode III (Oktober- Desember 2021)	
		Pemberian bibit ikan yang meliputi ikan air tawar dan ikan air laut kepada pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok	12000	Budidaya ikan kerapu realisasi s.d Tahun 2021	Dinas Perikanan
			15000	Budidaya ikan kakap realisasi s.d Tahun 2021	
		pembudidaya ikan (Pokdakan)	22000	Budidaya ikan air laut realisasi s.d Tahun 2021	
			48000	Budidaya ikan air tawar realisasi s.d Tahun 2021	
5	TUSENA (Satu Desa Satu Destinasi setiap tahun yang bersifat desa tematik)	Bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan/pembudidaya (kelompok pengendalian sumberdaya ikan/kelompok peduli lingkungan)	3 6 10	Lomba mancing ikan Pembinaan kelompok peduli sumberdaya perikanan Pembinaan unit pembenihan rakyat	Dinas Perikanan (data dukungan untuk Program Inovasi Tusena)



		Atraksi/Daya Tarik Wisata	6 lokasi DTW	1. Suak Parak Mangrove. Desa Air Saga, Tanjungpandan 2. Honey Bee Farm. Desa Buluh Tumbang, Tanjungpandan 3. Agro Wisata Desa Mentigi. Membalong, Belitung Regency 4. Mangrove Petaling. Desa Petaling, Kec. Selat Nasik 5. Aik Lembong Dalam. Desa Petaling, Kec. Selat Nasik 6. Pangkalan Baru Suak Gual. Desa Suak Gual, Kec. Selat Nasik	Dinas Pariwisata
6	ILAK (Intensif Langsung untuk Kemajuan)	Insentif untuk investor yang rutin memberikan CSR dan investor yang menyerap tenaga kerja lokal dan pembangunan usaha/investasi yang selesai sebelum masa waktu yang ditentukan	Pengusulan persetujuan pengesahan Rancangan Perda pemberian insentif investasi sebagai dasar pelaksanaan pemberian insentif di Tim Eksekutif	2019 : Pengusulan perubahan regulasi mengenai pemberian insentif untuk investor 2020 : Pembahasan regulasi Perda pemberian insentif investasi sebagai dasar pelaksanaan pemberian insentif di Tim Eksekutif 2022 : Diusulkan kembali untuk persetujuan dan pengesahan Rancangan Perda insentif investasi ke legislatif karena status persetujuan dan pengesahan yang tertunda di Tahun 2021	DPMPTSPP
7	PUKAT (Program Air Bersih untuk Masyarakat)	Pembangunan spot/titik jaringan air bersih bagi masyarakat yang berbasis rumah ibadah	-	Belum ada data	DPUPR, Dinas Kesehatan
8	PELANDUK (Pelayanan Medik untuk Kampung)	Program Medik mengunjungi dan memberikan pengobatan ke rumah pasien menggunakan motor dan mobil untuk meningkatkan dan memperluas akses pelayanan kesehatan	0.80% 41.70% 13.02% 10.60% 8.80% 2.50% 3.01% 18.30% 0.80% 1% 94.9% 5.06%	Pemanfaatan Pelanduk di PSC 119 PKM Tanjungpandan PKM Air Saga PKM Perawas PKM Badau PKM Sijuk PKM Tanjung Binga PKM Membalong PKM Simpang Rusa PKM Selat Nasik Skrining Covid-19 Skrining kesehatan lainnya	Dinas Kesehatan
9	GANGAN (Garansi Hasil Panen Komoditi Gabungan)	Garansi pembelian hasil pertanian, perkebunan dan perikanan masyarakat yang telah membuat perjanjian bersama dan dibina oleh BUMD	-	Belum ada data	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPMPTSPP
10	BETARE (Belitung Terang Benderang)	Pengadaan lampu untuk penerangan dermaga tambat kabuh kapal nelayan	30 unit	2019 : 10 unit 2020 : 10 unit APBD dan 10 unit DID tambahan 2021 tidak ada penambahan	Dinas Perikanan (data dukungan untuk Program Inovasi Betare)
11	SIMPOR (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga)	Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama	685 siswa SD/per tahun 315 siswa SMP/per tahun	Rp. 342.500.000,- Rp. 157.500.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



			Perawas 86,13% Badau 90,09% Sijuk 64,18% Tanjung Binga 95,7% Membalong 98,89% Simpang Rusa 89,01% Selat Nasik 73,65% Kabupaten 79,8%		
15	SOS CENTER	Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan darurat dengan layanan telepon ke 505	-	Belum ada data	Dinas Kesehatan
16	TERINDAK (Tanah Teregister, Integrasi dan Akuntabel)	Sistem informasi pencatatan tanah di kantor desa dan kecamatan berbasis IT.	-	Belum ada data	Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
II PROGRAM INOVASI TAMBAHAN					
1	KERISI (Kios Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi/Berusaha Terintegrasi)	Layanan kemudahan investasi kepada masyarakat/pelaku usaha terutama UMKM, kerjasama dengan Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan Kelurahan sehingga mewujudkan pelayanan perizinan berusaha/investasi yang cepat, bersih, murah, transparan dan terintegrasi	Penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Program Kerisi sebanyak 13 kios KERISI di Desa/Lurah/Kecamatan dengan jumlah penerima manfaat dengan penerbitan NIB di Kios Kerisi sebanyak 143 NIB	2019 : Launching Program KERISI, dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Program Kerisi sebanyak 4 Kios KERISI di Desa, dengan jumlah penerima manfaat dengan penerbitan NIB di Kios KERISI sebanyak 36 NIB 2020 : Sosialisasi Program KERISI dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Program KERISI sebanyak 11 Kios KERISI di Desa/lurah/kecamatan, dengan jumlah penerima manfaat dengan penerbitan NIB di Kios KERISI sebanyak 138 NIB 2022 : Rencana pelaksanaan Penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Program KERISI sebanyak 12 Kios KERISI di Desa/lurah/kecamatan.	DPMPTSPP
2	SIMINO (Pendaftaran Online)	Pendaftaran berbasis online bagi pasien poliklinik. Berfungsi untuk meningkatkan mutu layanan dan mengurangi kerumunan di loket pendaftaran	1135	Mulai diberlakukan 1 Januari 2022	RSUD dr. H. Marsidi Judono
3	BELUNGKAK (Beranak Langsung Dapat Akta Anak)	Pelayanan PONEK IGD (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif di Instalasi Gawat Darurat) dalam pembuatan akta kelahiran bayi yang baru lahir di IGD RSUD dr. H. Marsidi Judono, untuk membatu pasien dan keluarga untuk mendapatkan akta kelahiran bayi baru lahir di IGD dengan proses yang lebih ringkas	187 pengguna	Diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2021 Juli : 27 pengguna Agustus : 28 pengguna September : 24 pengguna Oktober : 44 pengguna November : 34 pengguna Desember : 30 pengguna	RSUD dr. H. Marsidi Judono
4	BESADU (Belitung Saluran Aspirasi)	Menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat Belitung	214 aduan	135 ditanggapi	Dinas Komunikasi dan



	dan Pengaduan)	yang berkaitan dengan permasalahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Informatika
5	PANTAS (Pelayanan Antar Jemput Prioritas)	85 Orang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	BEKAWAN (Membuat KIA Lewat Online)	132 Dokumen	
7	LASKAR PELINGE (Laskar Pelayanan Keliling Ngebut)	456 Dokumen Kartu Keluarga	
8	PADUKA RT (Pelaporan Duka oleh Ketua RT)	183 Dokumen	
9	BEREGO (Beganti Rupe Gaye Foto)	464 Dokumen	

Sumber Data: Bappeda Kab. Belitung Tahun 2021

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik berintegritas tinggi di Kabupaten Belitung ditandai dengan diperolehnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Kabupaten Belitung pada tahun 2021 yang diraih oleh RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung, hal ini menjadi modal penting dalam rangka replikasi bagi unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mendapatkan predikat WBK.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Belitung mengusulkan tiga OPD untuk mendapat penghargaan zona integritas, yaitu UPT. RSUD dr. Marsidi Judono, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perindustrian. Direncanakan penambahan Unit Kerja untuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2022 yaitu Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.



RSUD dr. H. Marsidi Judono Terima Apresiasi dan Anugerah Zona Integritas Menuju WBK

Selanjutnya untuk Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Belitung. Persentase capaian tertib administrasi kependudukan pada tahun 2021 sebesar 92,68% melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 92%. Hal ini didorong dari pelayanan prima yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung kepada semua masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan.

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Program

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2020	2021	2020	2021
1	Persentase capaian pendaftaran penduduk	Persen	81	83	82,65	84,36
2	Persentase capaian pencatatan sipil	Persen	94	94	93,41	93,69
3	Persentase pemanfaatan data	Persen	100	100	100	100

Capaian Indikator Kinerja Program unsur penunjang urusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- Persentase capaian pendaftaran penduduk tahun 2021 sebesar 84,36% melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 81%. Adapun yang menjadi faktor pendorong tercapainya target pada indikator ini adalah:
 - Pelaksanaan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan terminnya;
 - Pelayanan keliling dan jemput bola kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan
- Persentase capaian pencatatan sipil tahun 2021 sebesar 93,69% kurang dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 94%. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak tercapainya target pada indikator ini adalah:
 - Pandemi Covid 19 menyebabkan pemangkasan anggaran Tahun 2021;



- Jauhnya jarak tempuh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online;
 - Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dirasakan masih kurang dalam mendukung program dan kegiatan. Salah satunya adalah tidak tersedianya Kendaraan Pelayanan Keliling;
 - Sumber Daya Manusia saat ini masih kurang karena untuk melayani penduduk Kabupaten Belitung yang berjumlah 174.567 jiwa idealnya 58 orang sementara saat ini hanya terdapat 35 pegawai (23 ASN dan 12 Pegawai Non PNS);
 - Belum maksimalnya pelaporan kematian oleh Ketua RT di Kabupaten Belitung
3. Persentase pemanfaatan data tahun 2021 sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 100%. faktor pendorong tercapainya target pada indikator ini adalah:
- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi Pantas, Matang di Pohon, Bekawan dan e-Besilak;
 - Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan OPD yang ada di Kabupaten Belitung;
 - Pelayanan dilakukan menggunakan aplikasi SIAK dengan Upgrade Sistem dilakukan secara berkala dan pemeliharaan Sistem dilakukan secara berkala.



Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana. Berikut kinerja realisasi pencapaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung dalam pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	Target (Jumlah Warga Negara)	Realisasi	
			Jumlah Warga Negara	%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	181.735	158.369	87,14%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	181.735	158.369	87,14%
3	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	3.012	3.012	100 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	38	29	76,32 %

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung 2022

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

- Belum adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
- Belum adanya Dokumen Rencana Kontijensi
- Terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana
- Belum dibentuknya WMK baru sesuai ketentuan yang berlaku;
- Masih minimnya mobil damkar dan personil serta situasi musim kemarau ;
- Belum terlaksananya diklat damkar I bagi pegawai non PNS;
- Belum terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran

Solusi :

- Merencanakan dan mengusulkan anggaran untuk penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi
- Merencanakan dan mengusulkan penambahan WMK untuk meningkatkan pelayanan;
- Merencanakan penambahan sarana prasarana penanggulangan bencana

- d) Merencanakan penambahan mobil damkar serta meningkatkan sosialisasi pencegahan kebakaran pada musim kemarau;
- e) Merencanakan dan melaksanakan diklat damkar bagi yang belum memenuhi kualifikasi.
- f) Merencanakan dan mengusulkan pemebentukan Relawan Pemadam Kebakaran

Hal lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pembenahan manajemen pelayanan publik. Sebagai upaya pengimplementasian Program BERUAH (Pembangunan dan Perbaikan Rumah Ibadah) sejak tahun 2019, yang sarasannya meliputi rumah ibadah untuk semua agama, meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui keterbukaan informasi publik dengan penggunaan teknologi dan informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Memberikan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Sebanyak 13 Rumah ibadah memperoleh Bantuan Dana Hibah Program Beruah Pada Tahun Anggaran 2021.



Pemberian Bantuan untuk Rumah Ibadah dalam Program BERUAH tahun 2021

Tabel 2.74

Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	925.129.130,00	796.392.995,00	86,08
2	Program Pencatatan Sipil	25.750.960,00	15.000.000,00	58,25
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.790.000,00	5.091.300,00	74,98
4	Program Informasi dan Komunikasi Publik	600.362.220,00	497.090.127,00	82,80
5	Program Aplikasi Informatika	2.177.576.240,00	2.140.083.582,00	98,28
6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	569.407.300,00	495.012.000,00	86,93
7	Program Penanggulangan Bencana	2.025.872.600,00	1.738.160.150,00	85,80
8	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.457.152.700,00	5.684.811.700,00	88,04
9	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	173.166.500,00	144.431.115,00	83,41
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	77.200.980,00	56.344.232,00	72,98
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.318.161.000,00	1.310.719.900,00	99,44
12	Program Pengelolaan Permuseuman	3.715.908.312,00	2.351.631.574,00	63,29

Sehingga untuk sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas dengan persentase realisasi anggaran

86,08%. Pandemi Covid 19 yang masih terjadi tahun 2021 sangat mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.



3.2.3 TUJUAN 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Capaian kinerja tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi diukur melalui pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2021 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,29	3,2-3,6	5,64	156,67	SANGAT BERHASIL	4,4-5,1

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2021 adalah 3,2-3,6, dan terealisasi sebesar 5,64 dengan capaian kinerja sebesar 156,67% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja LPE Kabupaten Belitung tahun 2021 sebesar 128,18%.

Namun Akibat adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia, hal ini karena banyak indikator perekonomian yang memburuk seperti daya beli yang merosot tajam hingga angka-angka kegiatan bisnis yang terus mengalami penurunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi selalu berkontraksi sejak awal hingga akhir tahun 2021. Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pada Laporan ini, menggunakan PDRB dari sisi lapangan usaha. Rendahnya ekonomi maka pendapatan akan menurun drastis.

Berdasarkan data resmi dari BPS Kabupaten Belitung, PDRB Kabupaten Belitung tahun 2021, ADHK tahun 2010, mencapai Rp 6 710,01 milyar. Angka ini naik Rp 357,98 milyar pada tahun 2021 dari Rp 6 352,03 milyar tahun 2020. Secara detail perkembangan PDRB Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76
PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2017 – 2021, (milyar rupiah) ADHK 2010

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^f	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 565,39	1 613,15	1 657,64	1 781,36	1 856,19
Pertambangan dan Penggalian	540,62	542,03	546,87	485,05	509,25
Industri Pengolahan	738,52	782,77	733,66	734,69	770,06
Pengadaan Listrik dan Gas	9,31	9,92	9,82	9,72	10,55
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,93	1,84	1,89	2,05	2,16
Konstruksi	682,97	768,35	832,64	798,64	839,47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	685,71	713,01	726,35	661,00	701,34
Transportasi dan Pergudangan	365,03	394,61	399,2	316,25	342,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	201,15	214,15	231,51	206,45	229,16
Informasi dan Komunikasi	186,41	209,56	244,71	285,43	308,72
Jasa Keuangan dan Asuransi	138,05	144,59	154,13	142,33	155,02
Real Estat	193,98	202,64	208,54	210,86	221,95
Jasa Perusahaan	20,69	21,36	21,96	17,51	18,47



Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	365,24	383,67	418,57	398,27	420,65
Jasa Pendidikan	113,94	119,59	129,02	124,88	127,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114,27	119,81	130,01	131,39	148,86
Jasa Lainnya	46,46	49,3	53,91	46,13	48,16
Produk Domestik Bruto	5 969,67	6 290,36	6 500,42	6 352,03	6 710,01

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2017 – 2021 PDRB Kabupaten Belitung menunjukkan kecenderungan meningkat. Dilihat dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar Rp 1.856,19 milyar atau sebesar 28,17%. Lapangan usaha yang kedua adalah konstruksi sebesar 12,61%, kemudian industri pengolahan sebesar 12,34% dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 10,23%. Berikut ditampilkan distribusi persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha kurun waktu 2017 – 2021 :

Tabel 2.77
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2017 – 2021, ADHB

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^r	2020 [*]	2021 ^{**}
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,21	25,31	25,01	27,79	28,17
Pertambangan dan Penggalian	7,99	7,27	6,60	5,94	6,22
Industri Pengolahan	12,25	12,41	11,41	11,93	12,34
Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,19	0,18	0,18	0,17
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	11,17	12,49	13,34	12,94	12,61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,46	11,47	11,23	10,35	10,23
Transportasi dan Pergudangan	6,72	6,86	7,00	5,31	5,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,38	3,48	3,83	3,75	3,80
Informasi dan Komunikasi	2,54	2,66	2,93	3,40	3,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,27	2,31	2,36	2,18	2,24
Real Estat	3,23	3,20	3,22	3,43	3,25
Jasa Perusahaan	0,34	0,35	0,36	0,31	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,52	7,28	7,57	7,52	7,12
Jasa Pendidikan	2,10	2,07	2,14	2,17	2,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,78	1,77	1,89	1,94	2,01
Jasa Lainnya	0,84	0,85	0,91	0,83	0,78

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2022

Dapat diuraikan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan kontribusi beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Belitung dan beberapa lapangan usaha lain mulai berkurang. Lapangan usaha yang menunjukkan penurunan antara lain pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan/minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan dan jasa lainnya.

Sementara lapangan usaha yang terus memberikan kontribusi meningkat adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, real estate dan jasa pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung, walaupun sangat lamban, dari ketergantungan terhadap alam menuju masyarakat yang mengandalkan jasa. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempersiapkan SDMnya dan membekali masyarakat dengan keahlian.

Walaupun telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi dan PDRB terus bertumbuh setiap tahun, pada



tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi terjadi percepatan. Pada tahun 2021 LPE Kabupaten Belitung sebesar 5,64%, sementara LPE tahun 2020 sebesar -2,31%. Percepatan atau perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.78
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017–2021

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^r	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,58	3,08	2,73	7,46	4,20
Pertambangan dan Penggalian	0,82	0,91	0,24	-11,30	4,99
Industri Pengolahan	4,15	6,11	-6,38	0,14	4,81
Pengadaan Listrik dan Gas	5,30	6,61	-1,05	-0,94	8,48
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,76	-6,01	4,03	8,63	5,35
Konstruksi	12,15	12,50	8,37	-4,08	5,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,17	3,50	2,35	-9,00	6,10
Transportasi dan Pergudangan	9,74	8,10	1,16	-20,78	8,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,32	5,46	9,14	-10,82	11,00
Informasi dan Komunikasi	8,33	13,45	15,71	16,64	8,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,19	4,74	6,60	-7,66	8,91
Real Estat	5,34	4,47	2,91	1,11	5,26
Jasa Perusahaan	4,62	3,24	2,77	-20,27	5,50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,41	5,04	9,10	-4,85	5,62
Jasa Pendidikan	8,82	4,96	7,88	-3,21	2,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,85	4,06	9,33	1,06	13,29
Jasa Lainnya	11,06	6,10	9,36	-14,43	4,39
Produk Domestik Bruto	5,30	5,38	3,33	-2,28	5,64

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh laju pertumbuhan lapangan usaha. Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,26 % dari 7,46 % pada tahun 2020, menjadi 4,20 % di tahun 2021. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, tertinggi sebesar 7,46 % di tahun 2020 dan terendah sebesar 0,58 % di tahun 2017.

Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Walaupun terdampak pandemi covid-19 yang dihadapi dunia tak terkecuali Indonesia. Beberapa indikator perekonomian mulai membaik seperti daya beli yang mulai meningkat hingga angka-angka kegiatan bisnis juga mengalami sedikit kenaikan. Tingginya ekonomi maka pendapatan mengalami kenaikan, sehingga berbagai lapangan usaha mengalami peningkatan antara lain: Pertambangan dan penggalian yang menurun menjadi -11,30% di tahun 2020 mengalami kenaikan 4,99% ditahun 2021, begitu juga dengan konstruksi yang mengalami penurunan -4,08% ditahun 2020 naik menjadi 5,11 ditahun 2021, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami kenaikan menjadi 6,10%, kenaikan juga terjadi pada transportasi dan pergudangan 8,15%, juga untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi 11,00%.

Pada tahun 2021 laju pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mengalami kenaikan menjadi 8,91%, dan real estate juga mengalami kenaikan menjadi 5,26% kemudian untuk jasa perusahaan sebesar 5,50% begitupun untuk administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial menjadi 5,26% jasa pendidikan sebesar 2,48%. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami kenaikan menjadi 13,29 % dan jasa lainnya sebesar 4,39 %.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,92 % dari -2,28 % pada tahun 2020, menjadi 5,64 % di tahun 2021.



Selama 5 (lima) tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, tertinggi di tahun 2021 sebesar 5,64 dan terendah di tahun 2020 sebesar -2,28.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 2.79
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019 ^r	2020*	2021**
1	Bangka	5,04	4,52	2,87	-0,71	7,48
2	Belitung	5,30	5,38	3,33	-2,28	5,64
3	Bangka Barat	5,26	5,20	7,06	-5,37	0,21
4	Bangka Tengah	3,46	3,42	1,21	-2,86	4,76
5	Bangka Selatan	4,57	4,52	2,53	-1,94	3,61
6	Belitung Timur	4,85	4,22	3,26	-0,64	4,55
7	Pangkalpinang	5,19	5,08	3,26	-3,01	9,27
Jumlah		4,69	4,69	3,62	-2,59	5,09

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2022

Dari deskripsi di atas dapat tergambar bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Tahun 2021 mengalami percepatan. Sehingga perekonomian Kabupaten Belitung menduduki peringkat ketiga paling tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Pada tahun 2022, Kabupaten Belitung dicanangkan menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Development Working Group (DWG) G20 yang akan berlangsung pada tanggal 7-9 September 2022. G20 adalah kumpulan negara-negara dengan perekonomian raksasa ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G20 dinamakan *The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors* atau Kelompok Dua puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Dengan diselenggarakannya G20 di Kabupaten Belitung ini, diharapkan akan berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat Belitung ke depannya, khususnya dibidang Pariwisata dan UMKM.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui langkah-langkah dan program-program strategis sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPJMD.

Adapun faktor pendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- ❖ Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan dan industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru;
- ❖ Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;
- ❖ Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai penguat daya saing produk industri;
- ❖ Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor terutama yang bergerak di sektor industri pariwisata;
- ❖ Stabilitas sosial, politik dan keamanan yang terjaga;
- ❖ Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Belitung.

Sedangkan faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- ✘ Tingkat inflasi yang masih tinggi;
- ✘ Ketersediaan pasokan listrik yang belum memadai;
- ✘ Kualitas SDM yang belum memadai.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :





- ⌘ Menerapkan standarisasi industri lebih ketat, khususnya industri pariwisata sesuai dengan standar internasional;
- ⌘ Mendorong peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti proses perijinan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- ⌘ Mendorong pengembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberi kesempatan sektor swasta untuk berinovasi sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- ⌘ Meningkatkan kuitas SDM dengan program-program pelatihan.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 3 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi” melalui 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 8 Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
	Sasaran 9 Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan; 15. Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.
	Sasaran 10 Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	16. Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro.
	Sasaran 11 Meningkatnya investasi	17. Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri.
	Sasaran 12 Meningkatnya infrastruktur Kewilayahan	18. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah; 19. Pemenuhan Air Baku.

SASARAN 8 : Meningkatkan Pengembangan Pariwisata

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengembangan Pariwisata” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara) dengan target 150.000 orang. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2021.



Tabel 2.81
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2021 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara)	Orang	467.571	150.000	184.570	123,05	SB	400.000

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata, yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara) tahun 2021 sebesar 184.570 orang, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang semula 134.266 orang atau naik 50.304 orang. Terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran sebesar 123,05% dengan kategori SANGAT BERHASIL, melebihi target sebesar 23,05%. Sedangkan untuk target akhir RPJMD memerlukan peningkatan 53,86%.

Target indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara) dari Tahun 2020 mengalami penyesuaian dengan kondisi perekonomian nasional akibat wabah dunia yaitu pandemi covid-19 yang berdampak pada minimnya rute penerbangan dari dan ke Belitung yaitu hanya ada 2 (dua) penerbangan. Hal ini juga sebagai bentuk penyesuaian terhadap target Renstra dari Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Tabel 2.82
Jumlah Kunjungan Tamu Asing dan Domestik Tahun 2019, 2020 dan 2021

BULAN	2019			2020			2021		
	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	TAMU ASING	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	JUMLAH	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	JUMLAH
Januari	897	20 664	21 561	2.718	21.934	24.652	56	9.517	9.573
Februari	1 229	18 774	20 003	2.013	20.657	22.670	124	9.650	9.774
Maret	1 434	25 730	27 164	1.025	15.004	16.029	270	15.101	15.371
April	1 452	27 815	29 267	30	599	629	362	13.170	13.532
Mei	644	18 155	18 799	1	714	715	146	10.495	10.641
Juni	1 083	27 302	28 385	1	1.429	1.430	57	16.305	16.362
Juli	1 049	30 039	31 088	10	4.685	4.695	23	7.810	7.833
Agustus	1 569	28 751	30 320	101	8.475	8.576	50	7.769	7.819
September	639	29 078	29 717	52	9.483	9.535	39	12.465	12.504
Oktober	2 670	32 135	34 805	62	13.464	13.526	149	25.748	25.897
Nopember	3 091	34 275	37 366	34	13.450	13.484	125	28.960	29.085
Desember	3 306	36 373	39 679	233	16.935	17.168	182	25.997	26.179
JUMLAH	19.063	329.091	348.154	6.280	126.829	133.109	1.583	182.987	184.570

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2019 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 348.154 orang, menurun menjadi 134.266 orang di tahun 2020, dan di tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah wisatawan yaitu sebanyak 184.570 orang, yang terdiri dari 1.583 orang wisatawan asing dan 182.987 orang wisatawan domestik. Jumlah wisatawan asing ditahun 2020 mengalami penurunan dari 6.280 orang, menjadi 1.583 orang ditahun 2021. Faktor utama menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya penutupan jalur penerbangan, pembatasan sosial berskala besar (lockdown)



sepanjang tahun 2021. Jumlah wisatawan domestik ditahun 2020 mengalami peningkatan dari 126.829 orang, menjadi 182.987 orang ditahun 2021. Faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Belitung tahun 2021 adalah (a) meningkatnya kepercayaan pelaku perjalanan terhadap keamanan dan kenyamanan berwisata seiring dengan meningkatnya persentase orang yang sudah divaksin di Indonesia. Selain itu banyaknya local tourist (masyarakat) Belitung yang menggunakan jasa akomodasi pada saat libur pendidikan kenaikan kelas/libur semester (juli 2021), libur pendidikan (desember 2021) dan libur tahun baru; (b) adanya big promo /diskon oleh industri pariwisata (hotel) agustus-september 2021 serta adanya kegiatan kementerian /lembaga yang dilaksanakan di Belitung dengan menginapkan seluruh peserta (agustus-september 2021) dan kegiatan program apresiasi bagi tenaga kesehatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Oktober –November 2021). Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata didorong oleh beberapa faktor sebagai daya ungkit pengembangan pariwisata, antara lain :

a. Attraction (Atraksi Wisata/Daya Tarik Wisata)

Ada 3 hal penting dalam daya tarik wisata yaitu alam, budaya dan daya tarik buatan. Kondisi alam Belitung yang dikelilingi lautan dan pantai yang indah, menjadi daya tarik utama wisatawan nusantara terutama yang berasal dari daerah padat penduduk seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Semarang, dan lainnya. Alam yang masih asri dan alami dengan udara yang bersih menjadikan penduduk kota memiliki minat yang besar berkunjung ke Belitung. Beberapa destinasi pariwisata seperti Bukit Peramun, Gusung Bugis, Batu Baginda, Batu Mentas, Tanjungpandan dan lainnya yang terkenal di Belitung menyuguhkan keasrian dan keindahannya yang tidak didapatkan di kota-kota besar.

Budaya masyarakat Belitung yang kental dengan melayu serta perilaku masyarakatnya yang ramah, senang bergaul dan menjunjung tinggi toleransi umat beragama pada akhirnya menciptakan iklim berwisata yang aman dan nyaman dan kondusif bagi wisatawan. Sedangkan wisata buatan yaitu *waterboom*/kolam renang, kolam pemancingan, menyusuri hutan bakau dan event-event wisata tingkat nasional juga terbukti menarik minat wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara. Seperti Festival Tanjung Kelayang, Triathlon, Festival Desa Wisata, Festival Cap GoMeh, dan lain-lain.

Seiring berkembangnya pariwisata di Indonesia, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung didukung oleh semua OPD di Pemerintahan Kabupaten Belitung serta BUMD/BUMN dan pihak swasta akan menjaga anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan membangun infrastruktur didestinasii pariwisata seperti jalan, jembatan, drainase, jaringan listrik, ketersediaan air bersih, ketersediaan jaringan telekomunikasi dan sarana buatan lainnya guna memberikan pelayanan yang maksimal (*hospitality*) kepada wisatawan.

b. Amenities (Amenitas/Fasilitas)

Fasilitas-fasilitas yang sudah ada di destinasi pariwisata di Kabupaten Belitung seperti bandara, pelabuhan, hotel berbintang dan non bintang, rumah makan (menu barat, nusantara dan lokal), rumah ibadah, rumah sakit 24 jam, gedung pertunjukan dan sebagainya juga menjadi faktor penentu orang berkunjung ke Belitung. Namun masih diperlukan pembangunan sarana lainnya seperti petak kios cinderamata didestinasii pariwisata, tempat parkir, saung/gazebo, kamar ganti/bilas, dan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan utama wisatawan.

c. Accessibility (Aksesibilitas)

Aksesibilitas ke Pulau Belitung dapat dicapai melalui 2 pintu utama yaitu Bandara Hanandjoeddin Tanjungpandan dan Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan. Di Bandara Hanandjoeddin Tanjungpandan, ada 2 (dua) rute penerbangan yaitu Tanjungpandan-Jakarta (PP) dan Tanjungpandan-Pangkalpinang (PP). Wisatawan manca negara dan domestik bisa melakukan penerbangan langsung atau transit (via Jakarta/Pangkalpinang). Sedangkan Pelabuhan Laskar Pelangi dengan armada Kapal Express Bahari melayani rute Tanjungpandan-Pangkalbalam (Pulau Bangka). Akses yang mudah kedestinasii pariwisata di Belitung, bisa dicapai dengan mobil, sepeda motor dan sepeda. Transportasi umum seperti bis dan jasa transportasi lainnya (mobil/sepeda motor rental) sangat mudah ditemukan di pusat kota Tanjungpandan dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 300.000,- s.d Rp. 1.000.000,- sesuai dengan kebutuhan



wisatawan. Kemudahan akses transportasi dan penerapan tarif yang sesuai menjadi faktor penunjang besarnya minat berkunjung wisatawan ke Belitung.

d. Ancillary (Pelayanan Tambahan)

Sarana pendukung lainnya (tambahan) di destinasi pariwisata Belitung yang sebenarnya merupakan kebutuhan pokok wisatawan seperti ketersediaan pusat informasi, *money changer*, biro perjalanan, lembaga-lembaga kepariwisataan, dan usaha jasa pariwisata lainnya seperti (*guide, spa, bodyguard, laundry*, dan lain-lain). Di Kabupaten Belitung, khususnya di destinasi pariwisata utama seperti Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi, Bukit Peramun, Gusung Bugis, dan Tanjungpendam, memiliki/terdapat fasilitas-fasilitas tambahan yang memudahkan wisatawan. Fasilitas-fasilitas ini sangat penting keberadaannya dan akan terus ditingkatkan fungsinya sesuai dengan kebutuhan wisatawan/masyarakat umum.

Grafik 3.13. : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Manca Negara Tahun 2021

Total Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Ke Belitung Tahun 2021

Bulan	Jumlah
Januari	9.573
Februari	9.774
maret	15.371
April	13.532
Mei	10.641
Juni	16.362
Juli	7.833
Agustus	7.819
September	12.504
Oktober	25.897
November	29.085
Desember	26.179
Total	184.570



Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2021

Pengembangan penerbangan di Kabupaten Belitung dimaksudkan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung. Pembangunan pariwisata Belitung sendiri sudah dimulai sejak lama, namun semakin fokus setelah ditetapkan kawasan wisata Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2016. Aksesibilitas dan amenities untuk mendukungnya pun terus ditingkatkan seiring dengan semakin dikenalnya Belitung di dunia kepariwisataan, mulainya wisatawan melihat Belitung sebagai destinasi baru yang menarik dan layak dikunjungi, bertambahnya beberapa maskapai penerbangan yang membuka rute penerbangan ke Belitung, dan semakin intensifnya operator wisata menawarkan paket-paket wisata ke Belitung.

Pada tahun 2021 pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung pun semakin berkembang diikuti dengan perkembangan sarana dan prasarana pendukungnya seperti akomodasi, kamar, dan tempat tidur. Pada hotel berbintang dan non bintang kamar tersedia berjumlah 635.573 dan kamar terjual sebanyak 90.192 dengan rata-rata persentase okupansi kamar hotel sebesar 14,19 %. Faktor utama menurunnya persentase okupansi kamar hotel adalah pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan sosial, perjalanan dan sebagainya.

Tabel 2.83

Data Okupansi Hotel-Hotel Belitung Berdasarkan Kelas Bintang dan Non Bintang Tahun 2021

Kelas Bintang	Kamar Tersedia	Kamar Terjual	% OCC
Bintang 5	27.375	5.522	20,17
Bintang 4	252.355	40.843	15,50
Bintang 3	167.315	25.971	15,94
Bintang 2	30.660	509	1,63



Bintang 1	18.250	1.987	12,67
Non Bintang	139.618	15.360	8,63
Belitung	635.573	90.192	14,19

Sumber: Dinas Pariwisata 2021

Pada tahun 2021 jumlah homestay yang ada di Kabupaten Belitung sebanyak 113 homestay dengan jumlah kamar sebanyak 157 kamar dan 320 kapasitas kamar.

Tabel 2.84
Data Homestay di Kabupaten Belitung Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Homestay	Jumlah Kamar	Kapasitas Kamar
Tanjungpandan	3	3	12
Sijuk	74	114	228
Membalong	10	10	20
Selat Nasik	25	28	56
Badau	1	2	4
Belitung	113	157	320

Di samping ketersediaan akomodasi, dalam upaya membangun daya tarik wisata sehingga dapat menarik wisatawan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pada tahun 2021 Kabupaten Belitung melaksanakan kegiatan kepariwisataan sebagai berikut :



Semua itu merupakan upaya pencapaian kinerja sasaran. Upaya pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dicapai melalui strategi meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan 8 (delapan) arah kebijakan, yaitu : (1) meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata; (2) meningkatkan pemasaran promosi pariwisata berbasis digital; (3) meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Geopark Belitung, perhutanan sosial dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat; (4) pengembangan desa wisata sesuai dengan potensi desa; (5) peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata; (6) meningkatkan kompetensi SDM pariwisata; (7) pelestarian adat istiadat, rumah adat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai warisan budaya; dan (8) meningkatkan pengelolaan museum maritim.

Pada tahun 2021, arah kebijakan meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata, yang merupakan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.



Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategi pariwisata kabupaten/kota dan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.

Program pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Arah kebijakan meningkatkan pemasaran promosi pariwisata berbasis digital dilaksanakan melalui program pemasaran pariwisata dengan sub kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.



Arah kebijakan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan *Geopark* Belitung, Perhutananan sosial dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat mengacu pada status Kabupaten Belitung yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, Kawasan Strategis Pembanguna Nasional. Sejak ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tahun 2017, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur terus berupaya mengembangkan kawasan taman bumi (*geosite*) yang ada di Pulau Belitung. Khusus Kabupaten Belitung, berbagai upaya dilakukan untuk mengenalkan taman bumi di Belitung ke dunia internasional, salah satunya melalui berbagai *event* baik skala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Pantai Wisata Tanjung Kelayang, antara lain:

- Belitung Geopark International Kayak Marathon 2018 di Pantai Tanjung Kelayang, Belitung. Kegiatan yang digelar bersama Kemenpar ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, diikuti oleh 82 peserta dari Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Italia, Trinidad, dan News Zealand.
- Belitung Geopark Internasional Stand Up Paddle and Kayak Marathon 2019. Kompetisi ini diselenggarakan bersama BPJS di Pantai Tanjung Kelayang dan diikuti oleh 150 peserta dari 8 negara, terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Selandia, Kanada, Perancis, dan Amerika.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mendapatkan pengakuan status Unesco Global Geopark. Upaya untuk mendapatkan status tersebut didukung penuh oleh pemerintah pusat dengan mengusulkan Geopark Pulau Belitung, bersama Geopark Kaldera Toba, dan dibahas pada pertemuan Asia Pacific Geoparks Network



(APGN) ke 6 tahun 2019 yang diselenggarakan di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Agustus – September 2019. Sayangnya status Geopark Global belum dapat diraih Belitung dengan alasan usulan geopark tersebut masih dalam proses dan belum terjadwal untuk mengambil keputusan saat APGN di Lombok. Namun demikian, catatan persiapan menuju Global Geopark Pulau Belitung sudah diperoleh Tim Asessor melalui catatan penilaian 2 (dua) asessor, Andreas Schueller dan Jean



Simon Pages, yang datang ke Belitung bulan Juni 2019. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2020 diajukan kembali dan

Belitung geopark – Geosite Batu Bedil Granite Rock

menjalani ujian akhir sidang konsel pada 8 Desember 2020, Geopark Belitung memperoleh skor tertinggi. Geopark Belitung memperoleh skor 850, merupakan skor tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia dalam pengalaman mengajukan diri menjadi Geopark UNESCO dengan standar skor penilaian tertinggi 1.000 point.



Pada tahun 2021 Geopark Belitung ditetapkan sebagai *UNESCO Global Geopark* Periode 2021-2024 pada Sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk lanskap, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis, biologis, dan budaya. Lanskap geologi Pulau Belitung yang unik, menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang di antaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan Hampala dan ikan Toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung di antaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal. Itulah alasan kenapa Geopark Belitung meraih nilai tertinggi di antara sejarah pengajuan geopark nasional ke UGG, yaitu 850 dari 1000 poin tertinggi. Geopark Belitung, merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar *UNESCO Global Geopark*.



Adapun objek wisata yang ditetapkan dalam *UNESCO Global Geopark* Belitung terdiri dari 21 geosite, diantaranya :

- 1.17 (tujuh belas) geosite yang ditetapkan dalam Sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO, terdiri dari Juru Sebrang, Terong Tourism Village, Kuale Granite Mangrove Forest, Peramun Hill Granite Forest, Tanjung Kelayang Trias Granite, Batu Bedil Trias Granite Rock, Nam Salu Open Pit, Lumut Hill, Batu Pulas Granite Rock, Cendil Heat Forest, Tebat Rasau Cenozoic Swamp, Burung Mandi Cretaceous Granodiorite, Siantu Pillow Lava, Tajam Mountain, Baginda Rocks, Punai Beach, dan Garumedang Tektite
- 2.4 (empat) geosite tambahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/533/KEP/DISPAR/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Geosite Tambahan *Unesco Global Geopark* Belitung, yaitu terdiri dari Pesisir Tanjung Rusa, Maritim Pulau Seliu, Kuning Kubing, dan Linsum Kawai.

Di samping penyelenggaraan *event-event* berskala nasional dan internasional, Pemerintah Kabupaten Belitung juga membangun *Geopark Information Center*, yang berlokasi di kawasan wisata Tanjungpendam,



tepatnya di Jl. Seroja nomor 484 Tanjungpandan Belitung. Pusat informasi taman bumi ini menyajikan taman bumi yang ada di Belitung seperti *Geosite* Juru Sebrang, *Geosite* Bukit limbongan, dan taman bumi lainnya. Di samping itu informasi berbagai taman bumi yang ada di dunia dan diakui oleh Unesco juga tersedia di pusat informasi taman bumi Belitung.

Sementara pengelolaan Kawasan Wisata Tanjung Kelayang mulai intensif dilakukan sejak penetapan Tanjung Kelayang sebagai KEK Pariwisata dan KSPN pada tahun 2016. Penetapan KEK Tanjung Kelayang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016 dan penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, yang disebut 10 Bali Baru.





Pembenahan, pengembangan, dan pembangunan infrastruktur Kawasan Wisata Tanjung Kelayang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, tetapi juga oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2018, pembuatan taman dan *landmark* berupa perahu kayu dengan bertuliskan “Welcome Belitung”, yang menjadi ikon baru Pantai Tanjung Kelayang, serta peningkatan jalur pedestrian, pembangunan toilet disabilitas, mushola, kolam pasir, arena ketangkasan, meja dan tempat duduk, dan jalur tangga menuju pantai.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 20 liter/detik. Pembangunan IPA ini ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air baku KSPN Tanjung kelayang. Selama ini pemenuhan kebutuhan air baku di KSPN Tanjung Kelayang dilayani oleh IPA yang dibangun pada tahun 2011 di Desa Keciput dengan kapasitas 10 liter/detik.

Untuk arah kebijakan pengembangan desa wisata sesuai dengan potensi desa telah dilaksanakan melalui terkelolanya 20 desa wisata yang tersebar di Kabupaten Belitung. Berikut Daftar Desa Wisata Kabupaten Belitung Tahun 2021:

Tabel 2.85
Daftar Desa Wisata Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Desa Wisata	Klasifikasi
1	Desa Wisata Kreatif Terong	Desa Terong Kecamatan Sijuk	Taman Wisata Aik Rusa Berehun, Geosite Bukit Tebalu Simpor Laki, Hutan Mangrove, Kesenian Gambus, Tradisi Ngijing/ngeremis, kerajinan daun lais, homestay	Maju/ mandiri
2	Pulau Seliu	Desa Pulau Seliu, Kecamatan Membalong	Sejarah kopra, Liu liu (alat angkut tradisional), heritage rumah tradisional (akulturasi budaya melayu, bugis,cina, eropa), pembuatan minyak kelapa dan VCO, pembuatan emping bagu' (melinjo), pembuatan perahu tradisional, pembuatan atap dari daun kelapa, perkampungan dan kuliner khas	Maju/ mandiri
3	Kuale Sidjoek	Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk	Heritage kota tua sijuk (mesjid, kelenteng, rumah tradisional), geosite mangrove kuale, geosite lava bantal siantu, pembuatan belacan (terasi) secara tradisional, homestay	Berkembang
4	Tanjung Kelayang	Desa Keciput, Kecamatan Sijuk	Geosite Tanjung Kelayang, pulau-pulau kecil dan bawah laut, penangkaran panyu sisik, madu teran (trigona), homestay (geohouse)	Berkembang
5	Tanjong Tinggi	Desa Tanjong Tinggi, Kecamatan Sijuk	Pantai laskar pelangi, mangrove labunaji, homestay	Berkembang
6	Sungai Padang	Desa Sungai Padang, Kecamatan Sijuk	Taman Sungai Padang, Pantai Batu Bedil (geosite), mangrove sungai padang, rumah hobbit (rumah bekas tungku pembuatan arang tradisional), situs makam tua padang kelarin, pembuatan belacan (terasi) secara tradisional	Berkembang
7	Suak Gual	Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik	Keroncong setambul fajar, permukiman dan budaya khas melayu pesisir, tradisi berua kampong, ritual selamat laut, tradisi menangin (permainan tradisional), pembuatan okulele, mercusuar tanjong lancor, pulau piling, perlintasan jalur sutra maritim dan bawah air, homestay	Berkembang
8	Petaling	Desa Petaling, Kecamatan Selat Nasik	Ekowisata mangrove petaling, bukit petaling, kerajinan kayu petaling, tradisi berua kampong, homestay	Rintisan
9	Badau	Desa Badau, Kecamatan Badau	Kesenian beripat beregong, sentra pembuatan parang badau, perkebunan nanas badau, museum badau dan sejarah kerajaan badau	Rintisan
10	Kacang Butor	Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau	Geosite gunung tajam, air terjun gurok beraye, situs makam Syech Abu Bakar Abdullah (Penyebarnya Islam di Belitung), perkebunan lada, agrowisata	Rintisan



11	Pelepak Pute	Desa Pelepak Pute, Kecamatan Sijuk	Dusun Balitung (perkampungan khas etnis Bali), Bukit Batu Titi	Rintisan
12	Tanjung Binga	Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk	Kampung nelayan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan, homestay	Rintisan
13	Padang Kandis	Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong	Bukit Batu Baginde (geosite), pantai penyabong, pantai teluk gembira, perkebunan lada, pembuatan gula aren, sentra rajungan	Rintisan
14	Selat Nasik	Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik	Joli/Pikul Pengantin (tandu khas pengantin di Pulau Mendanau), musik keroncong setambul fajar, tupai selat nasik, tugu perjuangan selat nasik, pantai kuku burong	Rintisan
15	Tanjung Pendam	Kelurahan Tanjung pendam Kecamatan Tanjungpandan	Kampung wisata, sunset beach, tradisi ngjijing/ngeremis	Rintisan
16	Air Saga	Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan	Pembuatan Perahu tradisional, pusat kuliner dan oleh-oleh	Rintisan
17	Tanjung Rusa (persiapan)	Desa Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong	Pantai Merida, Pulau Kampak, Tradisi Muar Madu, atraksi bird feeding (camar), mancing pakai layangan, kesenian gambus inang-inang	Berkembang
18	Simpang Rusa (persiapan)	Desa Simpang Rusa, Kecamatan Membalong	Jurak (air terjun) linsum kepala kawai (dusun aik angka), sawah dan mangrove (kampung baru)	Rintisan
19	Perpat (persiapan)	Desa Perpat, Kecamatan Membalong	Gunung kubing, persawahan, peternakan sapi	Rintisan
20	Ibul (persiapan)	Desa Ibul, Kecamatan Badau	Bukit Ibul dan situs gunung lilangan (kompleks makam kerajaan badau), bukit pepa puyo, kerajinan rotan, kesenian kuda lumping (transmigran jawa), festival rambutan	Rintisan

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2021

Arah kebijakan peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata di Kabupaten Belitung sejalan dengan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Belitung, yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kreatif dalam pengembangannya baik dari segi kuliner, kriya, fesyen, penerbitan, musik, seni pertunjukan, fotografi, seni rupa, televisi radio, desain interior, film, animasi dan video, design product, design komunikasi visual, periklanan, arsitektur, aplikasi dan game developer.

Berikut daftar tenaga kerja sektor ekonomi kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2021 :

Tabel 2.86
Daftar Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2021

Sub Sektor	Tanjungpandan	Sijuk	Badau	Membalong	Selat Nasik	Jumlah
Kuliner	560	351	91	196	34	1232
Kriya	153	124	101	73	36	487
Fesyen	99	78	27	23	1	228
Penerbitan	19	4				23
Musik	11	7	2	7	0	27
Seni Pertunjukan	17	8	4	3	1	33
Fotografi	79	13	3	0	1	96
Seni Rupa	4	0	0	0	0	4
Televisi Radio	3	0	0	0	0	3
Desain Interior	2	0	0	0	0	2
Film, Animasi dan Video	0	0	0	0	0	0
Design Product	0	0	0	0	0	0
Design Komunikasi Visual	0	0	0	0	0	0
Periklanan	0	0	0	0	0	0
Arsitektur	0	0	0	1	0	1
Aplikasi dan Game Developer	2	5	0	0	0	7
TOTAL	948	589	228	303	73	2143

Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belitung pada tahun 2018 terdata 1.986 orang meningkat menjadi 2.012 orang di Tahun 2019. Dan terus mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu sebanyak 2.143



orang. Meningkatnya jumlah orang kreatif ini merupakan akibat dari semakin berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai industri kreatif sehingga mendorong peningkatan permintaan produk kreatif. Walaupun jumlah orang kreatif sudah meningkat, namun ketersediaan dan kualitas orang kreatif masih belum memadai untuk dapat meningkatkan skala produksi industri kreatif. Peningkatan jumlah dan kualitas orang kreatif dipengaruhi oleh dua aspek utama yaitu Pendidikan Kreatif dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Kreatif.

Berikut daftar tenaga kerja yang bersertifikat dan tidak bersertifikat tahun 2021, yaitu :

Tabel 2.87

Daftar Tenaga Kerja yang Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Sub Sektor Usaha Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja	Daftar tenaga kerja (orang)	
			Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
1	Subsektor Biro Perjalanan Wisata	820	-	820
2	Subsektor Hotel dan Restoran	1664	1078	586
3	Subsektor Spa	5	-	5
4	Subsektor Bar dan Jasa Boga	53	9	44
5	Jasa Pramuwisata/ Tour Leader	463	450	13
6	Pemandu Wisata Alam	-	-	-
7	Pemandu Ekowisata	-	-	-
8	Arung Jeram	-	-	-
9	Pemandu wisata agro	-	-	-
10	Bidang jasa boga	-	-	-
11	Pemandu wisata goa	-	-	-
12	Bidang manajerial spa	-	-	-
13	Bidang MICE	20	-	20
Total I		3025	1537	1488
Tenaga kerja pariwisata lainnya :				
1	Pengelola/Pegawai taman bermain	18	-	18
2	Pengelola/Pegawai komunitas perahu wisata	164	-	164
Total II		182	0	182
Total I + II		3207	1537	1670

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang bersertifikat sebanyak 1.537 orang dan tenaga kerja yang tidak bersertifikat sejumlah 1.670 orang.

Arah kebijakan meningkatkan kompetensi SDM pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan uji kompetensi pariwisata (sertifikat) tahun 2021 dan kegiatan pengembangan SDM Pariwisata Belitung Tahun 2021. Berikut daftar kegiatan uji kompetensi pariwisata (sertifikat) tahun 2021 dan kegiatan pengembangan SDM Pariwisata Belitung Tahun 2021 :

Tabel 2.88

Daftar Kegiatan Uji Kompetensi Sektor Pariwisata (Sertifikat) Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Pelaksana	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
1	Hotel dan Restoran (uji Kompetensi bidang hotel/restoran)	130 orang (lulus 80 orang dan tidak lulus 50 orang)	Kemenparekraf RI	29-30 Maret 2021	Hotel BW Inn, oleh LSP Rafflesia
2	Kepemanduan wisata (uji kompetensi bidang kepemanduan wisata city tour, local guide)	50 orang (lulus)	Kemenparekraf RI	29-30 Maret 2021	Hotel BW Inn, oleh LSP Rafflesia
TOTAL				180 orang	



Tabel 2.89
Daftar Kegiatan Pengembangan SDM Pariwisata Belitung Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Pelaksana	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
1	CAPTURE (course of profesional talent and incubation program for photographer)	30	KEMENPAREKRAF/ BAPAREKRAF	3 Maret 2021	Swissbel Resort Hotel, Sijuk
2	Kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar sub kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar (Workshop Kriya “inovasi produk anyaman lais berbasis konservasi dan kearifan lokal belitung”)	50	Dinas Pariwisata	29-31 Maret 2021	Hotel Green Tropical Village, Tanjungpandan
3	Pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi wisata (dana pelayanan kepariwisataan)	40	Dinas Pariwisata	30-31 Maret dan 1 April 2021	Bahamas Hotel Tanjungpandan dan HKM Linsum Kawai Desa Simpang Rusa, Membalong Bahamas Hotel
4	Uji Kompetensi Pemandu Wisata Snorkling	17	HPI Belitung	8 April 2021	Bahamas Hotel
5	Penyuluhan kepariwisataan Kabupaten Belitung menghadapi Unesco Global Geopark	40	Poltekpar Palembang	16 April 2021	Fairfield By Marriot Hotel
6	Pemberdayaan minuman lokal dan pengelolaan homestay sebagai daya dukung destinasi wisata Belitung	40	Poltekpar Palembang	17 April 2021	Fairfield By Marriot Hotel
7	MASAMO (masak bersama master)	30	Direktorat kuliner, kriya, desain dan fesyen Deputy Bidang Digital dan Produk Kreatif, Kemenprekraf RI	25 Mei 2021	Santika Hotel, Sijuk
8	Peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi pariwisata (dana pelayanan kepariwisataan)	40	Dinas Pariwisata	15-17 Juni 2021	Grand Hatika Hotel Tanjungpandan
9	Peningkatan masyarakat di destinasi pariwisata	40	Dinas Pariwisata	22-24 Juni 2021	Desa Kacang Butor Kec. Badau
10	Pembinaan Destinasi	40	Dinas Pariwisata	5-7 Juli 2021	Hotel Golden Tulip
11	Pelatihan pengelolaan desa wisata (dana pelayanan kepariwisataan)	40	Dinas Pariwisata	15-17 September 2021	Grand Hatika Hotel
12	Kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar sub kegiatan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (workshop kuliner “membangun bisnis kuliner inovatif dan kreatif dimasa pandemi”)	50	Dinas Pariwisata	20-21 September 2021	Maaxone bellstar hotel
13	Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar (pelatihan pemandu geowisata)	40	Dinas Pariwisata	28-30 September 2021	BW Suite hotel dan tanjung rusa
14	Bimtek pengelolaan destinasi	40	Dinas Pariwisata	13-15 Oktober	Hotel Maxone



	pariwisata sehat			2021	
15	Pelatihan pengelolaan usaha homestay/pondok wisata (dana pelayanan kepariwisataan)	40	Dinas Pariwisata	26-28 Oktober 2021	Hotel Maxone
16	Kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar sub kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar (workshop peningkatan sub sektor kuliner di desa wisata)	50	Dinas Pariwisata	28-29 Oktober 2021	Geosite Batu Bedil Sungai Padang Kec. Sijuk
17	Pelatihan pemandu wisata outbond (dana pelayanan kepariwisataan)	40	Dinas Pariwisata	9-11 November 2021	Grand Hatika dan Batu Bedil Geosite
18	Pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran (termasuk digitalisasi) destinasi pariwisata (dana pelayanan kepariwisataan)	40	Dinas Pariwisata	16-18 November 2021	Grand Hatika dan Bukit Peramun
19	Kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDP dan Ekraf tingkat lanjutan sub kegiatan pelatihan berbasis kompetensi bidang pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjut	40 (20 orang Kab. Belitung dan 20 Orang Kab Beltim)	Dinas Pariwisata	25-28 Oktober 2021	Manggar Belitung Timur
20	Kegiatan Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan Ekraf tingkat lanjutan Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay tingkat lanjut	40 (20 orang Kab. Belitung dan 20 Orang Kab Beltim)	Dinas Pariwisata	28-30 Oktober 2021	Tanjungpandan Belitung
TOTAL				747 orang	

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian tersebut. Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata :

- ❖ Penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016;
- ❖ Penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016;
- ❖ Penetapan Geopark Belitung sebagai Geopark Nasional pada tahun 2017;
- ❖ Penetapan *Unesco Global Geopark* Belitung pada tanggal 15 April 2021 untuk periode 2021-2024;
- ❖ Penetapan Bandara H.AS.Hanandjoeddin sebagai Bandar Udara Internasional;
- ❖ Kesepakatan Bersama antara Pemenritah kabuapten Belitung dengan PT. Indonesia Air Asia tentang Pengembangan Penerbangan di Kabupaten Belitung (181/006/MoU/I/2019 (Jangka waktu 1 Tahun)) dan diresmikannya rute penerbangan dari Malaysia – Belitung (PP) yang beropaerasi mulai tanggal 2 Oktober 2019;
- ❖ Dukungan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PUPR, dalam pengembangan KSPN Tanjung Kelayang.

Adapun faktor penghambat capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata, antara lain :

- ❖ Kurangnya operator penerbangan, kurangnya penerbangan langsung dari dan ke Belitung untuk destinasi selain Jakarta dan Pangkalpinang, dan kurangnya jumlah jadwal penerbangan dari dan ke Belitung.
- ❖ Minimnya rute penerbangan dari dan ke Belitung. Hanya ada 2 (dua) penerbangan dari dan ke Belitung yaitu Tanjungpandan-Jakarta dan Tanjungpandan- Pangkalpinang yang menyebabkan tidak maksimalnya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan perhari/perbulan/pertahun dan berkurangnya

frekuensi penerbangan dari 13 kali menjadi 7 kali sehari pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 dari 7 kali penerbangan menjadi 4 kali penerbangan dalam sehari s.d Desember 2020.

- ✘ Terjadinya wabah pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia yang berimbas pada pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar dan *Lockdown* hampir diseluruh negara didunia mulai dari Maret s.d Desember 2020 dan penghentian penerbangan internasional (Tanjungpandan-Kualumpur) dan penerbangan komersil domestik mulai bulan April 2020 s.d Juli 2020 rute Tanjungpandan-Jakarta dan Tanjungpandan-Pangkalpinang. Wabah pandemi yang meluas dan menelan banyak korban jiwa serta dan penerapan rapid test/uji swab berbayar menjadi faktor utama penyebab menurunnya jumlah wisatawan ke Belitung.
- ✘ Pintu masuk wisatawan ke Belitung Tahun 2021 sebesar 88,66 % melalui Bandara Udara Hanandjoeddin Tanjungpandan dan 11,34 % melalui Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan.
- ✘ Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di daya tarik wisata belum maksimal.
- ✘ Pemasaran pariwisata (promosi pariwisata) belum maksimal.
- ✘ SDM Pariwisata kurang dan kualitas SDM Pariwisata tidak sesuai standar.

Tabel 2.90

Perhitungan Persentase Kedatangan Melalui Bandar Udara dan Pelabuhan di Kabupaten Belitung Tahun 2018 s.d 2021

No.	VIA	Tahun								Persentase Rata-rata dalam 4 tahun (2018, 2019, 2020,2021)
		2018 (orang)	%	2019 (orang)	%	2020 (orang)	%	2021 (orang)	%	
1.	Bandar Udara Tanjungpandan	528.610	94,90	395.274	87,59	163.298	92,42	147.363	88,66	90,89
2.	Pelabuhan Tanjungpandan	28.414	5,10	55.987	12,41	13.402	7,58	18.843	11,34	9,11
Jumlah		557.024		451.261		176.700		166.206		

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2022

Tingginya persentase melalui bandar udara menggambarkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan Belitung sangat tergantung pada banyaknya operator penerbangan, jumlah destinasi kedatangan (pintu masuk) selain Jakarta dan Pangkalpinang serta jumlah jadwal penerbangan dari dan ke Belitung. Apabila operator penerbangan, jumlah destinasi kedatangan (pintu masuk), serta jumlah jadwal penerbangan dari dan ke Belitung ditambah, maka secara otomatis jumlah kunjungan wisatawan ke Belitung meningkat.

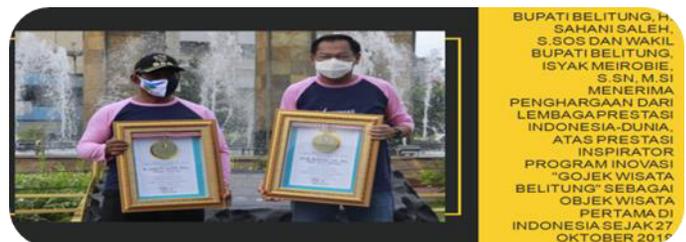
Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut di atas perlu strategi dan kebijakan daerah untuk mengatasinya. Berikut disampaikan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang :

✘ Promosi secara berkelanjutan dan inovatif

Promosi wajib dilakukan agar wisatawan semakin mengenal daerah tujuan wisata. Baik itu dengan melalui event-event berskala nasional maupun internasional, menyelenggarakan atau mengikuti pameran baik budaya maupun produk daerah berskala nasional dan internasional. juga melakukan promosi potensi wisata Belitung secara kreatif melalui jaringan nirkabel atau medsos, yang dapat menjangkau seluruh dunia tanpa batas.

✘ Meningkatkan kualitas layanan dan akomodasi pariwisata

Kesan pertama yang ada di benak setiap wisatawan adalah pelayanan. Pelayanan yang baik dan ramah akan membuat wisatawan merasa dihargai dan kehadirannya memang diharapkan. Perasaan dihargai dan diharapkan akan menimbulkan keinginan untuk kembali berkunjung di lain waktu. Itu bisa diciptakan jika layanan dan akomodasi pariwisatanya sudah bagus, lengkap



Penghargaan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam program inovasi "Gojek Wisata Belitung"



dan membuat para wisatawan merasa nyaman. Layanan adalah hal yang tidak boleh dilewatkan, ini menjadi semacam sihir yang membuat para wisatawan merasa wajib untuk datang dan datang kembali.

☞ Perlu adanya komitmen bersama untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan (wisatawan domestik dan mancanegara).

☞ Perlu ditingkatkan kerjasama semua pihak untuk segera mewujudkan pembukaan rute penerbangan baru dari dan ke Belitung.

☞ Meningkatkan keamanan

Keamanan adalah faktor penting yang tidak boleh dilewatkan jika ingin wisatawan semakin banyak berdatangan. Keamanan meningkat jika ada peran aktif para penegak hukum menjaga wilayahnya dari sentuhan orang-rang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat setempat juga harus ikut menjaga suasana yang aman agar wisatawan bisa menikmati liburan dengan nyaman. Selain itu keramahan warga juga sangat menentukan kemajuan pariwisata suatu daerah.

☞ Memperbanyak destinasi wisata

Pengunjung biasanya tertarik dengan tempat wisata baru, unik dan menarik. Ini bisa diwujudkan dengan membuat destinasi baru yang belum ada. Tapi dengan adanya kerjasama dari pihak swasta dan pemerintah, kebutuhan dana bisa diatasi dan pembangunan bisa dilanjutkan demi menghadirkan tempat baru sehingga memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Banyak destinasi baru yang muncul dan diracik dengan kreativitas menarik. Hal inilah yang akan menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2021 yaitu dengan mengemasnya dalam Program TUSENA, yaitu Program satu Desa satu Destinasi setiap 1 (satu) tahun yang bersipat desa Tematik. Untuk tahun 2021 ada 6 (enam) lokasi daya tarik wisata di Belitung, yaitu :

- (a) Suak Parak Mangrove. Desa Air Saga, Tanjungpandan;
- (b) Honey Bee Farm. Desa Buluh Tumbang, Tanjungpandan;
- (c) Agro Wisata Desa Mentigi. Membalong, Belitung Regency;
- (d) Mangrove Petaling. Desa Petaling, Kec. Selat Nasik;
- (e) Aik Lembong Dalam. Desa Petaling, Kec. Selat Nasik; dan
- (f) Pangkalan Baru Suak Gual. Desa Suak Gual, Kec. Selat Nasik.

Tabel 2.91

Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Peningkatan Daya Tarik destinasi pariwisata	8.934.613.744,00	8.027.666.556,00	89,85
2.	Pemasaran Pariwisata	301.594.950,00	195.634.250,00	64,87
3.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.814.894.385,00	1.029.814.363,00	56,74

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dengan rata-rata capaian 70,49% dengan persentase realisasi anggaran 83,73% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 16,27%.

SASARAN 9 : Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB dengan target “27,83%”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2021.



Tabel 2.92

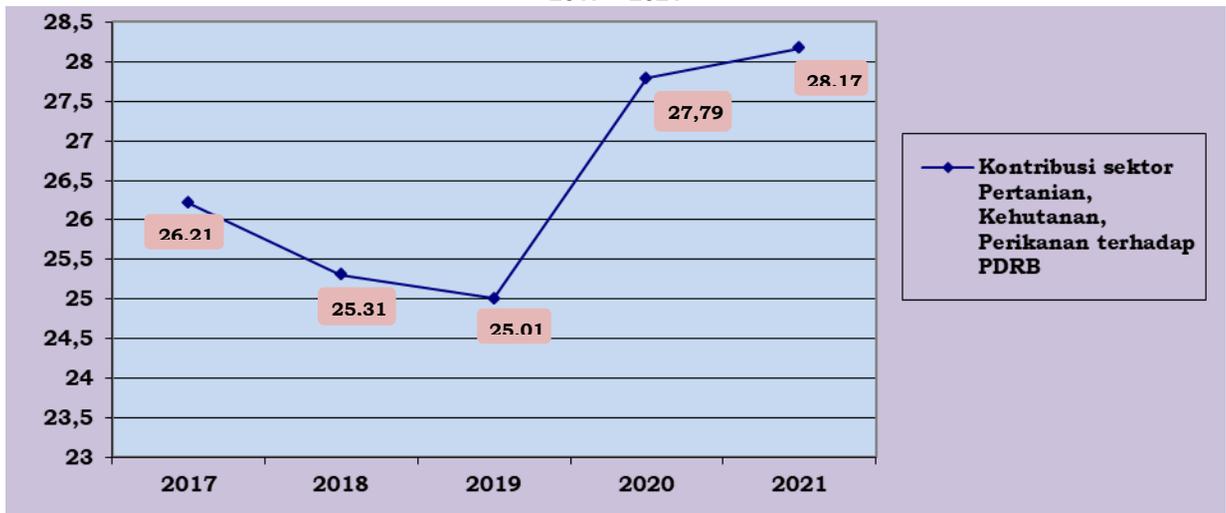
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2021 Realisasi	2021 Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB	Persentase	26,19	27,83	28,17	101,22	SB	27,83

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”, yaitu Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB tahun 2021 sebesar 27,83%. Pencapaian ini mencapai target atau terealisasi sesuai target yang ditetapkan sebesar 28,17%. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 101,22% dengan kategori SANGAT BERHASIL atau mencapai target. Sedangkan untuk target akhir RPJMD juga tercapai pada tahun ini sebesar 101,99.

Berikut kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung, selama kurun waktu 5 (lima) tahun

Grafik 3.14. : Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Belitung 2021

Sektor Pertanian memiliki peran yang penting terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Belitung, karena merupakan kontributor terbesar. Selama kurun waktu 2017 – 2021, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memperlihatkan kecenderungan mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,21%, pada tahun 2018 turun menjadi 25,31% dan terus menurun cukup signifikan sampai dengan tahun 2019 menjadi 25,01% namun dapat meningkat kembali tahun 2020 sebesar 27,79% dan di tahun 2021 terus meningkat menjadi 28,17%. Mengingat sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung, maka perlu strategi dan kebijakan khusus untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung 2018 – 2023, upaya pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan” melalui 2 (dua) strategi, yaitu; 1) meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa dan mendukung pembangunan kepariwisataan; dan 2) meningkatkan perikanan tangkap, dan budidaya.

Ada 5 (lima) arah kebijakan dari strategi meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa dan mendukung pembangunan kepariwisataan, yaitu; 1) intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; 2) mengembangkan produksi pertanian di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik; 3)



meningkatkan pengelolaan pasca panen dan mutu produksi; 4) perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; dan 5) penguatan kelembagaan pertanian.

Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman selama kurun waktu 4 (empat) tahun, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.93
Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kuintal) Tahun 2017–2021

JENIS TANAMAN	2017	2019	2020	2021
Bawang Daun	20	115	48	96
Bawang Merah	445	785	40	0
Bayam	772	808	355	1 036
Buncis	-	-	66	96
Cabai Besar	1 880	1 500	2 515	1 569
Cabai Rawit	1 944	1 916	2 047	1 715
Kacang Panjang	2 306	2 477	2 014	1 208
Kangkung	1 142	1 145	789	2 025
Ketimun	7 075	5 890	4 620	3 793
Labu Siam	-	-	-	-
Petsai	824	1214	870	777
Terung	1 615	1 347	791	589
Tomat	140	198	312	261
Selada	-	-	-	-
Seledri	-	-	-	-
Semangka	50	325	340	431

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman tahun 2021 tertinggi adalah ketimun yaitu 3.793 kuintal, dan terendah bawang daun dan buncis yaitu 96 kuintal. Dibandingkan tahun 2020 tertinggi adalah ketimun yaitu 4.620 kuintal, dan terendah bawang merah yaitu 40 kuintal. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman tertinggi adalah ketimun yaitu sebanyak 7.075 ton pada tahun 2017 dan produksi terendah bawang daun sebanyak 20 ton pada tahun 2017.

Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kg) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, tersaji seperti tabel berikut :

Tabel 3.94
Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman (kg) tahun 2019–2021

JenisTanaman	2019	2020	2021
Jahe	1 174	654	5 809
Kencur	1 322	724	1 549
Kunyit	2 139	1 166	2 404
Laos/Lengkuas	2 403	1 917	3 232

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman di kabupaten Belitung tahun 2021 tertinggi pada produksi jahe yaitu 5.809 kg dan produksi terendah pada kencur yaitu 1.549 kg. Dibandingkan dengan tahun 2020 Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman, tertinggi juga pada laos/lengkuas yaitu sebanyak 1.917 kg, dan produksi terendah pada jahe sebanyak 654 kg. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir produksi tertinggi pada jahe sebanyak 5.809 kg pada tahun 2021, dan produksi terendah pada jahe sebanyak 654 kg di tahun 2020.



Selain meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu juga meningkatkan produksi perkebunan. Adapun produksi perkebunan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 2020-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.95
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman (ribu ton) Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Lada		Aren	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Membalong	1 893,80	2 217,70	332,00	336,00	640,30	780,00	4 697,00	4 743,70	1 440,60	1 469,10
Tanjungpandan	1 394,40	1 689,60	64,80	69,00	74,80	109,47	170,35	198,65	-	-
Badau	1 053,00	1 046,37	212,80	213,20	177,60	195,60	634,79	553,57	2,65	2,54
Sijuk	3 408,90	3 482,55	342,10	327,58	1 134,10	995,00	675,6	398,15	1,05	0,36
Selat Nasik	-	-	47,60	50,80	327,60	315,46	116,40	190,74	-	-
Belitung	7 750,10	8 436,22	999,30	996,58	2 354,40	2 395,53	6 294,04	6 084,81	1 444,30	1 472,00

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2022

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 686,12 ribu ton dari 7.750,10 ribu ton di tahun 2020 menjadi 8.436,22 ribu ton ditahun 2021; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman kelapa mengalami penurunan sebesar 2,725 ribu ton dari 999,30 ribu ton di tahun 2020 menjadi 996,58 ribu ton ditahun 2021; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman karet mengalami peningkatan sebesar 41,13 ribu ton dari 2.354,40 ribu ton di tahun 2020 menjadi 2.395,53 ribu ton ditahun 2021; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman lada mengalami penurunan sebesar 209,23 ribu ton dari 6.294,04 ribu ton ditahun 2020 menjadi 6.084,81 ribu ton di tahun 2021; dan Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman aren mengalami peningkatan sebesar 27,7 ribu ton dari 1.444,30 ribu ton ditahun 2020 menjadi 1.472,00 ribu ton ditahun 2021. Sehingga produksi perkebunan yang paling tinggi di tahun 2021 ada pada kelapa sawit sebesar 8.436,22 ribu ton dan terendah ada pada produksi perkebunan kelapa yaitu hanya sebesar 996,58 ribu ton.

Upaya pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam bentuk persentase sebagai indikator kesejahteraan petani. Nilai tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Dalam penentuan Nilai Tukar Petani (NTP) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: luas lahan, harga jual, harga pupuk dan jumlah tanggungan keluarga. Berikut gambaran persentase (%) peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2021 :

Tabel 2.96
Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)	90,52 %	113,59%	125,49%

Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2021 terealisasi sebesar 113,59% dari target sebesar 90,52% dengan tingkat capaian sebesar 125,49%. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021 dihitung meliputi 4 sub sektor yaitu sub sektor tanaman perkebunan, hortikultura, tanaman pangan dan peternakan sebesar 113,59 yang dapat diartikan bahwa petani di Kabupaten Belitung sudah sejahtera.

Berikut upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021 :

Tabel 3.97
Upaya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Data Nilai Tukar Petani	dokumen	1	1
2.	Saprodi pangan strategis	jenis	1	1



3.	Saprodi tanaman hortikultura	Jenis	3	3
4.	Bibit tanaman perkebunan	Jenis	1	1
5.	Produk olahan hasil tanaman perkebunan	Jenis	1	1
6.	Benih dan bibit pertanian	Jenis	9.000	13.619
7.	Benih/bibit dan pakan ternak	jenis	2	2
8.	Bibit ternak unggas	Ekor	1.500	1.500
9.	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	2	2
10.	Jalan Usaha Tani	Km	0,3	0,3
11.	DAM Parit	Unit	5	5
12.	Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)	%	100	100
13.	Balai Penyuluh dan Sarana Pendukungnya	BPP	3	3
14.	Detail Engineering Design (DED) BPP Badau dan perbaikan BPP Sijuk, Tanjungrusa	Dokumen	1	1
15.	Jalan Produksi	Km	2,5	2,5
16.	Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah layanan	1	1
17.	Pelayanan Puskesmas	Pasien	1.200	2.435
18.	Penerapan pengendalian Hama Terpadu (PHT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Poktan	12	12
19.	Jumlah peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian	Orang	4	4
20.	Jumlah gapoktan	Gapoktan	40	40
21.	Poktan	Poktan	350	453
22.	UPJA	UPJA	20	23

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung 2021

Upaya peningkatan produksi dan Nilai Tukar Petani tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2021 melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
2. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota;
3. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota;
4. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
5. Pembangunan prasarana pertanian;
6. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota;
7. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota;
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota;
9. Pelaksanaan penyuluhan pertanian.



Di samping itu, untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, Pemerintah Kabupaten Belitung sejak Maret 2019 telah meluncurkan program BAGUK di Desa [Badau](#), Kecamatan [Badau](#), [Kabupaten Belitung](#). Program ini merupakan penyediaan Bibit Buah Gratis untuk kampung/desa se-[Kabupaten Belitung](#), sebagai upaya ketersediaan buah-buahan di masyarakat desa. Pada Tahun 2021 sebanyak 3.470 bibit buah-buahan yang dibagikan kepada 3.470 KK Penerima yang tersebar pada Desa Selat Nasik, Desa Petaling, Desa Perpat, Desa Suak Gual, Desa Lassar, Desa Badau, Desa Pegantungan, Desa Ibu dan Desa Batu Itam. Berikut data Program BAGUK (bagi bibit gratis untuk kampung) se-[Kabupaten Belitung](#) selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel 2.98
Program BAGUK HORTIKULTURA Tahun 2019-2021

NO	Jenis Bibit	Volume (polibag)	Desa	Jumlah KK Penerima	Tahun
1.	Nanas	1.750	Desa Badau Kec Badau	18 RT sekitar 656 KK	2019



2.	Pepaya California	1.000	Desa Ibul Kec Badau	11 RT sekitar 402 KK	2019
3.	Jambu Jamaika	800	Desa Terong Kec. Sijuk	450 KK	2019
			Desa Gunung Riting Kec. Membalong	350 KK	
			Desa Kembiri Kec. Membalong	200 KK	
4.	Jambu Kristal	1.500	Desa Kembiri Kec. Membalong	500 KK	2019
			Desa Tanjung Rusa Kec. Membalong	500 KK	
			Desa Kacang Butor Kec. Badau	500 KK	
5.	Alpukat	500	Desa Air Selumar Kec. Sijuk	500 KK	2019
6.	Sawo	500	Desa Air Batu Buding Kec. Badau	500 KK	2019
7.	Mangga	500	Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan	500 KK	2019
8.	Durian	1.000	Desa Keciput Kec. Sijuk	500 KK	2020
			Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk	500 KK	
9.	Mangga	500	Desa Sijuk Kec. Sijuk	500 KK	2020
10.	Rambutan	1.000	Desa Sungai Samak Kec. Badau	500 KK	2020
			Desa Simpang Rusa Kec. Membalong	500 KK	
11	Durian	670	Desa Selat Nasik Kec Selat Nasik	470 KK	2021
			Desa Petaling Kec Selat Nasik	200 KK	
12	Lengkeng	800	Desa Perpat Kec Membalong	500 KK	2021
			Desa Suak Gual Kec Selat Nasik	300 KK	
13	Mangga	500	Desa Lassar Kec Membalong	500 KK	2021
14	Manggis	500	Desa Badau Kec Badau	500 KK	2021
15	Rambutan	1.000	Desa Pegantungan Kec Badau	300 KK	2021
			Desa Ibul Kec Badau	400 KK	
			Desa Batu Itam Kec Sijuk	300 KK	

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung 2021

Tabel 2.99
Program BAGUK PETERNAKAN Tahun 2019-2020

NO	Jenis Bibit	Volume (ekor)	Desa	Jumlah Penerima	Tahun
1.	Saprodi Ternak Unggas (Ayam Broiler) Penyaluran bibit pada bulan November 2019	DOC ayam pedaging	Kelompok Tani Mandiri Sejahtera Desa Terong Kec. Sijuk	3 peternak (Alfian, Zaini, Namdin)	2019
		6.500 ekor			
		Pakan ternak			
		5.037,5 kg	Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Perawas Kec. Tanjungpandan	6 peternak (Irwansyah, Hendriato, Supriadi, Iswadi, Meryadi, Nizar)	2019
		Obat obatan dan vitamin 1 paket			
		Mesin pencabut bulu 1 unit			
		DOC ayam pedaging	Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Air Batu Buding Kec. Badau	3 peternak (Mulyana, Indra Budiman, Rina Nur Cahyani)	2019
		7.000 ekor			
		Pakan ternak			
	Saprodi Ternak Unggas (Ayam Broiler) Penyaluran bibit pada bulan November 2020	5.425,0 kg	Kelompok Tani Lette Desa Batu Itam Kec. Sijuk	15 peternak (Lorry, Wepiansyah, H. Ramli, Riyana, Nurzain, Andriyanto, Deni, Budiman, Rozali, Nazir, Ajuan, Rusdi, Sudirman, Bani, Hadeli)	2020
		Obat-obatan dan vitamin 1 paket			
		Mesin pencabut bulu 1 unit			
		DOC ayam pedaging	Kelompok Tani	9 peternak	2020



6.500 ekor Pakan ternak 5.037,5 kg Obat-obatan dan vitamin 1 paket Mesin pencabut bulu 1 unit	Harapan Bersama Desa Air Selumar Kec. Sijuk	(Syamsu Sahril, Sutrita Wijaya, Hairul, Kusmulyadi, Hendrianto, Gilang Ramadhan, Sopian S., Feri Anggriawan, Tri Oktia)	
DOC ayam pedaging 6.500 ekor Pakan ternak 5.037,5 kg Obat-obatan dan vitamin 1 paket Mesin pencabut bulu 1 unit	Kelompok Tani Masa Depan Same Desa Air Seruk Kec. Sijuk	6 peternak (Toni Apriyanto, Perber Sutiawan, Zaini, Hardi, Hadi Kurniawan, Mardiansyah)	2020
DOC ayam pedaging 7.000 ekor Pakan ternak 5.425,0 kg Obat-obatan dan vitamin 1 paket Mesin pencabut bulu 1 unit	Kelompok Tani Sinar Baru Desa Pelepak Pute Kec. Sijuk	11 peternak (I Gusti Ngurah Arya Swadnya, I Gusti Nyoman Merta Jiwa, Harisa, Erdiansyah, Subardi, Anang Jaelani, Aryanto, Hayati, Asman, Yusdi, Masdiyanto)	2020
DOC ayam pedaging 7.000 ekor Pakan ternak 5.425,0 kg Obat-obatan dan vitamin 1 paket Mesin pencabut bulu 1 unit	Kelompok Tani Berkarya Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan	14 peternak (Supriyanto, Junaidi, Dodi, Yunardi, Hengki, Marzuki, Rudianto, Midin, Munzir, Wanda, Erwan, Sauri, Haryanto, Katto)	2020

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung 2021

Dengan program ini diharapkan setiap desa di [Kabupaten Belitung](#) memiliki komoditi buah-buahan dan peternakan yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara strategi meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya memiliki 5 (lima) arah kebijakan, yaitu: 1) meningkatkan produksi perikanan budidaya, 2) meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan, 3) pengembangan pembibitan budidaya laut dan 4) mengembangkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik, dan 5) Pengembangan Ekonomi Biru.

Arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan budidaya dilaksanakan melalui program pengelolaan perikanan budidaya, dengan beberapa kegiatan, yaitu; (a) Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; (b) Penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pada tahun 2021, produksi perikanan budidaya menurut jenis budidaya

dan kecamatan di Kabupaten Belitung tahun 2021 sebanyak 179,79 ton, terdiri dari jaring apung laut 71,51 ton, jaring tancap tawar 0,61 ton, kolam air tenang 105,19 ton, tambak 2,48 ton, dan longline mutiara 44.100 ekor.

Rencana Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik



Tabel 2.100
Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Belitung (ton) Tahun 2021

Kecamatan	Jaring Apung Laut	Jaring Tancap Tawar	Kolam Air Tenang	Tambak	Longline Mutiara (ekor)
Membalong	13,16	-	7,133	-	-
Tanjungpandan	1,66	-	60,841	-	-
Badau	39,8	-	5,699	2,48	44 100



Sujuk	14,75	0,61	31,514	-	-
Selat Nasik	2,14	-	-	-	-
Total	71,51	0,61	105,19	2,48	44 100

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka 2022

Perkembangan produksi perikanan budidaya selama kurun waktu 2007 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.101
Perkembangan produksi perikanan Budidaya (ton/tahun) Tahun 2007-2021

NO.	TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
1	2007	11,55
2	2008	24,32
3	2009	35,34
4	2010	90,23
5	2011	52,23
6	2012	130,14
7	2013	114,50
8	2014	95,79
9	2015	152,62
10	2016	154,84
11	2017	142,09
12	2018	207,2
13	2019	176,48
14	2020	152,96
15	2021	179,79

Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi perikanan budidaya tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 26,83 ton/tahun dari 152,96 ton/tahun ditahun 2020 menjadi 179,79 ton/tahun. Selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir produksi perikanan budidaya paling tinggi ditahun 2018 yaitu 207,2 ton/tahun, sedangkan paling rendah pada tahun 2007 yaitu 11,55 ton/tahun.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan antara harga produksi dengan harga konsumsi pembudidaya ikan selama satu yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh Universitas Bangka Belitung di lapangan.

Nilai NTPi Tahun 2021 diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sehingga data Tahunan yang nanti tersedia dan diperoleh berdasarkan rumusan:

$$NTPi = IT/IB \times 100\%$$

IT : Indek Harga yang diterima Pembudidaya Ikan

IB : Indek Harga yang dibayar Pembudidaya Ikan

Target kinerja pada tahun 2021 sebesar 102 pada tahun 2021, nilai tukar pembudidaya ikan yang terealisasi sebesar 102,6 atau mencapai 100,59 % dari target tahun 2021. Dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.102
Tabel Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2021

Uraian	Target	Realisasi
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	102	102,6

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2021 realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mencapai sebesar 102,6 dengan capaian sebesar 100,59 % mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 100,4.



Perkembangan realisasi nilai tukar pembudidaya ikan tahun 2019-2021 dan perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target tahun 2022-2023 dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut:



Grafik 3.15. : Grafik Target dan Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Pencapaian realisasi target Tahun 2021 sebesar 102,6 dari 102 nilai yang ditargetkan dan nilai ini meningkat sedikit dari Tahun 2020 yang hanya sebesar 100,4 dari 100 nilai yang ditargetkan. Peningkatan indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi

bidang perikanan Budidaya dan Bidang Lainnya dalam menyelenggarakan aktifitas pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Belitung. Pada dasarnya semua kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan Perikanan Budidaya memberikan kontribusi kepada peningkatan indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan ini.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Secara umum ada 3 (tiga) macam pengertian NTPi :

- NTPi > 100, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pembudidaya ikan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya.
- NTPi = 100, berarti pembudidaya ikan mengalami impas/ break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan tidak mengalami perubahan.
- NTPi < 100, berarti pembudidaya ikan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan periode sebelumnya.

Hasil perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kabupaten Belitung pada Tahun 2021 sebesar 102,6 menunjukkan bahwa pendapatan hasil budidaya lebih tinggi dengan biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga atau pembudidaya ikan dikatakan sejahtera.

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) antara lain yaitu:

- Melaksanakan peningkatan produksi budidaya ikan air laut, terutama ikan kerapu, dengan cara menumbuhkan pembudidaya-pembudidaya baru mengingat potensi budidaya ikan kerapu yang sangat besar namun baru dimanfaatkan dalam jumlah yang kecil;
- Melaksanakan pembinaan kepada pembudidaya untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya yang baku, baik Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB) maupun Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pembudidaya ikan air laut maupun air tawar.
- Meningkatnya keterampilan pembudidaya setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan-pelatihan melalui sekolah lapang yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.

Beberapa faktor penghambat/kendala pencapaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) diantaranya :

- Terhentinya kegiatan budidaya rumput laut karena adanya pencemaran disekitar lokasi budidaya yang diakibatkan oleh limbah penambangan timah.

- Adanya perubahan/peralihan mata pencaharian masyarakat pembudidaya yang sifatnya masih musiman akibat adanya aktivitas penambangan timah yang semakin marak karena harga yang cenderung lebih menjanjikan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Dinas Perikanan Kabupaten Belitung akan melakukan:

- Mengembangkan sistem produksi dan penerapan teknologi pembudidayaan ikan;
- Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya berbasis teknologi dan ramah lingkungan;
- Meningkatkan Manajemen serta Mendorong peran serta aktif anggota dalam peningkatan usaha dan kelembagaan kelompok Pembudidaya Ikan;
- Mendorong Pembudidaya Ikan untuk aktif mengikuti pelatihan teknis Perikanan seperti Bimtek dan Sosialisasi serta praktek langsung dilapangan;
- Diversifikasi komoditas perikanan budidaya dengan cara membudidayakan komoditas baru yang selama ini belum dikembangkan;
- Penguatan Data statistik dan informasi Perikanan Budidaya.

1. Foto Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi Pembudidaya ikan tawar dan ikan laut



2. Foto Pelaksanaan kegiatan budidaya ikan tawar dan ikan laut. Proses pembagian bantuan bibit, pakan dan wadah budidaya.



3. Foto Pelaksanaan kegiatan di upt perikanan budidaya



Arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan dilaksanakan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, dengan beberapa kegiatan, yaitu; (a) pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; (b) pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah/kota; dan (c) pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Produksi perikanan tangkap menurut kecamatan di Kabupaten Belitung tahun 2021 sebesar 45.564,32 ton/tahun, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Berikut data produksi perikanan tangkap menurut kecamatan di Kabupaten Belitung tahun 2021 :

Tabel 2.103
Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung (ton/tahun) Tahun 2021

Kecamatan	Volume
Membalong	9.136,55
Tanjungpandan	10.523,95
Badau	4.957,42
Sijuk	11.082,30
Selat Nasik	9.864,10
Total	45.564,32

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka 2022

Perkembangan produksi perikanan tangkap selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.104
Perkembangan produksi perikanan Tangkap (ton/tahun) Tahun 2008-2021

NO.	TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
1	2008	41.990,76
2	2009	42.501,36
3	2010	43.362,03
4	2011	43.246,18
5	2012	43.304,74
6	2013	44.946,23
7	2014	50.134,49
8	2015	44.560,27
9	2016	67.189,18
10	2017	68.197,01
11	2018	65.723,44
12	2019	56.845,62
13	2020	52.912,48
14	2021	45.564,32

Dari 14 tahun terakhir, jumlah produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 68.197,01 ton/tahun, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2008, yaitu hanya sebesar 41.990,76 ton/tahun.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan selama satu tahun dan merupakan perbandingan antara harga produksi dengan harga konsumsi nelayan yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survei oleh Universitas Bangka Belitung di lapangan.

Nilai NTN Tahun 2021 diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui *Mou* dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sehingga data Tahunan yang nanti tersedia dan diperoleh berdasarkan rumusan:

$$NTN = IT/IB \times 100\%$$

IT : Indek Harga yang diterima Nelayan

IB : Indek Harga yang dibayar Nelayan

Target kinerja pada tahun 2021 sebesar 111 pada tahun 2021, nilai tukar nelayan yang terealisasi sebesar 114,4 atau mencapai 103,06 % dari target tahun 2021. Dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Tabel Realisasi Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021

Uraian	Target	Realisasi
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	111	114,4

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2021 realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai sebesar 114,4. dengan capaian 103,06 %. Mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 110,3.

Perkembangan realisasi nilai tukar nelayan tahun 2019-2021 dan perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target tahun 2022-2023 dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut:

Grafik 3.16. : Grafik Target dan Realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN)



Pencapaian realisasi target tahun 2021 sebesar 114,4 dari 111 nilai yang ditargetkan dan nilai ini meningkat cukup baik dari tahun 2020 yang hanya sebesar 110,3 dari 115 nilai yang ditargetkan. Target untuk tahun 2021 memang mengalami penurunan dibanding tahun 2020 pada saat perubahan Renstra dilakukan dalam rangka menyesuaikan



indikator pada Revisi RPJMD Kabupaten Belitung. Realisasi Peningkatan indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi bidang perikanan tangkap dan bidang lainnya dalam menyelenggarakan aktifitas pengembangan perikanan tangkap di kabupaten belitung. Pada dasarnya semua kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan Perikanan Tangkap memberikan kontribusi kepada peningkatan indikator Nilai Tukar Nelayan ini.

Sebagaimana yang diketahui bersama, Nilai Tukar Nelayan adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan. Secara umum ada 3 (tiga) macam pengertian nilai NTN :

- a. $NTN > 100$, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan nelayan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya.
- b. $NTN = 100$, berarti nelayan mengalami impas/ break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan tidak mengalami perubahan.
- c. $NTN < 100$, berarti nelayan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan nelayan periode sebelumnya.

Hasil perhitungan nilai tukar nelayan di Kabupaten Belitung pada tahun 2021 sebesar 114.4 menunjukkan bahwa harga yang diterima nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang di bayar, sehingga pendapatan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya melaut. Hasil nilai tukar Nelayan di kabupaten Belitung pada tahun 2021 lebih tinggi di bandingkan dengan tahun 2020. Berdasarkan hasil hitungan data BPS diperoleh nilai NTN kabupaten belitung pada tahun 2019 sebesar 102,01 dan berdasarkan hasil hitungan data UBB diperoleh nilai NTN kabupaten belitung pada tahun 2020 yaitu 102,01. Hasil ini menunjukkan ada peningkatan Nilai tukar Nelayan sebesar 114,4. Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan atau hasil penerimaan nelayan dari hasil tangkapan lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga di kabupaten Belitung pada tahun 2021.

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan antara lain :

- ❖ Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2021 mengalami penurunan yaitu dari produksi Tahun 2020 sebesar 52.912,5 ton menjadi 45.564,3 ton pada Tahun 2021. Walaupun menurun namun nilai produksi perikanan tangkap relatif masih tinggi karena kondisi cuaca dan perairan di Tahun 2021 cenderung stabil seperti Tahun 2020 sehingga hasil tangkapan nelayan masih diatas rata rata terkecuali pada triwulan ke empat;
- ❖ Ketersediaan BBM, kebutuhan pokok untuk melaut dan keperluan lainnya yang mudah diperoleh nelayan sehingga operasional melaut dapat terpenuhi dengan baik;
- ❖ Beberapa kelompok nelayan mendapatkan bantuan dari Pemkab Belitung berupa Kapal penangkap ikan, alat bantu dan alat penangkap ikan untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan;
- ❖ Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang sudah diaplikasikan oleh beberapa nelayan seperti penggunaan GPS dan Fish Finder dalam aktivitas penangkapan ikan;
- ❖ Pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan rutin kepada nelayan dan kelompok usaha bersama terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta kesadaran untuk melaporkan hasil produksi perikanan tangkap.

Beberapa faktor penghambat/kendala pencapaian arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan diantaranya :

- ⌘ kondisi cuaca yang ekstrem pada musim barat harus di minimalisir dengan perencanaan yang baik;
- ⌘ Kondisi sarana dan prasarana Perikanan tangkap di beberapa lokasi yang sudah mengalami kerusakan;



- ⌘ Belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan;
- ⌘ Penurunan produksi lebih kepada zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga perlu modernisasi sarpras penangkapan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan, dinas perikanan Kabupaten Belitung akan melakukan

- ⌘ Nelayan Belitung perlu melakukan modernisasi armada penangkapan yang lebih besar lagi sehingga jangkauan wilayah penangkapan menjadi lebih jauh;
- ⌘ Terus melakukan pembinaan kepada kelompok nelayan sehingga dapat tertib administrasi saat melaut;
- ⌘ Tetap memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung ketersediaan operasional nelayan kecil untuk tetap dapat melaut dengan baik seperti BBM, Kebutuhan pokok, alat tangkap dan sebagainya;
- ⌘ Mendukung nelayan kecil untuk mengikuti program kementerian yang pro nelayan diantaranya asuransi nelayan, sehat nelayan, kartu kusuka dan program inovatif lainnya;
- ⌘ Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan terkait pemahaman penggunaan teknologi penangkapan ikan;
- ⌘ Memaksimalkan kegiatan pengawasan terkait masuknya nelayan luar dan aktivitas illegal fishing serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang beroperasi di perairan Kabupaten Belitung;
- ⌘ Mengoptimalkan usaha penangkapan ikan pada musim puncak sebelum musim pancaroba (paceklik) berlangsung;
- ⌘ Melakukan pengendalian distribusi BBM minyak solar secara teratur dan terarah di titik penyalur sesuai dengan kebutuhan berdasarkan mesin kapal, alat penangkapan ikan dan lokasi fishing ground sehingga pengalokasian BBM minyak solar untuk usaha perikanan/nelayan dapat tepat sasaran;
- ⌘ Penguatan Data statistik dan informasi Perikanan Tangkap.

1. Foto Pelaksanaan Pemberian bantuan Kapal dan Fispinder



4. Foto Pelaksanaan Pelestarian Sumber daya Perikanan



5. Foto Pelaksanaan operasional kapal perikanan dalam rangka pengendalian SDP



Strategi Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya ikan Di Kabupaten Belitung Berdasarkan Dokumen Penyusunan Dokumen Analisis Indikator Kinerja Sektor Perikanan tahun 2021 hasil dari kerja sama antara Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung diperoleh Analisis untuk memperoleh strategi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Belitung sesuai dengan tabel dibawah ini sebagai berikut:



Tabel 2.106. : Tabel Analisis IFAS

Faktor Internal				
No.	Kekuatan	Bobot	Rating	Score
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan setiap tahun. NTN dan NTPi tahun 2021 sebesar 114 dan 102,6 inimenunjukkan nelayan dan pembudidaya di Kabupaten Belitung di kategorikan sejahtera	0,1	3,2	0,32
2	Rata-rata pendapatan bersih nelayan berkisar Rp.24.320.735/bulan dengan rata-rata biaya pengeluaran sebesar Rp. 13.377.203/bulan Sedangkan rata-rata pendapatan bersih pembudidaya sebesar Rp. 3.682.294/bulan dengan rata-rata biaya pengeluaran sebesar Rp. 4.831.697/bulan	0,1	3,2	0,32
3	Sudah terdapat pembenihan ikan kerapu, lele dan nila di Kabupaten Belitung	0,1	3,6	0,36
4	Tingkat konsumsi ikan menunjukkan nilai 70,44 yang berarti sudah memenuhi target tingkat konsumsi nasional.	0,1	3,8	0,38
5	Terdapat Peruntukan wilayah untuk kegiatan penangkapan ikan 143.798,7 Ha dan budidaya 26,94 Ha	0,1	3,8	0,38
Total	1,76			
No	Kelemahan	Bobot	Rating	Score
1	Rendahnya pemahaman terkait penanganan kegiatan budidaya ikan mengenai (pakan dan penyakit) serta pemasaran produk	0,1	3,7	0,37
2	Terbatasnya pemahaman SDM terkait penggunaan teknologi penangkapan ikan dan aplikasi teknologi dalam pembudidayaan dalam kegiatan	0,1	3,6	0,36
3	Penjualan hasil budidaya kerapu hanya ke satu eksportir	0,1	3,2	0,32
4	Keterbatasan pasokan bibit komoditas budidaya seperti udang vaname, kerapu dan bawal	0,1	3,8	0,38
5	Belum adanya produksi pakan dan tingginya harga pakan untuk budidaya ikan tawar	0,1	3,7	0,37
Total	1,8			
Total SW (X)	-0,04			

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 2.107. : Tabel Analisis EFAS

Faktor Eksternal				
No.	Peluang	Bobot	Rating	Score
1	Jenis komoditas ikan perikanan laut (tenggiri, kerapu, kakap merah dan cumi-cumi) dan perikanan budidaya (kerapu cantik, kerapu sunu dan udang vaname) sudah menjadi kebutuhan pangsa pasar ekspor	0,1	4	0,4
2	Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor perikanan tangkap maupun budidaya	0,1	3,6	0,36
3	Sudah terjalinya investasi dalam usaha budidaya air laut (komoditas Kerapu cantik dan kerapu macan, udang vaname) oleh pihak investor lokal maupun luar	0,1	3,8	0,38
4	Adanya peluang kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Belitung	0,1	3,5	0,35
5	Terdapatnya perusahaan PT/CV Perikanan yang tersedia sebagai fasilitator dalam pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan	0,1	3,8	0,38
Total	1,87			
No.	Ancaman	Bobot	Rating	Score
1	Perubahan kondisi iklim sangat mempengaruhi hasil tangkapan perikanan tangkap dan perikanan budidaya laut	0,1	3,5	0,35
2	Ketergantungan pembudidaya terhadap impor bibit benih komoditas budidaya	0,1	3,5	0,35
3	Ketergantungan nelayan terhadap BOS/PT terkait dalam modal usaha perikanan yang mengakibatkan rendahnya harga jual hasil tangkapan	0,1	3,4	0,34
4	Semakin jauhnya daerah penangkapan ikan (Fishing Ground) akibat adanya degradasi lingkungan dan masuknya nelayan luar beroperasi di perairan Kabupaten Belitung	0,1	3	0,3
5	Persaingan antar pembudidaya terkait pemasaran produk karena terbatasnya jaringan pelanggan atau pengepul	0,1	3,4	0,34
Total	1,68			
Total OT (Y)	0,19			

Sumber: Analisis, 2021

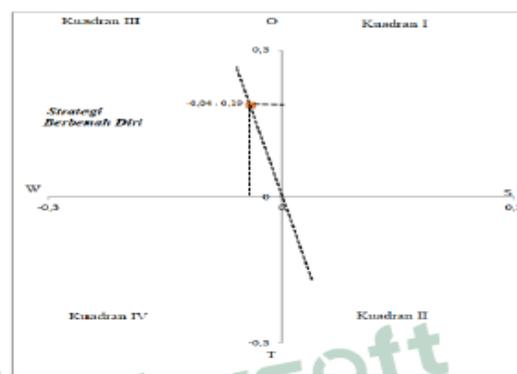
Tabel 2.108. : Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Belitung

	Strength (S)	Weakness (W)
IFAS EFAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan setiap tahun. NTN dan NTPi tahun 2021 sebesar 114 dan 102,6 ini menunjukkan nelayan dan pembudidaya di Kabupaten Belitung di kategorikan sejahtera. 2. Rata-rata pendapatan bersih nelayan berkisar Rp. 24.320.735/bulan dengan rata-rata biaya pengeluaran sebesar Rp. 13.377.203/bulan Sedangkan rata rata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemahaman terkait penanganan kegiatan budidaya ikan mengenai (pakan dan penyakit) serta pemasaran produk. 2. Terbatasnya pemahaman SDM terkait penggunaan teknologi dalam kegiatan penangkapan ikan dan aplikasi teknologi dalam pembudidayaan. 3. Penjualan hasil budidaya kerapu hanya ke satu eksportir. 4. Keterbatasan pasokan bibit komoditas budidaya seperti udang vaname, kerapu dan



	<p>pendapatan bersih pembudidaya sebesar Rp. 3.682.294/bulan dengan rata-rata biaya pengeluaran sebesar Rp. 4.831.697/bulan.</p> <p>3. Sudah terdapat pembenihan ikan kerapu, lele dan nila di Kabupaten Belitung.</p> <p>4. Tingkat konsumsi ikan menunjukkan nilai 70,44 yang berarti sudah memenuhi target tingkat konsumsi nasional.</p> <p>5. Terapat Peruntukan wilayah untuk kegiatan penangkapan ikan 143.798,7 Ha dan budidaya 26,94 Ha.</p>	<p>bawal.</p> <p>5. Belum adanya produksi palcan dan tingginya harga palcan untuk budidaya ikan bawal.</p>
<p>Opportunity (O)</p> <p>1. Jenis komoditas ikan perikanan laut (kerapu, kerapu, kakap merah dan cumi-cumi) dan perikanan budidaya (kerapu cantik, kerapu siru dan udang vaname) sudah menjadi kebutuhan pangan pasar ekspor</p> <p>2. Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor perikanan tangkap maupun budidaya.</p> <p>3. Sudah terjalarnya investasi dalam usaha budidaya air laut (komoditas Kerapu cantik dan kerapu macan, udang vaname) oleh pihak investor lokal maupun luar</p> <p>4. Adanya peluang kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Belitung.</p> <p>5. Terdapatnya perusahaan PT/CV Perikanan yang tersedia sebagai fasilitator dalam pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan.</p>	<p>Strategi Agresif (SO)</p> <p>1. (S1,S4,S5;O1,O3) Mengoptimalkan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya dengan memanfaatkan luas lahan untuk kegiatan budidaya sehingga dapat memaksimalkan dan memenuhi kebutuhan jumlah permintaan konsumsi pasar lokal dan ekspor.</p> <p>2. (S1-S4; O1,O4,O5) Menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan swasta (CV/PT) bidperikanan dalam meningkatkan dan menjamin kualitas mutu ikan sehingga komoditas tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya dilihat dari NTN dan NTPN seoptimalnya.</p> <p>3. (S3,S5;O2-O4) Mengoptimalkan pembenihan komoditas budidaya dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM, pemberian bantuan sarana dan prasarana sehingga dapat memenuhi kebutuhan permintaan benih budidaya.</p>	<p>Strategi Berbenah Diri (WO)</p> <p>1. (W1,W2,W3;O1-O3) Meningkatkan kualitas SDM terkait pemasaran penggunaan aplikasi teknologi pada usaha penangkapan ikan dan pemahaman terkait penanganan penyakit dan pembuatan palcan pada usaha budidaya ikan guna memaksimalkan jumlah produksi perikanan.</p> <p>2. (W3;O1-O5) Memperluas rentang pemasaran hasil budidaya dengan mengoptimalkan kerjasama kepada para stakeholder yang sudah ada khususnya budidaya kerapu (W3;W4;O1,O2)</p> <p>3. (W3;W4;O1,O2) Memanfaatkan program dan bantuan Pemerintah terkait pasokan bibit komoditas budidaya sehingga kegiatan usaha budidaya ikan dapat berlangsung serta memberikan pelatihan dan pembinaan terkait teknik pembenihan ikan bagi para pembudidaya</p>
<p>Threat (T)</p> <p>1. Perubahan kondisi iklim sangat mempengaruhi hasil tangkapan perikanan tangkap dan perikanan budidaya laut</p> <p>2. Ketergantungan pembudidaya terhadap impor bibit benih komoditas budidaya.</p> <p>3. Ketergantungan nelayan terhadap BOS/PT terkait dalam modal usaha perikanan yang mengakibatkan rendahnya harga jual hasil tangkapan.</p> <p>4. Semakin jauhnya daerah penangkapan ikan</p>	<p>Strategi Diversifikasi (ST)</p> <p>1. (S1,S4,S5;T1,T4) Adanya pengekangan bucum yang tegas terkait masuknya nelayan luar dan aktivitas ilegal yang beroperasi di perairan Kabupaten Belitung serta mengoptimalkan usaha penangkapan pada musim puncak sebelum musim pancaroba (pasoklik) berlangsung</p> <p>2. (S2,S4,S5;T1,T4,T5) Mengoptimalkan usaha penangkapan perikanan tangkap dan budidaya dengan memperluas usaha perikanan sehingga dapat meminimalisir</p>	<p>Strategi Defensif (WT)</p> <p>1. (W1,W2;T1,T4) Mengoptimalkan usaha penangkapan dan usaha budidaya dalam meningkatkan jumlah produksi pada musim puncak dan musim panen dan meminimalisir biaya operasional yang dikeluarkan dengan semakin jauhnya daerah penangkapan ikan dan tingginya biaya palcan dalam kegiatan budidaya.</p> <p>2. (W2,W4,W5;T1,T2) Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan terhadap pemasaran teknologi kegiatan usaha perikanan serta menjalin</p>
<p>(Fishing Ground) akibat adanya degradasi lingkungan dan masuknya nelayan luar beroperasi di perairan Kabupaten Belitung.</p> <p>5. Persaingan antar pembudidaya terkait pemasaran produk karena terbatasnya jaringan pelanggan atau pengepul.</p>	<p>kerugian akibat dari tingginya biaya operasional per trip dan musim penangkapan.</p> <p>3. (S3-S4;T2,T5) Melakukan pengembangan terhadap pembenihan yang sudah ada sehingga dalam pemenuhan bibit ikan dapat dipenuhi dari dalam lokal.</p>	<p>kerjasama dengan pihak BOS/PT terkait permodalan usaha perikanan tangkap dan permodalan benih budidaya.</p> <p>3. (W3,W4;T2,T5) Mengoptimalkan sarana dan prasarana usahabudidaya mulai dari pasokan pembenihan dan distribusi pemasaran (pengepul) sehingga ketersediaan produksi dapat memenuhi kebutuhan permintaan dan menjamin kesejahteraan pembudidaya.</p>

Grafik 3.17. : Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya



Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Belitung :

- 1) Strategi Agresif



- a. Mengoptimalkan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya dengan memanfaatkan luas lahan untuk kegiatan budidaya sehingga dapat memaksimalkan dan memenuhi kebutuhan jumlah permintaan konsumsi pasar;
 - b. Menjalin kerjasama dengan pihak PT/CV perikanan dalam meningkatkan dan menjamin kualitas mutu ikan sehingga komoditas tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya dilihat dari NTN dan NTPi setiap tahunnya;
 - c. Mengoptimalkan pembenihan komoditas budidaya ikan dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM, pemberian bantuan sarana dan prasarana sehingga dapat memenuhi kebutuhan permintaan benih budidaya.
- 2) Strategi Berbenah Diri
- a. Meningkatkan kualitas SDM terkait pemahaman penggunaan aplikasi teknologi pada usaha penangkapan ikan dan pemahaman terkait penanganan penyakit dan pembuatan pakan pada usaha budidaya ikan guna memaksimalkan jumlah produksi perikanan;
 - b. Memperluas rantai pemasaran hasil budidaya dengan mengoptimalkan kerjasama kepada para stakeholder yang sudah ada;
 - c. Memanfaatkan program dan bantuan Pemerintah terkait pasokan bibit komoditas budidaya sehingga kegiatan usaha budidaya ikan dapat berlangsung serta memberikan pelatihan dan pembinaan terkait teknik pembenihan ikan bagi para pembudidaya.
- 3) Strategi Diversifikasi
- a. Adanya penegakkan hukum yang tegas terkait masuknya nelayan luar dan aktivitas ilegal yang beroperasi di perairan Kabupaten Belitung serta mengoptimalkan usaha penangkapan pada musim puncak sebelum musim pancaroba (paceklik) berlangsung;
 - b. Mengoptimalkan usaha penangkapan perikanan tangkap dan budidaya dengan memperluas usaha perikanan sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat dari tingginya biaya operasional per trip dan musim penangkapan;
 - c. Melakukan pengembangan terhadap pembenihan yang sudah ada sehingga dalam pemenuhan bibit ikan dapat dipenuhi dari dalam lokal.
- 4) Strategi Defensif
- a. Mengoptimalkan usaha penangkapan dan usaha budidaya dalam meningkatkan jumlah produksi pada musim puncak dan musim panen dan meminimalisir biaya operasional yang dikeluarkan dengan semakin jauhnya daerah penangkapan ikan dan tingginya biaya pakan dalam kegiatan budidaya;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan terhadap pemahaman teknologi kegiatan usaha perikanan serta menjalin kerjasama dengan pihak BOS/PT terkait permodalan usaha perikanan tangkap dan permodalan benih budidaya;
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana usaha budidaya mulai dari pasokan pembenihan dan distribusi pemasaran (pengepul) sehingga ketersediaan produksi dapat memenuhi kebutuhan permintaan dan menjamin kesejahteraan pembudidaya.

Arah kebijakan pengembangan pembibitan budidaya laut dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung melalui Program Inovasi Bagus (bagi bibit gratis untuk kampung) yang telah terealisasi sampai dengan tahun 2021, yaitu :

- (a) Pemberian bibit ikan yang meliputi ikan air tawar dan ikan air laut kepada pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok, terdiri dari 12.000 ekor ikan kerapu dan 15.000 ekor ikan kakap;
- (b) Pembudidaya ikan (Pokdakan) terdiri dari 22.000 ekor ikan air laut.

Dalam pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan masukan/*input* produksi yang berkualitas. Salah satu input produksi adalah benih ikan, baik benih ikan air tawar maupun benih ikan kerapu.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, Pemerintah Kabupaten Belitung meluncurkan "Program Gangan", yaitu garansi hasil panen komoditi gabungan berupa hasil pertanian, perkebunan, dan



perikanan masyarakat, yang sebelumnya telah membuat perjanjian bersama dan dibina BUMD. Jaminan ini berupa jaminan beli dengan harga wajar di atas harga pasar saat harga pasar jatuh. Bahan yang dibeli ini didistribusikan oleh BUMD dengan mitra-mitranya. Sebagai pemberi garansi membeli adalah Badan Logistik Daerah.

Untuk mewujudkan program ini, Pemerintah Kabupaten Belitung bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT Aman Jaya Perdana. Bentuk kerja sama tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Aman Jaya Perdana tentang Pembelian dan Jaminan Harga Produksi Serta Pembinaan Sumber Daya Petani Lada Kabupaten Belitung yang sekaligus ditandai dengan Soft Launching Program GANGAN (Garansi Hasil Panen Komiditi Gabungan).

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan, ada faktor-faktor yang mendukung upaya tersebut. faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan antara lain:

- ❖ Komitmen pimpinan yang tinggi dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Komitmen ini dibuktikan dengan peluncuran program inovatif, yaitu “Program Baguk” untuk peningkatan produk pertanian dan “Program Gangan” untuk menjamin hasil panen pertanian, perkebunan dan perikanan masyarakat tersalurkan di pasar;
- ❖ Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung;
- ❖ Potensi sektor perikanan yang cukup besar dan berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Perikanan dapat menjadi penopang perekonomian masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan antara lain:

- ✘ Rendahnya Skor Pola Pangan Harapan (PHH), 78,90%, masyarakat di Kabupaten Belitung. Rendahnya skor ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat terhadap bahan pokok masih, sedangkan untuk konsumsi bahan pangan non beras masih sangat rendah. Hal ini berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk menanam bahan pangan non beras sehingga berdampak pada rendahnya produksi sektor pertanian;
- ✘ Zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga membutuhkan armada penangkapan yang lebih besar;
- ✘ Kondisi cuaca yang ekstrim pada musim barat;
- ✘ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan;
- ✘ Tingkat kegagalan budidaya ikan air tawar masih tinggi, sehingga kurang diminati masyarakat.

Dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa upaya peningkatan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menjaga kinerja sasaran, yaitu:

- ⌘ Meningkatkan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan melaksanakan sosialisasi varian-varian menu yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga pola konsumsi akan menjadi lebih beragam. Semakin beragamnya pola konsumsi masyarakat akan semakin tinggi kebutuhan akan pangan non beras. Pada akhirnya akan menarik minat masyarakat memproduksi pangan non beras;
- ⌘ Menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat petani dan pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Belitung sehingga diharapkan meningkatkan produksi pertanian dan perikanan dan kesejahteraan taraf hidup masyarakat sektor pertanian dan perikanan;
- ⌘ Meningkatnya kesadaran masyarakat pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan menggunakan pakan tambahan sehingga mampu menekan biaya produksi;



Soft Lounching Program GANGAN



- ⌘ Pelestarian terumbu karang dan padang lamun serta rumponisasi dan pembuatan terumbu karang buatan di zona tangkapan yang menjadi wilayah kewenangan kabupaten sehingga nelayan tidak perlu melakukan penangkapan di zona yang terlalu jauh;
- ⌘ Melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan padang lamun sehingga keberlanjutan reproduksi ikan tetap terjaga.

Berikut relisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya produksi pertanian dan perikanan:

Tabel 2.109

Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.304.954.600,00	1193459.591,00	91,46
2.	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2.389.305.000,00	2.275.471.655,00	95,24
3.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	140.186.200,00	130.471.113,00	93,07
4.	Penyuluhan pertanian	80.250.000,00	71.919.500,00	89,62
5.	Pengelolaan perikanan tangkap	3.786.968.100,00	3.617.121.224,00	95,51
6.	Pengelolaan perikanan budidaya	846.009.200,00	784.032.067,00	92,67
7.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	343.891.360,00	331.888.570,00	96,51
8.	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	287.879.600,00	284.262.200,00	98,74

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan dengan rata-rata capaian 94,10% dengan persentase realisasi anggaran 94,65% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 5,35%.

SASARAN 10 : Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPMJD dengan indikator Nilai Omset Koperasi dengan target Rp 80.651.293.000,00 dan Nilai Omset Usaha Mikro Rp 1.479.811.375.000,00. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Belitung Tahun 2021.

Tabel 2.110

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Belitung (Ribu Rupiah) Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Nilai Omset Koperasi	Ribu Rupiah	55.550.754	80.651.293	93.098.521	115,43	SB	85.562.956
2	Nilai Omset Usaha Mikro	Ribu Rupiah	973.000.000	1.479.811.375	1.533.059.179	103,60	SB	1.957.050.000

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2022



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja **Nilai Omset Koperasi** Tahun 2021 sebesar Rp 93.098.521.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 115,43 % berkategori SANGAT BERHASIL atau melampaui target sedangkan **Nilai Omset Usaha Mikro** Tahun 2021 sebesar Rp 1.533.059.179.000,00 melampaui target dengan capaian kinerja 103,6 % berkategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, Nilai Omset Koperasi Kabupaten Belitung Tahun 2021 sudah melebihi target sebesar 8,80 % dan Nilai Omset Usaha Mikro Kabupaten Belitung Tahun 2021 memerlukan peningkatan sebesar 21,66 %.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro dicapai melalui strategi meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro, dengan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu 1) meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri; dan 2) meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro.

Pada tahun 2021, arah kebijakan meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri, yang merupakan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota melalui sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 189 koperasi yang ada di Kabupaten Belitung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 109 koperasi aktif, 1 koperasi tidak aktif dan 79 koperasi statusnya dalam proses pembekuan. Berikut disajikan Keragaan Koperasi Kabupaten Belitung Tahun 2021:

Tabel 2.111
Data Keragaan Koperasi Kabupaten Belitung Tahun 2021

NO	JENIS KOPERASI	STATUS		PEMBEKUAN	TOTAL KOPERASI	ANGGOTA				MANAGER			KARYAWAN			MODAL SENDIRI	MODAL LUAR	VOLUME USAHA	SHU
		AKTIF	TIDAK			L	P	JML H	RAT	L	P	JML H	L	P	JML H				
1	KUD	8	-	7	15	2.905	668	3.573	3	2	-	2	24	16	40	339.731	750.000	2.144.153	144.756
2	KPRI	18	-	13	31	1.144	345	1.489	7	-	1	1	4	14	18	3.070.124	233.207	4.492.555	1.340.377
3	KOPKAR	8	-	10	18	1.944	121	2.065	3	2	1	3	21	8	29	1.613.159	350.000	17.109.455	1.899.162
4	KOP TNI / ABRI	4	-	2	6	701	97	798	4	-	-	-	8	2	10	2.707.138	49.610	2.627.280	785.833
5	KOPERASI WANITA	5	-	2	7	-	367	367	1	-	-	-	-	-	-	175.579	80.000	280.215	59.828
6	KOPERASI PEMUDA	-	-	3	3	63	20	83	-	-	-	-	-	-	-	2.963	-	4.883	493
7	KSP	11	-	-	11	755	330	1.044	8	7	-	7	50	23	73	1.088.809	1.634.000	5.394.653	288.939
8	KOPONTREN	1	-	1	2	135	9	144	-	-	-	-	-	-	-	13.180	300.000	20.000	14.500
9	LAINNYA	29	-	35	64	3.545	422	3.967	12	5	-	5	16	-	16	1.866.634	4.613.391	25.313.727	3.743.315
10	KSU	25	-	6	31	2.303	389	2.687	17	3	-	3	19	5	24	6.680.323	4.423.610	35.711.600	6.078.414
11	PKPRI	-	1	-	1	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	61.174	-	-	-
JUMLAH		109	1	79	189	13.520	2.768	16.242	55	19	2	21	142	68	210	17.619.174	12.433.818	93.098.521	14.355.617

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2022

Penambahan jumlah koperasi aktif ternyata juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah anggota koperasi. Pada tahun 2021, jumlah anggota koperasi sebanyak 16.242 orang, atau berkurang sebanyak 32 orang dari semula 16.254 di tahun 2020. Hal ini terjadi sebagai akibat penurunan aktivitas dalam mengelola dan melayani anggota/masyarakat pada sektor usaha simpan pinjam, sembako, dan jasa lainnya.

Berikut data perkembangan jumlah anggota koperasi di Kabupaten Belitung Tahun 2014-2020 :

Tabel 2.112
Data Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2014-2021

NO	Tahun	Jumlah Anggota Koperasi (Orang)
1.	2014	16.395
2.	2015	16.594
3.	2016	16.754



4.	2017	15.151
5.	2018	15.815
6.	2019	16.052
7.	2020	16.254
8.	2021	16.242

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2022

Volume usaha koperasi pada tahun 2021 sebesar Rp 93.098.521,00. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi belum terlalu baik meski pun terdapat dukungan dari pemerintah daerah, namun peran aktif masyarakat masih belum optimal untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan usaha koperasi.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tengah menggalakkan Reformasi Koperasi yang dapat dicapai melalui tiga upaya, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan usaha. Salah satu tindakan nyata dari rehabilitasi adalah pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan *Online Base Data System* sehingga koperasi mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) serta membangun Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi secara online untuk mempermudah pendirian Badan Hukum Koperasi.

Sementara arah kebijakan meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro dilaksanakan melalui (a) Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan (b) Program Pengembangan UMKM dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2021, mengalami penurunan jumlah usaha sebanyak 936 usaha yang semula 21.399 usaha di tahun 2020 menjadi 20.452 usaha. Usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Belitung berjumlah 20.452 usaha, yang terdiri dari 19.671 usaha mikro, 774 usaha kecil dan 7 usaha menengah, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Berikut tersaji jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Belitung..

Tabel 2.113
Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kab. Belitung Tahun 2021

No	Kecamatan	GENDER			KUALIFIKASI			Jumlah UMKM
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	Tanjungpandan	1.645	2.560	4.205	4.029	173	3	4.205
2	Sijuk	545	380	925	870	54	1	925
3	Badau	242	213	455	445	10	-	455
4	Membalong	344	154	498	479	19	-	498
5	Selat Nasik	245	93	338	319	19	-	338
	JUMLAH	3.021	3.400	6.421	6.142	275	4	6.421

No	Kecamatan	GENDER			KUALIFIKASI			Jumlah UMKM
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	Tanjungpandan	680	347	1.027	919	108	-	1.027
2	Sijuk	474	95	569	481	88	-	569
3	Badau	60	18	78	69	9	-	78
4	Membalong	149	25	174	151	23	-	174
5	Selat Nasik	70	2	72	59	13	-	72
	JUMLAH	1.433	487	1.920	1.679	241	-	1.920

No	Kecamatan	GENDER			KUALIFIKASI			Jumlah UMKM
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	Tanjungpandan	533	1.474	2.007	1.982	25	-	2.007
2	Sijuk	283	440	723	707	13	3	723
3	Badau	115	138	253	242	11	-	253
4	Membalong	345	208	553	552	1	-	553
5	Selat Nasik	174	132	306	305	1	-	306
	JUMLAH	1.450	2.392	3.842	3.788	51	3	3.842



No	Kecamatan	SEKTOR PERTANIAN/ PETERNAKAN, KEHUTANAN/PERIKANAN						
		GENDER			KUALIFIKASI			
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	508	129	637	582	55	-	637
2	Sijuk	2.316	284	2.600	2.490	110	-	2.600
3	Badau	161	34	195	183	12	-	195
4	Membalong	4.380	154	4.534	4.504	30	-	4.534
5	Selat Nasik	290	1	291	291	-	-	291
JUMLAH		7.655	602	8.257	8.050	207	-	8.257

No	Kecamatan	SEKTOR PERTAMBANGAN/ PENGGALIAN						
		GENDER			KUALIFIKASI			
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	-	-	-	-	-	-	-
2	Sijuk	-	-	-	-	-	-	-
3	Badau	-	-	-	-	-	-	-
4	Membalong	12	-	12	12	-	-	12
5	Selat Nasik	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		12	-	12	12	-	-	12

No	Kecamatan	Usaha Mikro			Usaha Kecil			Usaha Menengah			Jumlah UMKM		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Tanjungpandan	5.562	7.066	7.512	276	372	361	55	55	3	5.893	7.481	7.876
2	Sijuk	4.913	5.187	4.548	248	297	265	4	4	4	5.165	5.488	4.817
3	Badau	905	1.076	939	48	49	42	4	4	-	957	1.129	981
4	Membalong	6.125	6.194	5.698	72	78	73	-	0	-	6.197	6.272	5.771
5	Selat Nasik	800	992	974	26	26	33	-	0	-	826	1.018	1.007
JUMLAH		18.305	20.515	19.671	20.515	822	774	63	63	7	19.038	21.383	20.452

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2022

Faktor pendukung:

- ❖ Berkembangnya koperasi dan usaha mikro
- ❖ Meningkatnya Volume Usaha Koperasi.
- ❖ Penyerapan Tenaga Kerja dan Kompetensi Pencari Kerja

Faktor penghambat :

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro yaitu sebagai berikut :

☞ Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, menghadapi permasalahan :

- ❌ Belum optimalnya promosi produk usaha kecil menengah dan penguatan jaringan pemasaran;
- ❌ Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pengelola koperasi dan usaha kecil menengah masih rendah;
- ❌ Akses permodalan belum optimal;
- ❌ Penurunan permintaan dan turunnya penjualan;
- ❌ Penurunan kegiatan, kesulitan sampai dengan penutupan usaha;
- ❌ Distribusi terhambat;
- ❌ Kesulitan bahan baku;
- ❌ Pandemi Covid 19 yang terjadi dari tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

☞ Urusan Usaha Perdagangan, menghadapi permasalahan :

- ❌ Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana pelayanan kemetrolgian dan perdagangan;
- ❌ Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa;
- ❌ Belum optimalnya perlindungan konsumen;
- ❌ Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pelayanan kemetrolgian.



Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- ⌘ koperasi hendaknya tidak terbatas di bidang simpan pinjam saja, tapi juga lebih bersifat produktif dan merambah berbagai sektor, terutama sektor unggulan daerah, seperti pariwisata dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal, sehingga nantinya dapat memberi multiplier effect terhadap perekonomian di Kabupaten Belitung
- ⌘ peningkatan kualitas dan produktivitas koperasi.
- ⌘ mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa.
- ⌘ mengoptimalkan perlindungan konsumen.
- ⌘ mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pelayanan kemetrologian.

Koperasi dan Usaha Mikro memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Secara umum pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Belitung cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai omset usaha mikro yang merupakan hasil dari pembinaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah secara intensif, khususnya Dinas KUKMPTK dan PLUT KUKM melalui pembinaan kewirausahaan disetiap kecamatan dan desa yang berimbas pada peningkatan kompetensi wirausaha di Kabupaten Belitung.

Realisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.114

Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	327.902.040,00	326.579.720,00	99,60
2.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	683.816.800,00	580.856.660,00	84,94
3.	Pengembangan UMKM	186.637.680,00	136.730.648,00	73,26

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan rata-rata capaian 85,93% dengan persentase realisasi anggaran 87,13% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 12,87%.

SASARAN 11 : Meningkatnya Investasi

Investasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maka perlu perbaikan kecepatan pelayanan dan kemudahan berusaha. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Investasi” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Nilai Investasi dengan target Rp 2.519.187.000.000,00. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran meningkatnya investasi Kabupaten Belitung Tahun 2021.

Tabel 2.115

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi (juta rupiah) Tahun 2021

No	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2021 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	Juta Rupiah	981.694	2.519.187	2.639.167,25	106,91	SB	5.023.529

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran meningkatnya investasi yaitu nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp 2.639.167.250.000,00 dengan capaian sebesar 106,91 % atau berkategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD nilai investasi belum mencapai target, sehingga perlu peningkatan nilai investasi sebesar 46,39 %.



Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya investasi dicapai melalui strategi meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri, dengan 6 (enam) arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif, 2) meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi, 3) meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah, 4) penataan peruntukan kawasan industri, 5) menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas industri kecil menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan, dan 6) menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan.

Pada tahun 2021, arah kebijakan meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif dilaksanakan melalui (a) program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; b) program promosi penanaman modal dengan kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan. Dari program yang telah dilaksanakan tercapai 50 (lima puluh) Jumlah Investor yang di berikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di tahun 2021.

Arah kebijakan meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi tahun 2021 dilaksanakan melalui program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu (a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan (b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Arah kebijakan meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah pada tahun 2021 dilaksanakan melalui (a) program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan (b) program perencanaan dan pembangunan industri dengan kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Arah kebijakan penataan peruntukan kawasan industri tahun 2021 dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota yaitu Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas industri kecil menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan dan arah kebijakan menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan tahun 2021 dilaksanakan melalui pemberdayaan industri kecil dan menengah secara terstruktur dan berkelanjutan yang diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan IKM seharusnya diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap investasi.

Berikut tersaji tabel perkembangan investasi PMA dan PMDN per Triwulan tahun 2021 :

**Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Kabupaten – Kota Per Triwulan
Triwulan 1 s/d Triwulan 4 Tahun 2021**

PMA	Proyek	2021
		Investasi (US\$.ribu)
Triwulan 1	10	6,8
Triwulan 2	45	2.019,9
Triwulan 3	65	208,9
Triwulan 4	22	5.004,1

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, Maret 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan 1 sebanyak 10 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 6,8, pada Triwulan 2 sebanyak 45 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 2.019,9, pada Triwulan 3 sebanyak 65 proyek dengan nilai investasi US\$ 208,9 dan pada Triwulan 4 sebanyak 22 proyek dengan nilai investasi US\$ 5.004,1.



**Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Kabupaten – Kota Per Triwulan
Triwulan 1 s/d Triwulan 4 Tahun 2021**

PMDN	2021	
	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Triwulan 1	85	92.177,3
Triwulan 2	78	209.521,9
Triwulan 3	78	59.040,7
Triwulan 4	63	29.641,3

Sumber : Dinas
Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu

Pintu dan Perindustrian, Maret 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Perkembangan Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan 1 sebanyak 85 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 92.177.300.000,00, pada Triwulan 2 sebanyak 78 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 209.521.900.000,00, pada Triwulan 3 sebanyak 78 proyek dengan nilai investasi Rp. 59.040,700.000,00 dan pada Triwulan 4 sebanyak 63 proyek dengan nilai investasi Rp 29.641.300.000,00.

Peningkatan capaian investasi di Kabupaten Belitung antara lain disebabkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040, yang menjadi pendorong pelaksanaan investasi di sektor pariwisata dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung.

Faktor pendukung:

- ❖ Tingginya dukungan pemerintah daerah dalam menjaring investor yang menanamkan usahanya di Kabupaten Belitung, hal ini dibuktikan dengan berjalannya program KERISI (Kios, Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi) yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung untuk mempermudah pelayanan informasi perizinan investasi menasar sampai dengan seluruh desa di Kabupaten Belitung;
- ❖ Letak geografis Kabupaten Belitung yang strategis.
- ❖ Tersedianya Peraturan Daerah sebagai jaminan kepastian hukum tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah yang harus segera dijabarkan dalam turunan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah;
- ❖ Tersedianya Sumber Daya Alam dan Potensi Investasi yang memadai di berbagai sektor unggulan, sehingga mendorong harus adanya perumusan strategi perencanaan dan promosi investasi daerah;
- ❖ Telah diterapkannya Perizinan Online yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan;



Faktor penghambat :

- ✘ Belum tersebar nya investasi ke seluruh Kabupaten Belitung;
- ✘ Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya banyak berada pada sektor tersier;
- ✘ Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- ✘ Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Belitung masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan disebabkan tidak adanya kewenangan Tim *Task Force* untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- ✘ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan;
- ✘ Belum optimalnya perencanaan penanaman modal;
- ✘ Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan antara investor besar dengan pelaku usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil.
- ✘ Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia;
- ✘ Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana;
- ✘ Masih rendahnya kesadaran investor untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- ⌘ Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh stake holder
- ⌘ Memberikan kemudahan berinvestasi di kabupaten belitung dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor (*Ease of Doing Business*)
- ⌘ Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efisien dan efektif guna mendorong pesebaran investasi di Kabupaten dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah
- ⌘ Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMA/PMD.
- ⌘ Meningkatkan promosi investasi daerah;
- ⌘ Menyusun dokumen Rencana Strategis dan Rencana Pengembangan Penanaman Modal Daerah berdasarkan sector usaha;
- ⌘ Menyusun Peraturan Daerah Rencana Pengembangan Industri.

Realisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya investasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.116
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Investasi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengembangan iklim penanaman modal	20.283.250,00	16.840.000,00	83,02
2.	Promosi penanaman modal	280.589.300,00	276.161.736,00	98,42
3.	Perencanaan dan pembangunan industri	273.992.600,00	268.806.950,00	98,11
4.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	173.322.030,00	30.761.908,00	17,75



Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Investasi dengan rata-rata capaian 74,33% dengan persentase realisasi anggaran 79,20% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 20,80%.

SASARAN 12 : Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan

Capaian kinerja sasaran “meningkatnya infrastruktur kewilayahan” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Pemenuhan Infrastuktur Kewilayahan dengan target 54,35 %. Berikut realisasi dan Capaian Indikator Sasaran infrastruktur kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2021.

Tabel 2.117
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2021 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan	Persentase	35,18	54,35	57,17	105,19	SB	59,94

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran meningkatnya infrastuktur kewilayahan yaitu indikator Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan tahun 2021 sebesar 57,17 % dari target sebesar 54,35 %, dengan capaian kinerja sebesar 105,19 % berkategori SANGAT BERHASIL.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya infrastruktur kewilayahan dicapai melalui strategi yaitu meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah.

Ada 14 (dua belas) arah kebijakan strategi meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah, yaitu 1) meningkatkan konektivitas antar pulau; 2) mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata; 3) mendorong percepatan pembangunan infrastuktur marina; 4) meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan; 5) meningkatkan pengelolaan jalan dengan program hibah jalan daerah (PHD); 6) mendorong percepatan pembangunan jembatan juru seberang; 7) meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten; 8) Membangun akses jalan yang menghubungkan wilayah potensial; 9) meningkatkan pemenuhan penerangan jalan umum yang estetis dan fungsional; 10) meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan pelabuhan dan pembangunan lainnya; 11) meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; 12) meningkatkan keselamatan transportasi; dan 13) pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi.

Berikut realisasi Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2021 :

Tabel 2.118
Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Uraian	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (jalan standar kabupaten)	89,00	88,26
2	Persentase sawah terairi	54,46	54,54
3	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari	81,00	81,85
4	Persentase drainase sekunder dalam kondisi baik	67,90	83,01
5	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	18,59	22,64
6	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	15,50	15,83
7	Persentase pengolahan air limbah pemukiman	53,98	54,04

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 2022

Pencapaian kinerja pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang diukur dengan menggunakan indikator Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:



$$\begin{aligned}
 &= (0,92 \times \text{Target Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten}) + (0,08 \times \text{Target Pengelolaan sumber daya air}) \\
 &= (0,92 \times 70,88\%) + (0,08 \times 50,26\%) \\
 &= 69,23 \%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten = (Panjang jalan mantap kabupaten / Panjang jalan kabupaten) x 100%

Panjang jalan mantap kabupaten adalah total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang

2. Pengelolaan sumber daya air = 90% sawah terairi + 10% sumber air baku yang terkelola dengan baik
Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan pada tahun 2021 adalah sebesar 69,23 %. Tingkat capaian kinerja sebesar 98,13 % dalam kategori sangat baik/memuaskan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan mantap kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten yang direncanakan}} \times 100 \%$$

$$\frac{614,78}{867} \times 100 \%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar 70,88 % dengan perhitungan Panjang jalan mantap kabupaten sebesar 614,78 km dibagi dengan Panjang jalan kabupaten yang direncanakan yaitu 867 km dikali seratus persen.

- b. Pengelolaan sumber daya air didapat dengan menggunakan rumus

$$\begin{aligned}
 &= (90\% \text{ sawah terairi irigasi}) + (10\% \text{ sumber air baku yang terkelola dengan baik}) \\
 &= (90\% * 54,54 \%) + (10\% * 11,76\%) \\
 &= 50,26 \%
 \end{aligned}$$

Realisasi pengelolaan sumber daya air adalah sebesar 50,26 % dengan perhitungan 90% sawah terairi irigasi dan 10% air baku yang terkelola dengan baik.

Sasaran Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) Program utama antara lain Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun target, realiasi dan capaian program tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.119
Target, Realisasi dan Capaian

No.	Program	Indikator Kinerja	Capaian Akhir 2020	2021		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kriteria	Target Akhir Renstra (2023)	capaian kinerja 2020 terhadap 2023 (%)
				Target	Capaian				
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap Kabupaten	70,01%	72,32%	70,88%	98,01	Sangat Baik	72,78%	97,39
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	34,52%	36,61%	40,57%	110,82	Sangat Baik	45,10%	89,96
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	97,60%	100,00 %	98,03%	98,03	Sangat Baik	100,00 %	98,03

Program Penyelenggaraan Jalan mencapai tingkat capaian kinerja Persentase Jalan Mantap Kabupaten sebesar 98,01% yaitu dari target yang direncanakan sebesar 72,32% pada tahun 2021 terealisasi sebesar 70,88%. Melalui program ini, selama tahun 2021, terdapat penambahan 0,52 km jalan kabupaten yang dibangun, 1,1 km jalan yang dilebarkan sesuai standar jalan, 564,87 km jalan yang dipelihara, 48 m panjang jembatan yang dibangun, dan 10 m panjang jembatan yang dipelihara.



Untuk mewujudkan pencapaian program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan 10 (sepuluh) sub kegiatan diantaranya adalah:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
3. Pengelolaan Leger Jalan
4. Survey Kondisi Jalan/ Jembatan
5. Pembangunan Jalan
6. Pelebaran Jalan Menuju Standar
7. Pemeliharaan Berkala Jalan
8. Pemeliharaan Rutin Jalan
9. Pembangunan Jembatan
10. Pemeliharaan Rutin Jembatan

Faktor pendorong capaian kinerja program penyelenggaraan jalan adalah adanya komitmen pemerintah pusat melalui DAK Bidang jalan untuk pembangunan jalan dan jembatan serta tersedianya dana PHJD yang mendukung capaian panjang jalan mantap kabupaten. Melalui kegiatan Hibah Jalan Daerah (PHJD) telah terlaksana Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang dengan panjang efektif 3,8 km dan panjang total jalan yang mendapat pemeliharaan yaitu 54,93 km. Sementara itu, Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 3 Simpang IV Sujuk - Sungai Padang dilaksanakan dengan capaian panjang efektif 2,6 km dan panjang total pemeliharaan 53,73 km. Kegiatan pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yaitu KSPN Tanjung Kelayang dan Belitong UNESCO Global Geopark.

Selain itu **faktor penghambat** tercapainya kinerja adalah kurang sinkronisasi perencanaan target capaian panjang jalan mantap kabupaten. Pada tahun 2019, penambahan panjang jalan mantap adalah sebesar 20 km per tahun. Pada kenyataannya, sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia di awal tahun 2020, kegiatan DAK bidang jalan pada tahun tersebut harus difocussing sehingga penambahan jalan dalam kondisi baik tidak sesuai target yang direncanakan.

Gambar 3.5. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (PHJD)



Foto: Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 3 Simpang IV Sujuk - Sungai Padang



Foto: Pemerintah Kabupaten Belitong Juara 3 dalam Lomba Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinamargaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021

Foto: Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang



Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu *readiness criteria* agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah. Karena itulah Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk kegiatan pengadaan lahan. Tahun 2021, melalui Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Pemerintah Daerah telah menyediakan anggaran untuk penyediaan lahan guna mendukung pembangunan jalan. Pada tahun ini, kegiatan pembebasan lahan dilaksanakan di 7 (tujuh) desa termasuk untuk pembebasan lahan dermaga Tanjung Paku dengan total penerima manfaat sebanyak 257 orang.

Tabel 2.120
Daftar penerima manfaat kegiatan pembebasan lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

No	Nama Desa	Jumlah Penerima Manfaat	Satuan
1	Desa Cerucuk	47	Orang
2	Desa Bantan	44	Orang
3	Desa Perawas	26	Orang
4	Desa Buluh Tumbang	31	Orang
5	Desa Sijuk	70	Orang
6	Desa Pelepek Pute	35	Orang
7	Desa Padang Kandis	3	Orang
8	Dermaga Tanjung Paku	1	Orang
	Total	257	Orang

Kegiatan pembebasan lahan di desa Cerucuk dan Bantan dilaksanakan untuk melengkapi *readiness criteria* pelebaran jalan junction membalong yang dilaksanakan melalui kegiatan PHJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang 10,95 km. Pembebasan lahan di desa Perawas dan Buluh Tumbang adalah untuk mendukung pelebaran jalan Perawas-Buding sepanjang 1 km. Sedangkan, pembebasan lahan di desa Sijuk dan Pelepek Pute dilaksanakan untuk mendukung pelebaran jalan Trans Bali sepanjang 4,5 km. Total lahan yang dibebaskan pada tahun 2021 adalah sebesar 11.519 m².

Gambar 3.6. kegiatan pembebasan lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan



Kegiatan sosialisasi pembebasan lahan desa Cerucuk



Kegiatan pengukuran pembebasan lahan desa Cerucuk



Kegiatan sosialisasi pembebasan lahan desa Pelepek Pute



Kegiatan pengukuran pembebasan lahan desa Pelepek Pute



Kegiatan pembayaran/pemberian kwitansi pembebasan lahan desa Pelepek Pute

Dalam kegiatan pembebasan lahan, masyarakat turut berpartisipasi untuk menghibahkan lahannya dalam pembangunan jalan kabupaten. Hal ini didorong gencarnya sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak pembebasan Lahan yang dilaksanakan oleh dinas PUPR Kabupaten Belitung sehingga masyarakat semakin menyadari pentingnya infrastruktur jalan untuk mempermudah aksesibilitas. Untuk jalan-jalan kolektor sekunder yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, lahan yang terkena pelebaran jalan tidak dibayar melainkan hanya bangunan dan tanam tumbuh. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong suksesnya kegiatan pembebasan lahan.

Dilihat dari realisasi indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik adalah sebesar 40,57 % dari target sebesar 36,61% dengan realisasi kinerja sebesar 110,82% (sangat baik). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Gambar 3.7. kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota



Optimalisasi Lahan Sawah Aik Betik



Pembangunan Irigasi Sawah Aik Bakul Dusun Kampung Baru



Pembangunan Irigasi Sawah Tanjung Rusa



Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah Dusun Badau

Sepanjang tahun 2021, terdapat 2.762 meter tanggul sungai yang dipelihara, 547 meter tanggul sungai yang ditingkatkan, 30 meter tanggul sungai yang dibangun. Selain itu, pada tahun yang sama, sepanjang 614 meter saluran irigasi yang ditingkatkan dan 1.223 meter saluran irigasi yang dipelihara. Adapun rincian luas sawah yang terairi irigasi pada tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.121
Luas sawah yang terairi irigasi

Kecamatan	Luas Irigasi dalam kondisi baik (Ha)	Luas Irigasi (Ha)
Tanjungpandan	45,97	80
Sijuk	5,00	160
Membalong	493,89	740
Badau	16,89	50



Selat Nasik	0	0
Total	561,75	1030

Pelaksanaan pencapaian kinerja indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik didorong oleh faktor yaitu:

- ❖ Tersedianya data rincian yang akurat dan peta seluruh daerah irigasi di wilayah kabupaten.
- ❖ Tersedianya alat penunjang kebutuhan di lapangan seperti mobilisasi lapangan dan alat pengukuran yang lengkap dalam melakukan pendataan terkait perencanaan dibidang SDA.

Faktor penghambat pelaksanaan adalah:

- ✘ Adanya alih fungsi lahan irigasi menjadi permukiman sehingga mengurangi daerah fungsional irigasi
- ✘ Kurangnya optimalnya sumber daya air untuk pertanian.
- ✘ Daerah sekitar sumber daya air yang masih belum terbebas dari wilayah permukiman maupun tambang.

Dengan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, telah terpasang 855 Sambungan Rumah (SR) selama tahun 2021 sehingga terdapat penambahan sekitar 2.565 jiwa penduduk yang terlayani air minum yang layak.

Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), Pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana serta sebagai komitmen Dinas PUPR Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Selain pelayanan air minum ke rumah-rumah penduduk, UPT PAM dinas PUPR juga mendistribusikan air minum ke hotel-hotel di Kawasan KSPN dan kelompok nelayan pelabuhan perikanan Tanjungpandan. Berikut adalah jumlah pelanggan aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2021.

Tabel 2.122

Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2021

No.	Nama SPAM	Jumlah pelanggan aktif tahun 2021
1	SPAM Juru Seberang	129
2	SPAM IKK Sijuk	277
3	SPAM IKK Membalong	207
4	SPAM Desa Bantan	260
5	SPAM IKK Badau	247
6	PAM Kws, PPN Tanjungpandan	100
7	Mobil Tangki	3
8	Air Kemasan/Galon	75
9	SPAM Kws. Tanjung batu	276
10	SPAM IKK Selat Nasik	345
Jumlah		1919

Berbagai langkah strategis dilaksanakan oleh dinas PUPR dalam rangka mendorong peningkatan standar pelayanan air minum (SPM) diantaranya melakukan sosialisasi pelayanan UPT PAM di desa-desa. Di tahun 2021 terdapat 2 desa yang menjadi target sosialisasi yaitu desa Pegantungan dan desa Sungai Samak. Selain itu juga dilakukan kegiatan sosial penyaluran air bersih ke kapal KRI Semarang 594 dan pengisian tangki cuci tangan sebagai bentuk dukungan dinas terhadap penanganan pandemi Covid-19 di kabupaten Belitung.

Gambar 3.8. Pelayanan air minum oleh UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung



Sosialisasi pelayanan air minum di desa Sungai Samak



Sosialisasi pelayanan air minum di dusun Suge desa Pegantungan



Distribusi air bersih ke kapal KRI Semarang 594



Distribusi air melalui Mobil Tangki UPT PAM Dinas PUPR kepada PDAM Kabupaten Belitung



Pelayanan air bersih untuk sarana cuci tangan di area Tanjungpandan



Pelayanan air bersih kepada korban banjir di kecamatan Tanjungpandan

Dalam pengembangan SPAM di seluruh wilayah kabupaten terdapat bantuan DAK Air Minum oleh pemerintah pusat sebagai komitmen pemerintah pusat untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) air minum di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, KEK Pariwisata dan Geopark Belitung, pemerintah pusat melalui Balai Sarpras Perkim wilayah Provinsi Babel membangun SPAM Batu Mentas di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan sekaligus melaksanakan kegiatan pemasangan jaringan distribusi utama dari SPAM Batu Mentas ke wilayah kota

Tanjungpandan. Kegiatan ini menjadi faktor eksternal dalam mendukung kinerja pelayanan air minum di kabupaten Belitung.

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 100,11 % dari target 53,98 % dengan capaian sebesar 54,04 %. Pada tahun 2021 jumlah SPALD-T yang dibangun sejumlah 2 unit yang berlokasi di desa Air Saga dan Desa Dukong. Sementara itu, jumlah SPALD-S yang dibangun adalah sejumlah 10 unit, berlokasi di desa Selumar sebanyak 5 unit dan desa Batu Itam sebanyak 5 Unit.

Gambar 3.9. Pembangunan SPALD-T dan SPALD-S Tahun 2021



SPALD-T desa Dukong



SPALD-T desa Air Saga

Tingkat capaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase adalah sebesar 102,13 %. Dari target 15,50 %, terealisasi sebesar 15,83 % dimana pada tahun 2021 sepanjang 5.714 meter saluran drainase lingkungan yang dibangun.

Gambar 3.10. Pembangunan drainase lingkungan Tahun 2021



Pembangunan drainase jalan Kerindipongan 12,13,dan 14 Desa Air Saeruk Kec. Sijuk



Pembangunan Drainase Jalan Pondok Pinang RT.006/007 rw.003 Kelurahan Paal Satu Kec. Tanjungpandan

Berikut data konektivitas antar wilayah bidang perhubungan:

Tabel 2.123
Data Trayek Penumpang Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Trayek		Jarak	Jumlah Trayek	
	Dari	Ke		Kebutuhan	Ketersediaan
1	Tanjungpandan	Teluk Gembira	67	1	1
2	Tanjungpandan	Tanjung Rusa	55	1	-
3	Membalong	Tanjung Rusa	22	1	-
4	Selat Nasik	Petaling	17	1	-
5	Selat Nasik	Tanjung Nyato	10,5	1	-
6	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi -via Tanjung Binga	37	1	1
7	Tanjungpandan	Tanjung Kelayang	37	1	1



8	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi –via Sijuk	37	1	1
9	Tanjungpandan	Air Batu	42	1	1
10	Tanjungpandan	Tanjung Ru	30	1	1
11	Tanjungpandan	Badau (Batu Mentas)	27	1	1
12	Tanjungpandan	Ibul	27	1	1
13	Dalam Kota Tanjungpandan 1		15	1	1
14	Dalam Kota Tanjungpandan 2		15	1	1
15	Tanjungpandan	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	14	1	-
16	Bandara H.AS Hanandjoeddin	Tanjung Kelayang	35	1	1
17	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	Tanjung Ru	43	1	-
Jumlah				17	11

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2022

Perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Jalan:

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot Trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut
(11 x 1) /17 = 0,65

Tabel 2.124
Data Lintas Komersil dan Lintas Perintis Kabupaten Belitung
Tahun 2021

No	Lintas Komersil	Kebutuhan	Tersedia	Persentase
1	Tanjung Ru-Nyato	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
2	Tanjung Ru-Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
3	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Seliu	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
4	Tanjung Kelayang – Lengkuas	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
5	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
6	Tanjungpandan- Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
7	Tanjungpandan- Pulau Gersik	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
8	Tanjung pandan- Pulau Kuil	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
9	Tanjungpandan- Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
10	Tanjungpandan- Buntar	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
TOTAL		10 Lintasan	4 Lintasan	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2022

Perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan:

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)
(4x1)/10 =0,40

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Untuk bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Belitung adalah Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)

sehingga perhitungan rasio konektivitas adalah :

$$\begin{aligned}
 &= ((11 \times 1/ 17) \times 50) + ((4 \times 1/10) \times 50) \\
 &= (0,65 \times 50) + (0,40 \times 50) \\
 &= 32,50 + 20,00 \\
 &= 52,50
 \end{aligned}$$

Nilai 52,50 ini menunjukkan bahwa tingkat konektivitas di Kabupaten Belitung berada pada kondisi kurang baik sehingga masih diperlukan penambahan baik itu lintas trayek.

Meningkatnya sistem transportasi daerah dengan indikator Kinerja lalu lintas, memiliki formulasi dari rata-rata volume lalu lintas dibagi rata-rata kapasitas jalan. Berikut tabel capaian indikator kinerja lalu lintas



Tabel 2.125
Capaian Indikator Kinerja Lalu Lintas Tahun 2021

No	Ruas/ Nama Jalan	Fungsi Jalan	Volume Lalu Lintas (kend/jam)	Kapasitas (kend/jam)	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
1	D.K Tanjungpandan- Kota	Jalan Utama	925	1019	0,19	60
2	Perawas – Kelapa Kera	Jalan Utama	355	1019	0,35	60
3	Pilang – Cerucuk	Jalan Utama	248	1019	0,24	65
4	Pilang – TPA	Jalan Utama	440	1019	0,43	50
5	Sp. Mungkui – Cerucuk	Jalan Utama	199	1019	0,20	65
6	Pilang – Juru Seberang	Jalan Utama	164	1019	0,16	60
7	Buluh Tumbang – Air Seru	Jalan Utama	320	1019	0,31	55
8	Buluh Tumbang – Air Mungkui – Mempiu	Jalan Utama	199	1019	0,20	60
9	Piak Aik – Kantor Camat	Jalan Utama	172	1019	0,17	65
10	Tanjungpandan- Simpang Empat	Jalan Utama	625	1019	0,61	55
11	Simpang Empat - Pasarakan	Jalan Utama	150	1019	0,15	60
12	Simpang Empat – Sungai Padang	Jalan Utama	189	1019	0,19	55
13	Sungai Padang – Cendil	Jalan Utama	120	1019	0,12	65
14	JL. Padang Bola – JL. Padang Bola	Jalan Utama	167	1019	0,16	60
15	Tanjung Binga – Sp. III Tanjung Binga	Jalan Utama	164	1019	0,16	50
Rata- rata			4.437/15=295,8	1019	0,29	59

Keterangan:

Jumlah sampel (n) wajib minimal sesuai dengan matriks dibawah, panjang jalan minimal 1 Km, untuk seluruh jenis kota, yang meliputi:

Ruas jalan yang dinilai terdiri dari:

1. Jalan Nasional (maks. 2 ruas)
2. Jalan Propinsi (maks. 2 ruas)
3. Jalan Kab/Kota.

Kinerja Lalu Lintas = Rata-rata volume lalu lintas dibagi rata-rata kapasitas jalan.

$$= 295,8/ 1019$$

$$= 0.29$$

Nilai 0,29 ini menunjukkan bahwa kinerja jalan di kabupaten kota dalam kategori lancar.

Pengukuran Pencapaian Kinerja terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2021 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Permasalahan dan Solusi Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

- ❖ Belum meratanya penerangan jalan umum di Kabupaten Belitung;
- ❖ Belum meratanya fasilitas keselamatan lalu lintas baik darat maupun laut di Kabupaten Belitung;
- ❖ Belum optimalnya pemanfaatan terminal penumpang di Kabupaten Belitung;
- ❖ Belum tertatanya kawasan parkir di Kabupaten Belitung;
- ❖ Belum adanya aturan tentang angkutan khusus yang ada di Kabupaten Belitung;
- ❖ Adanya pandemi Virus Covid-19 yang mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksana terkait protocol kesehatan;
- ❖ Adanya refocusing anggaran yang menjadikan tertunda bahkan batalnya pelaksanaan kegiatan

Solusi:

- ❖ Pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum secara bertahap di Kabupaten Belitung;
- ❖ Pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas baik darat maupun laut secara bertahap di Kabupaten Belitung;
- ❖ Revitalisasi terminal penumpang di Kabupaten Belitung;



- ✘ Pembuatan aturan dan dasar hukum untuk mengatur kawasan perparkiran di Kabupaten Belitung;
- ✘ Pembuatan aturan dan dasar hukum untuk mengatur angkutan khusus di Kabupaten Belitung.

Terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2021 secara keseluruhan berjalan dengan baik, namun masih terdapat adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Untuk itu, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung mengupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pada tahun berikutnya dengan melihat beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja, antara lain dengan melakukan beberapa strategi yaitu:

- ⌘ Meningkatkan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas darat dan laut;
- ⌘ Melakukan pembangunan jaringan trayek darat dan laut;
- ⌘ Melakukan penataan manajemen rekayasa lalu lintas;
- ⌘ Meningkatkan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia perhubungan.

Tabel 2.126 :
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.981.132.000,00	5.644.895.637,00	94,38
2	Penataan Bangunan Gedung	6.032.495.750,00	5.351.390.500,00	88,71
3	Penyelenggaraan Jalan	75.188.788.315,00	67.755.431.436,00	90,11
4	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.655.143.920,00	1.308.421.200,00	79,05
5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.768.182.450,00	1.704.167.200,00	96,38
6	Pengelolaan Pelayaran	13.162.188.000,00	11.377658.366,00	86,44
7	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.107.612.039,00	8.665.289.317,00	95,14

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan dengan rata-rata capaian tahun 2021 sebesar 105,19% dengan persentase realisasi anggaran 90,03% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 9,82 %.

3.2.4 TUJUAN 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, upaya pencapaian Tujuan 2 “ meningkatkan kualitas lingkungan hidup “ telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) strategi, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
	Sasaran 14 Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan

Lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.

Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup dengan target 67,86. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2021.



Tabel 2.127
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2021			Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	58,18	67,86	68,09	100,34	SB	68,88

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 68,09 melampaui target sebesar 0,23% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD melebihi target perlu peningkatan ditahun berikutnya. Dari realisasi IKLH Tahun 2021 sebesar 68,09 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori **Sedang**. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam proses perhitungannya sudah mempergunakan Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rumus :

Untuk formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 menggunakan Formulasi Perhitungan sesuai dengan Surat Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 rumusannya sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

IKA : Indeks Kualitas Air

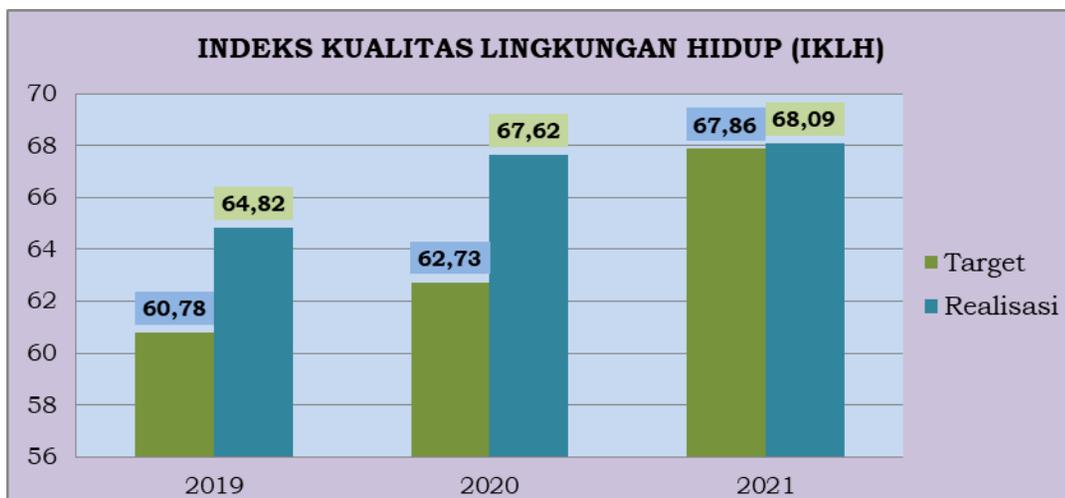
IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKLH dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.128
Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2019 sampai dengan 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64.82	67.62	68.09



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKLH pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Hal ini sangat tergantung dan ditentukan oleh Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) serta dipengaruhi oleh perubahan formulasi perhitungan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.



Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan dicapai melalui strategi meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, dengan arah kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan inspeksi penataan lingkungan hidup, terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan, sehingga dilakukan pembinaan kepada para pemilik ijin lingkungan agar mentaati segala ketentuan yang tertera pada ijin lingkungan, dan bagi pemilik ijin lingkungan yang belum taat diberikan surat peringatan dan/atau sanksi administrasi sehingga tingkat ketaatan terhadap persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan lahan mengalami peningkatan.

Beberapa alternative kebijakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH diantaranya adalah :

1. Melakukan aksi/program kegiatan pengendalian Air Limbah.
2. Melakukan sosialisasi lebih lanjut dan intens kepada masyarakat di sekitar sempadan sungai tentang perlunya perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Melakukan Rencana Aksi Udara Bersih setiap tahun.
4. Menambah lokasi sampling udara ambient agar dapat mewakili semua kecamatan di Kabupaten Belitung
5. Peningkatan program kegiatan penanaman pohon serta rehabilitasi DAS.

Tidak dapat dipungkiri bahwa besar ataupun kecil pengaruh negatif pelaksanaan kegiatan pembangunan terhadap kualitas lingkungan tetap terjadi. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan sangat perlu untuk memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperkecil pengaruh negatif yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga upaya untuk selalu mengindahkan aspek kelestarian lingkungan tetap terjaga. Selain itu, aktivitas kegiatan masyarakat sehari-hari terkait dengan aspek sosial ekonomi juga sangat ikut berperan dalam penciptaan degradasi kualitas lingkungan. Berkaitan dengan permasalahan di atas maka urusan lingkungan hidup berkewajiban untuk menjaga dan tetap mempertahankan kualitas lingkungan. Secara umum indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung masih belum baik atau berkategori sedang yaitu pada tahun 2021 sebesar 68,09.

Ditahun 2021 Penghargaan ditorehkan kepada kepala daerah yang dalam kepemimpinannya berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup dengan menerima Piagam Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2020 dan Penghargaan *Green Leadership* untuk DPRD pada bulan Juni 2021 kemudian untuk Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2021 yang masih berlangsung Bupati Belitung juga masuk nominasi bagian dari penilaian Penghargaan Nirwasita Tantra atau *Green Leadership* 2021.



Foto: Piagam Penghargaan Nirwasita Tantra 2020 dan Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020

SASARAN 13 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan” merupakan salah satu indikator kinerja utama dengan 3 indikator Indeks kualitas lingkungan Air dengan target 53,26, Indeks kualitas lingkungan Udara dengan target 93,63 dan Indeks kualitas lingkungan Tutpan Lahan dengan target 53,26. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan Kabupaten Belitung Tahun 2021.

Tabel 2.128

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2021 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Indeks Kualitas Air	Skala	57,34	53,26	56,75	106,35	SB	53,46
2	Indeks Kualitas Udara	Skala	89,40	93,63	91,69	97,93	SB	93,83
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skala	35,40	46,41	43,89	94,57	SB	50,35

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan yaitu Indeks Kualitas Air kinerja sebesar 56,75 melampaui target dengan persentase capaian sebesar 106,35%, Indeks Kualitas Udara kinerja sebesar 91,69 belum mencapai target dengan persentase capaian sebesar 97,93%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan kinerja sebesar 43,89 belum mencapai target dengan persentase capaian sebesar 94,57%, dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD melebihi



target perlu peningkatan ditahun berikutnya. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Belitung.

➤ Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai IKA tahun 2021 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik yang dapat merepresentasikan hulu, tengah dan hilir sungai di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik. Titik dipantau sejumlah 57 (Lima Puluh Tujuh) titik yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) titik Sungai dan 11 (sebelas) Danau dan/atau Kolong Bekas Galian. Dari hasil pemantauan terdapat 14 (empat belas) titik yang memenuhi baku mutu sedangkan 43 (empat puluh tiga) lokasi lainnya termasuk kedalam katagori tercemar ringan terdiri dari : 46 (empat puluh enam) sungai dan 11 (sebelas) Danau dan/atau Kolong bekas galian hanya 9 (Sembilan) lokasi yang memenuhi baku mutu sementara pada Titik pantau lainnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) lokasi termasuk dalam kategori tercemar ringan.

Nilai IKA pada Tahun 2021 memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan hal disebabkan oleh :

- Terdapat perubahan nilai target IKA, dimana pada Tahun 2020 target IKA ialah 62,22 sedangkan pada tahun 2021 menjadi 53,26 dikarenakan menyesuaikan dengan Target IKA pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.4/Menlhk/Setjem/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.
- Perubahan lokasi titik pantau untuk mendapatkan keterwakilan pemantauan air sungai berdasarkan lokasi hulu, tengah dan hilir sungai.
- Penambahan nilai IKA yang dihitung dari lokasi yang diuji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) lokasi di Sungai Air Batu Buding.
- Nilai IKA yang dihitung ialah perhitungan berdasarkan aplikasi IKLH yang dikeluarkan oleh KLHK. Perhitungan dilakukan berdasarkan 8 (delapan) parameter wajib yang harus diujikan sehingga data triwulan 1 (satu) tidak masuk kedalam perhitungan nilai IKA dikarenakan belum memenuhi persyaratan parameter wajib yaitu *fecal coli*.

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKA tahun 2020 dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.128
Perbandingan Nilai IKA Tahun 2017 dengan 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	66,25	57,34	50,00	53,16	56,75

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKA pada tahun 2021 mengalami kenaikan 3,59 atau 6,75% dibandingkan dengan tahun 2020.

➤ Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai IKU dihitung berdasarkan hasil pengujian parameter SO₂ dan NO₂ menggunakan metode passive sampler selama 24jam/14 hari yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokasi sampling ditentukan berdasarkan 4 (empat) criteria lokasi, antara lain :

1. Kepadatan transportasi
Untuk kepadatan transportasi dilakukan sampling di lokasi Terminal Bis Tanjungpandan Jl. Jendral Sudirman
2. Kepadatan pemukiman
Untuk kepadatan pemukiman dilakukan sampling di lokasi Kantor Desa Aik Pelempang Jaya Jalan Nusantara Rt.04 RW.02
3. Lokasi perkantoran
Untuk kepadatan perkantoran dilakukan sampling di lokasi Puskesmas Air Saga Jalan Pattimura.
4. Lokasi industri
Untuk kepadatan industri dilakukan sampling di Kawasan Industri Suge.

Dari hasil pengujian Rata-rata Nilai SO₂ dan NO₂ yang terukur masih memenuhi baku mutu namun nilai IKU belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kenaikan nilai SO₂ dan No₂ pada Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2.129
PERBANDINGAN NILAI SO₂ DAN NO₂ TAHUN 2020 DENGAN 2021

NO	PARAMETER	KATEGORI	NILAI RATA-RATA	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	SO ₂	Transportasi	7.9	6.59
		Industri	6.05	5.91
		Pemukiman	6.31	9.76
		Perkantoran	6.09	5.69
2	NO ₂	Transportasi	4.92	4.83
		Industri	3.64	4.07
		Pemukiman	6.56	6.33
		Perkantoran	6.67	8.75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat kenaikan nilai pada 3 (tiga) titik kategori sampling yaitu kepadatan pemukiman (SO₂), Lokasi Industri (NO₂), dan Perkantoran (NO₂). Sedangkan katagori transportasi mengalami penurunan nilai namun tidak signifikan.

- Meningkatnya nilai SO₂ dipemukiman dikarenakan makin bertambahnya jumlah dan aktivitas penduduk dalam penggunaan bahan bakar minyak di kehidupan sehari-hari. Meningkatnya nilai NO₂ dikarenakan aktivitas industry yang melakukan pembakaran batu bara dan perkantoran yang berdekatan dengan jalan yang menjadi akses kendaraan kelokasi pariwisata di Kabupaten Belitung.
- Terdapat perubahan lokasi sampling pada katagori kepadatan pemukiman yang semula pada tahun 2020 berada dilokasi Perumnas Tanjungpandan Jalan Garuda menjadi dilokasi Kantor Desa Aik Pelampang Jaya yang berada ditengah perumahan warga.
- Nilai IKU didapat berdasarkan data hasil pengujian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKU tahun 2020 dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.130
Perbandingan Nilai IKU Tahun 2017 dengan 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,97	89,40	96,32	92,63	91,69

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKU pada tahun 2021 mengalami penurunan 0,94 atau 1,01% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Nilai IKU termasuk katagori sangat baik.

➤ Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang saat ini sudah berubah menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung berdasarkan data yang diinput oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam Aplikasi IKLH. Kabupaten hanya dapat menginput data yang tersedia berupa data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belitung dan data Taman Kehati sumber data daRI Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.

Seperti yang terlihat Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2021 terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020 hal ini disebabkan oleh :

- Minimnya inventarisasi data sehingga kurang tersedianya data tutupan lahan yang dapat diinput kedalam aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), untuk itu diperlukan inventarisasi data tutupan lahan secara menyeluruh yang ada di wilayah Kabupaten Belitung.
- Data skunder yang didapat hanya data Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa data Hutan Lindung, KSA/KPA, Lapangan Udara, RTH Tanjung Binga, RTH Tanjung Tinggi, Sempadan Sungai Cerucuk dan Taman Kota dari Dinas PUPR Kabupaten Belitung dan data Taman Kehati dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.



Tabel 2.131
Perbandingan Nilai IKTL Tahun 2017 dengan 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	2017	2018	Tahun 2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	35,40	35,40	40,18	46,19	43,89

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKTL pada tahun 2021 menurun 2,30 dari Tahun 2020 atau 4,97%.

Faktor pendukung :

- ❖ adanya pemantauan pada pengelolaan lingkungan dan perbaikan terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Belitung baik dari institusi maupun non institusi yang terkait;
- ❖ kandungan SO₂ dan NO₂ pada udara memenuhi baku mutu yang ditentukan dari hasil pengukuran, hal ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan khususnya udara pada Kabupaten Belitung tidak tercemar;

Faktor penghambat :

- ⊗ banyak terjadi pencemaran di lokasi badan sungai;
- ⊗ adanya perubahan bentang alam akibat aktifitas penambangan dan perkebunan, sehingga terjadi sedimentasi terhadap sungai;
- ⊗ bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang Menurunnya kualitas udara di Kabupaten Belitung;
- ⊗ lemahnya sistem penegakan hukum lingkungan;
- ⊗ terbatasnya jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai;
- ⊗ masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan fungsi lingkungan hidup;
- ⊗ belum optimalnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ⊗ belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ⊗ masih rendahnya aspek penataan peraturan lingkungan oleh pelaku usaha, serta meningkatnya konflik antara pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak;
- ⊗ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- ⊗ perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim;
- ⊗ memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- ⊗ menambah sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang dapat mendukung pada pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada lingkungan;
- ⊗ menambah dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan fungsi lingkungan hidup;
- ⊗ menyiapkan dan meningkatkan ketersediaan data dan akses informasi bidang lingkungan hidup;
- ⊗ membuat, menambah dan menetapkan produk hukum daerah yang diperlukan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Tabel 2.132
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	116.445.000,00	109.405.775,00	93,95
2.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.393.365.239,00	1.372.297.297,00	98,49
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	57.860.700,00	53.250.960,00	92,03
4.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	15.587.200,00	14.593.800,00	93,63
5.	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	48.544.260,00	46.482.650,00	95,75
6.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	55.059.450,00	54.271.550,00	98,57
7.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	17.890.400,00	15.756.450	88,07

Sehingga untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan dengan persentase realisasi anggaran 94,36 %.



SASARAN 14 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Capaian kinerja sasaran “meningkatnya pengelolaan sampah” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan dengan target 5,50%. Berikut Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran meningkatnya pengelolaan sampah Kabupaten Belitung Tahun 2021.

Tabel 2.133
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2021 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%	0,79	15,50	16,73	107,94	SB	16,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi persentase cakupan pelayanan persampahan Tahun 2021 sebesar 16,73 % dengan capaian kinerja sebesar 107,94 % berkategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase cakupan pelayanan persampahan sudah melampaui target sebesar 104,56 %.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan sampah dicapai melalui strategi meningkatkan pengelolaan persampahan, dengan 6 (enam) arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan ketersediaan kontainer sampah untuk penampungan sampah sementara; 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; 3) meningkatkan perencanaan pengelolaan persampahan; 4) meningkatkan cakupan pelayanan persampahan; 5) meningkatkan pengolahan TPA berbasis 3R; dan 6) mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat.

Arah kebijakan meningkatkan cakupan pelayanan persampahan tahun 2021 terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah terus bertambah, dan akan menjadi permasalahan yang besar di masa yang akan datang.

Pada saat ini cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan, yaitu dari target 15,50 % dengan realisasi tahun 2021 sebesar 16,73 % dengan tingkat capaian sebesar 107,94 %, dengan total luas wilayah yang dapat dilayani yaitu 383,81 km² dari luas daratan Kabupaten Belitung seluas 2.293,69 km² atau 16,73 %. Pelayanan persampahan di Kabupaten Belitung pada tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan pelayanan persampahan di Kecamatan Tanjungpandan sudah terlayani 90 %, seperti Desa Air Saga sudah mencapai 96%, Kelurahan Kota Kelurahan Lesoung Batang dan Pangkal Lalang rata-rata sudah terlayani sebesar 95% .

Selain itu didukung dengan terbentuknya Satuan Tugas Laskar Bebas Sampah (Lebah) di wilayah pedesaan diseluruh Kecamatan se Kabupaten Belitung. Adapun daerah pelayanan sampah yaitu di Kecamatan Tanjungpandan (tujuh kelurahan dan enam desa), sebagian wilayah kecamatan sijek (Kawasan Wisata), dan Kecamatan Badau (kawasan PLTU Suge). Berikut tersaji hasil kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Belitung selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

Tabel 2.134
Hasil Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2021

NO	Kinerja Pengelolaan Sampah	TAHUN						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Timbulansampahyang ditangani (Ton/Tahun)	24.166,21	25.269,39	28.984,80	26.092,17	26.092,17	11.679,22	13.577,09
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	68,77%	98,52%	80,00%	30,84%	34,03%	44,76 %	52,03 %
3	Jumlah TPS 3R yang ada	5	8	10	11	14	16	17



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa timbulan sampah yang ditangani tahun 2021 sebesar 13.577,09 ton/tahun. Timbulan sampah yang ditangani paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 28.984,80 ton/tahun, dan paling rendah sebesar 11.679,22 ton/tahun di tahun 2020.

Target persentase (%) jumlah sampah yang ditangani tahun 2021 adalah 52,03 %. Dibandingkan tahun 2020 persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami peningkatan sebesar 7,27 % di tahun 2020 dari 44,76 %. Persentase jumlah sampah yang tertangani paling tinggi pada tahun 2016 sebesar 98,52 % dan paling rendah sebesar 30,84 % di tahun 2018.

Jumlah TPS 3R yang ada mengalami peningkatan sebanyak 1 TPS 3R dari 16 TPS 3R tahun 2020 menjadi 17 TPS 3R di tahun 2021. Selama 6 (enam) tahun terakhir, dari tahun ke tahun jumlah TPS 3R terus mengalami peningkatan.

Faktor pendukung:

- ❖ adanya pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R;
- ❖ adanya pemberian penghargaan yang diberikan kepada desa terbersih maupun terkotor;
- ❖ tersedianya tong sampah yang memadai pada sekolah-sekolah dan tempat umum;
- ❖ peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R.

Faktor penghambat :

- Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah terus bertambah;
- Meningkatnya volume timbulan sampah per hari;
- Masih adanya masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan, sehingga masih membuang sampah di sembarang tempat;
- Munculnya tempat pembuangan sampah ilegal;
- Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung.
- Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- ⌘ Terus mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung;
- ⌘ Pada daerah-daerah destinasi wisata menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat karena meningkatnya volume sampah.
Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan persampahan yang diarahkan pada meluaskan cakupan pelayanan persampahan, serta pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan dan mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat.
- ⌘ Diberlakukannya aturan mengenai sanksi yang tegas bagi setiap orang atau badan usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tata cara penerapan sanksi tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 23/2019 yang diterbitkan 28 Juni 2019, penerapan sanksi dapat dilakukan terhadap orang per orang maupun badan usaha. Ketentuan pemberian sanksi itu sekaligus tindak lanjut dari Pasal 57 Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.
Penerapan sanksi tersebut diharapkan mampu mendisiplinkan warga dan pengunjung, sekaligus menjaga citra Belitung sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Sebagaimana diketahui, kawasan Tanjung Kelayang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
- ⌘ Keberlanjutan satgas khusus patroli kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sampai dengan saat ini. Program ini merupakan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2018 - 2023. Program ini dibuat untuk melakukan penanganan atau perang terhadap sampah, terutama sampah plastik. Program Lebah ini, sebagian merupakan bantuan oleh CSR perusahaan swasta, sehingga permasalahan sampah, kini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun sudah menjadi tanggung jawab seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung.



Satgas sampah tersebut dibentuk sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan dalam rangka upaya untuk memperoleh penghargaan Adipura pada tahun yang akan datang.

- ⌘ Melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman terus dilakukan oleh OPD terkait kepada masyarakat, hal ini dilakukan untuk memotivasi semua warga agar membuang sampah pada tempatnya.

Tabel 2.135
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	6.907.902.930,00	6.896.565.300,00	99,84

Sehingga untuk sasaran strategis keempat belas dengan persentase realisasi anggaran 99,84%.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan umum keuangan/ anggaran RPJMD Kabupaten Belitang tahun 2018 – 2023 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi:

- Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah infrastruktur dasar dan lainnya;
- Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 08 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitang Tahun Anggaran 2021, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.100.750.041.618,00 Berkurang sejumlah Rp. 14.588.986.212,00 sehingga menjadi Rp. 1.086.161.055.406,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan daerah:

Semula	Rp. 964.938.538.517,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>(861.975.117,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 964.076.563.400,00

Belanja daerah:

Semula	Rp. 1.100.750.041.618,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>(54.081.562.900,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.086.161.055.406,00

Pembiayaan daerah:

Penerimaan pembiayaan	
Semula	Rp. 136.156.568.221,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>(14.072.076.221,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 122.084.492.006,00

Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp. –
Bertambah/ (berkurang)	Rp. –
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. -

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 197.095.344.331,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. –



Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan dana perimbangan terdiri dari komponen (1) Dana bagi hasil, (2) Dana alokasi umum dan (3) Dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari komponen (1) Pendapatan hibah, (2) Pendapatan bagi hasil pajak (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (4) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya (5) Pendapatan Lainnya.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Hasil Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.136
Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Pendapatan	964.352.113.400,00	1.008.883.392.291,45	104,62
1	Pendapatan Asli Daerah	149.090.783.152,00	185.892.722.702,98	124,68
	Pendapatan Pajak Daerah	73.233.194.752,00	81.758.425.816,47	111,64
	Hasil Retribusi Daerah	8.168.099.200,00	7.595.276.094,00	92,99
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.354.310.000,00	4.281.969.912,36	98,34
	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	63.335.179.200,00	92.257.050.880,15	145,66
2	Pendapatan Transfer	749.772.360.248,00	766.716.523.438,47	102,28
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	697.576.552.000,00	716.912.345.622,00	103,02
	Dana Perimbangan	647.448.815.000,00	666.982.986.622,00	97,37
	Dana Insentif Desa (DID)	0,00	0,00	0,00
	Dana Desa	50.127.737.000,00	49.929.359.000,00	99,60
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.195.808.248,00	49.804.117.816,47	95,42
	Pendapatan Bagi Hasil	48.229.658.248,00	46.131.074.816,47	95,65
	Bantuan Keuangan	3.966.150.000,00	3.673.103.000,00	92,61
3	Lain lain pendapatan daerah yang sah	65.488.970.000,00	56.274.146.150,00	85,93
	Pendapatan Hibah	39.585.620.000,00	39.262.663.106,00	99,18
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan KetentuanPeraturan Perundang-undangan	25.903.350.000,00	17.011.483.044,00	65,67



Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing- masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing OPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program- program strategis daerah. Belanja Daerah Tahun 2021 dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.137
Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja Daerah	1.086.436.605.406,00	981.935.654.269,20	90,38
1	Belanja Operasi	872.546.217.355,00	786.237.658.071,20	90,11
	Belanja Pegawai	455.042.458.525,00	431.450.743.712,00	94,82
	Belanja Barang dan Jasa	391.922.588.530,00	331.227.690.815,20	84,51
	Belanja Subsidi	1.393.162.500,00	1.213.110.144,00	87,08
	Belanja Hibah	23.545.103.300,00	22.063.125.040,00	93,71
	Belanja Bantuan Sosial	642.904.500,00	282.988.360,00	44,02
2	Belanja Modal	101.591.706.051,00	86.023.297.198,00	84,68
	Belanja Modal Tanah	9.769.271.588,00	5.005.482.915,00	51,24
	Belanja Modal Peralatan Mesin	26.317.490.785,00	23.980.510.190,00	91,12
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.083.687.088,00	21.131.077.693,00	95,69
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.820.449.100,00	33.973.179.700,00	89,83
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.600.807.490,00	1.933.046.700,00	34,51
3	Belanja Tidak Terduga	3.250.000.000,00	824.385.000,00	25,37
	Belanja Tidak Terduga	3.250.000.000,00	824.385.000,00	25,37
4	Belanja Transfer	109.048.682.000,00	108.850.304,00	99,82
	Belanja Bagi Hasil	8.141.833.000,00	8.141.833.000,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan	100.906.849.000,00	100.708.471.000,00	99,80



Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;

Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 3.138
Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pembiayaan Daerah			
	Penerimaan Pembiayaan	122.084.492.006,00	122.084.492.006,00	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.084.492.006,00	122.084.492.006,00	100,00

Capaian Keuangan

Rencana keuangan pendukung 13 sasaran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.139. : Pencapaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Realisasi Anggaran 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021 (%)	TARGET ANGGARAN 2021	REALISASI ANGGARAN 2021	CAPAIAN 2021 (%)	KET	
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan												
1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	Skala	72,88	72,57	99,57	-	-	-	-	
			2. Angka Kemiskinan	Persentase	5,97	7,15	80,23	-	-	-	-	
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Angka Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,10	99,83	147.625.364.677,00	117.140.832.523,00	79,35	EFEKTIF DAN EFISIEN	
			3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,46	8,47	100,12	75.633.558.825,00	70.086.244.883,00	92,67	EFEKTIF DAN EFISIEN
		4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	5. Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	Rupiah	13.671	13.563	99,21	3.588.976.145,00	3.204.546.135,00	89,29	EFEKTIF DAN EFISIEN	
		5. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	6. Status Desa "Maju"	Desa	25	29	116	6.544.465.701,00	5.073.720417,00	77,53	EFEKTIF DAN EFISIEN	
MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan												
2. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	2. Indeks Reformasi Birokrasi	6. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	B	N/A	-	-	-	-	-	
			7. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	8. Opini BPK	Skala	WTP	N/A	-	134.329.109.304,00	128.607.821.687,00	95,74	EFEKTIF DAN EFISIEN
		8. Terciptanya	9. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	BB	N/A	-	-	-	-	-	-
			10. Indeks	Skala	75	33,80	45,07	2.954.098.195,00	1.913.911.788,00	64,79	EFEKTIF	



		Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Profesional ASN						0		DAN EFISIEN
		9. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11. Survey Kepuasan Masyarakat	Skala	85	99,76	102,17	18.072.477.942,00	15.234.768.675,00	84,30	EFEKTIF DAN EFISIEN
MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan											
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,2-3,6	5,64	156,67	-	-	-	-
		11. Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)	Orang	150.000	184.570	123,05	11.051.103.079,00	9.253.115.169,00	83,73	EFEKTIF DAN EFISIEN
		12. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	27,83	28,17	101,22	9.179.444.060,00	8.688.625.920,00	94,65	EFEKTIF DAN EFISIEN
		13. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	80.651.293	93.098.521	115,43	1.198.356.520,00	1.044.167.028,00	87,13	EFEKTIF DAN EFISIEN
			16. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	1.479.811.375	1.533.059.179.000	103,60	-	-	-	-
		14. Meningkatnya investasi	17. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	2.519.187	2.693.167,25	106,91	748.187.135,00	592.570.594,00	79,20	EFEKTIF DAN EFISIEN
		15. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	54,35	57,17	105,19	112.895.542.474,00	101.807.253.656,00	90,18	EFEKTIF DAN EFISIEN
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	16. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	67,86	68,09	100,34	1.704.752.249,00	1.666.058.482,00	97,73	EFEKTIF DAN EFISIEN
		17. Meningkatnya Kualitas lingkungan	20. Indeks Kualitas air	Skala	53,26	56,75	106,35	-	-	-	-



	air, udara dan tutupan lahan									
		21. Indeks Kualitas udara	Skala	93,63	91,69	97,93	-	-	-	-
		22. Indeks Kualitas tutupan lahan	Skala	46,41	43,89	94,57	-	-	-	-
18. Meningkatnya pengelolaan sampah		23. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	15,50	16,73	107,94	6.907.902.930, 00	6.896.565.30 0,00	99,84	EFEKTIF DAN EFISIEN



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tujuan dari tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu, tugas pembantuan diberikan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah membiayai langsung melalui kementerian teknis yang memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis di daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari dinas teknis daerah. Hal ini diberikan atas pertimbangan bahwa tugas pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan tugas pembantuan tersebut akan lebih bersifat sebagai pendorong dan penguat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah guna mencapai suatu kondisi kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Belitung tidak ada tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pendidikan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan terdiri dari:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2021
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	5.903
2	Pendidikan Dasar	Orang	28.502
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	735

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tiap jenjang dinyatakan dengan persentase berdasarkan rumusan yang telah dibuat. Persentase Capaian SPM tiap jenjang pada tahun 2021 digambarkan sebagai berikut :



Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2021 (Orang)	Realisasi	
			Orang	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	5.903	6.082	103,03
2	Pendidikan Dasar	28.502	30.243	106,11
3	Pendidikan Kesetaraan	735	679	92,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan pada tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 251.197.015.145,00 dengan realisasi sebesar Rp.239.960.564.079,00 atau terserap 95,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	174.658.244.868	165.341.164.495	94,67
2.	Belanja Barang dan Jasa	60.048.273.777	59.021.869.433	98,29
3.	Belanja Hibah	3.540.051.000	3.446.308.840	97,35
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.757.654.500	5.697.768.552	98,96
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.152.791.000	1.908.993.056	88,68
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.040.000.000	4.544.459.703	90,17
Jumlah		251.197.015.145	239.960.564.079	95,53

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Adapun alokasi anggaran per Program untuk pembiayaan pembangunan Daerah di bidang Pendidikan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2021

No	Program Pengelolaan Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	32.543.612.140	30.463.669.915	93,61
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	32.140.801.280	30.441.390.769	94,71
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.278.165.650	6.080.688.461	83,55



4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.670.979.755	3.100.495.738	84,46
Jumlah		75.633.558.825	70.086.244.883	92,67

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu didukung oleh sumber daya Manusia yang mumpuni baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilikinya. Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	72	S2 : 0 orang S1 : 42 orang D3 : 7 orang D2 : 1 orang SMA : 22 orang	Gol II : 18 orang Gol III : 40 orang Gol IV : 14 orang	Esl.II : 1 Esl.III : 5 Esl.IV : 9	14 orang

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya dan untuk Tahun 2021 capaiannya sebesar 8,47 Tahun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8,46 Tahun. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP belum seluruh guru memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan bersertifikat pendidik;
2. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
3. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih harus ditingkatkan bila dibandingkan standar Nasional, hal ini terlihat dari Capaian Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG).

Solusi

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;



2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
3. Mendorong pemeratan Guru PNS dengan Pengukuran Indeks Pemerataan Guru, paling tidak di tingkat kecamatan untuk menekan adanya perpindahan Guru yang kurang jam mengajar;
4. Melakukan optimalisasi kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Penilaian Kinerja Berkelanjutan (PKB).

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan target sasaran sebagai berikut :



Tabel 4.6

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar SPM		Target Tahun 2021 (Orang)
	Indikator	Nilai (%)	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	3.587
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	3.426
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	3.262
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	13.132
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	27.950
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	116.285
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	16.859
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100	45.462
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	2.422
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	100	302
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	100	3.457
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)	100	4.391

Sumber : Dinas Kesehatan 2021

4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2021 (Orang)	Target (%)	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	3.587	100	2.994	83,46
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	3.426	100	3.118	91,01
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	3.262	100	3.035	93,04



4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.132	100	10.479	79,79
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sd 10 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	27.950	100	27.950	100
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	116.285	100	88.717	76,29
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	16.859	100	14.420	85,53
8	PELAYANAN KESEHATAN PADAPENDERITA HYPERTENSI				
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	45.462	100	24.335	53,53
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MILITUS				
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.422	100	3.108	128,31
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT				
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	302	100	295	97,68
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB				
	Setiap orang yang Terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.457	100	3.925	113,54
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV				
	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	4.391	100	4.504	102,57

Sumber : Dinas Kesehatan 2021

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung berjumlah Rp. **251.580.003.151,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) APBD Kabupaten Belitung : Rp. 224.484.309.693,-
- 2) DAK (DAK FISIK)Bidang Kesehatan : Rp. 19.836.281.063,-
- 3) APBN (dak non Fisik) :



BOK	: Rp.	6.625.559.395,-
AKREDITASI PUSKESMAS	: Rp.	558.853.000,-
JAMPERSAL	: Rp.	75.000.000,-

Untuk pembiayaan Kesehatan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO.	INDIKATOR SPM	PENYERAPAN ANGGARAN SPM		
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	200.152.400	191.228.400	95,54
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	49.876.500	41.786.500	83,78
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir (0-28 Hari)	55.240.000	52.840.000	95,66
4.	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	584.030.300	542.485.850	92,89
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (kls 1-9)	153.123.000	137.656.500	89,90
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Usia 15-59 Tahun)	345.409.100	334.114.600	96,73
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia 60 Tahun ke atas)	258.664.500	244.067.750	94,36
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	57.080.000	40.780.000	71,44
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	93.800.000	73.988.000	78,88
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	40.080.000	32.740.000	81,69
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	86.700.000	76.450.000	88,18
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	48.260.000	37.809.000	78,34
TOTAL		1.972.415.800	1.805.946.600	91,56

Sumber : Dinas Kesehatan 2021



4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2021 sebanyak 1.076 orang dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------------|-------------|
| a) | PNS/ CPNS | : 786 orang |
| b) | PTT Pusat dan Provinsi | : 0 orang |
| c) | Non PNS | : 290 orang |
| d) | Sukwan Katagori II | : 0 orang |

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

➤ **Masalah :**

Sebagian besar Indikator SPM Bidang Kesehatan tidak mencapai target 100%, akan tetapi pelayanan Kesehatan Diabetes mellitus yang melebihi target 100% yaitu capaian (120%). Namun Pelayanan Kesehatan Dasar untuk indikator lainnya sudah cukup baik diatas 80% antara lain: Pelayanan kesehatan orang dengan orang dengan resiko terinfeksi HIV (90,32%) , pelayanan kesehatan bayi baru lahir (99,50%) dan Pelayanan kesehatan ibu hamil (90,32%) Pelayanan Kesehatan balita (92,65%), Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) sebesar (97,63), Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut sebesar (97,59%), Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar sebesar (90,25%), pelayanan Kesehatan pada ibu bersalin sebesar (85,35%) .Yang lainnya masih sangat jauh dari target. Adapun indikator SPM yang masih rendah yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif (52,20%), pelayanan kesehatan hipertensi (37,69)%, pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (67,67)%.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan tidak tercapainya Indikator SPM ini adalah :

- ✓ SPM pelayanan kesehatan Ibu hamil : .
 1. Karena adanya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan.
 2. Masih ada ibu hamil pendatang dari luar wilayah Kabupaten Belitung yang tidak memeriksakan kesehatannya dan tidak memiliki kelengkapan pencatatan riwayat kesehatan selama kehamilannya.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan keluarga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil ke fasilitas kesehatan.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin :
 1. Adanya persalinan yang terjadi tanpa ditolong oleh tenaga kesehatan (melahirkan seorang diri di rumah)
 2. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non nakes (dukun) di wilayah Kecamatan Badau dan Membalong walaupun sudah bermitra.
 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melahirkan di Fasyankes dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih.
 4. Masih kurangnya informasi tentang pentingnya persalinan di Fasyankes.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Balita :
 1. Pemantauan tumbuh kembang balita selama pandemic covid pada tahun 2020 di Posyandu,TK/PAUD dan fasilitas kesehatan tidak bisa dilaksanakan sesuai standar di



- karenakan SK bupati no 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret tentang instruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung dan surat dari Kepala Dinas Kesehatan nomor 440/525/Dinkes tanggal 19 Maret 2020 perihal himbauan (penutupan sementara pelaksanaan posyandu) serta surat Dinas kesehatan provinsi kepulauan Bangka Belitung nomor 440/1004/Dinkes tanggal 30 Maret 2020 tentang Himbauan dalam situasi pandemic covid-19.
2. Pemantauan kesehatan balita melalui *sweeping* terkendala dengan jumlah tenaga baik di Puskesmas maupun di desa/kelurahan, dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai ugas rangkap dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta sebagai Satgas Covid-19.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut :
 1. Pemantauan kesehatan pada usia lanjut selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di Posyandu lansia dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang intruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung.
 2. Pemantauan kesehatan usia lanjut melalui *sweeping* terkendala jumlah tenaga di Puskesmas maupun di desa/kelurahan.
 - ✓ SPM Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar:
 1. Masih ada 2 Puskesmas yang belum menjalankan penjangkauan kesehatan sampai Desember 2020, namun masih dilanjutkan pada bulan Januari dan Februari 2021 untuk mencapai 100%, yaitu Puskesmas Tanjungpandan dan Puskesmas Tanjung Binga .
 - ✓ SPM Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif :
 1. Pemantauan kesehatan pada usia produktif selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di Posbindu dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang intruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di kabupaten Belitung.
 2. Usia produktif yang datang ke Posbindu hanya usia di atas 40 tahun.
 3. Ada juga karena Posbindu belum berjalan sampai ke desa-desa untuk melakukan skrining kesehatan.
 - ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi:
 1. Pemantauan kesehatan pada Hipertensi selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di Posbindu dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang instruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung.
 - ✓ SPM Pelayanan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat :
 1. Untuk Pelayanan Kesehatan Jiwa yang menjadi kendala karena belum adanya dokter tetap kesehatan jiwa di kabupaten Belitung,
 2. Jangkauan untuk pengambilan obat jiwa jauh dari tempat Fasyankes,
 3. Masih rendahnya dukungan keluarga Penderita jiwa
 - ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis :
 1. Pemantauan kesehatan pada Penyakit Tuberkulosis selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di Posbindu dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang intruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di kabupaten Belitung.



2. Pemantauan kesehatan pada penyakit Tuberkulosis melalui *sweeping* terkendala jumlah SDM yang ada di Puskesmas.
 3. Penemuan kasus Tuberkulosis hanya melalui *pasif case finding* saja.
 4. Penderita Tuberkulosis tidak melakukan pemeriksaan lanjutan ke Puskesmas.
- ✓ SPM pelayanan Kesehatan pada orang Berisiko terinfeksi HIV :
1. Pemantauan kesehatan pada orang yang berisiko terinfeksi HIV selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di tempat Hiburan malam dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang instruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung.
 2. Pelayanan Ibu Hamil di praktek swasta tidak datang lagi ke Puskesmas untuk dilakukan test HIV, karena Rapid Test HIV hanya tersedia di Puskesmas.

Hal tersebut diatas menjadi kendala sehingga tidak mencapai atau memenuhi standar SPM yang telah ditetapkan. Di samping memang ada alat dan bahan serta dana untuk ke lapangan yang terbatas. Selain itu hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ini adalah masih belum maksimalnya kerjasama dari lintas program maupun lintas sektor lainnya.

➤ **Solusi :**

Memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

➤ **Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari (Kabupaten/Kota)**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

➤ **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Kabupaten/Kota)**

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah



Memperhatikan kebutuhan pemenuhan air minum dan akses pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Belitung maka direncanakan target pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target (Jiwa)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	3.342
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	452

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021

4.3.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target (Jiwa)	Realisasi Pencapaian SPM (Jiwa)	Realisasi Persentase (%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	3.342	3.340	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	452	452	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM Pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Tahun 2021 mencapai target direncanakan persentase pencapaiannya mencapai 100%.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan 4.12 di bawah ini :

Tabel 4.11
Anggaran SPM Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum yang Layak

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Tanjungpandan (DDUPB)	APBD	141.351.000	141.000.000	99,75
2	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kacang Butor (DDUPB)	APBD	130.542.000	130.100.000	99,66
3	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Air Seru (DAK)	DAK	152.299.000	151.443.000	99,44



4	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Batu Itam (DAK)	DAK	195.813.000	190.297.000	97,18
5	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kacang Butor (DAK)	DAK	130.542.000	130.040.000	99,62
6	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Lassar (DAK)	DAK	195.813.000	194.915.000	99,54
7	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Pegantongan (DAK)	DAK	195.813.000	192.240.000	98,18
8	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Pelepak Pute (DAK)	DAK	195.813.000	190.516.000	97,29
9	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Sungai Padang (DAK)	DAK	195.813.000	195.108.000	99,64
10	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Terong (DAK)	DAK	174.056.000	173.444.000	99,65
11	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sijuk – DAK	DAK	1.805.831.000	1.150.273.000	63,70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021

Tabel 4.12
Realisasi Anggaran SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	(Rp)	%
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Desa Air Saga, Tanjungpandan	DAK	540.000.000	540.000.000	100
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk	DAK	300.000.000	300.000.000	100
3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk	DAK	300.000.000	300.000.000	100
4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Desa Dukong, Tanjungpandan	DAK	540.000.000	540.000.000	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021

4.3.5 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitung pada Desember 2021, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 53 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas PUPR didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 44 orang (83,01%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 9 orang



(16,98%). Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	14
2	Bidang Sumber Daya Air	5
3	Bidang Bina Marga	9
4	Bidang Cipta Karya	5
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	7
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	8
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	3
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	Jumlah	53

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021

Kondisi kepegawaian Dinas PUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.14
Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total	Persentase (%)
1	S.2	3	0	3	5,66
2	S.1	22	2	24	45,28
3	D4	5	0	5	9,43
4	D3	12	0	12	22,64
5	SMA/Sederajat	7	0	7	13,21
6	SMP/Sederajat	2	0	2	3,77
7	SD/Sederajat	0	0	0	0,00
	Jumlah	51	2	53	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021

4.3.6 Permasalahan dan Solusi



4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perumahan Rakyat terdiri dari:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

1. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
2. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Perhitungan capaian adalah sebagai berikut.

1. Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan
2. Tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
3. Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
4. Tidak memiliki asset bangunan lain;
5. Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:



1. Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;
2. Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
3. Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Berdasarkan RENSTRA Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Pada tahun 2021 tidak ada relokasi program pemerintah daerah. Adapun Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021 berdasarkan RPJMD adalah adalah 10 orang (asumsi untuk 2 unit rumah).

Tabel 4.15
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2021
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Orang	10
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Orang	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021

4.4.3 Realisasi

Pada tahun 2021 tidak terealisasi anggaran untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten karena sepanjang Tahun 2021 tidak terjadi bencana alam/lainnya yang dampaknya memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai bencana kabupaten oleh Bupati, sehingga tidak ada rumah korban bencana yang pemiliknya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SPM berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Sedangkan untuk Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, pada tahun 2021 tidak ada relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 4.16
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2020 (Orang)	Realisasi	
			Orang	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	10	N/A	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	-	-	-



	Pemerintah Daerah Kabupaten			
--	-----------------------------	--	--	--

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021

4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021 hanya unuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten yang dapat dilihat pada Tabel 4.17 di bawah ini :

Tabel 4.17

Realisasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	APBD	130.000.000,-	-	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021

4.4.5 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitung pada Desember 2021, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 53 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas PUPR didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 44 orang (83,01%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 9 orang (16,98%). Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18

Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	14
2	Bidang Sumber Daya Air	5
3	Bidang Bina Marga	9
4	Bidang Cipta Karya	5
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	7
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	8
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	3
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	Jumlah	53

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021



Kondisi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.19
Jumlah SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung
Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total	Persentase (%)
1	S.3	0	0	0	0,00
2	S.2	3	0	3	5,66
3	S.1	22	2	24	45,28
4	D4	5	0	5	9,43
5	D3	12	0	12	22,64
6	D2	0	0	0	0,00
7	D1	0	0	0	0,00
8	SMA/Sederajat	7	0	7	13,31
9	SMP/Sederajat	2	0	2	3,77
10	SD/Sederajat	0	0	0	0,00
	Jumlah	51	2	53	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

✓ Permasalahan :

- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar stakeholder/sector;
- Tingkat pemahaman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum komprehensif antar stakeholder/sector;
- Tidak semua indikator dan definisi operasional dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik Daerah;
- Belum teridentifikasinya perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

✓ Solusi :

- Kebijakan pejabat terkait untuk mengakomodir upaya penerapan SPM.



- b. Dukungan OPD yang terkait dengan Keuangan Daerah.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Jenis SPM di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	OPD Pelaksana SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung 2021

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2021
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Orang	0
2	Pelayanan Informasi Rawan	Orang	181.735



	Bencana		
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	181.735
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	3.012
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	38

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD 2021

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22
Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target (Orang)	Realisasi	
			Orang	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	181.735	158.369	87,14
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	181.735	158.369	87,14
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.012	3.012	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	38	29	76,32

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung 2021

4.5.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.23
Anggaran Pencapaian SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		OPD Pelaksana
			Rp	%	
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.771.061.200,00	5.164.794.000,00	89,18	Sat Pol PP



2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	686.091.500,00	538.017.700,00	78,41	Sat Pol PP
---	--	----------------	----------------	-------	------------

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung 2021

Tabel 4.24

Anggaran Pencapaian SPM

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)
			Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	87,14%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	87,14%
		Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
	Anggaran		2,025,872,600,00
	Realisasi		1.738.160.150,00
	%		85.80
	Kegiatan :		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Output : Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
		Outcome : Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
	Anggaran		12.000.000,00
	Realisasi		8.750.000,00
	%		72.91
	Sub Kegiatan :		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	
	Anggaran		12.000.000,00
	Realisasi		8.750.000,00
	%		72.91
	Kegiatan :		
		Output:	



No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)
			Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(5)
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
		Outcome: warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
	Anggaran		2.013.872.600,00
	Realisasi		1.729.410.150,00
	%		85.87
	Sub Kegiatan :		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan operasional penanggulangan bencana	
	Anggaran		2.013.872.600,00
	Realisasi		1.729.410.150,00
	%		85.87
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Penyelamatan Non kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
	Anggaran		569.407.300,00
	Realisasi		495.012.000,00
	%		86.93
	Kegiatan :		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output : Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
		Outcome : Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	
	Anggaran		569.407.300,00
	Realisasi		495.012.000,00
	%		86.93
	Sub Kegiatan :		
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan operasional penanggulangan	



No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)
			Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(5)
		kebakaran	
	Anggaran		421.357.300,00
	Realisasi		364.829.000,00
	%		86.58
	Sub Kegiatan :		
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	
	Anggaran		73.050.000,00
	Realisasi		61.246.000,00
	%		83.84
	Sub Kegiatan :		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	
	Anggaran		75.000.000,00
	Realisasi		68.937.000,00
	%		91.91

Sumber : Satuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung 2021

Alokasi anggaran belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2021 adalah terdiri dari :

- Belanja Langsung : Rp. 7.208.619.100,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Rupiah).
- Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.920.880.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu didukung oleh sumber daya Manusia yang mumpuni baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilikinya. Untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung. Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :



Tabel 4.25

Alokasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Satuan	- (Plt)
2.	Sekretariat	7
3.	Bidang Penegakan Perundang – Undang Daerah	5
4.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	8
5.	Bidang Perlindungan Masyarakat	7

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2021

Kondisi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.26

**Rincian SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2021
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir**

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir										
	S 3	S 2	S 1	D IV	D III	D II	D I	SMA	SMK	SMP	SD
PNS Gol. IV	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
PNS Gol. III	-	-	8	-	-	-	-	2	2	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	8	3	-	-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	11	-	-	-	-	11	5	-	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2021

Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.27

Alokasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	1
2.	Sekretariat	2
3.	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2
4.	Seksi Penanganan Darurat Logistik dan Kebakaran	11
5.	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2
Jumlah		18

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021

Kondisi kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut ini :



Tabel 4.28

Rincian SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir										
	S 3	S 2	S 1	D IV	D III	D II	D I	SMA	SMK	SMP	SD
PNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. III	-	2	5	-	1	-	-	1	-	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	2	6	-	1	-	-	6	3	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

 - a) Standar operasional prosedur dalam hal tata cara pelayanan yang terkena dampak gangguan tranribum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara belum optimal;
 - b) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
 - c) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas belum optimal.

Solusi :

 - a) Meningkatkan koordinasi dan pengkajian dalam penyusunan SOP dalam hal tata cara pelayanan dampak gangguan tranribum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
 - b) Merencanakan dan menyusun penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
 - c) Merencanakan dan menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas.

- Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

 - a) Belum adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
 - b) Belum adanya Dokumen Rencana Kontijensi
 - c) Terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana
 - d) Belum dibentuknya WMK baru sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Masih minimnya mobil damkar dan personil serta situasi musim kemarau ;
 - f) Belum terlaksananya diklat damkar I bagi pegawai non PNS;
 - g) Belum terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran

Solusi :

 - a) Merencanakan dan mengusulkan anggaran untuk penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi
 - b) Merencanakan dan mengusulkan penambahan WMK untuk meningkatkan pelayanan;



- c) Merencanakan penambahan sarana prasarana penanggulangan bencana
- d) Merencanakan penambahan mobil damkar serta meningkatkan sosialisasi pencegahan kebakaran pada musim kemarau;
- e) Merencanakan dan melaksanakan diklat damkar bagi yang belum memenuhi kualifikasi.
- f) Merencanakan dan mengusulkan pemebentukan Relawan Pemadam Kebakaran
- g) Merencanakan dan menyusun penyediaan Sarana dan Prasarana secara bertahap;
- h) Merencanakan dan menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas;
- i) Merencanakan dan melaksanakan diklat damkar bagi yang belum memenuhi kualifikasi.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dalam Permensos tersebut yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab. /kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Yang diterapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Belitung, hanya 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar di luar Panti dan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial. Sedangkan Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial kepada Gelandangan Pengemis di luar Panti tidak diterapkan, karena berdasarkan data Pembangunan Daerah tidak terdapat Gelandangan Pengemis di Kabupaten Belitung.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang tersedia. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa jumlah Warga Negara yang belum mampu memperoleh Pelayanan Dasar akan diberikan Pelayanan Dasar melalui APBD.

Tabel 4.29

Perhitungan Sasaran Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2021

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH SASARAN	PENGHITUNGAN PELAYANAN DASAR	
			Jumlah Yang Sudah Terpenuhi	Jumlah Yang Belum Terpenuhi
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	30 Orang	-	30 Orang



2.	Anak Terlantar	219 Orang	209 Orang	10 Orang
3.	Lanjut Usia Terlantar	1163 Orang	1.083 Orang	80 Orang
4.	Gelandangan dan Pengemis	N/A	N/A	N/A
5.	Korban Bencana Alam dan Sosial	49 Jiwa	49 Jiwa	-

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021

Target capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2021 adalah 100% dengan rincian target capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.30

Target Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Sasaran	Target Capaian Tahun 2021	
		Indikator Kinerja	Persentase	Orang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</p> <p>Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti</p>	100	30
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</p> <p>Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti</p>	100	219
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</p> <p>Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti</p>	100	1163
4.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota</p> <p>Persentase (%) Korban Bencana Alam Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota</p>	100	49

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021



4.6.3 Realisasi

Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah disusun dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Target pencapaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan Dasar yang diperoleh pada setiap tahunnya.

Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dasar yang tertuang dalam Program dan Kegiatan adalah pemberian bantuan permakanan atau pemenuhan kebutuhan pangan/pokok bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar.

Selain itu pemenuhan kebutuhan lainnya berupa fasilitasi untuk pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan alat bantu, pemenuhan penyediaan Administrasi Kependudukan, fasilitasi pengobatan atau bantuan biaya berobat kepada pihak lain, serta penyediaan sandang.

Realisasi dari pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021 dapat tergambar dalam tabel 4.31 berikut :

Tabel 4.31

Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Sasaran	Tahun Pencapaian	Target (%)	Capaian	
		Indikator Kinerja			Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2021	100	= 30 orang / 30 orang X 100%	100
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti			= 100	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2021	100	= 219 orang / 219 orang x 100%	100
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti			= 59,01	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2021	100	= 1163 orang / 1163 orang x 100%	100
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti			= 85,38	
4.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan social	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	2021	100	49 orang / 49 orang x 100%	100
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota			= 100	
Nilai Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial						100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021



4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Belitung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 32
Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2021
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	APBD	2.134.688.045,-
2.	APBN	11.592.234.220,-
	- KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	0.00,-
	- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	1.730.200.000,-
	- Kebencanaan Alam dan Sosial	485.059.720,-
	- PKH (3.356 KPM)	9.210.950.000,-
	- PROGRES BANTU LU (Program Rehabilitasi Sosial bantuan Bertujuan Lanjut Usia) dengan Penerima 49 orang Lansia	-
	- Program Atensi Balai Literasi Braile Indonesia (BLBI) Abiyoso Cimahi	114.442.000,-
	- Program Atensi Balai Disabilitas Budi Perkasa Palembang	51.582.500,-
Jumlah		13.726.922.265,-

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil merupakan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM tahun 2021 pada Bidang sosial yaitu :

- Pegawai Negeri Sipil 29 orang
- Non PNS 6 orang
- Pekerja Sosial Penyandang Disabilitas 2 orang
- Pendamping Sosial Lanjut Usia dan Anak 2 Orang
- Petugas Pengelola Gudang Logistik Kebencanaan 1 Orang
- SAKTI PEKSOS ANAK 1 Orang
- Dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 120 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial yaitu data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana.

Adapun langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos melalui Diklat dan Bimtek dan anggaran disesuaikan dengan PMKS yang dilayani, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.



4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

➤ Urusan Pendidikan

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

a. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar

- (1) Penambahan Ruang Kelas Baru
- (2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- (3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- (4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- (5) Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah
- (6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
- (7) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
- (8) Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- (9) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- (10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- (11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- (12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- (13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- (14) Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- (15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

b. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama

- (1) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- (2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- (3) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- (4) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- (5) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- (6) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- (7) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- (8) Penyelenggaraan Proses belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- (9) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- (10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- (11) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

- (1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- (2) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- (3) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD



- (4) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- (5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- (6) Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- (7) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

- (1) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- (2) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- (3) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- (4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

➤ **Urusan Kesehatan**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

Tabel 4.33

Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Ket.
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten	Pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten	Pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan kesehatan bayi baru lahir	
4	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	



No	Jenis Pelayanan Dasar	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Ket.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten	Pengadaan bahan habis pakai	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten	Pengadaan bahan habis pakai	

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021

➤ Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

✓ Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Tanjungpandan (DDUPB)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kacang Butor (DDUPB)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Air Seru (DAK)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Batu Itam (DAK)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kacang Butor (DAK)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Lassar (DAK)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Pegantongan (DAK)



- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Pelepek Pute (DAK)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Sungai Padang (DAK)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Terong (DAK)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sijuk – DAK
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Desa Air Saga, Tanjungpandan
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Desa Dukong, Tanjungpandan

➤ **Urusan Perumahan Rakyat**

Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

- ✓ Program Pengembangan Perumahan
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

➤ **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Program dan Kegiatan Urusan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

Tabel 4.34

Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja

Program		Kegiatan
1.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan :
		a) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
		b) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
		c) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
		d) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
		e) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada



		2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Sub Kegiatan :
		a)	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		b)	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2021

Program dan Kegiatan Urusan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

Tabel 4.35

Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1	Program Penanggulangan Bencana
	Kegiatan :
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Sub Kegiatan :
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	Kegiatan :
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Sub Kegiatan :
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Penyelamatan Non kebakaran
	Kegiatan :
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan :
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan :
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	Sub Kegiatan :
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021



➤ **Urusan Sosial**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2021 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

Tabel 4.36
Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2021 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Galandangan Pengemis di Luar Panti 2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan
		2. Penyediaan Alat Bantu
		3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
		1. Penyediaan Permakanan
		2. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
3.	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
		2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
		3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan paparan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 yang telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2021 sebagai suatu tahapan proses pemerintahan, dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah terdapat program yang berhasil dilaksanakan dengan baik dan terdapat juga program-program yang belum optimal hasilnya seperti perencanaannya. Namun demikian, pada masa yang akan datang hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga program-program dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung dapat mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang direncanakan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021 masih terdapat kendala dalam realisasinya yang disebabkan masih terbatasnya sumber daya aparatur dan juga sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Belitung dapat meminimalisasi berbagai kendala tersebut sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa yang akan datang secara lebih efektif dan efisien, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Meminimalisasi jumlah program-program yang akhirnya batal dilaksanakan dan juga program-program yang ternyata tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, diharapkan semua unsur terkait pada masa yang akan datang membuat perencanaan program-program dengan perhitungan yang matang. Dengan demikian diharapkan kinerja dapat lebih efektif karena tidak menghabiskan waktu untuk pelaksanaan program-program yang tidak dapat diselesaikan atau batal dilaksanakan.
- b. Diharapkan OPD dalam penyampaian data dan bahan untuk menunjang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung dapat meningkatkan kelengkapan dari laporannya masing-masing sesuai dengan format yang diberikan demi untuk memudahkan rekapitulasi data. Selain itu diharapkan agar menyampaikan laporannya tepat waktu sehingga penyampaian LPPD Kabupaten Belitung ke Provinsi dapat disampaikan sebelum 31 Maret setiap tahunnya.
- c. Agar kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan Laporan dapat meningkatkan kesadaran tentang tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak terkesan hanya baik pada sisi kuantitas personil penyusunan namun tidak pada sisi kualitas/kinerjanya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dengan tersusunnya Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintahan pada masa yang akan datang, agar terjadi kesinambungan pembangunan yang terpola dan tersusun secara tahap demi tahap dan sistematis.



Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung
Menurut Struktur Umum dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Struktur Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0	1.053	977	2.030
2	1	1.397	1.374	2.771
3	2	1.500	1.376	2.876
4	3	1.501	1.439	2.940
5	4	1.470	1.384	2.854
6	5	1.475	1.355	2.830
7	6	1.580	1.493	3.073
8	7	1.664	1.512	3.176
9	8	1.675	1.554	3.229
10	9	1.636	1.681	3.317
11	10	1.721	1.579	3.300
12	11	1.641	1.620	3.261
13	12	1.664	1.520	3.184
14	13	1.550	1.479	3.029
15	14	1.583	1.468	3.051
16	15	1.472	1.483	2.955
17	16	1.516	1.409	2.925
18	17	791	891	1.682
19	18	1.302	1.508	2.810
20	19	1.579	1.480	3.059
21	20	1.467	1.552	3.019
22	21	1.636	1.611	3.247
23	22	1.433	1.398	2.831
24	23	1.488	1.457	2.945
25	24	1.550	1.464	3.014
26	25	1.484	1.470	2.954
27	26	1.456	1.363	2.819
28	27	1.560	1.481	3.041
29	28	1.394	1.257	2.651
30	29	1.448	1.393	2.841
31	30	1.485	1.450	2.935
32	31	1.413	1.371	2.784
33	32	1.443	1.377	2.820
34	33	1.457	1.380	2.837
35	34	1.435	1.268	2.703
36	35	1.456	1.384	2.840
37	36	1.437	1.387	2.824
38	37	1.461	1.354	2.815
39	38	1.574	1.555	3.129



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2021

40	39	1.778	1.646	3.424
41	40	1.577	1.545	3.122
42	41	1.711	1.597	3.308
43	42	1.529	1.417	2.946
44	43	1.417	1.338	2.755
45	44	1.399	1.332	2.731
46	45	1.468	1.378	2.846
47	46	1.394	1.296	2.690
48	47	1.203	1.127	2.330
49	48	1.389	1.281	2.670
50	49	1.258	1.246	2.504
51	50	1.030	1.036	2.066
52	51	1.292	1.179	2.471
53	52	1.139	1.060	2.199
54	53	1.047	1.019	2.066
55	54	846	836	1.682
56	55	860	846	1.706
57	56	1.055	966	2.021
48	57	890	859	1.749
59	58	827	817	1.644
60	59	869	865	1.734
61	60	625	635	1.260
62	61	858	846	1.704
63	62	667	669	1.336
64	63	697	632	1.329
65	64	591	619	1.210
66	65	531	531	1.062
67	66	471	553	1.024
68	67	515	552	1.067
69	68	466	486	952
70	69	441	437	878
71	70	265	333	598
72	71	360	400	760
73	72	252	298	550
74	73	258	340	598
75	74	213	234	447
76	75	165	207	372
77	<75	1.059	1.464	2.523
TOTAL		92.259	89.476	181.735

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung



Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung
Menurut Pekerjaan Tahun 2021

KODE PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	20.034	18.108	38.142
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	46.237	46.237
3	PELAJAR/MAHASISWA	17.568	16.329	33.897
4	PENSIUNAN	803	281	1.084
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	2.078	2.160	4.238
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	180	3	183
7	KEPOLISIAN RI	398	23	421
8	PERDAGANGAN	703	179	882
9	PETANI/PEKEBUN	5.367	254	5.621
10	PETERNAK	16	3	19
11	NELAYAN/PERIKANAN	6.937	16	6.953
12	INDUSTRI	36	5	41
13	KONSTRUKSI	57	2	59
14	TRANSPORTASI	60	0	60
15	KARYAWAN SWASTA	7.840	2.752	10.592
16	KARYAWAN BUMN	224	65	289
17	KARYAWAN BUMD	25	21	46
18	KARYAWAN HONORER	686	771	1.457
19	BURUH HARIAN LEPAS	19.048	471	19.519
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	131	31	162
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	222	2	224
22	BURUH PETERNAKAN	4	2	6
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	51	52
24	TUKANG CUKUR	2	0	2
25	TUKANG LISTRIK	15	0	15
26	TUKANG BATU	11	0	11
27	TUKANG KAYU	49	0	49
28	TUKANG SOL SEPATU	4	0	4
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	22	0	22
30	TUKANG JAHIT	20	17	37
32	PENATA RIAS	5	4	9
34	PENATA RAMBUT	7	9	16
35	MEKANIK	92	0	92
36	SENIMAN	22	3	25
37	TABIB	2	1	3
38	PARAJI	0	1	1
41	IMAM MESJID	4	0	4
42	PENDETA	15	0	15
43	PASTOR	2	0	2
44	WARTAWAN	27	1	28
45	USTADZ/MUBALIGH	6	0	6
46	JURU MASAK	1	7	8
58	BUPATI	1	0	1
59	WAKIL BUPATI	1	0	1
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	4	1	5
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	19	1	20
64	DOSEN	14	10	24
65	GURU	111	252	363
66	PILOT	2	0	2
67	PENGACARA	7	2	9
68	NOTARIS	1	3	4
69	ARSITEK	4	0	4
70	AKUNTAN	0	1	1
71	KONSULTAN	15	0	15
72	DOKTER	33	38	71
73	BIDAN	0	44	44
74	PERAWAT	14	33	47
75	APOTEKER	1	8	9
78	PENYIAR RADIO	1	2	3
79	PELAUT	146	0	146
80	PENELITI	1	0	1
81	SOPIR	369	1	370
84	PEDAGANG	379	101	480



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2021

85	PERANGKAT DESA	107	85	192
86	KEPALA DESA	18	1	19
87	BIARAWATI	0	9	9
88	WIRASWASTA	8.272	1.063	9.335
89	LAINNYA	15	12	27
	TOTAL	92.259	89.476	181.735

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung



**CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN
YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021**

Belitung di Tahun 2021 adalah tahun perjuangan untuk menyelamatkan masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi. Banyak program yang direncanakan sejak awal tidak berjalan sesuai rencana. Namun, hal tersebut tidak mengurangi sedikitpun semangat berinovasi dan melayani dari kami. Kami sadar bahwa prioritas di tahun 2021 adalah keselamatan jiwa warga Belitung dan setelah itu kembali membangun perekonomian yang runtuh .

Ditahun 2021, Belitung berhasil meredakan situasi pandemi yang memuncak di Juli sampai September 2021 dan berkolaborasi dengan Forkopimda, DPRD, dan pihak di luar pemerintahan seperti komunitas dan organisasi maupun kelompok masyarakat lainnya untuk memulihkan keadaan. Yakin bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini tidak hanya kita yang rasakan namun menjadi pertarungan seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia.

Di tengah pandemi melanda, Belitung masih bisa berprestasi di berbagai bidang. Diraihnya predikat UNESCO Global Geopark (UGG) pada April lalu adalah kerja nyata kita semua, seluruh elemen masyarakat yang harus kita pertahankan Di tahun 2022, Belitung menjadi salah satu tempat pertemuan G-20. Akan menjadi lebih berarti lagi bagi pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang.

Kita patut bersyukur situasi sudah kembali membaik dan tumbuh harapan di tahun 2022, masyarakat akan menjalankan kehidupan yang lebih sehat dan normal. Kami optimis semangat yang dibangun bersama akan melahirkan sebuah kondisi yang disebut dengan Pemulihan Ekonomi Belitung. Prestasi 2021 lebih kepada menjaga pelayanan publik tetap baik dan optimal kepada masyarakat luas, memperbaiki sistem internal dan menciptakan inovasi di bidang ekonomi.

Dari upaya yang dilakukan selama tahun 2021 tersebut diraih beberapa penghargaan tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Penghargaan yang diterima pada tahun 2021 terdiri dari :

**DAFTAR PRESTASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG SEPANJANG 2021**

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
 - a. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, mendapatkan penilaian Kategori “BAIK” dengan skor 70,221.
 - b. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendapatkan kategori “ZONA HIJAU”.
 - c. Penghargaan Apresiasi Kreativitas Indonesia (AKI) Area Palembang 2021 ke binaan industri kecil menengah (IKM) yaitu “IKM SEPIAK”.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Juara I Lomba Tari Kreasi Tradisional SMP (ACEX Art, Culture, Education and Sport eXhibition), Februari 2021
 - b. Penghargaan sebagai Penulis Nasional, Program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional yang diselenggarakan Nyalanesia, 30 Agustus 2021.



- c. Penghargaan Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, Predikat Favorit Pelaksana Terbaik PAUD III.
 - d. Penghargaan Pemenang Kategori Video Apresiasi Bunda PAUD BABEL'A CHALLENGE, 10 Mei 2021.
 - e. Penghargaan Juara III Penulisan Puisi Tingkat Sekolah Jenjang SD/Sederajat, November 2021.
 - f. Penghargaan sebagai Sekolah Aktif Literasi Nasional, Program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional yang Diselenggarakan Nyalanesia, 30 Agustus 2021.
 - g. Penghargaan Kepala SD Inspiratif Hari Guru Nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi , 30 Agustus 2021
 - h. Penghargaan sebagai Finalis Kategori Kepala SD Inspiratif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hari Guru Nasional Tahun 2021 pada 15 November.
 - i. Penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Keroncong Stambul
 - j. Fadjar dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, 7 Desember 2021
 - k. Penghargaan Juara II Lomba Mewarnai Wawasan Kebangsaan Tingkat PAUD se Babel peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Sumpah Pemuda Ke 93 Tahun 2021 pada 16 November.
 - l. Penghargaan Juara III Bidang Matematika Olimpiade Insan Cendekia (OLIMPIC) SMP/MTS/Sederajat Tingkat Provinsi Babel Tahun 2021.
3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kategori Pendataan Keluarga Dengan Pencapaian 100% Target KK Terdata 'Tepat Waktu", 2 Juni 2021.
 - b. Penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemenang Terbaik I Lomba Keluarga Teladan Tahun 2021, Juni.
 - c. Penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lomba Keluarga Teladan Nasional Tahun 2021, 28 Juni.
 - d. Penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Juara III Apresiasi PIK Remaja Unggulan Tahun 2021, 10 September.
 - e. Penghargaan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kategori Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mendukung Program Banggakencana Tahun 2021, Desember.
4. Dinas Lingkungan Hidup
- Penghargaan NIRWASITA TANTRA 2021.
5. RSUD dr H Marsidi Judono Tanjungpandan
- Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK), 20 Desember 2021.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik III dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 7 April 2021.
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Penghargaan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota Terbaik
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Penghargaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Direktorat Jenderal Bina Marga, Puncak Hari Jalan 2021 Kategori Penilaian Kinerja Bidang Kebinamargaan Dalam Penyelenggaraan Jalan.
9. Sekretariat Daerah
- A. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Penghargaan Juara I Stand Terbaik Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Pameran Batam ITT Expo 2021 (Pameran Investasi, Produk Unggulan, Kelautan, Perikanan,Perdagangan, dan Pariwisata), pada 31 Oktober bertempat di Nagoya Hill Kota Batam.



B. Bagian Hukum

- Penghargaan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kategori Eka Acalapati dalam Penilaian Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 76 s/d 100 pada 2 Desember 2021.

C. Bagian Organisasi

- Penghargaan dari Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2021 Zona Hijau.